

# Mengenal Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu Iklim dan Lingkungan Hidup di Indonesia

LAPORAN STUDI  
PUSKAPA





# Informasi Kepengarangan

Laporan studi 'Mengenal Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu Iklim dan Lingkungan Hidup di Indonesia' disusun dan dihasilkan oleh Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA). Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kaum muda dan non-kaum muda yang telah bersedia berbagi kisah dan informasi dalam rangkaian konsultasi, diskusi kelompok, dan wawancara pada studi ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung seluruh proses pelaksanaan dan penyusunan laporan studi ini.

---

## Penanggung Jawab dan Ketua Tim Peneliti

Santi Kusumaningrum

---

## Wakil Ketua Tim Peneliti

Widi L. Sari  
Ryan Febrianto

---

## Penulis Laporan

Santi Kusumaningrum  
Widi L. Sari  
Ryan Febrianto  
Wenny Wandasari  
Sandra Dewi Arifiani  
Ghivo Pratama

---

## Pengumpul dan Pengolah Data (Berdasarkan Abjad)

Ghivo Pratama  
Iqbal Hafizhul Lisan  
Muhammad Bill Robby  
Nilla Sari Dewi Iustitiani  
Qodri Azizi Akbar  
Ryan Febrianto  
Sandra Dewi Arifiani  
Siti Ainun Nisa  
Wenny Wandasari  
Widi L. Sari

---

## Pengelola Proyek

Ryan Febrianto  
Wenny Wandasari  
Nadira Irdiana

---

## Proofreader

Rahma Septika

---

## Ilustrator Cover & Key Visual

Natalia Surjaudaja

---

## Desain Laporan

Faddy Ravydera Monterey

---

## Penerbit

PUSKAPA

---

## Saran Kutipan

Kusumaningrum, S., Sari, W. L., Febrianto, R., Wandasari, W., Arifiani, S. D., & Pratama, G. (2023). Mengenal Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu Iklim dan Lingkungan Hidup di Indonesia. Depok, Indonesia. PUSKAPA

ISBN 978-623-333-497-6 (PDF)



# Kata Pengantar

Saat ini, banyak pihak menyadari bahwa kaum muda adalah pemegang kunci masa depan yang berkelanjutan, karena mereka akan mewarisi konsekuensi dari tindakan kita saat ini. Peran mereka dalam mengatasi tantangan iklim dan lingkungan hidup sangat penting, dan merupakan tugas pemerintah, organisasi, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa mereka memiliki suara yang berarti dalam membentuk kebijakan dan pengambilan keputusan. PUSKAPA mengakui pentingnya keterlibatan kaum muda sebagai hak asasi yang perlu dilindungi dan didukung.

Penting untuk ditegaskan bahwa mendukung dan melindungi keterlibatan sipil kaum muda harus lebih dari sekadar tokenisme atau sentimen kosong dalam proposal program dan janji-janji kampanye. Keterlibatan kaum muda yang sejati membutuhkan komitmen untuk menciptakan ruang di mana kaum muda dapat berpartisipasi secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan, menyuarakan keprihatinan mereka, dan menyumbangkan ide dan solusi. Hal ini membutuhkan investasi berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas, bimbingan, dan sumber daya yang memungkinkan kaum muda untuk menjadi aktivis yang percaya diri dan berpengetahuan luas. Hanya melalui keterlibatan yang berkelanjutan dan bermakna, kita dapat memastikan bahwa semangat dan potensi kaum muda dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendorong perubahan positif dalam aksi iklim dan lingkungan hidup, serta isu-isu sosial penting lainnya.

Selama beberapa tahun terakhir, kami menganalisis dan mempelajari keterlibatan kaum muda dalam berbagai kebijakan publik dan isu-isu sosial-politik di Indonesia. Laporan studi kami, "Mengenal Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu Iklim dan Lingkungan Hidup di Indonesia," menggali lebih dalam tentang peran yang semakin meningkat yang diambil oleh kaum muda dalam mengatasi krisis yang ada di depan mata kita semua.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan panduan bagi kaum muda dan pihak-pihak yang ingin berkolaborasi dengan mereka dalam menciptakan perubahan yang berdampak. Laporan ini menyajikan temuan, diskusi, dan rekomendasi untuk mendorong keterlibatan kaum muda yang efektif dan inklusif dalam masalah iklim dan lingkungan hidup, serta masalah sosial penting lainnya.

Kami mengundang Anda untuk membaca dan terlibat dalam laporan ini, menggunakan wawasannya untuk menjadi masukan bagi kerja Anda. Bersama-sama, kita dapat memberdayakan kaum muda untuk mengambil alih kendali dalam mengamankan dunia agar lebih berkelanjutan, adil, dan berdaya.

Salam hangat,

**Dr. Santi Kusumaningrum**  
Direktur PUSKAPA

# Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Diagram, Boks, dan Tabel	v
Daftar Singkatan	vi
Ringkasan Eksekutif	viii
Temuan Kunci	x

---

<b>1</b>	<b>Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu Iklim dan Lingkungan Hidup</b>	<b>1</b>
----------	--	----------

---

<b>2</b>	<b>Metodologi</b>	<b>3</b>	
	2.1	Pertanyaan dan Tujuan Studi	4
	2.2	Konsep-Konsep Utama	4
	2.3	Pengumpulan Data	5
	2.4	Analisis Data	8
	2.5	Etika dan Mitigasi Risiko	8
	2.6	Keterbatasan Studi	9

---

<b>3</b>	<b>Lanskap Keterlibatan Kaum Muda di Indonesia</b>	10
3.1	Karakteristik Kaum Muda yang Aktif dalam Isu Iklim dan Lingkungan Hidup	11
3.2	Topik Iklim dan Lingkungan Hidup yang Penting untuk Kaum Muda	15
3.3	Bentuk Keterlibatan Sipil Kaum Muda dalam Isu Iklim dan Lingkungan Hidup	19

---

<b>4</b>	<b>Jalan Pelibatan dan Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu Iklim dan Lingkungan Hidup di Indonesia</b>	23
4.1	Keterlibatan Kaum Muda Melalui Inisiasi Kaum Muda	24
4.2	Keterlibatan Kaum Muda Melalui OMS dan ENGO	27
4.3	Keterlibatan Kaum Muda Melalui Pemerintah dan Swasta	29

---

<b>5</b>	<b>Faktor-Faktor Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu Iklim dan Lingkungan Hidup</b>	33
5.1	Faktor Pendukung Keterlibatan Kaum Muda	34
5.2	Faktor Penghambat Keterlibatan Kaum Muda	41
5.3	Perubahan Praktik dan Kesempatan yang Berkaitan dengan Keterlibatan Kaum Muda	45
5.4	Dukungan yang Dibutuhkan dan Diharapkan Kaum Muda	47
5.5	Masa Depan yang Dicitakan	49

---

<b>6</b>	<b>Studi Kasus</b>	50
6.1	Lanskap Keterlibatan Kaum Muda per Kasus	51
6.2	Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Perubahan	52

---

<b>7</b>	<b>Hasil Tinjauan terhadap Ekosistem Kebijakan Terkait Keterlibatan Kaum Muda</b>	<b>55</b>
7.1	Kebijakan yang Secara Umum Berkontribusi pada Keterlibatan Sipil	56
7.2	Kebijakan Terkait Keterlibatan Kaum Muda Secara Umum	57
7.3	Kebijakan Terkait Partisipasi Masyarakat dalam Isu Iklim dan Lingkungan Hidup	58

---

<b>8</b>	<b>Diskusi</b>	<b>60</b>
8.1	Lanskap Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu ILH	61
8.2	Pendukung dan Penghambat Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu ILH	67
8.3	Kebijakan yang Berpotensi Menghambat Partisipasi Kaum Muda dalam Upaya Mengatasi Isu ILH	70
8.4	Pembelajaran dari Praktik-Praktik Baik Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu ILH	71

---

<b>9</b>	<b>Kesimpulan dan Rekomendasi</b>	<b>74</b>
----------	-----------------------------------	-----------

---

Referensi	81
Lampiran	85

# Daftar Diagram

---

<b>Diagram 1.</b>	Proses Tinjauan Pustaka Sistematis	5
<b>Diagram 2.</b>	Panduan Diskusi Lanskap Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu ILH	61
<b>Diagram 3.</b>	Panduan Diskusi Jalan Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu ILH	65
<b>Diagram 4.</b>	Panduan Diskusi Pendukung dan Penghambat Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu ILH	67
<b>Diagram 5.</b>	Nilai-Nilai yang Menarik Kaum Muda untuk Terlibat dan Tantangan di Sekitarnya	69

# Daftar Boks

---

<b>Boks 1.</b>	Demografi Kaum Muda Indonesia	11
<b>Boks 2.</b>	Masalah Sosial Selain ILH yang Penting bagi Kaum Muda	18
<b>Boks 3.</b>	Tokenisme dalam Pelibatan Kaum Muda	31
<b>Boks 4.</b>	Contoh Sukses yang Memotivasi	39
<b>Boks 5.</b>	Media Aktivisme ILH Kaum Muda	47

# Daftar Tabel

---

<b>Tabel 1.</b>	Peta keterkaitan topik-topik ILH dengan keterlibatan sipil yang muncul dalam studi	63
<b>Tabel 2.</b>	Bentuk keterlibatan kaum muda berdasarkan situasi, tujuan, dan manifestasi	64



# Daftar Singkatan

Singkatan	Kepanjangan
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASN	Aparatur Sipil Negara
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Bumdes	Badan Usaha Milik Desa
DAS	Daerah Aliran Sungai
ENGO	<i>Environmental Non-Governmental Organization</i>
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
FCTC	<i>Framework Convention on Tobacco Control</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i> (konsultasi/diskusi kelompok)
GIDKP	Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik
ILH	Iklim dan Lingkungan Hidup
IPP	Indeks Pembangunan Pemuda
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
IYCTC	<i>Indonesia Youth Council on Tobacco Control</i>
K-pop	<i>Korean Popular Music</i>
KII	<i>Key Informant Interview</i> (wawancara peserta kunci)
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
LH	Lingkungan Hidup
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat

Singkatan	Kepanjangan
LTKL	Lingkar Temu Kabupaten Lestari
Musrenbang	Musyawah Perencanaan Pembangunan
NDC	<i>Nationally Determined Contribution</i>
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
PBLHS	Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah
P3KT	Panduan Pelibatan Partisipasi Kaum Muda dalam Isu Pengendalian Tembakau
Permen	Peraturan Menteri
Permendikbud	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Permenpora	Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga
Perpres	Peraturan Presiden
PLTU	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PP	Peraturan Pemerintah
Proklim	Program Kampung Iklim
SARA	Suku, Ras, Agama, dan Antargolongan
SCC	<i>She Creates Change</i>
SDM	Sumber Daya Manusia
SMA	Sekolah Menengah Atas
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
UU	Undang-Undang
WWF	<i>World Wildlife Fund</i>



# Ringkasan Eksekutif

Krisis iklim dan lingkungan hidup (ILH) akan memengaruhi kehidupan generasi muda di masa datang. Meski demikian, keputusan seputar pencegahan dan penanganannya masih dibuat oleh mayoritas orang dewasa yang kecil kemungkinan akan menanggung akibatnya. Belakangan, kaum muda di dunia terlihat lebih aktif berpartisipasi dalam aksi-aksi mengatasi krisis ILH. Bagaimana dengan kaum muda di Indonesia?

Secara umum, meski partisipasi kaum muda banyak digaungkan sebagai unsur penting dalam mengatasi masalah ILH, hingga saat ini praktiknya masih menghadapi tantangan tokenisme dan penyisihan. Sejumlah literatur tentang isu ILH telah menyoroti keterlibatan kaum muda Indonesia dalam aktivisme lingkungan hidup, termasuk gaya hidup ramah lingkungan. Namun, peran mereka dalam perubahan kebijakan, tata kelola, atau praktik di tingkat komunitas masih belum disoroti.

Studi ini percaya bahwa keterlibatan sipil, atau disebut juga aktivisme dalam laporan ini, adalah hak yang harus dilindungi dan didukung agar bisa bermakna. Para peneliti pun percaya bahwa keterlibatan kaum muda diperlukan agar respons dan mitigasi terhadap dampak krisis ILH lebih efektif. Oleh karenanya, studi ini bertujuan untuk memahami topik ini secara lebih sistematis. Studi ini juga mengidentifikasi berbagai dukungan yang dibutuhkan agar kaum muda dapat membangun dan mempertahankan gerakan dan organisasi yang strategis, berbasis bukti, dan efektif mewujudkan agenda reformasi ILH di Indonesia. Secara lebih luas, strategi yang sama kemungkinan bisa diterapkan di berbagai agenda reformasi lainnya.

Studi ini mengumpulkan data primer melalui konsultasi/diskusi kelompok (FGD), wawancara peserta kunci (KII), dan wawancara mendalam dengan total partisipan sekitar 60 orang. Partisipan FGD dan KII dipilih secara sengaja (*purposive*) berdasarkan pengalaman mereka dalam aktivisme iklim dan lingkungan hidup. Perekrutan partisipan juga mempertimbangkan keterwakilan kelompok usia, gender, wilayah geografis, beserta isu-isu khusus yang berkaitan dengan ILH. Untuk studi kasus, dua gerakan/inisiatif kaum muda dipilih berdasarkan keberhasilan mereka mendorong perubahan dalam isu ILH, sebagaimana direkomendasikan oleh rekan-rekan mereka. Dua gerakan lainnya merupakan gerakan/inisiatif di luar isu ILH yang melibatkan kaum muda. Di samping itu, studi ini juga melakukan

tinjauan terhadap 57 literatur yang disaring dari total 771 literatur melalui metode tinjauan literatur sistematis, serta melakukan tinjauan terhadap kebijakan dan peraturan yang relevan.

Studi ini berhasil memetakan lanskap keterlibatan kaum muda Indonesia dalam isu ILH berdasarkan karakteristik kaum muda yang terlibat, topik ILH yang dianggap penting oleh kaum muda, dan bentuk keterlibatan mereka. Dari pemetaan ini, teridentifikasi sejumlah kekuatan serta kesenjangan yang masih perlu diisi dalam kaitannya dengan akses keterlibatan. Dari segi karakteristik kaum muda, studi ini mendapat gambaran bahwa pelibatan masih perlu diperluas ke kaum muda dari kelompok usia yang lebih muda, di wilayah nonurban, dari kelompok sosial ekonomi yang lebih beragam, dan dengan abilitas berbeda. Pelibatan juga harus merangkul pemimpin-pemimpin kaum muda perempuan, kaum muda marjinal, dan kaum muda dari komunitas yang selama ini terdampak krisis ILH secara langsung.

Studi ini menemukan bahwa keterlibatan kaum muda dalam aktivisme isu ILH berkaitan dengan kesadaran mereka terhadap pentingnya posisi sebagai pemeran aktif di gerakan ILH. Komitmen kaum muda untuk melakukan aksi sipil cenderung dominan pada topik-topik yang dekat dengan keseharian mereka, seperti penyebab gejala ILH serta dampak krisis ILH pada lingkungan hidup (LH) dan masyarakat beserta mitigasinya.

Lebih lanjut, peningkatan kapasitas dan kampanye serta aksi protes merupakan bentuk keterlibatan sipil kaum muda yang dominan muncul di semua kategori topik ILH. Meski sudah ada, kegiatan riset dan advokasi kebijakan cenderung lebih sedikit disebutkan. Ke depannya, dukungan dan fasilitasi oleh pemangku kepentingan (pemerintah dan non-pemerintah) dapat lebih difokuskan pada perluasan ragam kegiatan kaum muda dalam isu ILH, yang mampu mempertemukan kaum muda yang telah berpengalaman dalam pendampingan dan kampanye, misalnya, dengan mereka yang kuat terlibat dalam riset dan advokasi kebijakan. Studi ini menyadari bahwa bentuk keterlibatan bisa jadi berkaitan dengan minat dan kapasitas. Oleh karenanya, memfasilitasi lebih banyak kerja kolaboratif menjadi langkah strategis ke depan.

Selain memetakan lanskap, studi ini juga mengeksplorasi faktor-faktor pendukung dan penghambat keterlibatan sipil kaum muda di segala dimensi, baik komitmen, keterampilan, aksi, maupun kohesi sosial. Masing-masing faktor tersebut berkaitan dan dipengaruhi oleh jalan keterlibatan mereka. Faktor individu dominan muncul sebagai pendorong komitmen sipil kaum muda, terutama di jalan keterlibatan melalui komunitas yang diinisiasi kaum muda. Dalam melakukan aksi sipil, kaum muda cenderung bergerak sesuai kemampuan masing-masing, dan di ruang partisipasi yang menurut mereka lebih bebas dan aman. Jalan keterlibatan ini juga banyak didorong oleh kohesi sosial yang terbangun melalui interaksi sosial dengan sesama kaum muda dan tersedianya wadah informasi dan komunikasi digital yang mendukung berbagai dimensi keterlibatan sipil. Di saat yang bersamaan, motivasi dan etos kerja yang dimiliki kaum muda belum bisa sepenuhnya mendorong mereka untuk mengembangkan keterampilan dan mencari akses agar dapat bersaing dengan organisasi yang lebih mapan atau aktivis senior dalam hal pendanaan dan pengaruh.

Meski jalan keterlibatan komunitas kaum muda lebih terbuka, peran *environmental nongovernmental organization* (ENGO) atau lembaga nonpemerintah internasional untuk ILH dan organisasi masyarakat sipil lokal (OMS) ILH masih dominan sebagai inisiator dan fasilitator gerakan sipil kaum muda. Jalan keterlibatan melalui ENGO dan OMS cenderung terkait dengan titik masuk interaksi kaum muda dengan beragam pemangku kepentingan ILH termasuk pembuat kebijakan. Terlebih, ENGO dan OMS mampu menyediakan lebih banyak infrastruktur yang mendukung peningkatan keterampilan dan aksi sipil berkat pengalaman, bentuk dan tata kelola organisasi, serta akses sumber daya mereka yang lebih mapan. Namun, infrastruktur tersebut belum mendukung konsistensi kerja-kerja kaum muda dalam isu ILH dan belum dirancang secara strategis untuk mendukung keberlanjutan ENGO dan OMS.

Terakhir, faktor eksternal, seperti kebijakan yang tidak mendukung, risiko keamanan, dan kecenderungan tokenisme serta penyisihan muncul sebagai faktor penghambat jalan keterlibatan kaum muda melalui lembaga pemerintah. Oleh karena itu, jalan keterlibatan melalui lembaga pemerintah tidak seefektif dua jalan keterlibatan lainnya dalam memfasilitasi keterlibatan kaum muda.

Studi kasus menunjukkan bahwa interaksi sosial yang positif dan kegiatan berjejaring dengan sesama kaum muda, OMS, pemerintah, donor, dan pemangku kepentingan lain turut mendukung gerakan kaum muda dalam mencapai agenda perubahannya. Di samping itu, dukungan peningkatan kapasitas untuk memperkuat aksi sipil dan strategi manajemen organisasi secara positif memfasilitasi inisiatif kaum muda.

Secara internal, gerakan-gerakan dalam studi kasus selalu berupaya membangun keterlibatan yang bermakna dan inklusif, meski sejumlah kegiatan yang melibatkan mereka masih mengandung tokenisme. Studi kasus mencatat bahwa gerakan-gerakan yang diamati kali ini menganggap pandemi Covid-19, penatakelolaan dan sumber daya gerakan yang terbatas, dan pemahaman masyarakat dan kaum muda lain tentang isu ILH yang masih rendah sebagai faktor penghambat.

Terakhir, studi kasus mencatat beberapa capaian yang dihasilkan dari empat gerakan yang diamati, antara lain penerbitan peraturan pembatasan plastik di berbagai daerah, semakin banyaknya pembahasan mengenai isu masyarakat adat di media sosial, banyaknya inisiatif kampanye ILH yang dikelola kaum muda, serta dihasilkannya beragam dokumen panduan dan kebijakan.

Studi ini menegaskan bahwa potensi keterlibatan sipil kaum muda dalam isu ILH sudah tampak dan perlu mendapat perhatian. Sejumlah hasil positif sudah muncul dan dampaknya dirasakan oleh kaum muda. Perbaikan ekosistem kebijakan, program, dan praktik sangatlah penting untuk mendukung keterlibatan yang mampu mendorong terwujudnya perubahan yang lebih sistemis dan menyeluruh. Perbaikan tersebut harus dimulai dengan upaya-upaya memperluas komitmen berbagai pemangku kepentingan (pemerintah dan non-pemerintah) untuk mendorong keterlibatan kaum muda, dan mengatasi berbagai penghambat keterampilan sipil, aksi sipil, dan kohesi sosial dalam keterlibatan sipil kaum muda. Keterlibatan sipil adalah hak yang harus dilindungi dan kebermaknaannya tergantung pada akses ruang partisipasi yang aman; bukti dan pemikiran ilmiah yang melandasi aksi; kapasitas kaum muda dalam advokasi, kampanye, dan pendampingan; serta tersedianya wadah dan dukungan untuk aksi-aksi kolaboratif.

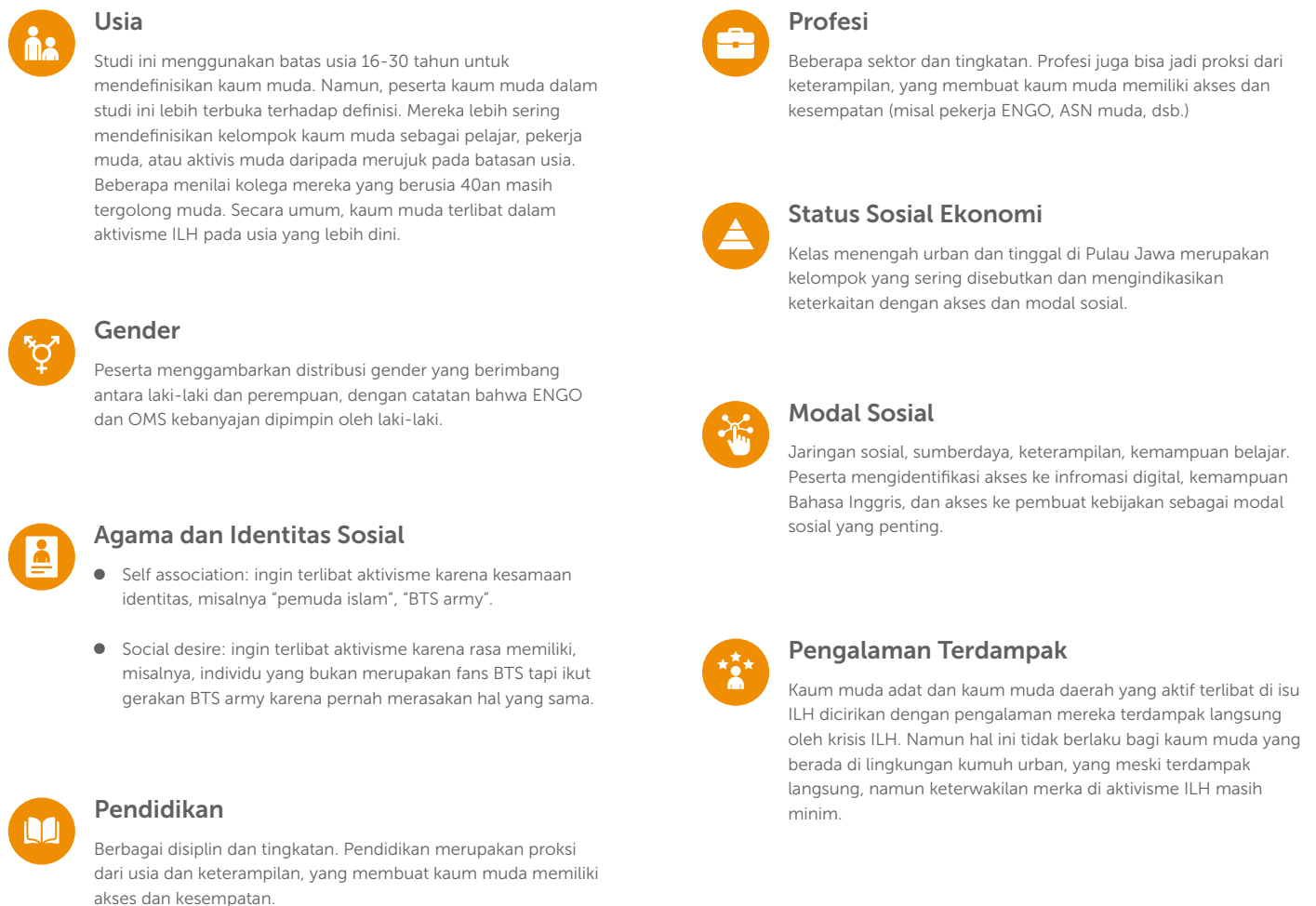
# Temuan Kunci

## Lanskap keterlibatan kaum muda

### Karakteristik

Studi ini mengidentifikasi berbagai karakteristik kaum muda yang terpapar keterlibatan sipil. Bagan 1 menggambarkan karakteristik kaum muda yang terlibat dalam aktivisme ILH.

Bagan 1. Karakteristik Kaum Muda dalam Aktivisme ILH



## Berbagai karakteristik tersebut memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai lanskap keterlibatan kaum muda dalam isu ILH.

- 1 Kaum muda yang terlibat dalam gerakan ILH adalah mereka yang memiliki sejumlah modal sosial seperti kesempatan, akses informasi, kemampuan, keterampilan, serta kepentingan untuk terlibat dalam gerakan ILH. Dari segi demografis, kaum muda yang terlibat dalam studi didominasi oleh mahasiswa dan pekerja muda yang bekerja di bidang ILH dan kaum muda dari kelas ekonomi menengah yang tinggal di wilayah urban. Karakteristik lainnya termasuk terampil bermedia sosial, punya jaringan yang luas, dan pernah terdampak persoalan ILH.
- 2 Meski sudah ada keterlibatan kaum muda adat, belum banyak informasi yang muncul terkait ragam kelompok muda lainnya, seperti kelompok disabilitas atau minoritas gender dan kaum muda yang berada di wilayah kumuh perkotaan yang aktif dalam gerakan ILH.
- 3 Terlepas dari latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan sosial ekonomi, studi ini menemukan mulai adanya keterlibatan kaum muda yang berusia lebih dini, bertambahnya keterlibatan kaum muda adat dan kaum muda dari wilayah perdesaan dan timur Indonesia, serta keterlibatan kelompok kaum muda berbasis organisasi agama, kepercayaan, minat, dan fandom.
- 4 Berbagai karakteristik kaum muda yang telah diidentifikasi bisa berkaitan dengan komitmen dan keterampilan sipil kaum muda. Misalnya, terdapat perbedaan komitmen sipil antara generasi kaum muda usia pelajar, kelompok mahasiswa, dan pekerja dengan usia dewasa muda, yang terkait dengan minat mereka yang berbeda. Perbedaan komitmen sipil ini bisa jadi disebabkan pula oleh perbedaan tingkat akses informasi dan kepemilikan modal sosial untuk berpartisipasi.

## Topik Penting

### Studi ini mengidentifikasi beberapa topik dalam isu ILH yang menjadi perhatian kaum muda.

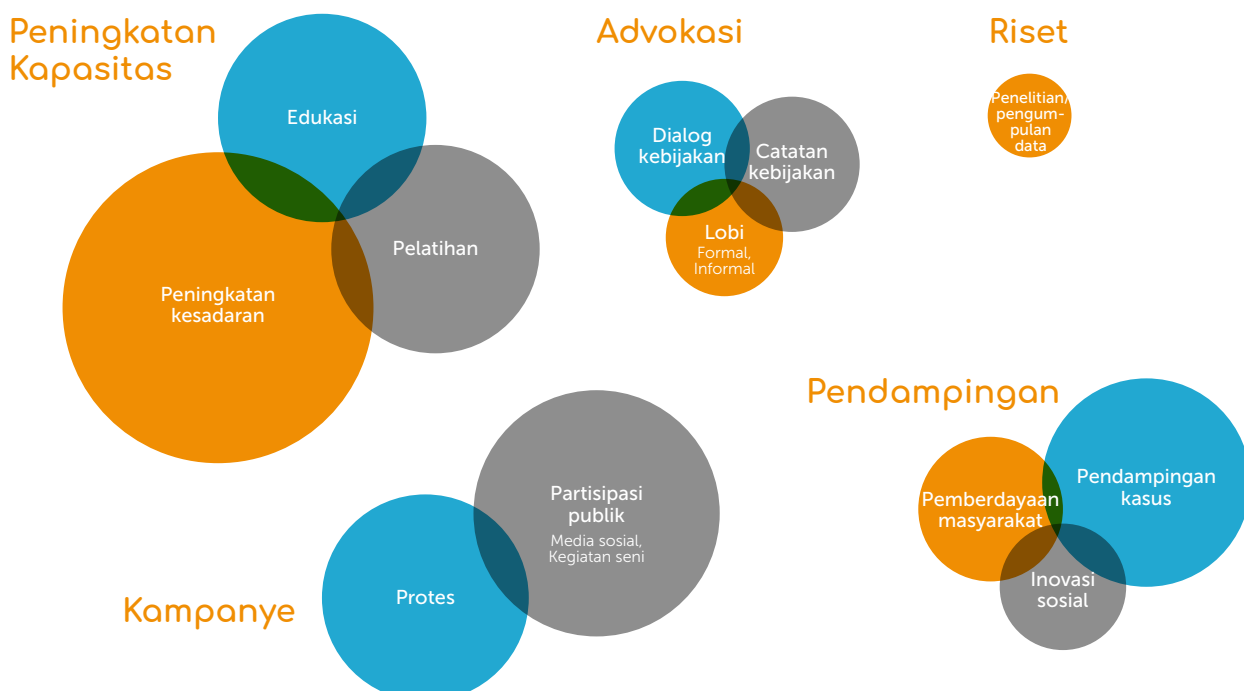
- 5 Secara umum, kaum muda dalam studi ini sudah terpapar topik-topik ILH. Secara khusus, kaum muda yang sudah aktif terlibat dalam gerakan ILH melihat persoalan ini sebagai topik multidimensional dan saling berpotongan, terutama dengan isu ketidakadilan. Sejumlah peserta menyebutkan *intersectional environmentalism* dalam beberapa diskusi.
- 6 Topik ILH yang menjadi perhatian kaum muda dapat dipetakan dalam lima kategori, yaitu 1) gejala ILH, 2) tindakan perusakan yang mengakibatkan gejala ILH, 3) faktor-faktor pendorong tindakan perusakan ILH (termasuk ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kebijakan), 4) dampak pada ILH dan mitigasinya, dan 5) dampak pada warga dan mitigasinya. Selain kelima topik tersebut, kaum muda juga menyebutkan beberapa fokus gerakan pada isu sosial yang terhubung secara langsung maupun tidak langsung dengan topik ILH, yaitu isu ketidakadilan, demokrasi, korupsi, kesehatan reproduksi, pemenuhan hak kelompok minoritas, kelompok penyandang disabilitas, dan konflik agama. Berbagai isu tambahan ini dapat memberikan informasi mengenai potensi titik masuk yang menjembatani kaum muda dengan isu-isu ILH.
- 7 Meski kaum muda sudah memahami berbagai topik ILH secara multidimensional, komitmen sipil kaum muda untuk melakukan aksi sipil cenderung dominan pada topik-topik yang dekat dengan keseharian mereka seperti tindakan perusakan, dampak pada ILH dan warga, serta mitigasinya dalam skala kecil atau terbatas. Kesenjangan komitmen sipil dalam aksi sipil terlihat pada masih terbatasnya aksi sipil kaum muda untuk topik gejala ILH dan faktor pendorong perusakan ILH, yang membutuhkan pendekatan sistemis.

## Bentuk Aksi Sipil

Studi ini menemukan bahwa beberapa karakteristik kaum muda yang berkontribusi terhadap keterlibatan mereka dalam aktivisme ILH juga dapat menunjukkan jalan keterlibatan dan jenis kegiatan yang mereka ikuti.

- 8 Studi ini mengamati adanya peningkatan aksi sipil kaum muda dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini ditunjang oleh naiknya kepedulian kaum muda dan berkembangnya media keterlibatan sipil kaum muda. Kaum muda makin peduli dan aktif menyuarakan permasalahan ILH dan ragam media aktivisme makin tersedia secara daring sehingga membuka peluang kreativitas kaum muda.
- 9 Studi ini mencatat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh peserta sebagai bentuk aksi sipil (bagan 2). Bentuk yang dominan muncul di semua kategori topik ILH adalah peningkatan kapasitas dan kampanye/protes, utamanya dalam merespons isu-isu 'hijau' seputar tindakan perusakan yang mengakibatkan gejala ILH dan dampak isu ILH pada lingkungan hidup. Namun, meski termasuk dominan, aksi peningkatan kapasitas masih terbatas pada edukasi publik soal isu ILH serta peningkatan kapasitas organisasi dan komunikasi kaum muda. Belum banyak yang berfokus pada pengambilan keputusan kolektif dan kemampuan berpikir kritis, yang merupakan elemen penting keterampilan sipil.
- 10 Kesenjangan bentuk aksi sipil terlihat pada kegiatan advokasi dan riset. Selama ini, advokasi cenderung baru dilakukan saat ada kasus tertentu atau ketika ada peraturan yang menjadi perhatian kaum muda dan sifatnya lebih *ad hoc*. Selain itu, aktivitas riset juga masih sedikit dan belum dipandang sebagai bentuk aksi sipil yang menunjang aksi sipil lain serta masih jarang menjadi agenda tetap dalam rencana aksi sipil kaum muda. Meskipun demikian, studi kasus ini berhasil menangkap informasi mengenai aksi sipil kaum muda berupa advokasi melalui satu organisasi yang berfokus pada perubahan kebijakan.

Bagan 2. Bentuk Aksi Sipil dalam Aktivisme ILH yang Diidentifikasi oleh Peserta Studi



## Jalan Pelibatan dan Keterlibatan Sipil

Studi ini menemukan tiga jalan keterlibatan kaum muda, yaitu 1) keterlibatan kaum muda melalui komunitas yang diinisiasi oleh kaum muda sendiri, 2) keterlibatan kaum muda melalui OMS dan ENGO, dan 3) keterlibatan kaum muda melalui pemerintah.

- 11 Dari ketiganya, jalan keterlibatan pertama yang diinisiasi kaum muda makin meningkat. Salah satu penyebabnya adalah adanya ruang untuk bisa lebih bebas berpendapat dan berpartisipasi dengan aman dan bermakna. Solidaritas, kolaborasi, dan jejaring diamati sebagai ciri khas interaksi sosial yang banyak muncul dalam komunitas kaum muda, yang keanggotaannya lebih fleksibel dan sifatnya sukarela. Studi kasus menemukan adanya organisasi/komunitas yang diinisiasi oleh kaum muda, tetapi tidak membatasi keanggotaan hanya pada usia 30 tahun ke bawah.
- 12 Gerakan yang diinisiasi kaum muda menawarkan kesetaraan dan proses pelibatan yang lebih beragam, tetapi jalan keterlibatan ini juga memiliki beberapa kekurangan. Peserta studi menyadari bahwa gerakan yang diinisiasi kaum muda masih perlu meningkatkan jangkauan dan aksesibilitas bagi kelompok kaum muda dari latar belakang ekonomi yang beragam. Di samping itu, gerakan kaum muda juga perlu mengatasi permasalahan pembagian tugas dari sisi gender. Selama ini, aktivis perempuan cenderung berperan dalam perencanaan dan berada di belakang panggung, sedangkan aktivis laki-laki cenderung berperan dalam implementasi dan berada di atas panggung. Lebih lanjut, dalam mengelola gerakannya, kaum muda sering kali tidak dilengkapi dengan cara mengelola persaingan dalam mendapatkan pendanaan dan menciptakan pengaruh, khususnya dengan gerakan yang lebih mapan dan aktivis yang lebih senior. Selain itu, terdapat pula sikap hati-hati kaum muda dalam menerima dukungan pendanaan dari ENGO karena adanya risiko benturan kepentingan dan berkurangnya kendali kaum muda, yang pada akhirnya membatasi kegiatan-kegiatan mereka.
- 13 Studi ini menemukan bahwa kaum muda secara umum memiliki pengalaman yang cenderung positif ketika terlibat dalam kegiatan atau program yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat sipil dan ENGO. Meski jalan keterlibatan melalui komunitas kaum muda meningkat, banyak kaum muda memperoleh akses peningkatan kapasitas organisasi dan jaringan yang lebih luas melalui keterlibatan dengan OMS dan ENGO. Namun demikian, jalan keterlibatan ini belum mengarah pada mentoring yang lebih terstruktur dalam hal gambaran besar kerja-kerja ILH dan mobilisasi sumber daya.
- 14 Meski peran kaum muda dalam perumusan kebijakan sangat diperlukan, keterlibatan mereka melalui pemerintah masih kurang. Kesempatan generasi yang lebih muda untuk memegang jabatan publik sudah lebih terbuka, dan beberapa memiliki kemampuan dan akses langsung untuk memengaruhi kebijakan. Akan tetapi, meski sudah ada kaum muda yang berperan dalam perumusan kebijakan ILH melalui struktur internal pemerintahan, mereka masih harus berhadapan dengan kerumitan birokrasi dan senioritas. Sementara itu, keterlibatan kaum muda dalam perumusan kebijakan di luar sistem pemerintahan masih bersifat *ad hoc* dan eksklusif.
- 15 Keterlibatan kaum muda dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan oleh pemerintah masih jarang. Hal ini terjadi karena terbatasnya isu ILH yang dapat dibahas bersama pemerintah, cara pandang pengambil kebijakan yang memosisikan kaum muda sebagai individu yang belum memiliki kapasitas cukup untuk partisipasi yang lebih bermakna, dan beban yang diberikan pada kaum muda untuk menyelesaikan persoalan ILH yang mereka suarakan.



# Faktor pendorong dan penghambat keterlibatan kaum muda dalam isu ILH

Studi ini memetakan empat faktor pendukung dan penghambat keterlibatan kaum muda dalam aktivisme, yaitu faktor individu, interaksi sosial, komunitas/organisasi, dan faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut berkontribusi sebagai pendorong komitmen sipil, aksi sipil, keterampilan sipil, dan kohesi sosial, sebagai dimensi-dimensi utama keterlibatan kaum muda dalam isu ILH.

- 16 Faktor individu ditemukan sebagai faktor dominan pendukung komitmen sipil kaum muda untuk terlibat dalam gerakan ILH. Faktor individu ini antara lain keresahan akan dampak ILH baik di masa sekarang maupun masa depan, pengalaman terdampak, minat dan ketertarikan terhadap isu, identitas sebagai kaum muda adat, adanya waktu luang, pengalaman terlibat dalam aksi sipil, dan ajaran agama/kepercayaan untuk melestarikan lingkungan hidup. Di sisi lain, faktor individu seperti dukungan keluarga dan kelas sosial ekonomi menjadi tantangan bagi kaum muda dalam keterlibatan aktivisme.
- 17 Faktor interaksi sosial juga ditemukan mendorong penguatan komitmen sipil kaum muda. Faktor interaksi sosial seperti jaringan pertemanan atau komunitas penggemar (*fanbase*) beberapa kali disebutkan telah mendorong kaum muda untuk terlibat dalam gerakan ILH. Interaksi dengan orang dewasa seperti mentor atau *role model* juga memberikan insentif bagi kaum muda untuk melanjutkan aktivisme mereka.
- 18 Komunitas/organisasi yang inklusif dan memberikan ruang bagi kaum muda untuk berkembang dan berekspresi juga menjadi faktor pendukung kaum muda untuk mempertahankan komitmen sipil di gerakan ILH. Potensi lainnya adalah dari faktor eksternal, dengan penyediaan lingkungan dan kebijakan yang melindungi keamanan partisipasi kaum muda. Namun, studi ini menemukan bahwa faktor eksternal masih menjadi tantangan karena masih kurangnya ruang aman bagi partisipasi kaum muda, baik secara daring maupun tatap muka.
- 19 Faktor individu, interaksi sosial, dan komunitas/organisasi berpengaruh lebih dominan dalam mendukung penguatan keterampilan sipil kaum muda. Faktor individu ini antara lain latar belakang pendidikan, sosial, dan ekonomi; akses informasi dan sumber daya; dan pengalaman melakukan aksi sipil.
- Sementara itu, faktor interaksi sosial mencakup interaksi kaum muda dengan sesama komunitas kaum muda, OMS, ENGO, atau pemerintah, yang memberi mereka pengalaman dan kegiatan peningkatan keterampilan sipil. Keterampilan sipil kaum muda juga dinilai perlu diperkuat melalui pengembangan kapasitas pengelolaan organisasi, peningkatan kemampuan berpikir kritis, dan pengelolaan kesehatan mental.
- 20 Studi ini menemukan faktor interaksi sosial sebagai faktor dominan yang mendukung kohesi sosial dalam keterlibatan sipil kaum muda. Interaksi sosial, baik sesama kaum muda maupun dengan pemangku kepentingan dewasa, memperkuat modal sosial kelompok yang menjembatani dan mengikat kaum muda dalam memobilisasi gerakan ILH. Di sisi lain, masih terpecah-pecahnya aktivisme kaum muda di berbagai topik menjadi tantangan dan perlu diatasi dengan memperkuat kolaborasi antarkomunitas.
- 21 Kohesi sosial juga ditemukan telah mendorong peningkatan keterampilan sipil kaum muda. Kolaborasi dan solidaritas merupakan ciri khas interaksi kaum muda yang terus dijaga. Ciri ini mendorong kaum muda untuk terus mengasah keterampilan dan memperkuat komitmen partisipasi mereka dalam kegiatan komunitas. Aksi peningkatan kapasitas melalui kegiatan berjejaring dan aliansi juga mendorong peningkatan keterampilan sipil sekaligus membangun kohesi sosial.
- 22 Terkait aksi sipil, faktor eksternal merupakan faktor dominan yang memengaruhi efektivitasnya. Strategi pengorganisasian aksi sipil dan akses informasi melalui teknologi dan media dianggap berperan besar dalam mendorong aksi sipil agar menghasilkan perubahan yang diharapkan. Kebijakan sebagai faktor eksternal sangat berperan dalam mendorong terbentuknya ruang aman untuk aksi sipil kaum muda dan melembagakan perubahan yang diusung oleh gerakan kaum muda.

- 23 Interaksi sosial juga berkontribusi pada beragamnya bentuk dan kesempatan aksi sipil. Berbagai interaksi sosial yang terjadi di dalam dan di luar komunitas kaum muda memberikan kesempatan bagi mereka untuk berjejaring dan terpapar berbagai bentuk aksi sipil, yang kemudian dikembangkan menjadi bentuk-bentuk lain yang lebih kreatif. Interaksi dengan pemangku kepentingan juga mendorong munculnya berbagai dukungan pendanaan, kemitraan, dan *mentorship* yang mendorong keberlangsungan dan keberhasilan aksi sipil kaum muda.
- 24 Kaum muda mengetahui berbagai risiko dari aksi sipil mereka dan memperhitungkannya dalam kegiatan-kegiatan mereka. Peserta dalam studi ini menyebutkan tingkat risiko yang berbeda-beda dalam aktivisme isu ILH. Sebagian besar kegiatan daring atau kegiatan yang dianggap aman, seperti membersihkan sampah, dinilai sebagai kegiatan dengan risiko rendah. Sementara itu, aksi protes langsung terhadap pemerintah atau perusahaan besar dianggap sebagai kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Kaum muda yang memiliki sistem pendukung yang baik dan akses terhadap bantuan hukum cenderung menggunakan pendekatan *hard diplomacy*.
- Sementara itu, komunitas kaum muda dengan dukungan terbatas cenderung lebih banyak melakukan pendekatan *soft diplomacy* dalam aksi sipilnya. Kedua pendekatan diplomasi tersebut saling melengkapi dan belum tentu pendekatan yang satu lebih efektif dari yang lainnya.
- 25 Peran media sosial dalam aktivisme juga dibahas dalam literatur dan peserta kaum muda pun menyadari potensinya. Kaum muda menggunakan media sosial untuk berkampanye dan mengelola kegiatan-kegiatan mereka. Media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan satu arah, tetapi juga digunakan untuk merekrut relawan, mengajak publik untuk terlibat dalam aksi protes, dan mendiskusikan isu-isu ILH. Meskipun memiliki jangkauan yang luas, peserta studi ini menyadari bahwa aktivisme di media sosial tidak cukup untuk menciptakan perubahan nyata. Kegiatan melalui media sosial perlu dilengkapi dengan aktivitas membangun ikatan dalam komunitas secara tatap muka, mengingat signifikannya peran kohesi sosial dalam memberikan insentif bagi keterlibatan kaum muda dalam isu ILH.

## Aspek kebijakan yang berkaitan dengan keterlibatan kaum muda dalam isu ILH

---

Studi ini mengelompokkan kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan keterlibatan kaum muda ke dalam tiga kategori, yaitu 1) peraturan yang mendorong atau menghambat kebebasan berekspresi dan partisipasi publik; 2) peraturan yang mengatur keterlibatan kaum muda, termasuk kehadiran mereka dalam berbagai ruang publik dan bagaimana mereka mengekspresikan pendapat; dan 3) peraturan tentang ILH yang mengandung komponen partisipasi publik.

- 26 Beberapa peraturan tidak secara khusus mengatur partisipasi kaum muda. Namun, sebagian peraturan berpotensi mempersempit ruang aman bagi masyarakat, termasuk kaum muda, untuk berpendapat dan berpartisipasi di ruang publik, misalnya kriminalisasi atas perbuatan pencemaran nama baik dan penistaan yang diatur dalam KUHP dan UU ITE.
- 27 Peraturan yang merumuskan keterlibatan kaum muda cenderung mengatur partisipasi secara dangkal (*superficial*). Contohnya, partisipasi kaum muda dalam program Kota Layak Pemuda dibatasi pada tahap perencanaan dan pemberian penghargaan pada wilayah terpilih.

**28** Studi ini menemukan beberapa peraturan tentang ILH yang berpotensi melemahkan partisipasi kelompok masyarakat, termasuk kaum muda, dalam mencegah dampak kerusakan ILH. Peraturan yang menjabarkan mekanisme dan tahapan partisipasi masyarakat memberikan persyaratan tertentu bagi warga yang dapat berpartisipasi. Contohnya, peran dan partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi lingkungan diatur dengan ketentuan yang ketat.

Di samping itu, beberapa peraturan juga menempatkan masyarakat secara pasif (hanya sebagai penerima manfaat) dalam berbagai program pemerintah. Sementara itu, peraturan lainnya mengatur partisipasi masyarakat secara ambigu dan tanpa pedoman teknis.

## Pembelajaran dari kesuksesan (dan ketidaksuksesan) gerakan kaum muda

---

**Meskipun peserta studi kasus dipilih berdasarkan keberhasilan gerakan kaum muda dalam menciptakan perubahan kebijakan atau mendorong praktik yang proiklim dan prolingkungan hidup, belum terdapat kesepakatan di antara kaum muda tentang apa yang dianggap sukses dalam aktivisme ILH. Gerakan kaum muda cenderung merancang aksi sipil mereka tanpa menggunakan teori perubahan yang dapat membantu mereka memonitor dan mengukur keberhasilan atau kegagalannya. Meskipun demikian, studi kasus menemukan beberapa terobosan yang telah dibangun oleh kaum muda dan beberapa pembelajaran dari terobosan tersebut.**

**29** Interaksi sosial yang positif yang tercermin dalam solidaritas sesama kaum muda dan dukungan dari pemangku kepentingan dewasa seperti, ENGO, OMS, donor, dan pemerintah daerah, berhasil memengaruhi keberhasilan kaum muda dalam mencapai agendanya. Di samping itu, berbagai faktor internal komunitas/organisasi itu sendiri, seperti bentuk, struktur, pengelolaan organisasi, dan pendanaan juga berperan sebagai katalis gerakan kaum muda ke depannya. Dalam satu gerakan, studi kasus menemukan bahwa tokoh yang berpengaruh, memiliki peran dalam menentukan jalannya gerakan dan pencapaian organisasi. Menariknya, organisasi tersebut bercita-cita menjadi gerakan yang 'tanpa pemimpin' (*leaderless*) atau mengikuti struktur 'tanpa hirarki' (*holacracy*). Penilaian lebih lanjut diperlukan untuk mempelajari tentang keefektifan pendekatan tersebut, faktor yang dapat mendukung proses transisinya, dan bagaimana pendekatan tersebut dapat diadopsi oleh organisasi lain yang memiliki visi yang sama.

**30** Sama halnya dengan temuan pada FGD dan KII, studi kasus juga menemukan bahwa faktor pendorong dapat pula berperan sebagai faktor penghambat dalam kondisi tertentu. Di satu sisi, kepemimpinan yang kuat dan tata kelola yang baik mendorong perkembangan gerakan. Di sisi lain, rendahnya komitmen kaum muda dan pengelolaan yang buruk dapat menghalangi keberhasilan gerakan. Meskipun solidaritas kuat dipandang sebagai kekuatan positif dalam gerakan kaum muda, keanggotaan yang bersifat sukarela dapat menghalangi terbentuknya komitmen jangka panjang para anggota terhadap gerakan. Terakhir, ketidakpastian yang disebabkan oleh krisis, misalnya pandemi Covid-19 dan kesulitan sumber pendanaan masih menjadi salah satu hambatan terbesar bagi gerakan kaum muda.



01

# Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu Iklim dan Lingkungan Hidup

**Pembahasan tentang krisis iklim dan lingkungan hidup (ILH) belum diikuti oleh kemampuan kita mengatasi konsekuensi kerusakan jangka panjang secara efektif.** Faktanya, kerusakan yang terjadi saat ini akan lebih memengaruhi kehidupan generasi muda sekarang. Sebaliknya, orang-orang dewasa yang saat ini menentukan keputusan untuk bertindak (atau tidak) memitigasi krisis ILH, justru tidak akan merasakan akibat buruknya di masa datang.

**Karena kaum muda yang akan menanggung akibat krisis ILH di masa depan, kita perlu memahami lebih dalam tentang potensi partisipasi kaum muda untuk memengaruhi kebijakan pro-ILH.** Studi tentang anak-anak dan kaum muda di kota-kota di Indonesia menemukan bahwa mereka khawatir akan naiknya permukaan laut, serangkaian banjir, dan kekeringan yang disebabkan oleh perubahan iklim (Kusumaningrum et al., 2021). Di sisi lain, pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa konsekuensi negatif dari pembangunan perkotaan dan risiko eksternal, termasuk ILH, sering menimpa warga rentan di perkotaan secara tidak proporsional (Kusumaningrum et al., 2021).

**Namun, partisipasi anak dan kaum muda adalah konsep yang tidak mudah direalisasikan secara bermakna, termasuk dalam isu ILH.** Meski makin banyak kaum muda aktif dalam gerakan global pro-ILH, kebanyakan masih terbatas pada mendorong gaya hidup hijau, misalnya meningkatnya tren kesadaran akan konsumsi berkelanjutan dan etis di kalangan kaum muda (Kim et al. 2020), tetapi belum banyak yang mengadvokasi perubahan sistemis. Dugaan tersebut terkonfirmasi melalui pencarian daring cepat yang dilakukan oleh Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA). Dari situ, PUSKAPA menemukan bahwa keterlibatan kaum muda Indonesia memang lebih menonjol pada seruan gaya hidup ramah lingkungan. Lainnya, sebuah survei yang melibatkan 1.000 siswa SMA di Yogyakarta dan Surabaya menemukan bahwa siswa dapat mengidentifikasi masalah lokal seperti sampah, tetapi tidak punya cukup informasi tentang isu ILH di tingkat nasional dan global (Parker et al., 2018).

**Selain skala dan kedalaman keterlibatan kaum muda dalam isu-isu ILH, konseptualisasi dan implementasi partisipasi kaum muda secara umum di Indonesia memang masih terus berproses.** Nilai Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia meningkat dari 48,67 pada tahun 2015 menjadi 51,5 (skala

0–100) pada tahun 2018 (Bappenas, 2020). Meski ini menunjukkan kemajuan, pencapaiannya belum memuaskan. Partisipasi masih sering digunakan sebagai jargon daripada diimplementasikan sebagai bagian dari strategi reformasi. Saat partisipasi diterapkan, ia cenderung dipraktikkan secara tokenistik, *ad hoc*, dan eksklusif. Akibatnya, partisipasi kaum muda masih banyak terjadi secara kebetulan, melibatkan kaum muda tertentu saja, dan belum secara setara menyertakan kaum muda rentan.

**Kesadaran akan besarnya potensi kaum muda sudah dimiliki pemerintah Indonesia meski masih terdapat sejumlah hambatan.** Kementerian Pemuda dan Olahraga punya dokumen perencanaan khusus tentang populasi muda, tetapi belum menerapkan pendekatan yang partisipatif untuk membina keterlibatan bermakna kaum muda (Ramadhan, 2013). Pembuatan kebijakan belum melibatkan anak-anak dan kaum muda secara etis dan efektif. Di luar itu, Indonesia memberlakukan sejumlah peraturan yang bisa jadi membatasi kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul yang mendasar bagi keterlibatan bermakna untuk mendorong perubahan (Mietzner, 2020).

**Mitra pembangunan jelas punya minat besar untuk mendukung partisipasi dan keterlibatan kaum muda sebagai bagian dari strategi mengatasi masalah abad ke-21, termasuk ILH.** Minat ini terbangun di atas dua keyakinan. Pertama, pengelolaan setiap krisis, termasuk ekonomi, sosial, kesehatan, dan ILH, harus mengikutsertakan kaum muda sebagai pemangku kepentingan utama masa depan. Kedua, keberhasilan partisipasi dan keterlibatan kaum muda akan berkontribusi pada keberhasilan memitigasi berbagai dampak dari krisis-krisis tersebut.

**Oleh karena itu, dukungan perlu tersedia agar kaum muda Indonesia dapat membangun dan mempertahankan keterlibatan sipil mereka, menguatkan gerakan dan organisasi untuk tujuan-tujuan yang memengaruhi kemaslahatan bersama, dan menggiatkan praktik-praktik berbasis komitmen kemanusiaan dan bukti untuk mewujudkan reformasi ILH di Indonesia.**



02

# Metodologi

## 2.1 Pertanyaan dan Tujuan Studi

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, studi ini merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

- 1 Seperti apa lanskap keterlibatan kaum muda terkait isu ILH di Indonesia?
- 2 Apa saja faktor pendorong keterlibatan kaum muda dalam isu ILH di Indonesia?
- 3 Apa yang dapat kita pelajari dari model keterlibatan kaum muda di Indonesia yang telah menghasilkan perubahan, baik kebijakan, norma, atau praktik, yang proiklim atau prolingkungan?

Jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas diharapkan dapat memenuhi tujuan studi, yakni:

- 1 Memperoleh pemahaman dan mendokumentasikan situasi keterlibatan kaum muda dalam isu ILH di Indonesia, termasuk kesenjangan yang ada.
- 2 Mengidentifikasi tantangan dan kesempatan keterlibatan kaum muda dalam isu ILH di Indonesia, untuk kemudian digunakan dalam memahami keterlibatan kaum muda dalam isu-isu sosial lainnya.
- 3 Mengidentifikasi beberapa cerita perubahan kebijakan, norma, atau praktik melalui keterlibatan kaum muda dan menganalisis pembelajaran dari kesuksesan atau kegagalan yang ada.

## 2.2 Konsep-Konsep Utama

### *Partisipasi dan Keterlibatan Sipil*

Dalam studi ini, keterlibatan sipil merujuk pada dimensi yang terdiri dari:

- Aksi sipil, yakni keterlibatan dan partisipasi dalam kegiatan untuk membantu masyarakat.
- Komitmen atau kewajiban sipil, yakni kesediaan untuk memberikan kontribusi positif pada masyarakat.
- Keterampilan, yakni kemampuan untuk terlibat dalam masyarakat sipil, politik, dan demokrasi. Ada empat kategori keterampilan yang dominan: 1) kemampuan mengorganisasi, 2) komunikasi, 3) pengambilan keputusan kolektif, dan 4) berpikir kritis.
- Kohesi sosial, yakni rasa timbal balik, kepercayaan, dan ikatan dengan orang lain. Kohesi sosial ini dapat ditemukan dalam keragaman dalam komunitas, pentingnya membangun hubungan dengan orang lain, basis dukungan di antara kelompok-kelompok yang beragam, dan tanggapan positif terhadap pandangan yang beragam dari kelompok populasi yang berbeda dalam masyarakat.

### *Kaum Muda*

Kaum muda dalam studi ini didefinisikan sebagai individu yang berusia 16 sampai 30 tahun. Sementara itu, PBB mendefinisikan pemuda sebagai mereka yang berusia 15–24 tahun, sedangkan Undang-Undang Pemuda No. 40/2009 mendefinisikan pemuda sebagai mereka yang berusia 16 hingga 30 tahun. Agar dapat memberikan rekomendasi kontekstual, studi ini akan menggunakan definisi pemerintah Indonesia.

### *Keadilan Iklim dan Lingkungan Hidup*

Istilah keadilan ILH pada studi ini merujuk pada isu-isu keadilan iklim, yaitu masalah perubahan iklim yang memberikan dampak sosial, ekonomi, kesehatan masyarakat, dan berbagai dampak buruk lainnya pada masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang lebih rentan (United Nations, 2019). Keadilan iklim ini juga merupakan salah satu bentuk keadilan lingkungan yang mengedepankan perlakuan yang adil dan keterlibatan yang berarti dari semua orang tanpa memandang ras, warna kulit, asal negara, ataupun pendapatan, dalam pengembangan, implementasi, dan penegakan peraturan dan kebijakan lingkungan (EPA, 2020).

## 2.3 Pengumpulan Data

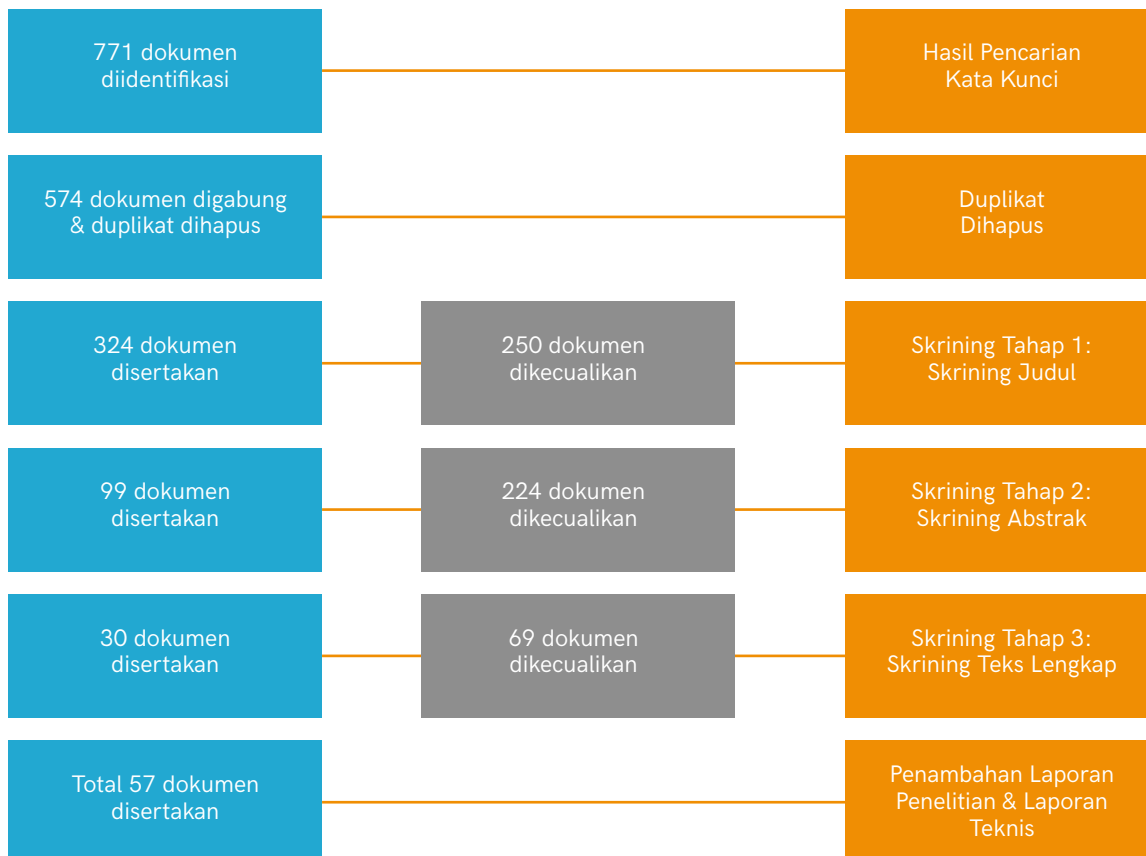
### Tahapan Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap. Pada tahap pertama, studi dimulai dengan tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*), yang dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui konsultasi, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion/FGD*), dan wawancara peserta kunci (*key informant interview/KII*). Pada tahap kedua, studi dilanjutkan dengan tinjauan kebijakan dan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam pada studi kasus terpilih. Tahapan pengumpulan data primer dimulai dari penyusunan pertanyaan dan manual wawancara, pelatihan untuk tim peneliti yang mengumpulkan data, pencarian peserta, pengumpulan data, data coding, dan analisis data. Seluruh proses pengumpulan data dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom atau telepon.

### Tinjauan Literatur

Tinjauan pustaka menggunakan pendekatan sistematis dengan memastikan prinsip-prinsip Boolean dalam mengembangkan kata kunci pencarian daring. Pencarian terhadap literatur memanfaatkan platform *library search* yang berafiliasi dengan PUSKAPA, seperti Universitas Indonesia, Columbia University, dan Australian National University. Selain itu, Google Scholar juga digunakan untuk melengkapi literatur yang tidak tersaring dalam jurnal akademik. Semua literatur disimpan dan dikelola dalam aplikasi referensi pustaka Zotero.

Diagram 1: Proses Tinjauan Pustaka Sistematis





Literatur yang digunakan dalam studi ini akan dibatasi dalam sepuluh tahun terakhir (2011–2021) untuk memastikan relevansinya dengan situasi saat ini. Dengan mempertimbangkan sensitivitas dari mesin pencari, penelusuran awal literatur menggunakan kombinasi kata kunci dalam Bahasa Inggris, yaitu “*youth engagement*”, “*youth participation*”, “*youth*” & “*civic engagement*”, “*youth civic engagement*”, “*climate crisis*”, “*climate change*”, “*climate justice*”, “*environment*”, “*activism*”, dan “Indonesia”. Penelusuran selanjutnya dilakukan secara manual terhadap dokumen awal yang ditemukan maupun dokumen-dokumen lain yang juga relevan, seperti laporan dan dokumentasi program yang diterbitkan oleh lembaga pembangunan dan organisasi masyarakat sipil, serta rekomendasi dari peserta konsultasi FGD dan peserta wawancara kunci untuk melengkapi analisis.

Pencarian awal terhadap kombinasi kata kunci berhasil menjangkau 771 dokumen yang kemudian dipersempit menjadi 30 dokumen berdasarkan tiga tahap penyaringan menggunakan kriteria inklusi seperti relevansi dan kredibilitas artikel yang diterbitkan. Penelusuran lanjutan menemukan 27 laporan penelitian dan laporan teknis yang juga relevan dengan pembahasan studi ini sehingga total dokumen yang dianalisis sebanyak 57.

## I Tinjauan Kebijakan

Pengumpulan kebijakan dilakukan melalui tiga tahap:

- 1 Peneliti mengidentifikasi kebijakan yang muncul berdasarkan hasil wawancara dengan peserta pada studi tahap 1 dan sejumlah peraturan tambahan yang relevan berdasarkan pertimbangan peneliti.
- 2 Peneliti menerapkan teknik penelusuran (*snowball*) terhadap kebijakan yang sudah dikumpulkan pada tahap 1 untuk mendapatkan referensi kebijakan pendahulu lain yang relevan.
- 3 Peneliti juga melakukan pencarian kebijakan melalui mesin pencari Google (Google.com) dengan menggunakan kata kunci, antara lain “partisipasi”, “keterlibatan”, “pemuda”, atau “masyarakat”, yang kemudian dicek kembali untuk memastikan substansi pasal relevan dengan pertanyaan studi. Setelah proses penelusuran peraturan selesai, peneliti melakukan periksa ulang untuk memastikan peraturan layak dikaji lebih lanjut dan tidak ada yang terduplikasi.

Peneliti kemudian menganalisis peraturan dengan memeriksa aspek-aspek yang diatur di dalamnya, antara lain

- karakteristik kelompok masyarakat atau pemuda;
- bentuk dan ruang lingkup partisipasi atau keterlibatan sipil;
- persyaratan untuk berpartisipasi atau terlibat; dan
- pasal-pasal yang bertindak sebagai pendukung dan penghambat keterlibatan sipil.

Aspek-aspek tersebut dianalisis menggunakan tabel oleh dua peneliti secara mandiri. Untuk memastikan konsistensi, dua peneliti ini saling meninjau, mengoreksi, dan mendiskusikan hasil kesimpulan yang didapat. Secara keseluruhan, peneliti menganalisis sebanyak 51 kebijakan yang relevan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

## I Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer terdiri dari dua tahap, yaitu konsultasi/diskusi kelompok (FGD) dan wawancara peserta kunci (KII) untuk tahap 1, dan studi kasus untuk tahap 2. Pengumpulan data pada tahap 1 bertujuan untuk menjawab pertanyaan studi pertama dan kedua, sedangkan pengumpulan data tahap kedua bertujuan untuk menjawab pertanyaan studi ketiga (lihat bagian 2.1).

### Tahap 1: Konsultasi/FGD dan KII

Sebelum pengumpulan data, PUSKAPA membuat Database Komunitas atau Jejaring Kaum Muda yang menjadi acuan pertama untuk pemilihan peserta. Pemilihan peserta konsultasi dilakukan oleh PUSKAPA dan mitra, sementara pemilihan peserta FGD mempertimbangkan masukan dari peserta konsultasi. Peserta dipilih sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan seperti usia, pengalaman aktivisme yang dimiliki, keterwakilan isu dan organisasi, serta ketersediaan akses internet dan gawai yang dimiliki. Staf dan asisten peneliti PUSKAPA juga menghubungi orang tua/wali peserta yang berusia di bawah 18 tahun untuk mendapatkan persetujuan untuk terlibat dalam studi ini.

Dalam studi ini, dilakukan tiga tahap pengumpulan data primer, yaitu konsultasi dengan pakar muda dan dewasa, FGD, dan KII. Sesi konsultasi dan FGD berlangsung selama maksimal 2,5 jam, sedangkan wawancara dilakukan maksimal 1 jam. Konsultasi dilakukan sebanyak dua kali dengan pakar dari kelompok kaum muda dan dewasa. Secara total, dilakukan enam FGD dan 14 wawancara (untuk info lebih terperinci, lihat Tabel 1 pada Lampiran).

## Tahap 2: Studi Kasus

Studi kasus dilakukan terhadap gerakan-gerakan kaum muda yang dipilih secara sengaja (*purposive*) berdasarkan hasil studi tahap 1 sebagai target utama (disebut sebagai gerakan tipe 1) dan ditambah model gerakan di luar partisipan studi tahap 1 sebagai pelengkap (disebut sebagai gerakan tipe 2). Gerakan tipe 1 memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1 Menunjukkan kesuksesan dalam memengaruhi perubahan sistem, kebijakan, atau perilaku di skala pusat, lokal, maupun komunitas yang teridentifikasi terkait dengan isu iklim dan lingkungan hidup.
- 2 Bergerak dalam isu iklim dan lingkungan hidup terkait (i) tindakan manusia yang mengakibatkan gejala iklim dan lingkungan, (ii) faktor-faktor yang melanggengkan tindakan perusakan lingkungan, serta (iii) dampak dan mitigasi dampak tindakan perusakan lingkungan pada lingkungan hidup dan masyarakat.
- 3 Bergerak di tingkat nasional maupun daerah.
- 4 Diinisiasi oleh kaum muda.

Sementara itu, gerakan tipe 2 merupakan model gerakan yang melibatkan kaum muda yang tidak menjadi partisipan pada studi tahap 1, dengan variasi sebagai berikut:

- 1 Model gerakan yang awalnya tidak diinisiasi oleh kaum muda, tetapi melibatkan kaum muda dalam programnya, khusus untuk isu iklim dan lingkungan hidup.
- 2 Model yang tidak secara khusus berfokus pada isu iklim dan lingkungan hidup, tetapi dibentuk oleh dan untuk kaum muda.

Berdasarkan kriteria di atas, terpilih dua gerakan kriteria tipe 1, yaitu Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) dan Jaga Rimba. Sementara itu, gerakan tipe 2 terdiri dari program She Creates Change (SCC) dan Indonesia Youth Council on Tobacco Control (IYCTC). Informasi lebih terperinci mengenai alasan pemilihan masing-masing gerakan dapat dilihat pada Lampiran 3.

Pengumpulan data dilakukan melalui *desk research* dan wawancara mendalam. Pada tahap awal, *desk research* dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal profil organisasi, latar belakang pendirian, capaian dan cerita kesuksesan, serta dokumentasi perkembangan dan pengelolaan organisasi/komunitas. Hasil *desk research* kemudian digunakan untuk memperdalam instrumen wawancara supaya dapat menangkap karakteristik dan situasi khusus masing-masing organisasi/komunitas dalam studi.

*Desk research* dilakukan dengan pencarian secara daring terhadap berbagai publikasi tentang masing-masing organisasi, laporan dan artikel yang diterbitkan organisasi/komunitas, video kegiatan, hingga sinar yang diisi oleh anggota organisasi/komunitas. Saat melakukan wawancara, tim peneliti juga menanyakan langsung dokumen-dokumen yang relevan kepada peserta, kemudian informasi yang diperoleh ditambahkan ke pangkalan data yang sudah tersedia.

Selanjutnya, wawancara mendalam dilakukan secara individu atau berkelompok melalui aplikasi Zoom. Wawancara mendalam untuk gerakan tipe 1 dilakukan dengan maksimal 15 orang peserta per organisasi/komunitas. Sementara itu, wawancara mendalam untuk gerakan tipe 2 dilakukan dengan maksimal dua orang peserta per organisasi/komunitas.

Peserta wawancara dibagi ke dalam tiga tipe, yaitu peserta tipe A (internal-struktural), peserta tipe B (internal teknis), dan peserta tipe C (eksternal). Setiap wawancara dilakukan oleh dua orang peneliti; satu orang bertugas memandu jalannya wawancara dan satu orang lagi bertugas merekam serta mencatat proses dan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. Setiap sesi wawancara rata-rata berlangsung sekitar 60–90 menit dan wawancara lanjutan juga dapat diadakan. Informasi lebih terperinci dapat dilihat pada Lampiran 2.

Tim peneliti berhasil mewawancarai total 18 peserta melalui 16 wawancara, yang terdiri dari 13 wawancara utama dan 3 wawancara lanjutan, 4 wawancara berkelompok dan 12 wawancara individu (lihat Tabel 2 dan 3 pada Lampiran 1 untuk informasi lebih terperinci).

## 2.4 Analisis Data

### Tahap 1: Konsultasi/FGD dan wawancara

Dalam penyusunan temuan studi, data dari konsultasi, FGD, dan wawancara dengan kaum muda menjadi sumber data utama, sementara informasi dari konsultasi dan studi pustaka digunakan untuk melengkapi informasi dan triangulasi data mengenai keterlibatan kaum muda dalam isu lingkungan dan iklim dari perspektif yang berbeda.

Studi ini menggunakan perangkat lunak Dedoose sebagai alat untuk mengolah data kualitatif. Beberapa tim peneliti mengelola data secara terpusat dan juga melakukan supervisi dan pengawasan untuk memastikan kualitas semua data yang masuk. Semua hasil pengumpulan data primer disertai dengan catatan lapangan. Rekaman diskusi ditranskripsi, diunggah ke perangkat lunak Dedoose, dan diberikan kode berdasarkan pertanyaan studi dan kerangka konseptual yang digunakan. Selanjutnya, *constant comparative method* digunakan dalam menganalisis data secara induktif dari data yang sudah melalui proses pengodean awal.

### Tahap 2: Konsultasi/FGD dan wawancara

Dalam studi kasus, diterapkan proses analisis yang serupa dengan tahap 1 dengan sedikit modifikasi. Buku kode dikembangkan dengan merujuk pada tema-tema yang muncul pada studi tahap 1 dan tema baru yang muncul pada studi tahap 2. Tim penulis dan peneliti lapangan memberi kode pada data yang diperoleh menggunakan matriks Excel.

## 2.5 Etika dan Mitigasi Risiko

Proses pengambilan data kualitatif melibatkan peserta anak (di bawah 18 tahun) serta dewasa (di atas 18 tahun). Adapun keterlibatan seluruh peserta dalam rangkaian penelitian ini dijaga sesuai etika penelitian dengan merujuk pada prinsip utama dan pendukung partisipasi anak, antara lain 1) penghargaan terhadap partisipasi, 2) berdampak positif (*beneficence*) dan tidak berbahaya (*nonmaleficence*), 3) adil, 4) menjunjung kepentingan terbaik anak, 5) dilakukan secara sukarela, 6) menjaga privasi anak dan kaum muda, dan 7) menjunjung hak anak dan kaum muda untuk didengar dan diteliti secara benar. Studi ini juga telah mendapatkan persetujuan uji etik dari Dewan Komisi Etik Universitas Atmajaya dengan Surat Persetujuan Nomor 0029D/III/LPPM-PM.10.05/09/2021 dan 0005G/III/PPPE.PM.10.05/05/2022.

Selama pengumpulan data, tim peneliti memastikan agar peserta mengetahui bahwa kontak mereka hanya akan digunakan untuk tujuan penelitian ini dan tidak akan diberikan ke pihak selain tim peneliti. Terkait kerahasiaan data, tim peneliti juga memastikan bahwa data-data dari peserta, terutama informasi pribadi yang dikumpulkan dari formulir dan diskusi, disimpan dalam format yang aman dan terenkripsi di pangkalan data, yang hanya dapat diakses oleh tim peneliti/fasilitator dan tim administrasi-keuangan. Sebelumnya, peserta juga telah mendapatkan informasi secara tertulis mengenai proses dokumentasi studi. Informasi tersebut disertakan dalam formulir persetujuan dan juga disampaikan di awal studi. Dalam laporan ini, identitas peserta studi juga dituliskan secara anonim demi keamanan peserta.

## 2.6 Keterbatasan Studi

### Keterbatasan Pengumpulan Data Primer

Keterbatasan studi ini melekat pada pendekatan kualitatif pada umumnya, yaitu kesimpulan yang dihasilkan tidak dapat dilepaskan dari konteks yang ada untuk kemudian dianggap sebagai gambaran menyeluruh situasi di Indonesia. Pada pengumpulan data primer tahap 1, walaupun studi ini sudah berusaha untuk mempertimbangkan beragam karakteristik dan latar belakang peserta, penarikan kesimpulan dan interpretasi penjabaran informasi dalam laporan ini perlu disikapi dengan cermat dan bijaksana karena terbatasnya jumlah peserta. Sementara itu, untuk pengumpulan data studi kasus (tahap 2), adanya dua tipe gerakan membuat level informasi yang diperoleh juga berbeda. Informasi dari gerakan tipe 1 cenderung lebih terperinci dan mendalam dibandingkan gerakan tipe 2. Oleh karena itu, dalam penulisan temuan, ada beberapa topik yang dibahas mendalam pada gerakan tipe 1, tetapi minim atau tidak dibahas pada gerakan tipe 2.

Proses pengumpulan data dilakukan secara daring untuk meminimalisasi penyebaran wabah Covid-19. Namun, metode ini memiliki keterbatasan dalam menangkap respons nonverbal terutama ketika dilakukan melalui telepon. Akibatnya, peneliti mungkin tidak dapat menangkap sentimen-sentimen yang muncul dengan baik. Selain itu, metode ini juga berpotensi menyisihkan kelompok-kelompok rentan yang kesulitan mengakses internet atau telepon. Walaupun demikian, pada pengumpulan data tahap 1, studi ini telah mengikutsertakan perwakilan dari masyarakat adat yang sangat terdampak perubahan iklim dan kerusakan LH.

Pada pengumpulan data tahap 1, studi ini sebagian besar menangkap informasi yang disampaikan kaum muda. Informasi dari orang dewasa umumnya diperoleh dari satu konsultasi dengan pakar dan empat KII dengan peserta dewasa. Kaum muda dan orang dewasa yang terlibat pun umumnya mereka yang ada di luar sistem pemerintahan, yaitu dalam komunitas atau organisasi masyarakat sipil. Keterbatasan waktu dari calon peserta menjadi kendala dalam melibatkan perwakilan pemerintah untuk konsultasi. Untuk mengakomodasi diskusi yang lebih mendalam dengan beberapa peserta pemerintah, tim memutuskan untuk melakukan beberapa KII dengan pemerintah di tingkat nasional dan daerah, termasuk perwakilan pejabat tinggi dan aparatur sipil negara yang berusia muda.

Peserta pengambil kebijakan seluruhnya merupakan kaum muda dan orang dewasa yang berada di lembaga eksekutif. Tim peneliti sudah berupaya untuk menjangkau kaum muda yang menempati posisi legislatif agar mendapatkan pandangan yang

berimbang, tetapi karena satu dan lain hal, wawancara dengan mereka tidak bisa dilakukan.

Pada pengumpulan data tahap 2 (studi kasus), hasil penulisan temuan dikonsultasikan dengan masing-masing organisasi/komunitas untuk memastikan akurasi informasi sekaligus mendapatkan persetujuan untuk dituliskan dalam laporan. Meskipun sebagian besar masukan dari peserta tidak mengubah substansi, tetapi ada catatan dari peserta yang meminta agar temuan mengenai organisasinya ditulis dengan lebih berhati-hati, khususnya untuk informasi yang dianggap cukup sensitif. Atas dasar tersebut, beberapa informasi ditambahkan, dipangkas, dan dimodifikasi sesuai dengan permintaan peserta.

Terakhir, sebagian menganggap aktivisme dalam isu iklim dan LH di Indonesia merupakan kegiatan yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, dalam mengidentifikasi peserta, tim peneliti berupaya menggunakan penanda (*identifier*) yang umum seperti kaum muda/dewasa, khususnya pada penulisan temuan tahap 1. Untuk tahap 1, nama lembaga tidak dituliskan di bagian informasi mengenai peserta dan di bagian temuan untuk menjaga anonimitas peserta. Sementara untuk penulisan di tahap 2, selain nama organisasi/komunitas terpilih yang sudah mendapatkan persetujuan untuk dituliskan, informasi mengenai jabatan peserta serta nama lembaga lain yang disebutkan oleh peserta tidak dituliskan secara terperinci.

### Keterbatasan Tinjauan Kebijakan

Penelusuran kebijakan terbatas pada peraturan umum di tingkat nasional yang menjadi referensi para peserta tahap 1, penelusuran ke peraturan pendahulu, dan pencarian cepat melalui mesin pencari Google (Google.com) yang dapat diakses secara daring. Oleh karena itu, peraturan yang bersifat teknis, peraturan di tingkat daerah, dan peraturan yang tidak dapat tersedia secara daring mungkin tidak tercakup dalam analisis.

Analisis regulasi tidak diikuti dengan konfirmasi yang berasal dari sumber lain, seperti studi literatur, wawancara dengan pelaksana kebijakan, atau pemantauan berita dan media. Akibatnya, tinjauan ini terbatas pada apa yang tertuang di dalam kebijakan dan tidak dapat dibandingkan dengan situasi di lapangan.



# Lanskap Keterlibatan Kaum Muda di Indonesia

Temuan studi ini memetakan lanskap keterlibatan kaum muda di Indonesia dalam ILH melalui 1) karakteristik, 2) topik ILH yang penting untuk kaum muda, dan 3) bentuk keterlibatan sipil mereka dalam isu ILH. Karakteristik kaum muda yang aktif dalam aktivisme ILH dibagi dalam dua kategori, yaitu karakteristik demografis dan nondemografis<sup>1</sup> yang saling terkait dan didapati berkaitan dengan komitmen kaum muda untuk terlibat dalam aksi sipil dalam isu ILH. Topik ILH yang dianggap penting oleh kaum muda juga mencakup berbagai topik yang dapat dikategorikan menjadi a) gejala ILH, b) tindakan yang menyebabkan timbulnya gejala ILH, c) penyebab tindakan, d) dampak tindakan pada ILH dan mitigasinya, dan e) dampak tindakan pada warga dan mitigasinya, terutama untuk kelompok rentan. Terdapat lima bentuk keterlibatan sipil kaum muda yang ditemukan dan dikelompokkan oleh peneliti secara tidak berurutan menjadi i) peningkatan kapasitas, ii) advokasi, iii) kampanye (termasuk aksi protes), iv) riset, dan v) pendampingan masyarakat. Secara umum, bentuk-bentuk keterlibatan tersebut menasar tiga kelompok utama, yaitu masyarakat, pengambil kebijakan, dan kaum muda itu sendiri.

<sup>1</sup> Karakteristik demografis mencakup informasi terkait usia, tingkat pendidikan atau jenis pekerjaan, gender, asal wilayah, agama, atau identitas lainnya. Sementara itu, karakteristik nondemografis mencakup karakteristik kaum muda yang terkait dengan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki; pengalaman terdampak isu lingkungan dan iklim; serta sumber daya dan jaringan yang dimiliki.

### 3.1 Karakteristik Kaum Muda yang Aktif dalam Isu Iklim dan Lingkungan Hidup

#### Boks 1. Demografi Kaum Muda Indonesia

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang dimaksud dengan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Definisi tersebut mengartikan bahwa rentang usia pemuda mencakup masa transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja, serta transisi menuju kemandirian sosial dan politik (Bappenas, 2020). Pada tahun 2020, jumlah pemuda di Indonesia diperkirakan sekitar 64,50 juta jiwa penduduk atau sebesar 23,86% dari total penduduk Indonesia. Jika dilihat berdasarkan kelompok umurnya, sekitar 20,62% dari total pemuda berusia 16–18 tahun (bisa dikatakan tergolong anak), sedangkan usia 19–24 tahun sebesar 40,06% dan usia 25–30 tahun sebesar 39,32%. Berdasarkan jenis kelamin, persentase pemuda laki-laki (50,78%) tidak jauh berbeda dari persentase pemuda perempuan (49,22%). Pemuda Indonesia juga lebih banyak yang tinggal di daerah perkotaan (57,83%) dibandingkan perdesaan (42,17%). Selain itu, sekitar 55,11% pemuda berada di Pulau Jawa (Sari et al., 2022).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan bahwa pada tahun 2020, masih terdapat 0,71% pemuda yang tidak/belum pernah sekolah dan 72,72% tidak sekolah lagi. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase pemuda laki-laki dan perempuan yang tidak/belum pernah sekolah cenderung sama. APS paling tinggi terdapat pada kelompok umur 16–18 tahun (72,72%), diikuti kelompok umur 19–24 tahun (25,56%), dan 25–30 tahun (3,38%) (Sari et al., 2020).

Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda pada tahun 2020 mengalami penurunan, yaitu 61,96% pada 2019 menjadi 61,31% pada 2020. TPAK pemuda laki-laki (73,90%) lebih tinggi dibandingkan TPAK pemuda perempuan (48,46%). Tidak ada perbedaan yang signifikan antara TPAK pemuda di perkotaan dan di perdesaan. Namun, jika dilihat berdasarkan kelompok umur, TPAK pemuda pada kelompok umur 16–18 tahun di perdesaan terlihat lebih tinggi dibanding di perkotaan. Di perdesaan, TPAK pemuda umur 16–18 tahun mencapai 32,21% sementara di perkotaan hanya 24,67% (Sari et al., 2020).

Untuk mengetahui gambaran pembangunan pemuda di Indonesia, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dijadikan tolok ukur pencapaian nasional untuk peningkatan kualitas pemuda. Nilai IPP Indonesia pada tahun 2015 hingga 2018 relatif meningkat, yaitu dari 48,67 menjadi 51,50. Meningkatnya nilai IPP ini mengindikasikan adanya kemajuan pembangunan pemuda yang terjadi dalam periode 2015–2018. Namun, capaian ini belum memuaskan karena masih jauh dari nilai maksimum 100 dan kenaikannya fluktuatif. Domain pendidikan merupakan domain dengan pencapaian yang terbaik dengan kenaikan indeks domain dari 63,33 pada 2015 menjadi 66,67 pada 2018. Domain kesehatan dan kesejahteraan juga secara umum meningkat, tetapi belum konsisten. Nilai indeks domainnya meningkat dari tahun 2015, 55,00 ke 57,50 pada tahun 2016, tetapi turun pada tahun 2017 (55,00), dan meningkat kembali ke 57,00 pada tahun 2018. Sementara itu, domain lapangan dan kesempatan kerja merupakan domain dengan nilai terendah yang hanya mencapai nilai 40,00 pada tahun 2018. Domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda mengalami stagnasi dalam periode 2015–2018; nilainya tetap berada pada angka 46,67. Begitu juga nilai domain gender dan diskriminasi yang tidak mengalami perubahan pada tahun 2017 dan 2018 pada angka 46,67 (Bappenas, 2020).

Domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda disusun berdasarkan tiga indikator: partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, partisipasi pemuda dalam organisasi, dan pemuda yang memberikan saran dalam rapat. Di antara ketiga indikator penyusun domain partisipasi dan kepemimpinan, indikator partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan memiliki capaian tertinggi dengan nilai 81,36 pada 2018. Capaian indikator partisipasi pemuda dalam organisasi masih tergolong rendah dengan angka nasional hanya sebesar 6,36 pada 2018. Rendahnya partisipasi dalam organisasi ini sejalan dengan rendahnya persentase pemuda yang memberikan saran dalam rapat, yaitu hanya 6,72 pada 2018 (Bappenas, 2020).

## Temuan Literatur

**Dalam literatur, kaum muda usia 18 tahun ke atas lebih sering disebut terlibat dalam aktivisme dibandingkan kaum muda usia anak.** Beberapa literatur khusus membahas isu keterlibatan aktivisme kaum muda dan menuliskan keterlibatan remaja dan pemuda pada rentang usia 18–30 tahun dalam aktivisme di Indonesia (Alam et al., 2019; Azis et al., 2020; Hersinta & Sofia, 2020; Saud et al., 2020; Warren et al., 2016).

**Meski demikian, terdapat kelompok usia yang lebih muda yang disebutkan dalam literatur.** Kusumasari (2013) dan Parker et al. (2018) menuliskan keterlibatan sipil kaum muda usia 13–19 tahun dan kaum muda usia pelajar Sekolah Menengah Atas/SMA. Selain itu, Nilan (2015) juga menemukan informasi adanya pelajar perempuan yang memulai aktivismenya pada usia 12 tahun.

**Menurut literatur, kaum muda dengan latar belakang pendidikan tinggi seperti pelajar, mahasiswa, dan dewasa muda lulusan perguruan tinggi lebih banyak terlibat dalam aktivisme dan tertarik untuk terlibat dalam isu ILH.** Beberapa literatur memang secara khusus mengamati keterlibatan sipil kelompok pelajar dan mahasiswa (Nilan, 2017; Nilan, 2018; Nilan, 2020; Karliani et al., 2019; Tanu & Parker, 2018; Saud & Margono, 2021). Dari survei yang ia lakukan, Saud et al. (2020) menambahkan bahwa kaum muda yang aktif dalam aktivisme merupakan kaum muda yang memiliki pendidikan tinggi, dan pencapaian pendidikan tinggi berasosiasi dengan keterlibatan sipil yang lebih kuat. Parker et al. (2018) menuliskan bahwa sebagian besar pelajar dan mahasiswa mengidentifikasi sendiri diri mereka sebagai pencinta lingkungan atau environmentalists.

**Status ekonomi menengah atas dan tinggal di perkotaan juga menandakan karakteristik kaum muda yang banyak terlibat dalam gerakan ILH.** Alam et al. (2019) menuliskan bahwa gerakan protes terkait isu LH dalam studinya dilakukan oleh kaum muda menengah atas yang berpendidikan. Nilan (2017) menyebutkan beberapa gerakan LH juga terkait dengan modal budaya dan ekonomi kaum muda. Modal-modal itu lalu mendukung mereka jadi peduli dan terlibat dalam isu ILH. Di negara berkembang seperti Indonesia, anak-anak dan kaum muda dari keluarga dengan status ekonomi yang lebih tinggi lebih mampu berpartisipasi dalam kegiatan karena kegiatan partisipasi juga membutuhkan biaya (Nilan, 2017).

**Tidak banyak literatur yang mengungkapkan perbedaan gender dalam gerakan kaum muda dalam isu ILH.** Namun, ada topik kepemimpinan laki-laki dan macho environmentalism yang diangkat oleh beberapa literatur. Nilan (2015) mengamati adanya dominasi kaum muda laki-laki seniman/musisi dan aktivis di salah satu komunitas LH dalam studinya. Dominasi kaum muda laki-laki di sini juga terlihat dari tampilan maskulin di media komunitas tersebut seperti *website*, *blogs*, dan media sosial komunitas mereka. Contoh ini sejalan dengan konsep *macho environmentalism*<sup>2</sup> yang muncul tahun 1990-an di Indonesia (Crosby, 2013). Dalam studi lain, Parker et al. (2018) menemukan bahwa meski perempuan muda banyak aktif di garis depan komunitas LH, organisasi LH masih lebih banyak dipimpin kaum muda laki-laki.

**Beberapa literatur mendiskusikan keterlibatan kaum muda yang terkait dengan asosiasi diri mereka dengan atau ketertarikan mereka pada sebuah identitas sosial.** Contohnya, Nilan (2017) melihat seniman muda yang mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang peduli LH lalu menggawangi komunitas LH. Dalam studi lain, Nilan (2018) menuliskan bahwa komunitas LH merupakan sarana mahasiswa untuk menciptakan identitas dengan sesama teman sebaya yang berpikiran sama. Nilan (2020) lalu menyoroti kaum muda yang menonjolkan identitas agama Islam dalam gerakan ILH. Misalnya, ada kelompok mahasiswa Muslim yang mengadvokasi aksi ILH sambil membangun aktivisme mereka di antara agama dan sains. Ada juga santri dan ulama di beberapa pesantren yang menginisiasi gerakan penghijauan atau green movement. Terakhir, Andini & Akhni (2021) membahas tentang aktivisme ILH di media sosial oleh kaum muda penggemar K-pop.

**Di luar karakteristik demografis, literatur juga membahas sejumlah karakteristik lain yang dimiliki kaum muda dalam aktivisme ILH.** Rata-rata, mereka adalah kaum muda yang memiliki kepedulian, kesadaran, rasa tanggung jawab terhadap LH, dan pengetahuan soal gerakan, serta terampil menggunakan media sosial (Alam, 2016; Nilan & Wibawanto, 2015; Parker et al., 2018).

<sup>2</sup> *Macho environmentalism* dalam Nilan (2015) mengacu pada penggambaran aktivis laki-laki musisi dan seniman dengan penampilan maskulin yang nampak dari pakaian, tato, gaya rambut dalam bermusik dan berkesenian.



## Temuan Utama

Mengikuti temuan literatur, studi mengelompokkan karakteristik kaum muda dalam aktivisme ILH yang ditemukan dalam diskusi dan wawancara ke dalam karakteristik demografis dan nondemografis.

### Karakteristik Demografis

#### Usia

Rentang usia kaum muda dalam gerakan ILH adalah kira-kira 17–30 tahun. Terminologi “muda” juga dimaknai beragam di tiap komunitas. Hal ini terlihat dari digunakannya istilah muda untuk menjelaskan usia mahasiswa, pegawai muda, atau usia anak sekolah, yang tidak selalu persis berada pada rentang usia pemuda sebagaimana diatur dalam undang-undang (UU). Contohnya, ada yang masih dianggap muda sampai usia 40 tahun. Ada juga yang menyebutkan bahwa partisipasi remaja muda mulai meningkat dalam aktivisme ILH.

#### Pendidikan dan Pekerjaan

Latar belakang pendidikan kaum muda dalam aktivisme ILH cukup beragam, baik secara tingkatan maupun disiplin. Kaum muda pelajar dan mahasiswa lebih dominan muncul sebagai kelompok yang aktif dalam gerakan ILH. Akan tetapi, yang tampak lebih mewarnai keterlibatan kaum muda dalam aktivisme ILH adalah kesempatan sosial, kemampuan, dan keterampilan mereka, yang bisa jadi terkait atau tidak dengan latar belakang pendidikannya. Hal ini termasuk punya lebih banyak akses informasi, aktif terlibat dalam kegiatan kelompok, dan menguasai serta fasih berbahasa Inggris.

Dari sisi pekerjaan, kaum muda yang terlibat dalam aktivisme ILH berasal dari beragam profesi, di antaranya petani, guru, desainer grafis, fotografer, seniman, musisi, jurnalis, serta pekerja organisasi lingkungan hidup nonpemerintah (Environmental Nongovernmental Organizations/NGO), pegawai perusahaan, dan pegawai pemerintah. Salah satu aktivis muda menyebutkan, sering kali kaum muda yang terlibat dalam aktivisme ILH adalah mereka yang pekerjaannya memang terkait langsung dengan isu ini,

atau yang memang punya kapasitas untuk berkontribusi pada kebijakan, seperti pegawai pemerintah. Ini juga menjelaskan kenapa afiliasi sebagai pekerja di ENGO sering muncul dalam diskusi.

### Status Sosial Ekonomi dan Lokasi Geografis

Secara umum, studi ini melihat variasi kaum muda dalam gerakan ILH berdasarkan letak geografis, lokasi asal baik perkotaan maupun perdesaan, serta kategori lain yang sering disebut “daerah”,<sup>3</sup> dan status ekonomi. Sejumlah peserta muda menyampaikan banyaknya kaum muda urban kelas menengah atas dalam aktivisme ILH. Mereka umumnya berpendidikan tinggi, punya pekerjaan baik, dan punya banyak kemudahan akses sosial ekonomi. Meski kaum muda dari permukiman kumuh di wilayah perkotaan terdampak isu ILH, keterlibatan mereka belum kuat. Hal ini diduga akibat keterbatasan akses dan kemampuan sosial ekonomi yang menyebabkan mereka punya prioritas lain.

Secara geografis, beberapa kaum muda berpendapat bahwa keterlibatan kaum muda dalam isu ILH saat ini masih terpusat di pulau Jawa dan Indonesia bagian barat. Baru beberapa komunitas yang menyampaikan adanya keterlibatan kaum muda di berbagai daerah di luar Jawa. Senada, beberapa kaum muda menduga ini dipengaruhi oleh infrastruktur dan akses yang masih timpang dan berpusat di Indonesia bagian barat. Secara khusus, kaum muda Jakarta dinilai punya akses yang lebih dekat ke pusat pemerintahan.

Di sisi lain, beberapa peserta menilai bahwa keterlibatan kaum muda dari Indonesia bagian timur dengan berbagai tantangan akses yang terbatas sudah mulai muncul, terutama dalam isu ILH yang terjadi di wilayahnya. Peserta studi ini juga menyebutkan adanya kaum muda daerah dan kaum muda adat yang melakukan aktivisme ILH. Secara khusus, keterlibatan mereka ada yang terkait dengan filosofi adatnya. Seorang peserta muda memberikan contoh aksi kolektif pemuda adat mempertahankan wilayah adat dari eksploitasi perusahaan karena adanya filosofi adat yang melihat alam sebagai bagian dari tubuh mereka. Tanah dipercaya sebagai daging, darah sebagai air, dan rambut sebagai akar, sehingga apabila lahan hilang, artinya tubuh mereka juga rusak.

<sup>3</sup> Karakteristik daerah muncul ketika membahas tentang konteks sosial kedaerahan. Pelabelan “daerah” mengacu pada identitas wilayah nonurban atau selain kota.



## Gender

Lain halnya dengan temuan literatur yang salah satunya menyoroti dominasi kaum muda laki-laki, dalam temuan utama dari diskusi dan wawancara ini, secara umum tidak bisa disimpulkan apa ada salah satu gender yang lebih terlibat dalam aktivisme ILH. Sejumlah peserta studi mengamati bahwa ada peningkatan keterlibatan kaum muda perempuan belakangan ini, termasuk dalam masa pandemi Covid-19. Beberapa menduga, keterlibatan kaum muda perempuan terkait dengan dampak isu ILH yang lebih dirasakan perempuan dan minat kaum muda perempuan yang besar untuk lebih tahu soal ILH, termasuk di antara kaum muda usia sekolah.

Secara khusus, diamati adanya peningkatan jumlah kaum muda perempuan yang bekerja di sektor kebijakan publik dan ENGO. Namun, posisi pimpinannya masih didominasi laki-laki. Selain itu, peserta studi mengamati bahwa ada lebih banyak kaum muda laki-laki dalam komunitas energi terbarukan dan kaum muda adat. Selain itu, dalam kegiatan lapangan, sejumlah peserta studi juga mengamati bahwa perempuan lebih banyak berperan sebagai pemikir atau konseptor, sedangkan laki-laki pelaksana.

## Identitas Kelompok

Dari FGD dan wawancara, ditemukan adanya identitas sosial berupa agama, kepercayaan, atau hobi dan minat yang terkait dengan keterlibatan aktif mereka dalam gerakan ILH. Misalnya, kaum muda Muslim (santri), kaum muda Katolik, dan kelompok kaum muda dari agama lainnya yang terlibat aktif dalam beberapa kegiatan aktivisme. Salah satu contohnya adalah aksi sipil dalam perlawanan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (geotermal) di Padarincang yang dilakukan oleh kaum muda yakni santri dan ulama dari salah satu pesantren. Salah satu pakar muda juga menyampaikan adanya kaitan nilai Islam dengan pelestarian LH yang membuat para santri aktif terlibat dalam aktivisme isu tersebut.

Identitas sebagai selebgram dan kelompok penggemar musik, sastra, dan idol juga muncul sebagai karakteristik kaum muda yang terlibat dalam aktivisme. Peserta muda dalam salah satu wawancara menyebutkan bahwa kaum muda di komunitasnya merupakan kumpulan anak band serta penggemar sastra dan genre musik yang sama. Kesamaan minat atau selera menyatukan mereka untuk bergerak dalam isu sosial dan LH.

Selain itu, identitas sebagai idol *fandom* juga muncul dalam wawancara, misalnya dengan BTS Army, yang banyak terlibat dalam berbagai aktivisme, baik dalam isu sosial maupun isu ILH.

Salah satu peserta mengaitkan BTS dengan sejarah musik hip-hop yang muncul dari komunitas masyarakat kulit hitam yang menyoroti isu di sekitar mereka. Ia melihat bahwa BTS juga menggunakan musik K-pop dan hip-hop untuk menyoroti isu-isu tertentu, dan menurutnya komunitas Army pun menyukai apa yang disuarakan oleh musik tersebut sehingga menggerakkan aktivisme mereka dalam isu sosial dan LH.

## Karakteristik Nondemografis

### *Kesadaran, Pengetahuan, dan Keterampilan*

Beberapa peserta dewasa berpendapat bahwa kaum muda yang terlibat dalam isu ILH adalah mereka yang memiliki akses informasi yang luas, keterampilan menggunakan media sosial dalam aktivisme, dan jaringan yang luas. Mereka menyebutkan bahwa kaum muda yang sudah punya kesadaran lebih terlibat dalam gerakan. Peserta dewasa dari pemerintah menyebutkan bahwa kaum muda yang terlibat dalam aktivisme ILH adalah mereka yang dapat memahami masalah, dampak, dan mencari solusi atas perubahan iklim. Sementara itu, ada anggapan dari peserta dewasa bahwa kaum muda baru sekadar ingin tahu tentang perubahan iklim dan belum memahami kompleksitas isu iklim.

Pendapat bahwa kaum muda yang terlibat dalam isu ILH berpengetahuan dan berkesadaran juga ditemukan di antara kaum muda. Ada kaum muda yang mengamati bahwa mereka yang bergerak dalam isu ini adalah kaum muda yang sadar, dan kesadaran itu diperoleh dari pengetahuan mereka. Di sisi lain, ada kaum muda yang menyebutkan bahwa kaum muda yang terlibat di ILH justru tidak berlatar belakang pengetahuan dan pengalaman di bidang ILH.

### *Pengalaman Terdampak*

Ada juga kaum muda yang mengamati bahwa rekan sesama kaum muda yang aktif dalam gerakan adalah mereka yang memiliki pengalaman terdampak persoalan ILH, seperti bencana. Hal ini juga terkait dengan karakteristik kaum muda di daerah yang bergerak dalam isu LH karena terdampak langsung.

## 3.2 Topik Iklim dan Lingkungan Hidup yang Penting untuk Kaum Muda

### Temuan Literatur

**Gejala ILH yang menjadi perhatian kaum muda mencakup persoalan perubahan iklim dan pemanasan global.** Nilan (2017) mewawancarai 40 mahasiswa di dua universitas negeri di Indonesia dalam studinya dan menemukan bahwa persepsi tentang kondisi alam yang memburuk dan dampak pemanasan global adalah isu LH yang menjadi perhatian kalangan kaum muda.

**Kaum muda menganggap penting tindakan yang mengakibatkan gejala ILH.** Alam (2020), menuliskan bahwa aktivis muda peduli pada isu deforestasi dan degradasi hutan. Isu deforestasi ini erat kaitannya dengan penebangan liar dan alih fungsi lahan hutan yang berakibat pada hilangnya kawasan hutan (Nilan, 2017), dan komersialisasi hutan kota (Alam, 2016) yang menjadi bagian dari fokus gerakan kaum muda di beberapa wilayah di Indonesia. Secara khusus, Amri et al. (2021) menemukan bahwa kaum muda di Kalimantan Barat dan Riau menilai kerusakan hutan sebagai salah satu isu paling penting. Selain itu, isu sampah dianggap paling penting oleh pelajar SMA di wilayah urban Surabaya dan Yogyakarta (Parker et al., 2018) dan kaum muda di Gorontalo dan Riau (Amri et al., 2021). Persoalan sampah dan limbah sering muncul sebagai permasalahan yang personal karena dekat dengan pengalaman kaum muda (Nilan, 2017). Lebih lanjut, Nilan (2020) juga menemukan kepedulian kaum muda Muslim pada isu sampah dan limbah sebagai bagian dari ajaran agama mereka.

**Kaum muda memperhatikan faktor-faktor pendorong tindakan perusakan ILH, yang mencakup kebijakan, industri, dan kapitalisme yang dianggap merusak lingkungan dalam rangka mencari laba.** Nilan (2017) menunjukkan bahwa aktivis LH di Indonesia memiliki perhatian pada masalah pembangunan yang tidak dikelola dengan baik, eksploitasi sumber daya alam, serta dampak buruk kebijakan pembangunan dan kegiatan industri pada LH dan masyarakat. Permintaan yang tinggi terhadap kayu dan hasil hutan lainnya kemudian mendorong penebangan liar dan makin banyaknya lahan yang dibuka untuk kegiatan pertambangan atau pengembangan perkebunan kelapa sawit (Nilan, 2017). Alam (2016) menemukan bahwa kaum muda berpendapat bahwa kapitalisme telah mendorong eksploitasi hutan demi menghasilkan keuntungan.

**Perhatian berikutnya adalah dampak tindakan pada ILH termasuk polusi, pencemaran air, dan bencana alam.** Parker et al. (2018) menemukan bahwa 52% pelajar dalam penelitiannya mengidentifikasi polusi sebagai masalah lingkungan yang paling penting di tingkat nasional. Alam (2020) menemukan polusi udara perkotaan sebagai pendorong utama aktivisme LH kaum muda di Yogyakarta. Selain polusi, Nilan dan Wibawanto (2015) juga menemukan adanya komunitas kaum muda yang terlibat dalam isu perlindungan mata air dari pencemaran. Masalah pencemaran sungai juga menjadi perhatian kaum muda di Sulawesi Tengah dan Kalimantan Barat (Yayasan Partisipasi Muda, 2021). Pegiat lingkungan Muslim berpendapat bahwa sebagian besar bencana di bumi disebabkan oleh tindakan manusia dan mereka menilai isu ini penting untuk dikenali dan dicegah (Nilan, 2020). Kurniawan et al. (2021) melihat adanya partisipasi kaum muda dalam penanggulangan bencana banjir, terutama mereka yang berasal dari daerah rawan banjir. Kaum muda juga melakukan sejumlah aktivisme pengurangan risiko dan mitigasi kerusakan lingkungan, seperti konservasi keanekaragaman hayati darat dan laut, dan pengembangan komunitas untuk penyelamatan alam (Nilan & Wibawanto, 2015; Nilan, 2017; Hersinta & Sofia, 2020).

**Meski belum banyak muncul, kaum muda mulai memperhatikan dampak krisis ILH pada warga.** Alam et al. (2019) menemukan bahwa aktivis muda LH sudah mulai mendiskusikan topik keadilan sosial dan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia dalam komunitasnya. Akan tetapi, belum jelas sejauh mana topik itu dianggap penting oleh kaum muda. Literatur lain menemukan bahwa pembangunan yang kemudian menimbulkan degradasi lingkungan dapat mengancam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat (Alam, 2020) dan kesehatan masyarakat akibat pencemaran lingkungan, asap kebakaran hutan, dan terkontaminasinya sumber pangan dari laut (Hersinta & Sofia, 2020; Nilan, 2018).

# Temuan Utama

Sesuai dengan temuan literatur, di bawah ini adalah temuan dari diskusi dan wawancara berdasarkan lima kategori topik ILH yang menjadi kepedulian kaum muda.

## Gejala ILH

**Beberapa peserta muda menyebutkan pentingnya mengatasi perubahan iklim, kenaikan air laut, pemanasan global yang menyebabkan kebakaran hutan, degradasi lahan, dan abrasi pantai.** Senada dengan pendapat peserta muda, beberapa peserta dewasa mengelaborasi keterbatasan perhatian kaum muda pada ILH yang belum menyeluruh. Menurut mereka, pemahaman soal gejala ILH masih terbatas di kalangan kaum muda urban dan belum banyak dibicarakan di kalangan nonurban. Perhatian pada gejala ILH dinilai sebagai akibat dari paparan gerakan kaum muda global, contohnya yang diinisiasi Greta Thunberg, dan munculnya organisasi internasional terkait.

## Tindakan Perusakan

**Pengelolaan sampah dan limbah industri yang tidak memadai dianggap sebagai isu penting oleh sebagian besar peserta muda.** Sebagai akibatnya, sampah dan limbah dianggap banyak berkontribusi pada pencemaran lingkungan, baik di darat maupun laut. Besarnya jumlah sampah juga dinilai memiliki kontribusi besar terhadap persoalan ILH, terlebih dengan adanya peningkatan sampah di masa pandemi. Topik sampah plastik lebih sering muncul dibandingkan isu limbah industri. Kaum muda cenderung fokus pada isu yang dirasa dekat dengan mereka, seperti sampah plastik yang sering ditemui dalam keseharian. Beberapa peserta muda menilai kontribusi sampah plastik di Indonesia terhadap bencana cukup signifikan, sedangkan peserta pakar dewasa berpendapat bahwa kontribusi sampah plastik sebagai penyebab perubahan iklim tidak mencapai 2%. Saat membicarakan limbah industri, kaum muda menyebut pencemaran air dan udara oleh industri yang banyak diangkat di media dan menghubungkannya dengan konflik di masyarakat setempat.

**Deforestasi, degradasi lahan, dan ekspansi lahan untuk produksi juga muncul di dalam studi.** Kaum muda nonurban dan yang wilayahnya terdampak, seperti kaum muda adat dan mereka yang tinggal daerah dengan wilayah hutan seperti di Kalimantan, Riau, Jambi, dan Papua, merupakan kelompok yang melihat ketiga topik tersebut paling penting.

Deforestasi disebut berkontribusi pada bencana alam dan hilangnya ruang hidup masyarakat, hilangnya lahan hutan adat dan lahan resapan air, degradasi lahan, dan bencana longsor serta banjir. Deforestasi juga dianggap memiliki keterkaitan erat dengan ekspansi lahan produksi perkebunan sawit.

## Faktor-Faktor Pendorong Perusakan

**Adanya kebijakan percepatan pembangunan dan industrialisasi, oligarki, dan korupsi di sektor pertambangan dinilai kaum muda sebagai bagian dari ekonomi politik yang melanggengkan tindakan perusakan lingkungan.** Isu UU Omnibus (UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja) dan Perubahan UU Minerba (UU No 3/2020 tentang Perubahan Atas UU No 4/2009 tentang Pertambangan dan Batu Bara), misalnya, dianggap peserta muda sebagai kebijakan nasional yang berkontribusi pada eksploitasi LH. Kebijakan Bali Baru juga salah satu contoh yang dianggap berdampak pada perampasan lahan masyarakat dan kerusakan alam akibat risiko peningkatan sampah dari pembangunan pariwisata. Seorang peserta muda melihat prioritas pemerintah dalam energi terbarukan melalui pertambangan nikel juga dapat berakibat pada deforestasi dan pencemaran lingkungan. Salah satu kaum muda menyebutkan bahwa sistem perekonomian Indonesia masih bergantung pada brown economy sehingga perekonomian dan pembangunan masih sangat bergantung pada energi kotor.

**Lebih lanjut, terdapat relasi antara industri dengan kehidupan masyarakat dan individu yang kemudian berkontribusi pada krisis ILH.** Pertama, adanya permintaan industri akan suatu produk yang berasal dari alam dan keterbatasan sumber penghidupan masyarakat. Seorang peserta muda menyampaikan bahwa masyarakat di wilayahnya menggali pasir untuk dijual sebagai bahan bangunan sehingga berakibat pada abrasi pantai. Padahal, masyarakat perlu menjual pasir agar dapat bertahan hidup. Narasi publik lalu menyalahkan masyarakat sebagai penyebab kerusakan LH, tanpa menyediakan alternatif pekerjaan. Kedua, hasil industri yang memengaruhi isu gaya hidup dan model ekonomi yang bergantung pada konsumerisme (misalnya *fast fashion*). Peserta muda lainnya menilai, ada ketimpangan dalam melihat kontribusi industri versus masyarakat dalam kerusakan lingkungan. Masyarakat sebagai konsumen sering diminta bertanggung jawab atas krisis ILH, padahal menurut beberapa peserta muda, perusahaan besar memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap krisis tersebut.

## Dampak pada ILH dan Mitigasinya

Kepedulian kaum muda muncul karena dampak krisis ILH yang makin dirasakan langsung, seperti makin hilangnya wilayah hutan, bencana alam dan polusi, serta beberapa wilayah daratan yang mulai tenggelam. Isu bencana alam yang banyak diberitakan oleh media mendorong munculnya kesadaran tentang dampak krisis ILH. Peserta muda dari Jawa Barat dan Kalimantan menyampaikan bahwa persoalan bencana, terutama banjir, menjadi topik yang dibahas dalam komunitasnya terutama karena mereka melihat dan mengalami sendiri bencana tersebut.

**Isu polusi atau pencemaran udara, pencemaran air, dan hilangnya varietas padi juga muncul sebagai dampak perusakan lingkungan dalam beberapa diskusi dengan kaum muda.** Isu polusi seperti pencemaran udara, air, maupun tanah yang berdampak langsung ke masyarakat lebih banyak dikaitkan dengan buruknya pengelolaan sampah rumah tangga, limbah industri, sistem transportasi, dan proyek pembangunan. Sementara itu, hilangnya varietas padi disebutkan sebagai dampak dari alih fungsi lahan pertanian menjadi pertambangan.

**Pencegahan dan pengurangan risiko dampak ILH juga menjadi perhatian kaum muda.** Topik terkait gaya hidup berkelanjutan dan ekonomi sirkular diminati oleh kaum muda urban. Topik tersebut dinilai dapat berkontribusi pada pengurangan sampah plastik, serta sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dari penjualan produk yang dihasilkan. Maraknya topik ekonomi sirkular juga dipengaruhi oleh tren kewirausahaan muda dan pertumbuhan perusahaan rintisan. Meski topik ini digemari sebagai upaya penyadaran masyarakat soal isu LH, seorang peserta muda menilai ada risiko produk *sustainable* hanya bisa diakses oleh kelompok menengah urban.

**Mitigasi perubahan iklim seperti isu restorasi bakau dan penggunaan energi terbarukan mulai diadvokasi oleh beberapa komunitas kaum muda di wilayah tertentu.** Restorasi bakau dinilai penting untuk mencegah bencana ekologis, sedangkan energi terbarukan merujuk pada upaya perubahan perilaku atau peralihan ke energi hijau (nonbahan bakar fosil). Meski sudah mulai dianggap penting, isu energi yang merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca nomor dua terbesar di Indonesia belum menjadi fokus gerakan kaum muda. Pembahasannya dinilai peserta muda masih terbatas pada kelompok aktivis dan ENGO dan perlu diperluas ke topik energi terbarukan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## Dampak pada Warga dan Mitigasinya

**Masyarakat rentan dan prasejahtera dinilai sebagai kelompok yang paling terdampak kerusakan LH.** Dampak eksploitasi industri dan pertambangan terhadap kehidupan masyarakat dinilai kaum muda sebagai isu penting di beberapa wilayah, terutama terkait perampasan dan konflik lahan, migrasi paksa, hilangnya sumber penghidupan dan identitas budaya, dan munculnya masalah kesehatan akibat pencemaran udara dan air tanah. Kaum muda juga mengamati bahwa hilangnya lahan pertanian dan hutan menimbulkan krisis pangan, terutama bagi masyarakat yang bersumber pangan langsung dari alam. Contohnya adalah krisis pangan yang terjadi di Papua akibat perkebunan sawit dan perkebunan kertas yang menyebabkan berkurangnya lahan masyarakat.

**Gerakan global, di antaranya soal keadilan iklim, menginspirasi kesadaran untuk mengintegrasikan pendekatan inklusi dalam gerakan ILH.** Isu masyarakat adat secara khusus dianggap penting karena masyarakat adat merupakan salah satu kelompok yang paling rentan atau terdampak dalam permasalahan ILH. Kaum muda beranggapan bahwa perampasan lahan dan wilayah adat akan berdampak pada hilangnya berbagai macam pengetahuan adat. Masyarakat adat dapat dirugikan karena mereka adalah kelompok yang menjaga hutan dan sungai, dan hidupnya bergantung pada alam. Akibat perampasan lahan, kaum muda adat dapat kehilangan tempat ritual dan melupakan praktik-praktik ritual adat mereka. Di sisi lain, praktik pembakaran lahan yang merupakan tradisi turun-temurun salah satu masyarakat adat untuk membuka lahan baru juga dianggap sebagai penyebab kerusakan lingkungan. Meski sudah ada peraturan pembukaan lahan, peraturan tersebut belum tersosialisasi dengan baik ke masyarakat adat. Kaum muda juga memberi perhatian pada isu kesetaraan gender dalam ILH, terutama karena perempuan dan kelompok rentan lainnya, seperti kelompok penyandang disabilitas, terdampak perubahan iklim paling berat, tetapi sering tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

## Boks 2. Masalah Sosial Selain ILH yang Penting bagi Kaum Muda

Studi ini menemukan sejumlah isu yang penting di mata kaum muda, yang sebagiannya juga terhubung dengan isu ILH.

### *Partisipasi Politik, Demokrasi, dan Korupsi*

Beberapa literatur membahas keterlibatan sipil kaum muda dalam isu partisipasi politik dan demokrasi (Kusumasari, 2013; Saud et al. 2020; Andini dan Akhni, 2021; Hasan, 2012), korupsi (Baharuddin, 2021), serta toleransi dan diskriminasi (Meyers, 2017; Ridwan & Wu, 2018). Isu partisipasi politik dan demokrasi dianggap penting karena kaum muda sebagai warga negara perlu punya suara dalam kebijakan. Sementara itu, isu korupsi muncul karena banyak dampak korupsi yang dapat menghambat kehidupan sosial, ekonomi, dan politik kaum muda. Peserta muda menyampaikan keterlibatan mereka dalam "reformasi dikorupsi",<sup>4</sup> yakni aksi protes pelemahan KPK yang dinilai kaum muda berisiko melanggengkan persoalan industri ekstraktif yang banyak terkait dengan korupsi izin pertambangan, konsesi sawit, dan kasus lain terkait ILH.

### *Toleransi, Nondiskriminasi, dan Kesetaraan Gender*

Meyers (2017) menemukan adanya penyisihan yang dialami kaum muda dengan disabilitas dalam keterlibatan sipil kaum muda, sedangkan Ridwan & Wu (2018) membahas pentingnya isu kaum muda minoritas seksual dan gender yang menghadapi diskriminasi dan kekerasan di Indonesia. Peserta muda juga menyampaikan kepedulian mereka pada masalah sosial yang sensitif dan dihindari oleh pemangku kepentingan, seperti isu penyintas 65, minoritas gender, dan keberagaman agama dan penghayat kepercayaan. Isu toleransi dan kesetaraan gender juga merupakan bagian dari isu yang diperjuangkan oleh *fanbase* K-pop dengan terlibat dalam aksi solidaritas Black Lives Movement dan Women's March Indonesia.

### *Kewirausahaan dan Pemberdayaan Kaum Muda*

Isu kewirausahaan dan pemberdayaan kaum muda di sektor ekonomi muncul dalam diskusi keterlibatan kaum muda. Dalam konsultasi pakar, peserta menyampaikan bahwa pentingnya isu kewirausahaan tidak terlepas dari narasi pemerintah dan organisasi pembangunan yang mendorong kaum muda untuk bergerak dalam isu tersebut.

### *Kesehatan Reproduksi*

Beberapa kaum muda juga ada yang menyebutkan isu hak dan kesehatan seksual dan reproduksi (*sexual and reproductive health rights/SRHR*) sebagai isu yang dianggap penting karena stigma dan tabu yang ada, dan dampak merugikan yang banyak diderita kaum muda sebagai akibatnya.

<sup>4</sup> Reformasi dikorupsi merupakan aksi protes terhadap UU No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### 3.3 Bentuk Keterlibatan Sipil Kaum Muda dalam Isu Iklim dan Lingkungan Hidup

## Temuan Literatur

Literatur banyak membahas aktivisme kaum muda untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran sesama kaum muda itu sendiri. Kegiatannya antara lain berupa kampanye tentang sampah plastik, gaya hidup berkelanjutan, dan perlindungan ekosistem hewan. Selain kampanye, upaya peningkatan kesadaran juga dilakukan melalui lokakarya, pelatihan, dan seminar, seperti pelatihan tentang konservasi hutan (Nilan & Wibawanto, 2015). Kegiatan juga dilakukan melalui sekolah dan universitas, seperti kegiatan kompetisi debat tentang isu ILH. Sebagian kaum muda lainnya bergabung ke kelompok mahasiswa dan siswa pecinta alam (Crosby 2013; Nilan & Wibawanto, 2015).

Di samping peningkatan kesadaran dan kapasitas yang diinisiasi oleh kaum muda, terdapat pula kegiatan yang diinisiasi oleh orang dewasa. Kegiatan penguatan kapasitas bisa dilakukan oleh pemerintah dan ENGO, seperti kegiatan lokakarya, seminar, dan forum-forum yang melibatkan kaum muda. Terdapat pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kepedulian kaum muda dalam memitigasi situasi perubahan iklim, seperti kegiatan siaga kebencanaan (Kurniawan et al., 2021). Ada juga pelatihan yang mengikutsertakan kaum muda dalam penyusunan aksi dan rencana aktivisme dalam isu ILH nirkekerasan (Alam et al., 2019). Lainnya termasuk pertemuan koordinasi bersama kaum muda, FGD, dan konsultasi atau debat publik (Bassar et al., 2018).

Ada juga upaya pemberdayaan dan pendampingan masyarakat, seperti pengolahan dan penjualan produk sampah plastik, dan produk-produk buatan sendiri atau *do it yourself* (DIY). Contoh lainnya berupa aktivitas daur ulang sampah tidak terurai yang kemudian dijual melalui internet (Nilan & Wibawanto, 2015). Selain itu, ada pengumpulan donasi penanaman pohon bakau yang dilakukan oleh kaum muda penggemar K-pop dan inovasi sosial kaum muda dalam gerakan konservasi LH (Andini & Akhni, 2021). Aktivitas yang dilakukan meliputi praktik mengumpulkan sampah di wilayah-wilayah hutan, preservasi spesies hewan tertentu, berkemah, mendaki gunung, arung jeram, serta aktivitas lainnya untuk mencegah kerusakan hutan (Nilan, 2018).

Bentuk lain adalah kampanye sosial atau aksi untuk mendorong perubahan. Beragam cara digunakan dalam aktivisme isu LH oleh kaum muda, seperti aktivisme melalui media sosial, aktivisme secara langsung atau turun ke jalan, serta aktivisme yang menggunakan dua cara tersebut secara bersamaan. Kaum muda sebagai pengguna aktif media sosial menjadikannya salah satu medium untuk mendiskusikan isu ILH di Indonesia, khususnya di Facebook, Twitter, Instagram, dan Whatsapp (Alam, 2016; Andini dan Akhni 2021; Hersinta & Sofia, 2020; Nilan & Wibawanto, 2015; Saud & Margono, 2021; Sugihartati, 2020; Warren et al., 2016; Yue et al., 2019).

Kajian literatur belum menemukan banyak kegiatan advokasi kebijakan. Dari yang ditemukan, ada kegiatan advokasi kebijakan melalui petisi, yaitu kebijakan alih fungsi hutan kota dan kebijakan perlindungan hewan (Alam, 2020; Hersinta & Sofia, 2020). Ada juga satu aksi protes yang dilakukan kaum muda lewat pementasan teatral di jalan dan pemasangan atribut berisikan slogan (Alam, 2016; Alam et al., 2019).

Demikian juga dengan kegiatan penelitian. Hanya tiga literatur yang ditemukan membahas tentang penelitian oleh kaum muda. Pembahasan yang ditemukan adalah tentang dampak industri pertambangan (Alam, 2019), keanekaragaman spesies hewan (Nilan, 2015), dan peluang kaum muda dalam kolaborasi penelitian dalam isu lingkungan hidup (Warren et al., 2010).

# Temuan Utama

Sesuai dengan temuan literatur, di bawah ini adalah temuan dari diskusi dan wawancara berdasarkan lima kategori bentuk keterlibatan sipil kaum muda dalam ILH.

## Peningkatan kapasitas yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan

Dalam peningkatan kapasitas, terdapat kategori yang ditemukan, yaitu kapasitas literasi isu ILH serta kapasitas advokasi dan berjejaring.

### Kapasitas Literasi Isu ILH

Kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas yang menasar kaum muda melibatkan kelompok demografi yang cukup beragam dan kemasannya tergantung kelompok sasaran. Ada pelatihan yang menasar anak-anak sekolah dasar; program bagi yang lebih muda selalu dikemas dengan lebih kreatif, seperti melalui cerita atau permainan. Sementara itu, yang menasar masyarakat umumnya melibatkan masyarakat yang rentan atau terdampak, seperti masyarakat adat dan masyarakat pesisir.

Kegiatan pelatihan dan penguatan kapasitas terdiri dari berbagai topik literasi iklim dan keterampilan terkait mitigasi dampak krisis ILH. Untuk literasi iklim, terdapat topik-topik dampak krisis iklim, bencana dan mitigasinya, gaya hidup berkelanjutan, pekerjaan hijau (*green jobs*), energi terbarukan, dan ketahanan pangan. Untuk pengembangan keterampilan, contohnya adalah pelatihan mengolah sampah dan berkebun organik. Salah satu organisasi yang berfokus pada kaum muda urban, sebagai contoh, memiliki program kursus singkat bagi kaum muda untuk memahami isu LH dari berbagai sudut pandang. Kursus tersebut mengajarkan, antara lain, ekonomi politik, sistem agraria, relasi kuasa dan gender, dan kemiskinan struktural. Kursus ini dilaksanakan beberapa hari dengan metode penyampaian materi secara tatap muka dan praktik langsung di lapangan. Contoh lain, sebuah organisasi kaum muda yang bergerak di bidang pertanian memiliki program Turba Santrium yang menggabungkan kegiatan belajar agama dengan kegiatan pertanian. Program ini diperuntukkan bagi kaum muda dari berbagai agama. Di dalam program ini, kaum muda belajar bertani dan berkebun dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan mereka.

Selain pelatihan, terdapat diskusi publik dan seminar untuk berbagi informasi dan peningkatan pengetahuan. Kegiatan ini sebagian besar membahas perubahan iklim, gaya hidup hijau, dan pekerjaan hijau.

### Kapasitas Advokasi dan Berjejaring

Selain topik ILH, kegiatan peningkatan kapasitas juga menasar keterampilan *how-to*. Studi menemukan adanya organisasi yang fokus melatih kapasitas kaum muda di bidang kebijakan publik. Ada juga pembentukan forum atau komunitas kaum muda untuk berbagi dan meningkatkan kapasitas kaum muda dalam penyusunan kebijakan.

Selain itu, organisasi kaum muda juga menyediakan wadah berjejaring agar kaum muda dapat berinteraksi satu sama lain. Ada sarana yang dikembangkan khusus bagi kaum muda perkotaan dan perdesaan untuk saling berinteraksi, belajar, dan berdiskusi. Peserta dari salah satu organisasi kaum muda menyampaikan soal forum Kaum Muda Tanah Air (KATA) sebagai wadah bagi kaum muda dari seluruh tanah air untuk belajar mengenai kebijakan dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan kebijakan. Salah satu kegiatan dalam forum ini adalah kongres kaum muda, yang dimulai pada tahun 2021. Forum ini diharapkan dapat menghasilkan kertas posisi yang diterbitkan secara berkala untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah soal ILH.

## Advokasi kebijakan yang bertujuan untuk mengubah, memunculkan, atau meniadakan kebijakan terkait ILH

Bentuk keterlibatan ini umumnya dilakukan melalui dialog dengan pembuat kebijakan di pemerintahan dan parlemen, baik melalui jalur formal seperti audiensi maupun jalur nonformal. Kebijakan yang disasar bisa ada di tingkat nasional, daerah, atau desa. Beberapa contoh target advokasi misalnya kebijakan moratorium sawit, regulasi dampak lingkungan bagi sektor bisnis, restorasi wilayah pesisir, dan anggaran penghijauan desa. Topik lainnya termasuk energi terbarukan, pemotongan pajak bagi wirausaha hijau, dan kebijakan kota berkelanjutan. Ada juga advokasi bagi perlindungan masyarakat adat, misalnya izin pembukaan lahan adat dan kesejahteraan masyarakat adat.



Kaum muda melakukan advokasi kepada berbagai pemangku kepentingan, salah satunya dengan membentuk forum komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan swasta. Informasi ini disebutkan oleh beberapa peserta muda yang tergabung dalam Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) yang merupakan sebuah inisiatif untuk membangun forum dialog multipemangku kepentingan di tingkat kabupaten.

Beberapa kaum muda juga beradvokasi melalui penyampaian usulan tertulis (misalnya *position paper*), mengirimkan gagasan lewat surat elektronik, mengisi petisi daring, dan berpendapat di media sosial.

## Kampanye yang bertujuan mengubah pendapat dan perilaku

### Kampanye Sosial

Kaum muda melakukan aksi ILH lewat media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Tiktok, atau *podcast* dan radio untuk menyampaikan pesan mereka. Pesan dari kampanye didominasi oleh topik mitigasi krisis iklim (seperti pentingnya upaya konservasi lingkungan dan penguatan pangan lokal) serta gaya hidup berkelanjutan (seperti diet kantong plastik dan mengurangi konsumsi). Sebagian peserta juga menyampaikan adanya beberapa kampanye sosial yang bertujuan untuk mempromosikan gerakan yang sedang dibangun seperti Teens Go Green (oleh kaum muda urban) dan Gerakan Pulang Kampung (oleh kaum muda adat). Sebagian kaum muda lainnya juga melakukan kampanye publik tentang konflik LH yang sedang terjadi, misalnya pada kasus Wadas dan Kinipan.

Aksi kampanye juga dilakukan sebagian kaum muda melalui acara kesenian seperti festival, konser, pameran foto, atau penayangan film. Satu peserta menyebutkan pernah menyelenggarakan konser dan festival untuk menyadarkan publik mengenai bahaya tambang batu bara. Beberapa peserta muda menyelenggarakan penayangan film *Diam dan Dengarkan*, sebuah film dokumenter yang bercerita tentang berbagai persoalan ILH.

### Aksi Protes

Aksi protes umumnya dilakukan melalui demonstrasi, orasi, aksi damai/nirkekerasan, atau penandatanganan petisi penolakan. Salah satu aksi protes yang sering disebutkan adalah demonstrasi menolak UU Omnibus (UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja) dan UU KPK (UU No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Selain itu, terdapat pula aksi untuk menuntut penutupan perusahaan kertas dan aksi turun langsung untuk menghambat proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dinilai berdampak pada kerusakan LH dan merugikan masyarakat. Peserta muda dari Papua menyebutkan aksi penolakan pembangunan perusahaan di wilayah adat dilakukan melalui tanda tangan penolakan. Ada pula kaum muda daerah yang melakukan demonstrasi untuk menolak kebijakan ekspor sampah plastik oleh pemerintah daerah dan ada pula yang mengirimkan petisi ke perusahaan *e-commerce* agar lebih bijak dalam mengelola sampah plastik. Beberapa kaum muda juga melakukan aksi protes untuk membela kepentingan masyarakat adat seperti pada kasus Kinipan<sup>5</sup> dan aksi mogok sekolah di depan kantor kementerian untuk memperjuangkan hak atas hutan adat dan kesejahteraan masyarakat adat.

Dalam aksi protes, sebagian peserta menyebutkan kaum muda memilih pendekatan nirkekerasan atau aksi damai. Misalnya, aksi pawai iklim (*climate strike*) atau aksi simpatik di tempat-tempat tertentu, misalnya aksi duduk di tengah jalan dengan membawa poster. Kegiatan lain di antaranya *long march*, memblokir jalan dan membuat kegaduhan dengan peralatan rumah tangga, atau melakukan tarian dan ritual budaya seperti tolak bala. Sebagai catatan, seorang peserta muda berargumen bahwa aksi nirkekerasan sulit diterapkan, karena sejarah demonstrasi di Indonesia identik dengan perlawanan dan kekerasan. Ia berpendapat bahwa ini disebabkan oleh pengalaman masyarakat sipil yang mengalami represi selama lebih dari 30 tahun (merujuk pada Orde Baru).

<sup>5</sup> Kasus Kinipan merujuk pada persoalan pembukaan lahan hutan di wilayah desa Kinipan oleh salah satu perusahaan untuk perkebunan sawit yang kemudian diprotes oleh masyarakat setempat karena dinilai mengancam wilayah hutan adat dan kehidupan masyarakat adat Laman Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.



## Riset yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang ILH secara saintifik

### Bentuk keterlibatan kaum muda dalam riset masih terbatas.

Sebagian riset yang ditemukan adalah untuk memahami persepsi kaum muda. Terdapat peserta muda yang melakukan studi untuk keperluan advokasi kebijakan dengan menganalisis kebijakan moratorium sawit. Terdapat pula kaum muda usia sekolah yang melakukan pengumpulan data untuk diberikan kepada pemangku kepentingan, misalnya mengukur curah hujan untuk diberikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kaum muda yang mendampingi masyarakat menyebutkan ia dan komunitasnya sedang melakukan pendataan terhadap varietas padi yang hilang. Selebihnya, riset yang dilakukan kaum muda adalah berupa skripsi atau karya akhir sebagai syarat kelulusan, misalnya, salah satu peserta muda mengatakan banyak mahasiswa di Kalimantan dan Sumatera yang meneliti tentang kebakaran hutan di dalam skripsi mereka.

## Pendampingan masyarakat dan inovasi sosial yang bertujuan untuk membantu komunitas atau kelompok melaksanakan pendekatan guna mengatasi masalah ILH

Studi menemukan bentuk-bentuk pendampingan masyarakat yang memadukan inovasi sosial dengan pemberdayaan ekonomi. Satu komunitas kaum muda yang berbentuk perusahaan sosial (*social enterprise*) mendampingi pemulung untuk mengumpulkan sampah plastik dan membantu menjualnya ke perusahaan. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagikan sebagian kepada para pemulung. Dalam LTKL, terdapat program ekonomi lestari yang mendorong masyarakat untuk membuat produk yang berkelanjutan, kegiatan penanaman kembali bekas lahan sawit oleh kaum muda adat, serta inovasi pelestarian hewan endemik. Ada juga program bank sampah dan kegiatan penanaman pohon, khususnya pohon bakau yang merupakan kegiatan pelestarian lingkungan yang sering disebutkan beberapa kaum muda. Kaum muda ASN mengembangkan program bank sampah desa menjadi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Bentuk lain adalah pendampingan yang memadukan inovasi sosial untuk keberlanjutan sumber daya. Komunitas kaum muda Papua yang mendampingi ibu rumah tangga di desa membuat tepung sagu, makanan pokok mereka. Sejumlah kelompok kaum muda juga menginisiasi kebun kolektif dan mendampingi masyarakat untuk berkebun atau bertani organik. Terdapat kaum muda yang bergerak dalam isu energi dan melakukan pemasangan panel surya di berbagai wilayah, termasuk wilayah adat. Di samping itu, kaum muda juga mendorong tumbuhnya perusahaan rintisan hijau melalui program inkubasi *start-up* yang kegiatan utamanya adalah memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas kepada peserta program.

Selanjutnya, terdapat bentuk pendampingan kasus, baik dalam proses litigasi maupun advokasi. Sebagai contoh, satu organisasi kaum muda mendampingi masyarakat pulau untuk membuat peta wilayah masyarakat yang kemudian disampaikan ke pemerintah daerah sebagai respons atas rencana kebijakan ekstraktif di wilayah mereka. Kelompok kaum muda lainnya mendampingi masyarakat terdampak di Batang dalam memprotes pembangunan PLTU di wilayah mereka dan mendampingi masyarakat adat dalam pemetaan wilayah adat dan menyelesaikan kasus perampasan lahan.



# Jalan Pelibatan dan Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu Iklim dan Lingkungan Hidup di Indonesia

Studi ini mengamati tiga jalan pelibatan dan keterlibatan kaum muda, yaitu 1) partisipasi kaum muda melalui organisasi, komunitas, atau gerakan yang diinisiasi oleh kaum muda sendiri, 2) partisipasi kaum muda melalui organisasi masyarakat sipil (OMS) dan ENGO, dan 3) partisipasi kaum muda melalui lembaga pemerintah atau swasta. Dari ketiganya, jalan partisipasi yang diinisiasi kaum muda dinilai makin bertambah meski masih cukup banyak partisipasi kaum muda yang muncul melalui OMS atau ENGO. Ada juga beberapa partisipasi kaum muda dalam aksi sipil ILH yang difasilitasi oleh pemerintah, tetapi belum banyak yang berkelanjutan karena keterlibatan lebih bersifat sangat khusus untuk tujuan tertentu yang singkat (*ad hoc*) atau untuk satu kegiatan saja (*one-off*).

## 4.1 Keterlibatan Kaum Muda Melalui Inisiasi Kaum Muda

### Temuan Literatur

**Keterlibatan kaum muda tidak lagi hanya muncul melalui lembaga pendidikan formal.** Dalam isu LH, mulai banyak keterlibatan dari jalur komunitas yang diinisiasi kaum muda di luar lembaga pendidikan seiring penurunan gerakan mahasiswa yang berbasis kampus (Weiss et al., 2014). Aktivisme dalam isu ILH di kampus dinilai cenderung terbatas pada gerakan mahasiswa pecinta alam (Crosby 2013; Nilan & Wibawanto 2015), sedangkan wadah partisipasi di komunitas LH di luar kampus lebih beragam.

**Meningkatnya partisipasi kaum muda dalam komunitas diperkuat dengan adanya peningkatan kepedulian dan solidaritas kelompok.** Nilan (2017) melihat tren kepedulian kaum muda terhadap isu ILH akan menguat di masa depan. Saud dan Margono (2021) melihat kaum muda makin tertarik untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial dan politik guna melakukan aksi kolektif. Di samping itu, solidaritas yang berakar pada identitas kolektif kaum muda ikut menguatkan aktivisme kaum muda dalam ILH. Andini dan Akhni (2021) mencontohkan solidaritas kaum muda penggemar K-pop dalam aktivisme ILH. Stigma bahwa mereka adalah sekelompok remaja yang *toxic* dan emosional justru mendorong solidaritas kelompok mereka untuk berkontribusi, salah satunya pada isu ILH di Indonesia.

Peningkatan keterlibatan sipil kaum muda di Indonesia juga makin terlihat dengan keberadaan media sosial (Gaby, 2017; Saud et al., 2020).

**Meski media sosial membuka banyak peluang keterlibatan, sejumlah literatur juga mencatat bahwa aktivisme melalui media sosial tidak cukup untuk menciptakan sebuah transformasi politik dan interaksi tatap muka tetap dibutuhkan dalam aksi sipil.** Keberadaan media sosial memberikan kesempatan bagi kaum muda untuk berinteraksi dan terhubung di dalam aktivisme ILH (Andini & Akhni, 2021; Hersinta & Sofia, 2020; Saud & Margono 2021). Sementara itu, kaum muda yang ikut serta dalam aktivisme secara langsung berpendapat bahwa aktivisme melalui media sosial juga dapat mengikis sekat relasi kuasa, ruang, dan waktu (Alam, 2016). Di sisi lain, Alam (2016) menjelaskan berelasi secara tatap muka dalam aktivisme dapat membangun keterikatan emosional antar kaum muda dan antara kaum muda dengan publik serta isu ILH yang diperjuangkan.

### Temuan Utama

**Studi ini menemukan bahwa sebagian besar kaum muda terlibat dalam aktivisme ILH melalui organisasi, komunitas, atau gerakan yang diinisiasi oleh kaum muda.** Beberapa peserta menyebutkan bahwa gerakan ILH yang mereka lakukan dibangun dari kelompok mahasiswa dan pelajar yang memiliki tujuan dan keresahan yang sama akan isu ILH. Salah satu peserta dewasa melihat adanya perubahan ketertarikan kaum muda dalam aktivisme ILH. Sebelumnya, selain aktivisme yang muncul

dari universitas, kaum muda banyak terlibat dalam gerakan yang diinisiasi ENGO dan pemerintah. Kini, kaum muda dianggap lebih suka membangun dan berinteraksi di komunitas yang lebih kecil, dengan kegiatan dan tata kelola yang lebih fleksibel. Beberapa peserta pakar menilai aktivisme kaum muda saat ini makin beragam dan cenderung ingin lepas dari ketergantungan terhadap ENGO besar atau organisasi yang diinisiasi orang dewasa.

**Sebagian besar peserta muda mengungkapkan kedekatan pertemanan dan pengaruh teman sebagai alasan mereka bergabung dan bertahan di organisasi/komunitas yang mereka ikuti saat ini.** Hal ini termasuk mendapatkan informasi dari teman terkait komunitas, ajakan dari teman terdekat, keterlibatan dalam acara publik komunitas/organisasi, serta perasaan terhubung dengan organisasi/komunitas karena berbagi semangat perjuangan yang sama dalam isu ILH.

**Peserta muda juga menyampaikan sejumlah faktor yang mereka nilai sebagai keunggulan keterlibatan kaum muda di komunitas kaum muda, yaitu sebagai berikut:**

### *Solidaritas, peluang kolaborasi, dan jejaring sosial*

Solidaritas dan kolaborasi digambarkan peserta muda sebagai upaya bersama untuk memperluas cakupan penerima manfaat kegiatan maupun keanggotaan serta bentuk inisiatif ILH. Upaya-upaya yang dilakukan juga termasuk berjejaring, membentuk dan memperkuat koalisi antarberbagai kelompok atau individu, kerja sama untuk mendukung inisiatif yang sama, advokasi, pendanaan, mobilisasi publik, serta pertukaran kapasitas antar sesama aktivis muda dalam berkomunikasi di publik, baik secara daring dan tatap muka, maupun di komunitas.

### *Ruang aman bagi perbedaan*

Ruang aman mendorong tumbuhnya rasa terhubung lewat nilai-nilai yang sama dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat dan karakteristik di kalangan gerakan kaum muda. Peserta muda rata-rata mengungkapkan praktik untuk tidak menyisihkan kaum muda lain yang memiliki pandangan berbeda. Misalnya, seorang peserta mengungkapkan perbedaan pendapat tentang keberpihakan terhadap pemerintah dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan tidak menjadi masalah dalam komunitas. Kaum muda juga menggunakan jejaring dan media sosial untuk mengajak kaum muda dengan karakteristik sosial yang lebih beragam untuk ikut serta.

### *Kesetaraan peran*

Dalam komunitas kaum muda, tiadanya hierarki memungkinkan pembagian tugas yang lebih fleksibel berdasarkan kemampuan atau kesediaan waktu tiap individu. Di dalam sebuah komunitas kaum muda penggemar K-pop, misalnya, dinamika interaksi yang terbangun antara anggota sangat cair dan tidak memandang usia.

Beberapa peserta muda juga menyampaikan bahwa di berbagai komunitas dan organisasi yang diinisiasi kaum muda, setiap anggota, terlepas dari usianya, memiliki kesempatan yang sama dalam jabatan organisasi, termasuk pada posisi strategis seperti manajer program. Kesetaraan peran juga diterjemahkan sebagian kaum muda ke dalam tata kelola organisasi yang lebih fleksibel. Di satu organisasi, misalnya, posisi direktur diberikan kepada seseorang yang berusia lebih muda dengan tujuan agar dapat memunculkan ide segar dan kreatif.

### *Kesukarelaan dan kebebasan*

Banyak peserta menyatakan bahwa di komunitas/organisasi mereka, sifat keanggotaan cenderung sukarela dan tidak mengikat secara jadwal. Kesukarelaan juga berarti keaktifan anggota tidak pasti dan tergantung kesediaan waktu dan kesibukan, menyesuaikan situasi dan kebutuhan kaum muda. Selain itu, peserta menjunjung tinggi kebebasan berbicara, yang merupakan prinsip dasar ruang aman.

**Sejumlah tantangan juga disebutkan peserta muda sebagai berikut:**

### *Ketimpangan akses*

Terdapat catatan khusus bahwa dalam perbincangan mengenai ILH di ruang publik, kaum muda perkotaan dipandang mendominasi gerakan dan suara di media, termasuk dalam isu yang tidak berdampak langsung pada mereka. Semangat untuk memperluas jejaring di luar daerah perkotaan juga banyak terbentur tantangan akses, meski media daring banyak berperan menjembatani jarak ruang dan waktu. Meski ada keinginan untuk melibatkan kaum muda daerah, sering kali hal ini terkendala kesenjangan akses media komunikasi serta perbedaan pemahaman tentang ILH.

Ketimpangan akses ke sumber daya yang dimiliki dalam organisasi juga disebutkan, misalnya koneksi dengan pemangku kepentingan. Seorang peserta muda mendeskripsikan fenomena ini sebagai *gatekeeping*, di mana relasi dengan pemangku kepentingan dan sumber daya hanya dapat diakses oleh segelintir kaum muda tanpa dibagi ke kaum muda lainnya.

### *Dinamika gender*

Pembagian peran antara anggota perempuan dan laki-laki di internal komunitas/organisasi diungkapkan secara beragam oleh peserta. Beberapa peserta tidak menyebutkan dinamika khusus antara laki-laki dan perempuan.

Beberapa lainnya mengungkapkan perempuan lebih mendominasi komunitas/ organisasi. Ada pula yang menyebutkan kaum muda perempuan lebih sedikit secara jumlah namun paling aktif berpartisipasi dalam rapat organisasi. Dalam sebuah FGD, seorang peserta mengungkapkan bahwa meski tidak ada pembagian tugas secara spesifik berdasarkan gender, namun menurutnya pembagian peran berdasarkan gender antara perempuan dan laki-laki tetap terjadi dan bersifat saling mendukung, di mana perempuan lebih berperan sebagai pemikir, sedangkan laki-laki sebagai pelaksana kegiatan. Meski demikian, peserta lain menanggapi bahwa hal tersebut perlu menjadi autokritik terhadap organisasi yang perlu disikapi secara internal.

### *Mengelola perbedaan*

Beberapa peserta muda mengangkat perbedaan yang terkait dengan latar belakang sosial ekonomi di antara kaum muda dalam aktivisme ILH. Misalnya, kaum muda berpendidikan tinggi dari kelompok menengah atas lebih mampu menambah jejaring dan memperkuat gerakan dibandingkan kaum muda di daerah yang cenderung berpendidikan lebih rendah dan minim sumber daya. Peserta muda tidak melihat kelompok elite yang memulai gerakan sebagai masalah asalkan berdampak positif.

Meski secara umum usia tidak menjadi aspek yang memengaruhi dinamika dalam kelompok, peran senior masih berpengaruh. Menurut seorang peserta, senior dapat membantu menghubungkan kegiatan komunitas dengan audiens atau kegiatan lain yang lebih luas. Di sisi lain, senior juga dapat menjadi penghambat karena memiliki pandangan yang sering berbeda dengan kaum muda. Dinamika ini juga diakui oleh seorang peserta yang mengungkapkan bahwa di organisasinya, masih ada anggota yang merasa segan untuk berhubungan dengan anggota senior. Terkait perbedaan pendapat, beberapa peserta muda memandang bahwa perbedaan pendapat sering muncul saat pengambilan keputusan akibat perbedaan gaya komunikasi dan cara pandang lintas isu.

### *Mengelola persaingan*

Kompetisi atau persaingan antar kaum muda terjadi dalam komunitas kaum muda, tetapi masih dipandang cukup sehat. Beberapa peserta mengungkapkan bahwa konflik, persaingan, dan kompetisi terjadi di dalam komunitas maupun dengan komunitas lainnya. Misal, ada persaingan antarorganisasi untuk mendapatkan perhatian publik dalam publikasi kampanye, kompetisi pendanaan dari donor, serta perdebatan internal terkait pembahasan isu maupun tata kelola organisasi. Hal ini dipandang salah satu peserta sebagai faktor yang membuat gerakan kaum muda sulit untuk bergerak secara bersama, sedangkan menurut peserta lain, persaingan antar organisasi tidak dianggap sebagai hambatan yang berarti karena aktivisme juga membutuhkan kerja-kerja bersama dengan organisasi lain.

Peserta muda juga menyampaikan adanya persaingan seputar klaim pribadi atau organisasi atas hasil-hasil kerja di gerakan ILH. Persaingan juga bisa menimbulkan konflik saat ada individu yang dilihat mengklaim hasil kerja bersama sebagai kerja pribadi atau organisasi yang mengklaim pencapaian organisasi lainnya. Persaingan juga bisa terjadi dalam perebutan akses ke sumber daya yang dituju, misalnya pendanaan.

## 4.2 Keterlibatan Kaum Muda Melalui OMS dan ENGO

### Temuan Literatur

Beberapa literatur melihat adanya gerakan ILH yang dilakukan oleh kaum muda yang berafiliasi dengan OMS atau ENGO, dan sejumlah OMS non-ILH. Ada juga mahasiswa yang terlibat dalam gerakan ILH yang terkait dengan afiliasi atau kerja sama mereka dengan ENGO (Alam, 2019; Tanu & Parker, 2018; Nilan, 2015). Dalam literatur lain, Nilan (2015) menjelaskan bahwa kaum muda yang berafiliasi dengan ENGO jadi punya kesempatan untuk menginisiasi gerakan pro-LH. Selain ENGO, Bassar et al. (2018) menjelaskan bahwa organisasi non-LH juga ikut berpartisipasi dalam melibatkan kaum muda agar dapat berkontribusi dalam mengelola dan mengurangi risiko perubahan iklim khususnya dalam isu kebencanaan. Di samping itu, Alam (2016) juga menemukan munculnya dukungan masyarakat sipil terhadap aksi LH kaum muda, seperti dukungan tokoh masyarakat dan masyarakat umum dalam aksi protes pengembangan perusahaan yang berpotensi merusak LH di Jawa Barat. Meski peran ENGO cukup besar, Alam (2019) menemukan bahwa dalam interaksinya, kaum muda lebih memilih komunitas yang lebih kecil karena mereka melihat banyak wilayah aktivisme di daerah tidak dapat tercakup dalam program ENGO dan pengambilan keputusan di dalam ENGO juga didominasi oleh orang dewasa.

Dari literatur, studi ini menemukan bahwa pertukaran informasi dan dukungan peningkatan kapasitas menjadi bagian dari pola interaksi antara kaum muda dengan OMS dan ENGO. Alam (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa dukungan terhadap aktivisme kaum muda dilakukan oleh ENGO utamanya melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi kaum muda. Nilan dan Wibawanto (2015) mencontohkan adanya pelatihan dasar aksi (basic action training) dari ENGO bagi kaum muda untuk kemampuan aksi langsung tanpa kekerasan. Reeuwijk (2018) menyebutkan bahwa ENGO juga memfasilitasi dialog seputar nilai antara kaum muda dan staf dewasa, memberikan kesempatan keterwakilan kaum muda dalam pengambilan keputusan, dan menguatkan kapasitas kaum muda sebagai peneliti, advokat, pendidik sebaya, penyedia layanan, penggerak masyarakat, dan pekerja dalam isu ILH.

Rekrutmen dan kaderisasi atau regenerasi juga merupakan bagian dari pola interaksi antara kaum muda dengan OMS dan ENGO, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nilan (2017) menemukan bahwa pelibatan mahasiswa dalam aktivisme ILH ENGO juga merupakan jalur perekrutan kaum muda. Secara umum, aktivisme LH mahasiswa Indonesia sering berkaitan dengan agenda aktivisme ENGO, meski dalam skala kecil dan untuk isu yang lebih dekat dengan mereka, seperti kampanye soal pengurangan sampah (Nilan dan Wibawanto, 2015), ancaman terhadap hutan kota (Alam, 2016), atau dukungan terhadap kampanye global WWF Earth Hour (Bassar dkk., 2017). Alam (2019) menemukan bahwa kaum muda yang terlibat dalam aksi penyelamatan hutan kota di Jawa Barat adalah aktivis berpengalaman dari salah satu ENGO. Meskipun ENGO tersebut tidak terlibat dalam kampanye secara lembaga, kaum muda mengakui bahwa desain kampanye mereka diadopsi dari yang digunakan oleh ENGO tersebut, dengan inovasi organisasi dan pengambilan keputusan yang lebih egaliter.

## Temuan Utama

Meski jalur keterlibatan melalui komunitas yang diinisiasi kaum muda makin diminati, studi ini menemukan pola interaksi dalam aktivisme ILH yang dominan antara kaum muda dengan masyarakat sipil dan ENGO. Sebagian besar peserta studi yang aktif dalam gerakan ILH merupakan bagian dari kelompok masyarakat sipil dan ENGO. Seorang pakar dewasa juga mengobservasi bahwa gerakan kaum muda dalam isu ILH tidak lepas dari peran ENGO sebagai salah satu jalur kaum muda untuk terlibat dalam isu tersebut dan menjalankan inisiatif lebih lanjut secara independen, baik sebagai pekerja organisasi/ ENGO, aktivis ILH dalam komunitas, ataupun bagian dari pemerhati isu ILH. ENGO dan organisasi masyarakat sipil lainnya juga dipandang memberikan wadah partisipasi melalui berbagai inisiatif atau program yang melibatkan kaum muda, termasuk yang banyak menjangkau kaum muda rentan (seperti perempuan dan difabel) untuk berdiskusi mengenai permasalahan ILH.

Selain kaum muda secara individu, beberapa organisasi atau komunitas kaum muda juga memiliki afiliasi atau keterhubungan dengan organisasi/ENGO di luar Indonesia (global) baik secara program atau pendanaan. Afiliasi global ini menurut pandangan peserta muda tidak memengaruhi pelaksanaan kegiatan dalam konteks Indonesia. Isu yang diusung dan jenis kegiatan yang dilakukan sepenuhnya bergantung pada kebutuhan sesuai konteks lokal. Meski tidak ada petunjuk khusus dari afiliasi global terkait penyelenggaraan kegiatan atau tata kelola organisasi, tetapi terdapat nilai-nilai dasar yang perlu diadopsi kaum muda dalam inisiatif yang dilakukan. Nilai-nilai tersebut misalnya aksi tanpa kekerasan; tidak memandang suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA); dan tidak terlibat dalam partai politik.

**Peserta menilai kaum muda memiliki pengalaman yang cenderung positif ketika terlibat dalam kegiatan atau program kelompok masyarakat sipil dan ENGO. Sejumlah pola dan tujuan pelibatan kaum muda oleh organisasi masyarakat sipil dan ENGO adalah sebagai berikut:**

- OMS/ENGO menguatkan kapasitas kaum muda dalam isu ILH serta keterampilan mereka dalam advokasi, berorganisasi, dan berjejaring.
- OMS/ENGO memberikan dukungan pendanaan dan pelaksanaan kegiatan kaum muda atau menjadikan kegiatan kaum muda sebagai bagian dari programnya. Khusus tentang pendanaan, kaum muda dalam studi punya dua pandangan. Pertama, pendanaan dari organisasi donor dirasa menjadi bentuk kepercayaan terhadap pentingnya kegiatan yang diinisiasi kaum muda dan pendanaan cenderung tanpa syarat khusus. Namun, peserta muda lain memiliki catatan khusus tentang kekhawatiran akan diatur oleh pendana yang akhirnya membatasi kegiatan kaum muda. Dukungan pendanaan dikatakan bisa memiliki agenda khusus yang perlu dicermati.
- OMS/ENGO menginisiasi terbentuknya atau mengajak kaum muda menjadi bagian dari komunitas atau kegiatan ILH.
- OMS/ENGO meminta kaum muda menjadi penasihat organisasi mereka, termasuk untuk memberi masukan pada program dan tata kelola organisasi.
- OMS/ENGO menjalin kerja kemitraan dengan kaum muda untuk sebuah inisiatif ILH.

Selain OMS berupa LSM, kaum muda juga bisa terlibat dalam isu ILH melalui media, universitas, lembaga penelitian, institusi keagamaan, komunitas seni, tokoh berpengaruh (*influencer*), dan ada juga yang melalui partai politik. Kesemuanya rata-rata terlibat sebagai peserta, sasaran penerima dari kegiatan yang diselenggarakan, atau sebagai mitra penyelenggara.

## Selain menjadi pihak yang dilibatkan oleh OMS/ENGO, kaum muda sendiri juga aktif melibatkan OMS/ENGO dengan berbagai cara, di antaranya:

- Kaum muda mengundang narasumber dari OMS/ENGO dalam kegiatan mereka.
- Kaum muda mengajak orang dewasa dari OMS/ENGO dalam kegiatan advokasi ke pemerintah.
- Kaum muda berkonsultasi dengan dan belajar dari OMS/ENGO tentang isu-isu ILH atau strategi advokasi dan berorganisasi

- Kaum muda meminta data atau informasi dari OMS/ENGO.

Selain melibatkan OMS/ENGO, sejumlah kaum muda juga aktif melibatkan media karena peliputan dan pemberitaan dipandang bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Meski begitu, pelibatan media ini belum merata.

### 4.3 Keterlibatan Kaum Muda Melalui Pemerintah dan Swasta

## Temuan Literatur

**Keterlibatan pemerintah untuk mendorong keterlibatan kaum muda dalam isu ILH bisa terkait dengan mencuatnya wacana tentang manfaat bonus demografi.** Seiring meningkatnya jumlah kaum muda dari total populasi masyarakat Indonesia, keterlibatan kaum muda juga meningkat. Argo et al. (2016) menyebutkan bahwa pada tahun 2030, jumlah kaum muda usia 15–29 diproyeksikan berada di kisaran 70 juta dari total populasi penduduk Indonesia. Kemudian, Peace et al. dalam Nilan & Wibawanto (2015) menyebutkan bahwa isu ILH sangat lekat dengan narasi masa depan, yang berarti bahwa kaum muda memiliki hak untuk menentukan nasib mereka kelak. Secara lebih lanjut, Argo et al. (2016) menyebutkan bahwa hal tersebut mendorong pemerintah untuk melibatkan kaum muda di dalam forum pembangunan dan dialog interaktif (Bassar et al., 2018), khususnya mulai pascatahun 2015.

**Peran pemerintah dalam mendukung isu ILH dilakukan dengan mendorong institusi pendidikan ikut terlibat secara aktif.** Bassar et al. (2018) menyebutkan pemerintah mendorong keterlibatan kaum muda dalam isu ILH di sekolah dan universitas. Contoh keterlibatan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Meteorologi adalah mengadakan kompetisi debat, seni kreatif,

dan jurnalisme bertemakan isu ILH; kompetisi sekolah Adiwiyata; serta kunjungan lapangan siswa dan mahasiswa ke wilayah-wilayah konservasi LH. Aktivitas pro-ILH di institusi pendidikan dianggap mampu membangun identitas sipil kaum muda sebagai bagian dari kelompok masyarakat dan menjadikan pola pikir pro-ILH sebagai cara hidup sehari-hari di keluarga dan masyarakat, serta dalam kapasitas kaum muda sebagai sukarelawan dan anggota atau pimpinan organisasi, dan di masa depan sebagai profesional, politisi, pegawai negeri sipil, ataupun pemilik bisnis (Nilan & Wibawanto, 2015).

**Belum banyak bentuk keterlibatan swasta dalam mendukung isu ILH yang ditemukan.** Baru sedikit bentuk keterlibatan swasta yang ditemukan dalam literatur, misalnya keikutsertaan perusahaan ekstraktif dalam mensponsori kegiatan dan memberikan beasiswa kepada sekolah dan siswa. Bassar et al. (2018) menyebutkan bahwa bentuk keterlibatan swasta terkait dengan sektor bisnis tempat perusahaan swasta tersebut berkecimpung. Kemudian, Bassar et al. (2018) menyebutkan beberapa contoh bentuk keterlibatan ini, seperti praktik dan pembelajaran ekstrakurikuler pemanfaatan energi terbarukan dalam skala kecil di lingkup sekolah, pengelolaan sampah di wilayah sekolah, penanaman pohon, dan mendukung transportasi ramah lingkungan di sekolah dan universitas.



## Temuan Utama

**Studi ini menemukan bahwa kaum muda yang bekerja di lembaga pemerintah juga peduli dan terlibat dalam gerakan ILH di Indonesia.** Beberapa peserta yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) muda dan dewasa di tingkat pemerintah pusat menyampaikan bahwa saat ini kaum muda dianggap memberikan masukan yang positif untuk kebijakan di pusat. Kaum muda memiliki peran dan kapasitas yang fleksibel, bukan hanya sebagai kelompok yang mampu memengaruhi kebijakan dari luar sistem, tetapi juga dari dalam sistem melalui berbagai posisi profesional muda yang bekerja di lembaga pemerintahan.

**Kaum muda ASN ini memiliki akses besar untuk memengaruhi proses perumusan kebijakan.** Salah satu ASN muda mengungkapkan bahwa proses perumusan kebijakan dan advokasi pemerintah Indonesia di tingkat global banyak melibatkan ASN muda. Misalnya, di salah satu kementerian, mereka berperan mendukung gerakan ILH dengan melakukan analisis perundingan perubahan iklim, menelaah dokumen dan proposal kerja sama internasional, membantu memetakan komitmen pemerintah di berbagai negara di Asia, menyusun sistem data, hingga mengelola media sosial dan kampanye digital kementeriannya. Sementara itu, di tingkat desa, peserta muda yang menjabat sebagai sekretaris desa berhasil berkontribusi besar terhadap terlaksananya program dan anggaran hijau di desanya.

**Meski peluangnya besar, kaum muda di dalam struktur pemerintahan tetap menghadapi tantangan dalam memengaruhi penyusunan kebijakan.** Peserta muda dari pemerintahan mengakui bahwa meski dari dalam, pemberian masukan kebijakan oleh kaum muda prosesnya panjang. Masukan dimulai dari ide yang dimiliki oleh ASN muda, lalu disampaikan ke pejabat eselon 4, 3, 2, hingga 1. Proses ini juga perlu mempertimbangkan forum perumusan kebijakan dan jenis kebijakan yang dikeluarkan; ada yang keputusannya bisa diambil di tingkat eselon 1 ataupun menteri. Dengan demikian, meski ASN muda bebas berpendapat, keputusan tertinggi masih berada di tangan pimpinan tertinggi (pejabat) perumus kebijakan berwenang.

**Berbeda dengan ASN muda, aktivisme ILH oleh kaum muda pekerja sektor swasta lebih merupakan kegiatan di luar pekerjaan.** Kegiatan ILH mereka cenderung tidak berhubungan dengan tempat mereka bekerja, tetapi di komunitas muda atau organisasi tempat mereka berkegiatan. Meski begitu, salah satu peserta muda menyebutkan partisipasi kaum muda yang sudah bekerja, termasuk dari sektor swasta, sering kali tidak seaktif kaum muda mahasiswa karena kesibukan pekerja yang sulit menyesuaikan waktu dengan aktivisme ILH.

### Selain menjadi bagian dari pemerintahan atau swasta, kaum muda juga terlibat dalam kegiatan ILH dengan pemerintah melalui:

- Keterlibatan kaum muda dalam kegiatan advokasi kebijakan, seperti dalam dialog kebijakan langsung, komunikasi informal dengan pemangku kebijakan baik eksekutif maupun legislatif, dan ikut merumuskan dokumen kebijakan untuk satu wilayah.
- Keterlibatan kaum muda dalam jajak pendapat yang diselenggarakan pemerintah.
- Keterlibatan kaum muda dalam forum-forum partisipasi yang difasilitasi pemerintah.<sup>6</sup>
- Keterlibatan kaum muda sebagai pemateri atau peserta kegiatan pemerintah.
- Keterlibatan kaum muda sebagai peserta atau penerima manfaat dalam program/kegiatan khusus pemerintah.<sup>7</sup>
- Keterlibatan kaum muda sebagai mitra kerja.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Contohnya adalah Lingkaran Temu Kabupaten Lestari sebagai media advokasi bersama pemerintah kabupaten sekaligus berjejaring dengan pemangku kepentingan lain; forum penyampaian pendapat kaum muda melalui inisiatif Cengkrama Iklim; forum kaum muda di tingkat internasional seperti ASEAN Working Group on Environmental Education; dan inisiatif dari pemerintah yang melibatkan kaum muda sebagai narasumber.

<sup>7</sup> Contohnya adalah Program Kampung Iklim (Proklim), Sekolah Adiwiyata, Sakawana Bakti, Saka Kalpataru, serta Teens Go Green yang ikut diinisiasi oleh KLHK dan pemerintah daerah (DKI Jakarta).

<sup>8</sup> Contohnya adalah bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengelola inisiatif seperti rumah baca, pengelolaan sampah terpadu dan air kotor, dan pengukuran curah hujan.

Kaum muda memandang bahwa dalam advokasi dengan pemerintah daerah, relasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu menjadi perhatian. Menurut pengalaman seorang peserta, pemerintah daerah, khususnya kabupaten, cenderung lebih menaati mandat dari pemerintah pusat terkait kebijakan yang disusun. Secara khusus, peserta muda juga mengamati bahwa kaum muda di daerah, terutama wilayah perdesaan, cukup aktif dalam berbagai inisiatif ILH, meski jarang terekspos dan diketahui publik. Kaum muda desa sudah terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, seperti dalam pengembangan konsep desa wisata.

Terkait kesempatan partisipasi, peserta muda mengungkapkan bahwa dalam berbagai kesempatan, keterwakilan kaum muda dalam proses pengambilan keputusan masih bersifat eksklusif.

Di tingkat nasional dan daerah, kaum muda yang mendapatkan banyak kesempatan berpartisipasi adalah kaum muda dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), kaum muda dengan isu yang lebih aman untuk diadvokasi seperti isu sampah, dan kaum muda yang cenderung apolitis serta yang sudah punya koneksi dengan pemerintah. Beberapa peserta muda menganggap masih banyak kelompok muda yang tersisih dari kesempatan tersebut, seperti kaum muda di kelompok rentan yakni masyarakat adat hingga kelompok yang membahas isu sensitif dan identitas khusus yang termarginalisasi (minoritas gender dan identitas keagamaan). Fragmentasi kaum muda di ruang keterlibatan dalam perumusan kebijakan pemerintah dirasa peserta menjadi salah satu tantangan besar terkait partisipasi kaum muda, terutama bagi kelompok rentan khususnya secara ekonomi.

### Boks 3. Tokenisme dalam Pelibatan Kaum Muda

Meski sudah ada beberapa ruang dan kesempatan partisipasi bagi kaum muda dalam perumusan kebijakan, nuansa tokenisme dominan muncul dalam dinamika interaksi pelibatan kaum muda dalam jalan keterlibatan sipil bersama pemerintah.

Beberapa peserta muda merasa pemerintah belum sepenuhnya terbuka terhadap masukan dan partisipasi kaum muda yang lebih bermakna. Seorang peserta muda sulit memperoleh akses untuk dapat terlibat dalam perumusan kebijakan sehingga harus melobi orang dalam pemerintahan.

Pemerintah juga dianggap belum konsisten dalam penerimaan audiensi kaum muda, meski dalam institusi yang sama. Misalnya, kaum muda yang diterima untuk audiensi di suatu direktorat kementerian tidak mendapatkan perhatian atau keterbukaan yang sama di direktorat yang lain. Peserta muda juga mengamati bahwa pemilihan pejabat muda atau perwakilan generasi milenial terkesan sebagai *gimmick* semata karena pemerintah cenderung memilih kaum muda yang dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah.

Peserta muda menilai nuansa tokenisme dalam ruang perumusan kebijakan terjadi karena beberapa faktor, antara lain terbatasnya isu ILH yang diterima pemerintah dan cara pandang pengambil kebijakan dalam memosisikan keterlibatan kaum muda dalam perumusan kebijakan.

Seorang peserta muda pakar menilai bahwa dukungan pemerintah terhadap keterlibatan kaum muda dalam isu ILH cenderung terarah pada isu nonpolitis seperti gaya hidup, sampah plastik, ekonomi sirkular, *green start-up*, *fast-fashion*, dan kewirausahaan hijau. Sementara itu, dalam isu-isu politis seperti perdagangan karbon, masyarakat adat, konflik lahan, dan dampak industri tambang, pemerintah dinilai masih menganggap kaum muda belum memiliki kapasitas dan sering kali berbeda pendapat.

Pemerintah dipandang belum serius memosisikan kaum muda sebagai mitra dalam perumusan kebijakan. Seorang peserta muda mengungkapkan bahwa dari cara komunikasinya, pemerintah terkesan seolah menganggap kaum muda tidak mengerti peraturan dan isu yang diperjuangkan. Kaum muda masih dianggap sebagai individu atau kelompok yang belum relevan untuk didengar atau dilibatkan oleh pengambil kebijakan, belum memahami permasalahan (dianggap junior), dan diposisikan sebagai *cute little stakeholder*, atau dielaborasi lebih lanjut sebagai obyek dan pemangku kepentingan kecil dengan keterlibatan yang tidak substansial. Dalam pandangan seorang peserta muda, pemerintah sering melibatkan kaum muda dalam kegiatan dengan pendekatan patronase, yaitu memuji kaum muda sebagai inspirasi, tetapi suara kaum muda tidak benar-benar dipertimbangkan.

Kaum muda juga diamati sering mengemban beban ganda ketika terlibat dalam kegiatan terkait perumusan kebijakan. Seorang pakar dewasa menyampaikan bahwa ketika kaum muda menyuarakan pendapatnya kepada pembuat kebijakan, sering kali ia dituntut untuk memberikan solusi atas permasalahan yang disuarakan. Hal ini dibuktikan oleh pendapat perwakilan pemerintah pusat yang menganggap kaum muda perlu memberi kritik atau menyampaikan masalah sekaligus menawarkan kontribusi langsung terhadap penyelesaian masalah tersebut. Terlebih lagi, kaum muda yang aktif dan kritis justru mendapat stigma sebagai kaum muda yang tidak memberikan solusi dalam perumusan kebijakan.

### Selain menjadi pihak yang dilibatkan oleh pemerintah, kaum muda sendiri juga aktif melibatkan pemerintah dengan berbagai cara, di antaranya:

- Advokasi kebijakan yang ditujukan terhadap perubahan sistem, dengan melakukan audiensi, mengirimkan kertas kebijakan, maupun mengirimkan rekomendasi melalui surat.
- Dialog dengan pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional (pusat) hingga desa dan kecamatan.
- Mengundang pemerintah sebagai narasumber kegiatan kaum muda, khususnya kegiatan publik.
- Memberikan pendampingan dan mentoring (*reverse mentoring*)<sup>9</sup> kepada pemerintah daerah.
- Berinisiatif untuk meminta dukungan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dalam program yang sedang dijalankan kaum muda.

**Meski sudah ada, pelibatan pemerintah oleh kaum muda belum banyak ditemukan.** Seorang peserta muda menilai bahwa belum banyak kaum muda yang bersedia melibatkan pemerintah karena adanya pandangan kaum muda terhadap beberapa kebijakan pemerintah sebagai penyebab kerusakan LH. Selain itu, peserta muda juga menilai pemerintah sering kali lebih mendengarkan aspirasi perusahaan swasta dibandingkan suara kaum muda. Seorang peserta akademisi dewasa juga mengungkapkan bahwa tantangan dalam pelibatan pemerintah adalah pemerintah masih menggunakan cara lama yang dibatasi proses birokrasi, sehingga sulit bagi pemerintah untuk mengikuti cara kaum muda yang menginginkan perubahan cepat.

**Strategi komunikasi kemudian menjadi catatan tersendiri dalam upaya kaum muda untuk membangun relasi dengan pemerintah.** Kaum muda menganggap pendekatan komunikasi yang dipilih juga dapat menentukan kualitas relasi yang dibangun. Strategi komunikasi yang lunak (*soft approach*), khususnya ketika berbicara lebih kalem dan halus dianggap lebih disukai pemerintah karena memosisikan kaum muda sebagai pihak yang tidak mengancam.

**Terakhir, ada kaum muda yang sudah melibatkan pihak swasta meski masih jauh lebih terbatas.** Menurut beberapa peserta, pelibatan sektor swasta belum banyak dilakukan, dan kesempatan untuk itu masih minim. Keterlibatan sektor swasta juga masih cenderung bersifat dukungan pendanaan dan kolaborasi jangka pendek dalam isu yang sangat spesifik. Sebagai contoh, pihak swasta mendukung kampanye kaum muda sebagai sponsor dan kaum muda bekerja sama dengan perusahaan rintisan dalam rangka mengembangkan kampanye sosial seputar isu energi. Dalam isu pangan, sebuah komunitas kaum muda bekerja sama dengan perusahaan rintisan untuk mempertemukan produsen pangan dengan konsumen.

**Sementara itu, narasi tentang pihak swasta, khususnya perusahaan di sektor ekstraktif yang merugikan LH, beberapa kali disampaikan peserta studi.** Eksplorasi perusahaan di sektor ekstraktif dianggap peserta muda dan pakar banyak berkontribusi sebagai penyebab permasalahan ILH di daerah yang merusak LH dan merugikan masyarakat, khususnya masyarakat adat. Di salah satu wilayah timur Indonesia, peserta muda menyampaikan bahwa gerakan kaum muda juga sering kali berhadapan dengan tekanan dari perusahaan.

<sup>9</sup> *Reverse mentoring* atau bimbingan terbalik merujuk pada proses mentoring yang dilakukan oleh seorang yang lebih junior membimbing seseorang yang lebih senior. Dalam konteks studi ini, kaum muda yang biasanya dibimbing, berperan juga sebagai mentor untuk orang dewasa. Tujuannya adalah untuk membantu orang dewasa mengembangkan keterampilan baru dan terhubung dengan generasi muda.



# Faktor-Faktor Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu Iklim dan Lingkungan Hidup

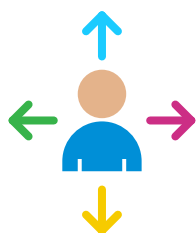
Studi ini menemukan bahwa faktor pendukung, penghambat, dan aspirasi kaum muda dalam keterlibatan kaum muda dalam isu ILH kerap berkelindan satu sama lain. Faktor pendukung sangat terkait dengan upaya mengatasi hambatan, dan aspirasi atau harapan sering kali dikaitkan dengan ketiadaan dukungan saat ini atau dianggap kontras dengan hambatan yang saat ini mereka hadapi.

Masing-masing faktor pendukung dan penghambat bisa dikategorikan ke dalam faktor individu, interaksi sosial, komunitas/organisasi, dan faktor eksternal. Faktor interaksi sosial dapat dilihat dari interaksi kaum muda dengan orang-orang di sekitarnya terutama sesama kaum muda dan orang dewasa pemangku kepentingan ILH.

Faktor pendukung yang cukup dominan ditemukan dalam studi adalah faktor individu, baik di temuan literatur maupun temuan utama. Faktor individu yang paling banyak didiskusikan adalah minat dan aspirasi pribadi, sedangkan pada temuan utama adalah keresahan terhadap dampak ILH, terutama dampaknya terhadap masa depan. Berbeda dengan faktor pendukung, faktor penghambat lebih banyak menemukan permasalahan eksternal seperti risiko keselamatan diri, keamanan, dan pendanaan.

## 5.1 Faktor Pendukung Keterlibatan Kaum Muda

### Temuan Literatur



#### Faktor Individu

**Ketertarikan pada isu krisis ILH, altruisme, ambisi pribadi, perasaan diterima, memiliki teman baru, atau menemukan wadah aktualisasi diri dominan muncul dalam literatur sebagai pendorong terlibatnya kaum muda dalam aktivisme ILH.**

Van Reeuwijk (2018) menemukan perasaan senang menolong orang lain sebagai motivasi keterlibatan kaum muda dalam aktivisme, sedangkan Alam (2016) menemukan alasan moral untuk menjaga kelestarian alam, rasa solidaritas, kesempatan aktualisasi diri, dan peluang berkegiatan bersama teman sebaya, sebagai motivasi kaum muda untuk turut aktif dalam kegiatan aktivisme. Nilan dan Wibawanto (2015) menemukan banyak peserta yang mengikuti kampanye berkebun agar dapat memamerkan kebun hasil garapannya di sosial media. Selain itu, bentuk kegiatan yang menyenangkan, rasa kekeluargaan yang tinggi, dan kenyamanan emosional juga menjadi faktor pendukung keterlibatan kaum muda (Tanu & Parker, 2018).

**Keresahan akan dampak krisis ILH dan keinginan untuk membuat perubahan juga memotivasi kaum muda.** Kaum muda yang terlibat aktivisme umumnya terdorong oleh kesulitan hidup yang dialami serta memiliki keresahan yang besar akan masa depan generasi muda (Nilan & Wibawanto, 2015; Peace et al., 2012). Kaum muda juga akan terdorong untuk melakukan aksi protes ketika mereka yakin keterlibatan secara politik akan memberikan perubahan (Zhu et al., 2018; Mok et al., 2013). Literatur lain menyebutkan bahwa pengalaman terdampak banjir (Kurniawan, 2021) dan terganggunya kesehatan karena asap kebakaran hutan (Nilan, 2018; Nilan & Wibawanto, 2015) menjadi salah satu pemicu kaum muda untuk terlibat dalam gerakan.

**Literatur juga menemukan diskusi terkait latar belakang pendidikan, identitas, dan ajaran agama sebagai pendorong kaum muda untuk terjun dalam aktivisme.** Latar belakang pendidikan tinggi kaum muda berpengaruh positif pada keterlibatan sipilnya (Saud et al. 2020; Campbell, 2009), walaupun tingkat pendidikan saja tidak cukup untuk meningkatkan partisipasi dalam aksi sipil (Campbell, 2009).

Di Indonesia, universitas-universitas ternama yang sudah menerapkan konsep kampus hijau juga dianggap turut berkontribusi dalam mengingatkan mahasiswa akan tanggung jawab LH (Nilan, 2017). Selain pendidikan, ajaran agama (Parker & Nilan, 2013) dan identitas budaya atau adat (Alam, 2016) juga menjadi salah satu faktor pendorong kaum muda untuk terjun dalam gerakan.



#### Interaksi Sosial

**Interaksi dengan dan adanya dukungan dari lingkungan sebaya menarik kaum muda untuk makin aktif dan bertahan dalam gerakan yang diikuti.**

Solidaritas, kekeluargaan, dan kebersamaan yang dibangun dalam komunitas (Alam, 2016), serta kepemimpinan dari kaum muda yang lebih dinamis (Tanu & Parker, 2018) telah mendorong kaum muda untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan aktivisme LH. Selain itu, pengaruh dari interaksi dengan sesama kaum muda juga berkontribusi menarik minat kaum muda untuk memulai keterlibatannya dalam suatu gerakan. Selebriti atau *influencer* (Nilan & Wibawanto, 2015), termasuk grup K-pop (Andini & Akhni, 2021) memiliki pengaruh yang besar sebagai pemasar sosial di Indonesia termasuk untuk gerakan isu-isu LH.

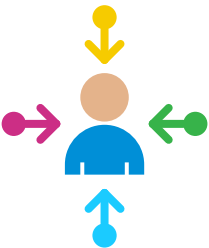
**Interaksi dengan orang dewasa yang mendorong keterlibatan kaum muda masih terbatas pada dukungan organisasi nonpemerintah.** Organisasi-organisasi nonpemerintah juga berperan dalam mendorong minat kaum muda untuk ikut dalam aktivisme, khususnya dalam memberikan inspirasi, bimbingan, dan peningkatan kapasitas bagi kaum muda (Ida et al., 2020b; Lovejoy et al., 2012; Saud & Margono, 2021).



### Komunitas atau Organisasi

Strategi-strategi pengorganisasian lembaga dan aksi yang dilakukan oleh kaum muda disebut dalam literatur sebagai faktor pendukung suksesnya aktivisme.

Strategi komunikasi melalui platform daring, penggunaan antikapitalisme secara persuasif (Alam, 2020), serta penggunaan karakter animasi sebagai simbol kampanye (Hersinta & Sofia, 2020) ditemukan sebagai faktor pendorong aksi gerakan. Persiapan matang sebelum melakukan aksi seperti pelatihan dan asesmen terhadap para peserta aksi juga menjadi strategi yang menarik (Alam, 2016). Kaum muda mengutarakan pentingnya peran peningkatan kapasitas dan kesempatan berpartisipasi terhadap berlanjutnya keterlibatan mereka dalam aktivisme serupa (Alam et al., 2019). Ada satu artikel yang menyebutkan pendanaan dari donor menjadi faktor pendukung aktivisme kaum muda (Alam & Nilan, 2015).



### Faktor Eksternal

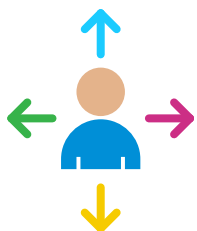
Berbagai literatur membahas pentingnya peran teknologi dan media dalam menyebarkan informasi terkait isu perubahan iklim dan meningkatkan minat kaum muda untuk turut terlibat dalam upaya-upaya yang dilakukan (Andini & Akhni, 2021; Alam, 2020; Argo et al., 2016; Hersinta & Sofia, 2020; Warren et al., 2016).

Pickerill (2001) berpendapat bahwa internet berperan sebagai “gerbang aktivisme yang dapat meningkatkan profil atau kampanye kelompok, merangsang aktivisme, serta memobilisasi aktivisme daring dan menarik minat pendukung aktivisme (protes)” (Hersinta & Sofia, 2020). Literasi digital juga dianggap meningkatkan antusiasme dan partisipasi kaum muda dalam suatu kegiatan atau program (Azis et al., 2020).

Lebih lanjut, penggunaan media sosial dianggap efektif dalam memfasilitasi dan mengakselerasi penyampaian informasi mengenai isu sosial dan ILH kepada masyarakat di lokasi geografis yang berbeda-beda, ataupun memobilisasi gerakan kaum muda (Ida et al., 2020a; Lovejoy et al., 2012; Saud & Margono, 2021; Alam, 2020; Nilan & Wibawanto, 2015; Sugihartati, 2020). Hersinta & Sofia (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa media sosial berperan sebagai sarana koordinasi aksi, distribusi informasi, serta keikutsertaan dalam proses lobbying. Saud & Margono (2021) juga berpendapat bahwa selama jalannya aktivisme, media sosial turut menggaungkan suara kaum muda sehingga mendukung partisipasi mereka dalam demokrasi. Selain itu, media sosial juga berperan besar dalam memengaruhi perubahan situasi politik dengan membangun diskusi-diskusi secara interaktif (Azis et al., 2020). Sementara itu, media televisi di Indonesia secara gencar menginformasikan isu LH seperti kebakaran hutan pada tahun 2017–2018 (Hersinta & Sofia, 2020).

Meski tidak dibahas secara khusus, beberapa literatur menemukan peran kebijakan yang memfasilitasi keberlangsungan aktivisme kaum muda. Tinjauan pustaka menemukan adanya peran pemerintah dalam mendukung gerakan kaum muda melalui komitmen nasional (Meyers, 2017), penyusunan kebijakan yang memfasilitasi (Alam, 2016), dan pemberdayaan komunitas kaum muda (Meyers, 2017). Ada juga pemerintah-pemerintah daerah yang turut mendukung kegiatan aktivisme lokal (Alam, 2016; Tanu & Parker, 2018).

## Temuan Utama



### Faktor Individu

Salah satu alasan kaum muda terlibat dalam gerakan aksi sipil adalah kekhawatiran akan dampak gejala ILH dan kondisi ILH di masa depan jika perubahan iklim tidak segera diatasi.

Aspirasi, minat, dan waktu luang dikemukakan kaum muda sebagai pemicu keterlibatan mereka dalam aktivisme terkait perubahan iklim. Ketertarikan terhadap isu serta aspirasi atau cita-cita untuk bekerja dalam sektor terkait penanganan perubahan iklim disebutkan beberapa peserta muda sebagai motivasi untuk terlibat bahkan berkarier dalam organisasi ILH. Seorang peserta muda menyebutkan bahwa terlibat di isu LH adalah panggilan hidupnya. Selain itu, beberapa kaum muda juga menyebutkan bahwa ketersediaan waktu luang dan keinginan untuk mengisinya dengan hal yang bermakna mendorong mereka untuk mencoba mengikuti kegiatan-kegiatan terkait isu LH. Situasi pandemi Covid-19 yang mengharuskan pembatasan fisik memberikan ruang bagi kaum muda untuk berpikir dan berefleksi mengenai permasalahan ILH yang ada dan terlibat dalam upaya kampanye perubahan iklim.

Pengalaman pribadi dalam mengikuti aktivisme ILH juga disampaikan sebagai salah satu faktor pendorong kaum muda untuk bertahan dan makin terlibat dalam gerakan isu ILH. Seorang peserta muda menyampaikan bahwa keterlibatannya sebagai relawan di organisasi lingkungan hidup membuatnya bekerja dan bergerak dalam isu ILH hingga saat ini. Peserta muda lainnya juga menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui mengapa memperjuangkan isu LH, tetapi karena sudah banyak terlibat dan mengembangkan keahlian dalam isu tersebut, dirinya tetap bertahan.

Latar belakang pendidikan juga mendorong keterlibatan kaum muda dalam gerakan. Menurut peserta studi, kaum muda yang aktif dalam gerakan umumnya adalah kaum muda berpendidikan sehingga cukup terpapar dengan isu dan memiliki akses informasi. Kegiatan-kegiatan di kampus membuka wawasan kaum muda mengenai perubahan iklim dan memberi mereka jejaring untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di luar kampus. Beberapa kaum muda juga menyinggung bahwa jurusan perkuliahan mereka dekat dengan isu ILH sehingga

mereka terpapar dan terdorong untuk menerapkannya dalam kegiatan aktivisme. Akses pendidikan dan gelar akademik juga berkaitan dengan kesempatan lebih luas dan status sosial ekonomi yang dimiliki kaum muda.

Di samping itu, kemampuan berpikir kritis serta keterampilan berstrategi dan mengelola komunitas dan kegiatannya juga menjadi faktor pendukung keberlangsungan aktivisme kaum muda hingga saat ini. Beberapa peserta muda juga mengemukakan pentingnya kemampuan pengorganisasian komunitas dampingan. Kemampuan berkomunikasi dan menarik minat kaum muda lainnya terhadap isu dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga dinilai mendukung keberlanjutan aktivisme yang diinisiasi.

Peserta muda mengungkapkan identitas kaum muda sebagai pemuda adat atau kelompok rentan lain juga memotivasi keterlibatan kaum muda dalam isu ILH. Salah satu peserta muda menyebutkan identitas dan filosofi pemuda adat dapat mendorong keterlibatan kaum muda di beberapa daerah. Sebagai contoh, masyarakat adat di Kalimantan Barat memaknai lingkungan tempat tinggal mereka sebagai bagian dari tubuh mereka sehingga kerusakan ekosistem di sekitar mereka akan mencelakakan diri mereka.

Ajaran agama juga muncul sebagai faktor pendorong keterlibatan kaum muda dalam gerakan. Beberapa peserta muda mengemukakan bahwa faktor pendorong aktivisme adalah ajaran agama yang dianut, seperti ajaran agama progresif yang menggali nilai-nilai kebajikan dan kebermanfaatn terhadap makhluk hidup lainnya. Dalam FGD, salah satu kaum muda menyampaikan konsep khalifah dalam agama Islam yang memotivasi keterlibatan dalam isu ILH.



### Interaksi Sosial

Peserta muda berpendapat bahwa pengaruh dari *influencer* muda atau tokoh publik sangat besar dalam meningkatkan antusiasme kaum muda terhadap isu maupun mendorong keterlibatan mereka dalam aktivisme.

Salah satu peserta muda menyampaikan bahwa *fan-based activism* di Indonesia yang muncul dari para penggemar K-pop mampu memobilisasi kaum muda untuk ikut bergerak dalam isu-isu LH. Salah seorang peserta dewasa juga mengonfirmasi hal ini dan memberikan pandangan bahwa kaum muda memiliki kemampuan menghasilkan *bandwagon effect*, yaitu mendorong orang muda lainnya untuk ikut bersuara atau bergerak dalam isu yang dianggap penting.

Jaringan pertemanan yang terbentuk juga mendorong kaum muda terlibat dalam aktivisme dan bertahan di gerakan yang telah diikuti. Seperti yang telah dibahas pada bagian 4, keterlibatan kaum muda dalam gerakan ILH dipengaruhi relasi sosial atau jaringan pertemanan yang terbentuk melalui organisasi atau komunitas yang diikuti.

Keterlibatan kaum muda dalam organisasi/komunitas yang mereka ikuti saat ini juga tidak lepas dari peran kekerabatan berdasarkan suku, seperti yang peneliti temukan dalam konteks ikatan mahasiswa daerah. Organisasi ikatan mahasiswa dinilai peserta muda dapat mendorong keterlibatan dan membantu meningkatkan kesadarannya tentang lingkungan. Salah satu temuan mengungkap bahwa ikatan mahasiswa daerah memengaruhi mahasiswa untuk ikut serta dalam aktivisme perjuangan tanah adat di wilayah asal mereka.

Oleh kaum muda, berbagai dukungan dari ENGO dan organisasi yang berpengalaman terkait krisis ILH dianggap berkontribusi terhadap pengembangan dan keberlanjutan gerakan-gerakan kaum muda. Bentuk-bentuk peningkatan kapasitas seperti pengetahuan terhadap isu yang lebih mendalam serta strategi yang efektif untuk mengelola kegiatan merupakan dukungan yang umum diberikan. Selain itu, organisasi-organisasi ini juga membantu memperluas jejaring kaum muda sehingga jangkauan dampak gerakan dapat lebih luas. Selain peran organisasi, salah satu peserta muda menyebutkan bahwa media membantu mempertemukan mereka dengan ahli atau akademisi untuk berdiskusi dan bertukar pengetahuan.

Dukungan dari orang dewasa di sekitar, seperti guru dan mentor, dalam penyebaran informasi terhadap isu LH dan peningkatan kapasitas juga mendorong keterlibatan kaum muda dalam aktivisme. Seorang peserta menyampaikan pentingnya peran mentor dalam menginspirasi kaum muda untuk bergerak. Mentor dapat berkontribusi dengan memberikan dukungan moral, saran, kritik, dan informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan gerakan yang saat ini diinisiasi. Peserta lainnya juga mengemukakan bahwa rasa timbal balik dan ikatan dengan orang lain ketika melihat dampak dari aktivisme yang dilakukan, terutama pada masyarakat yang dibantu, menjadi alasan tersendiri bertahan di organisasi atau komunitas.



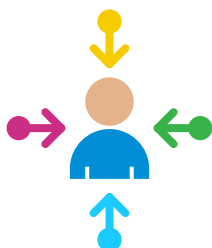
### Komunitas atau Organisasi

Peserta muda menyampaikan berbagai strategi organisasi maupun komunitas kaum muda sebagai faktor pendukung keberhasilan aktivismenya selama ini.

Karakteristik komunitas atau organisasi yang anggotanya beragam, inklusif, dan mendukung pengembangan diri anggotanya disebutkan sebagai faktor pendukung kaum muda bertahan dalam gerakan. Kaum muda juga menyampaikan konsistensi dalam melakukan kegiatan yang didukung dengan perencanaan, pelatihan, dan evaluasi berkala menjadi strategi organisasi/komunitas untuk mencapai keberhasilan aktivismenya. Strategi rekrutmen anggota baru untuk melibatkan lebih banyak kaum muda juga menjadi cara untuk mengembangkan dan mendukung keberhasilan aktivisme. Salah satunya adalah menggunakan media sosial seperti Instagram untuk menyebarkan informasi dan mengundang kaum muda untuk berdiskusi di grup WhatsApp. Seorang peserta muda mengungkapkan adanya kaderisasi, kegiatan rekrutmen dari kampung ke kampung, dan strategi pemberian insentif, seperti merchandise, untuk menarik keterlibatan kaum muda.

Dukungan pendanaan juga muncul sebagai faktor pendorong keberlangsungan dan keberhasilan aktivisme kaum muda. Selain pendanaan melalui donor, peserta dewasa menyebutkan adanya peluang bagi kaum muda untuk memanfaatkan dana desa, khususnya untuk kaum muda di desa.





### Faktor Eksternal

Perkembangan teknologi, media, dan gerakan global dan nasional dinilai peserta studi sebagai katalis yang mendukung keterlibatan dan juga kesuksesan aktivisme yang dilakukan kaum muda.

Teknologi dan media berperan memperluas akses informasi tentang isu sehingga meningkatkan kepedulian dan pemahaman kaum muda akan isu ILH dan mampu memobilisasi massa yang besar. Seorang peserta muda menyebutkan bahwa keterbukaan informasi, khususnya melalui internet dan media sosial, juga membuat kaum muda makin kritis dalam membahas permasalahan ILH. Peserta muda mengamati bahwa kaum muda sudah banyak mengakses dokumen-dokumen yang cukup rumit dan saintifik seperti laporan IPCC (laporan iklim oleh badan iklim dunia, The Intergovernmental Panel on Climate Change) dan jurnal-jurnal akademis.

Aksi kampanye kaum muda juga menjadi salah satu faktor pendukung kaum muda lainnya memperoleh informasi yang memengaruhi keterlibatan mereka dalam isu ILH. Salah satu contohnya adalah kampanye aktivis Greta Thunberg yang menjadi momentum gerakan perubahan iklim kaum muda dan mendorong kaum muda lainnya untuk memahami isu iklim dan terlibat dalam aktivisme. Peserta dewasa menambahkan adanya keinginan kaum muda untuk terhubung dengan perjuangan kaum muda yang ada di negara lain.

Di tingkat nasional, beberapa peristiwa di dalam negeri juga ditemukan terhubung dengan meningkatnya kepedulian dan keingintahuan kaum muda terhadap isu ILH. Seorang peserta muda menyebutkan penayangan film dokumenter *Sexy Killer* tahun 2019 menjadi salah satu momentum yang membuat kepedulian kaum muda terhadap isu ILH makin meningkat. Seorang peserta muda juga mengamati bahwa kaum muda makin sadar akan permasalahan ILH semenjak adanya pembongkaran kasus sawit dan tambang serta konflik lahan dan penggusuran yang mewarnai gejolak politik pada pemilu 2014.

**Walaupun tidak spesifik, kaum muda menyinggung kebijakan yang secara tidak langsung berperan dalam aktivisme yang dilakukan.** Peserta muda menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah yang mendorong kebebasan bersuara dan melakukan aktivisme juga dapat menjadi faktor pendukung keterlibatan kaum muda. Peserta muda juga menyampaikan salah satu program pemerintah sebagai pendorong kesadaran kaum muda terhadap isu-isu LH, contohnya program Adiwiyata yang memberikan penghargaan kepada sekolah-sekolah yang melakukan kegiatan-kegiatan terkait LH.

**Adanya forum internasional yang memfasilitasi keterlibatan kaum muda juga dianggap secara tidak langsung berperan dalam mendorong aktivisme kaum muda di Indonesia.** Salah satu peserta muda dalam FGD menyebutkan adanya peran dari forum-forum internasional dan afiliasi global terhadap keberhasilan aktivisme kaum muda dalam isu ILH. Keterpaparan dengan aktivisme global juga dapat menginspirasi aksi yang dilakukan dalam negeri dan memengaruhi momentum politik di tingkat nasional.

## Boks 4. Contoh Sukses yang Memotivasi

Kesuksesan dalam melakukan aktivisme dimaknai secara beragam oleh kaum muda, mulai dari hasil langsung dari kegiatan yang dilakukan sampai keberhasilan pada tataran perubahan perilaku atau kebijakan. Berikut pencapaian kaum muda yang dianggap sebagai kesuksesan:

### 1 Berhasil memengaruhi perubahan sistem dan kebijakan

Kampanye Diet Kantong Plastik dan aksi Pulau Plastik<sup>10</sup> dinilai berhasil mendorong perubahan kebijakan daerah terkait kantong plastik berbayar dan mendorong perubahan sistem pengelolaan limbah sampah. Di lingkungan kampus, aksi sipil seorang peserta berhasil meyakinkan minimarket di universitasnya untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai.

Selain itu, ada juga keberhasilan-keberhasilan kecil, seperti penundaan kebijakan yang merusak LH. Misalnya, kampanye #SaveKinipan yang berhasil mendorong pemerintah daerah memberikan hak hutan kepada masyarakat adat. Ada pula upaya menolak pertambangan batuan andesit melalui aksi Wadas Melawan yang berhasil menunda penggusuran selama beberapa hari. Selain itu, terdapat juga upaya-upaya aktivisme yang berhasil mengundurkan pembangunan PLTU di Batang dan Buleleng.

### 2 Adanya *buy-in* atau pengakuan dari pemangku kepentingan terhadap aksi kaum muda

Kaum muda juga menganggap aktivismenya berhasil ketika mampu mendapatkan pengakuan atau *buy-in* dari pemangku kepentingan yang terlibat seperti pemerintah atau perusahaan. Sebagai contoh, inovasi pengelolaan sampah di Surabaya berhasil mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah, data dari upaya pengukuran curah hujan yang dibuat kaum muda digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan program bank sampah yang dijadikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Lebih lanjut, kaum muda juga menyampaikan pengakuan pihak swasta dan organisasi lainnya sebagai bentuk keberhasilan. Misalnya, hasil riset komunitas kaum muda digunakan oleh perusahaan sektor pariwisata untuk pengelolaan sampah mereka, dan banyaknya undangan eksternal seperti universitas, kedutaan, maupun organisasi lainnya terhadap kaum muda yang menginisiasi kegiatan-kegiatan aktivisme LH.

### 3 Adanya perubahan perilaku masyarakat termasuk kaum muda lainnya

Salah satu peserta FGD menjelaskan keberhasilan yang dicapai adalah mengubah gaya hidup teman-temannya yang tinggal di luar kota besar untuk lebih ramah lingkungan seperti mengurangi penggunaan detergen dan plastik. Sejalan dengan itu, kaum muda lainnya mencontohkan keberhasilannya dalam menerapkan pola hidup ekologis dan mengajak keluarganya untuk mengurangi sampah, polusi udara, dan penggunaan bahan kimia. Contoh lain juga disebutkan oleh kaum muda yang berhasil mengajak ibu-ibu rumah tangga untuk tidak membuang minyak jelantah melainkan mengumpulkannya melalui program Migos (Minyak Goreng Bekas).

### 4 Makin terlibatnya kaum muda dalam menyuarakan isu LH

Keberhasilan juga banyak dimaknai kaum muda ketika mereka bisa menularkan informasi yang membuat kaum muda lainnya tertarik dan peduli pada isu LH. Beberapa peserta melihat adanya peningkatan jumlah kaum muda yang tertarik dan mengikuti kegiatan-kegiatan komunitasnya dalam isu LH dan selarasnya advokasi antarberbagai komunitas kaum muda.

<sup>10</sup> Pulau Plastik merupakan kampanye kolaboratif dalam menangani isu plastik sekali pakai di Bali dan sekitarnya.

Seorang peserta juga menyebutkan aktivismenya yang mampu menjangkau kaum muda di luar Jakarta sebagai bentuk pencapaian. Capaian lainnya adalah meningkatnya kaum muda yang lebih peduli dan kritis terhadap isu ILH melalui media sosial seperti Twitter. Seorang aktivis pelajar menceritakan bahwa semenjak bergabung dengan komunitas LH, banyak teman-temannya yang menggunakan isu ILH sebagai topik dalam latihan membuat pidato.

## 5 Adanya perubahan situasi hidup kelompok rentan yang terdampak perubahan iklim

Salah satu komunitas kaum muda menginisiasi pengelolaan limbah plastik berkelanjutan dengan melibatkan pemulung-pemulung di desanya dan berhasil meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pemulung dan mengurangi sampah plastik yang dibuang ke laut. Contoh lainnya, komunitas kaum muda yang bergerak di bidang energi terbarukan berhasil mengajak para petani agar mandiri energi, khususnya dalam mengatasi kekeringan. Di Purbalingga, komunitas ini membantu petani melakukan instalasi solar panel yang dapat menghasilkan aliran air untuk mengairi sawah di sekitarnya.

## 6 Tercapainya target dan dihasilkannya luaran (*output*) kegiatan

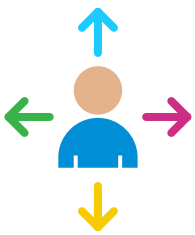
Kaum muda mengasosiasikan keberhasilan dengan dihasilkannya luaran dari kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Salah satu contohnya adalah keberhasilan dalam menerbitkan buku yang mendokumentasikan keresahan kaum muda soal perubahan iklim pada Hari Kemanusiaan Sedunia. Contoh-contoh lainnya termasuk terlaksananya aksi bersih-bersih yang berhasil mengumpulkan hingga 100 kg sampah dan terlaksananya kegiatan penanaman bakau.

## 7 Keberhasilan dalam memperoleh sumber pendanaan

Kemampuan berdikari dan mendiversifikasi sumber-sumber pendanaan sehingga tidak hanya bergantung pada satu atau dua donor juga menjadi pencapaian sendiri bagi gerakan kaum muda. Salah satu peserta FGD juga menyebutkan bahwa diterimanya proposal anggaran penghijauan desa sebagai bentuk kesuksesannya.

## 5.2 Faktor Penghambat Keterlibatan Kaum Muda

### Temuan Literatur



#### *Faktor Individu*

Meskipun belum mendalam, literatur sudah menyinggung masalah perbedaan karakteristik wilayah tempat tinggal kaum muda, kurangnya kemampuan berpikir kritis, dan dilema terhadap pilihan karier sebagai faktor yang menghambat keterlibatan kaum muda.

Organisasi kaum muda di perkotaan mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk berkembang (Ridwan & Wu, 2018) serta akses teknologi dan jaringan internet yang lebih baik dibandingkan kaum muda di perdesaan (Rahmawan, 2018). Kurniawan et al. (2021) mencatat masih rendahnya kemampuan berpikir kritis dan kepedulian kaum muda terhadap isu LH di sekitar mereka. Selanjutnya, Nilan (2018) mengungkapkan dilema yang dihadapi kaum muda untuk berkarier di perusahaan minyak sawit atau pertambangan yang lebih menjanjikan atau melanjutkan aktivismenya terhadap isu LH.

**Kurangnya minat kaum muda terhadap isu ILH muncul dalam literatur.** Nilan (2018) mendiskusikan tidak adanya ketertarikan kaum muda, masyarakat, dan media pemberitaan untuk bertindak terhadap isu kebakaran hutan. Parker et al. (2018) menyoroti bagaimana kaum muda belum sepenuhnya memahami siapa yang perlu bertanggungjawab terhadap perubahan iklim dan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasinya.



#### *Interaksi Sosial*

Literatur juga mendiskusikan praktik-praktik tokenistik yang menghambat keterlibatan bermakna kaum muda dalam penyusunan kebijakan.

Crosby (2013) menjelaskan bahwa bentuk keterlibatan kaum muda di institusi pendidikan berorientasi pada aktivitas konservasi lingkungan seperti kegiatan praktik membuang sampah, preservasi spesies hewan, berkemah, mendaki gunung, arung jeram, dan mencegah kerusakan hutan (Nilan, 2018).

Namun, Nilan (2015) berpendapat bahwa beberapa kegiatan yang disebutkan di atas bersifat seremonial dan tidak berorientasi pada upaya memahami secara kritis pentingnya aktivisme dalam isu ILH.

#### **Berbagai bentuk diskriminasi dan eksklusi sosial juga menjadi kendala terhadap keberlangsungan aktivisme kaum muda.**

Literatur mencatat ada bentuk diskriminasi terhadap kaum muda dari orang dewasa yang menganggap kaum muda tidak memiliki kapasitas dan apolitis (Azis et al., 2020) dan adanya penyisihan dan diskriminasi terhadap kaum muda dengan disabilitas dalam aktivisme (Meyers, 2017). Kaum muda yang aktif mendapatkan stigma dari kaum muda lainnya sebagai warga kelas rendah (Tanu & Parker, 2018) dan orang dewasa sering mendominasi diskusi dan aksi (Alam et al., 2019). Beberapa kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk isu ILH juga berbiaya besar sehingga kaum muda dari kalangan menengah ke bawah sulit mengaksesnya (Alam & Nilan, 2015).

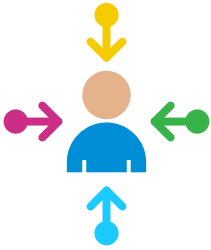


#### *Komunitas atau Organisasi*

**Lemahnya sistem informasi tentang isu krisis ILH di masyarakat menjadi tantangan bagi aktivisme kaum muda dalam membuat perubahan.**

Sekolah-sekolah belum memberikan pembelajaran isu perubahan iklim bagi siswa-siswanya (Nilan, 2015), sedangkan di beberapa universitas, gerakan kaum muda masih terkendala fasilitas kampus yang terbatas untuk mengakses informasi (Nilan, 2018).

**Permasalahan pendanaan juga menjadi tantangan.** Nilan (2018) mencatat adanya kesulitan kaum muda dalam mendapatkan pendanaan untuk inisiatif-inisiatif yang dilakukan. Donor-donor besar umumnya hanya mendukung kasus yang memiliki nilai politik yang besar (Alam et al., 2019).



### Faktor Eksternal

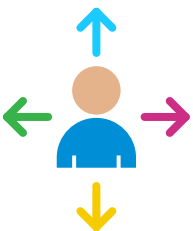
**Risiko keamanan dan keselamatan diri menjadi tantangan dalam aktivisme.**

Kaum muda kerap menghadapi risiko diinterogasi dan diintimidasi oleh polisi dan otoritas yang berwenang ketika melakukan aksi protes ke jalan (Alam, 2016). Sementara itu, aktivisme daring juga dapat dipermasalahkan karena dibatasi oleh peraturan dan pemerintah (Saud & Margono, 2021).

**Kaum muda belum banyak dilibatkan oleh pemerintah, terutama dalam perumusan kebijakan.** Sedikitnya keterlibatan kaum muda dalam perumusan kebijakan juga disampaikan oleh mayoritas peserta muda pada survei yang dilakukan Generasi Melek Politik di Riau (Amri et al., 2021c), Kalimantan Barat (Amri et al., 2021b), Sulawesi Tengah (Amri et al., 2021d), dan Gorontalo (Amri et al., 2021a).

Bentuk-bentuk kegiatan pemerintah yang melibatkan kaum muda juga masih bersifat simbolis (Kurniawan et al., 2021). Laporan survei kaum muda oleh Yayasan CERAH Indonesia dan Change.org juga mengungkapkan 63 persen kaum muda merasa bahwa permasalahan birokrasi termasuk lemahnya penegakan hukum, minimnya regulasi, kurangnya pemahaman pengambil kebijakan, dan rendahnya kemauan politik, telah menghambat pencapaian gerakan dalam isu perubahan iklim (CERAH & Change.org, 2020). Selain itu, pemerintah juga dinilai belum melihat isu perubahan iklim sebagai masalah nasional (Parker et al., 2018) dan kurang mendukung kegiatan kaum muda (Tanu & Parker, 2018).

## Temuan Utama



### Faktor Individu

**Sebagian peserta berpendapat bahwa masih terdapat kaum muda yang belum memiliki kepedulian terhadap permasalahan ILH.** Faktor ini juga terhubung dengan minimnya akses informasi, latar belakang pendidikan, dan status ekonomi yang membuat sebagian kaum muda tidak memiliki sumber daya, kapasitas, dan waktu untuk berpartisipasi.

Kaum muda dari kelas ekonomi bawah cenderung menghabiskan waktu untuk bekerja, sehingga tidak memiliki waktu untuk mengenal dan terlibat dalam isu ILH. Sebagian peserta muda juga berpandangan bahwa banyak kaum muda yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menyelesaikan urusan akademis di sekolah, sehingga tidak ada waktu untuk berpartisipasi dalam isu ILH.

**Peserta muda juga menyinggung kurangnya kemampuan berpikir kritis, terlebih lagi isu iklim adalah isu yang kompleks.**

Satu peserta dewasa juga berpendapat sama dan menyebutkan bahwa kaum muda masih belum bisa berpikir sistemis atau melihat permasalahan dari akarnya. Kaum muda cenderung berpikir secara pragmatis dan bermental *silo* (melihat isu secara terpisah) serta cenderung hanya mengikuti tren.

**Peserta muda menyebutkan tantangan individu yang berkaitan dengan orang terdekat, misalnya orang tua dan teman sebaya.**

Beberapa peserta menyebutkan adanya tuntutan dari orang tua untuk lebih memilih karier yang stabil dibanding bekerja di organisasi ILH. Sebagian lain menyebutkan tuntutan yang sama dari teman sebaya (*peer pressure*) atau tekanan sosial. Kaum muda usia sekolah menyebutkan bahwa izin dari orang tua sering kali menghambat aktivisme mereka, terlebih sebagian orang tua menganggap aktivisme merupakan kegiatan yang negatif.

**Bagi mereka yang sudah aktif dalam isu ILH, faktor individu berkaitan dengan kesehatan mental.** Seorang peserta muda mengaku bahwa ia kadang mengalami kelelahan mental atau trauma sekunder akibat mendampingi masyarakat yang menjadi korban konflik lahan.



### Interaksi Sosial

Baik peserta muda maupun peserta dewasa menyebutkan masih terpecahnya gerakan kaum muda sebagai salah satu tantangan. Peserta dewasa mengamati bahwa beberapa komunitas/organisasi kaum muda masih fokus pada isu dan kegiatan masing-masing sehingga sulit bersatu.

Peserta muda menambahkan bahwa kaum muda kadang memiliki persepsi dan sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi suatu persoalan. Peserta dari organisasi kaum muda adat juga menekankan masih kurangnya kolaborasi antara kaum muda adat dan kaum muda yang ada di perkotaan. Peserta lainnya juga menambahkan tantangan dalam mengaitkan persoalan yang dihadapi kaum muda adat dengan narasi perubahan iklim.

Tantangan lainnya adalah kesulitan dalam regenerasi, khususnya dalam merekrut kaum muda yang bersedia konsisten dalam aktivisme mereka. Gerakan kaum muda yang sifatnya sukarela dan banyak mengandalkan relawan menyebabkan tidak banyak kaum muda yang bertahan lama dalam gerakan. Peserta muda menyampaikan bahwa karakteristik kaum muda yang suka berpindah-pindah pekerjaan juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi konsistensi aktivisme kaum muda. Peserta muda lainnya menambahkan tanpa insentif yang tepat, sulit menjaga konsistensi keterlibatan kaum muda. Organisasi yang salah satu kegiatannya adalah memberikan kursus singkat kepada kaum muda mencatat dari sekian banyak kaum muda yang mengikuti kursus hanya sedikit kaum muda yang tetap aktif dalam isu ILH.

Tokenisme yang kerap dipraktikkan oleh pembuat kebijakan menjadi penghalang bagi kaum muda untuk bisa terlibat secara aktif dan bermakna dalam perumusan kebijakan. Kaum muda cenderung dibebani untuk juga menyediakan solusi pada saat menyampaikan kritik, padahal itu bukanlah tugas mereka. Seorang peserta muda juga menambahkan adanya ketidakpercayaan orang dewasa terhadap kemampuan kaum muda. Bentuk ketidakpercayaan ini misalnya dimanifestasikan dalam bentuk pengarahannya isu kaum muda oleh orang dewasa. Satu peserta lainnya juga menambahkan bahwa senior di organisasinya cenderung meremehkan pendapat kaum muda.

Terkait dengan interaksi dengan masyarakat, sebagian kaum muda menyebutkan rendahnya literasi iklim di masyarakat sebagai salah satu penghalang aktivisme mereka. Seorang kaum muda yang mendampingi petani misalnya menyebutkan bahwa perubahan cuaca dianggap sebagai takdir oleh petani.

Di sisi lain, kaum muda juga menyebutkan faktor internal kaum muda yang berdampak pada pemahaman masyarakat. Misalnya, sebagian aktivis muda masih sering menggunakan jargon dalam menyampaikan gagasan mereka sehingga sulit dipahami oleh publik yang lebih luas.

Peserta muda juga menyebutkan adanya sebagian masyarakat yang berorientasi pada keuntungan materi. Dua peserta muda yang mendampingi masyarakat adat menyebutkan adanya oknum di masyarakat yang justru mengizinkan praktik pembukaan lahan adat agar mendapatkan keuntungan materi. Kaum muda lainnya menyebutkan ada sebagian masyarakat yang mengikuti kegiatan jika dijanjikan kompensasi materi. Di samping itu, beberapa kaum muda juga menyebutkan bahwa masyarakat masih cenderung memandang negatif beberapa bentuk aksi sipil yang dilakukan kaum muda, misalnya saat kaum muda melakukan demonstrasi.



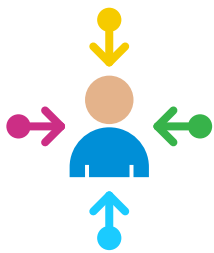
### Komunitas atau Organisasi

Faktor internal ini utamanya terkait dengan tantangan dukungan pendanaan. Organisasi kaum muda masih sulit mendapatkan pendanaan untuk kegiatan komunitas/organisasi mereka.

Beberapa kaum muda menyampaikan minimnya sumber pendanaan, terutama untuk aktivitas yang membutuhkan dana cukup besar, misalnya membangun teknologi pengelolaan limbah. Beberapa peserta muda sadar bahwa hal ini dapat pula disebabkan oleh terbatasnya informasi sumber pendanaan yang bisa mereka akses. Satu peserta muda merasa perlu adanya suatu wadah informasi donor yang bergerak dalam isu ILH. Sementara itu, peserta muda lainnya yang berpengalaman cukup lama dalam isu iklim melihat adanya risiko dari kehadiran donor. Menurutnya, kehadiran donor bisa memecah kaum muda berdasarkan agenda mereka sehingga kolaborasi atau kerja sama antarsesama kaum muda makin sulit tercapai.

Terkait dengan tata kelola organisasi kaum muda, satu peserta muda menyebutkan bahwa kaum muda masih perlu penguatan kapasitas dalam hal strategi pengelolaan organisasi yang baik dan efektif. Peserta muda lainnya mengamati adanya kendala birokrasi internal yang menghambat kegiatan di lapangan. Kendala ini makin terlihat saat situasi pandemi ketika sebagian besar kegiatan berubah dari tatap muka menjadi daring.

Nama besar organisasi juga terkadang menghambat kegiatan kaum muda khususnya saat berhadapan langsung dengan masyarakat karena berpotensi membuat masyarakat merasa inferior. Peserta muda lainnya menambahkan bahwa faktor kepemimpinan bisa berimplikasi pada jalan atau tidaknya organisasi secara berkelanjutan.



### Faktor Eksternal

Peserta studi ini menyebutkan tingkat risiko yang berbeda pada aktivisme ILH yang mereka jalani dan amati. Banyak kegiatan daring atau kegiatan yang 'aman' seperti membersihkan sampah, dilabeli sebagai aktivisme dengan risiko rendah.

Di saat yang bersamaan, aksi protes langsung terhadap pemerintah atau perusahaan besar dianggap sebagai aktivisme dengan risiko tinggi.

**Risiko keamanan yang dihadapi kaum muda serta kebijakan yang menghambat gerakan kaum muda merupakan faktor yang dominan disebutkan oleh peserta muda maupun dewasa.** Intimidasi, represi, dan kriminalisasi merupakan risiko yang sering disebutkan oleh kaum muda terutama bagi mereka yang bergerak dalam isu sensitif, misalnya konflik tambang dan perampasan lahan adat yang biasanya melibatkan pemilik modal atau penguasa. Seorang peserta muda usia sekolah menyatakan bahwa ia pernah diintimidasi oleh aparat keamanan saat berorasi tentang kesejahteraan masyarakat adat di depan kantor kementerian. Peserta lain menambahkan, bahkan saat melakukan aksi damai sekalipun, risiko represi dan kekerasan tetap ada, seperti yang ia alami saat diseret-seret oleh aparat keamanan padahal hanya menduduki jalan sambil membawa poster. Peserta lainnya menyampaikan bahwa gerakan kaum muda di daerah Papua kerap mendapatkan tekanan dari pemerintah atau pemilik kepentingan lain seperti korporasi. Dua peserta muda bahkan menyebutkan adanya risiko kehilangan nyawa dalam lingkup aktivisme yang mereka jalani.

**Risiko keamanan digital cukup sering disebutkan oleh peserta studi ini.** Pasal karet di UU ITE (UU No. 19/2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) merupakan topik yang sering muncul dalam pembahasan keamanan digital. UU ITE menciptakan pembatasan dalam berpartisipasi dan aktivis muda menjadi rentan dikriminalisasi saat mengkritik kebijakan ILH di media sosial.

Kondisi tersebut mematahkan semangat kaum muda dalam menyuarakan kritik atau aspirasi di ranah digital. Kekhawatiran lainnya adalah privasi dan keamanan digital. Seorang peserta muda menceritakan dirinya pernah mengalami *doxing* dan pemblokiran nomor Whatsapp yang berkaitan dengan aktivisme yang ia lakukan.

**Beberapa peserta juga menyebutkan adanya kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan isu ILH yang mereka perjuangkan.** Alih-alih berorientasi pada mitigasi perubahan iklim dan berpihak pada kelompok rentan, kebijakan pemerintah ada yang cenderung berpihak pada industri ekstraktif dan pemilik modal/korporasi. UU Ombinus dan UU Minerba merupakan kebijakan yang paling sering muncul sebagai kebijakan yang berpihak pada industri ekstraktif dan investor yang menyengsarakan masyarakat rentan, seperti masyarakat adat. Minimnya keberpihakan pemerintah pada mitigasi iklim dan pelestarian LH juga tercermin dalam proporsi APBN untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. APBN masih berpihak pada energi kotor dan kebijakan mengenai pajak karbon belum dianggap penting dan relevan oleh pembuat kebijakan.

**Di samping kebijakan, hambatan eksternal juga berkaitan dengan sistem politik dan sistem pendidikan nasional.** Pada sistem pendidikan misalnya, peta jalan pendidikan nasional cenderung berorientasi pada industri sehingga kurikulumnya pun dirancang untuk menyiapkan lulusan yang siap bekerja di sektor industri. Pekerjaan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan seperti bidang agraria cenderung tidak dilirik dan tidak dipandang menjanjikan. Seorang peserta dewasa menambahkan bahwa sistem pendidikan yang berorientasi pada industri ini akan menjadi ancaman jika tidak diimbangi dengan model ekonomi yang berkelanjutan.

**Peserta studi juga mengamati minimnya keterwakilan kaum muda di ranah politik.** Dua peserta muda mengamati bahwa sistem politik di Indonesia masih berbasiskan dinasti dan berpihak pada kelompok tua sehingga sulit bagi kaum muda untuk berpartisipasi aktif. Meskipun ada segelintir kaum muda di sistem politik, alih-alih mewakili suara kaum muda, mereka kerap mewakili suara keluarga atau suara partai. Kaum muda di DPR yang mau mendorong kebijakan yang berpihak pada ILH terhalang oleh sistem pengambilan keputusan yang berdasarkan fraksi. Di tingkat desa, seorang peserta berpendapat bahwa masih terdapat oknum di masyarakat yang justru mengizinkan praktik perambahan hutan ilegal karena ada dukungan aparat dan pihak yang berkuasa.

**Narasi media dan polarisasi juga disebut sebagai penghambat aktivisme kaum muda.** Kaum muda menilai media cenderung menonjolkan penokohan dan kisah inspiratif dalam meliput kegiatan mereka sehingga menciptakan jarak antara mereka dan kaum muda lainnya. Di samping itu, peserta lain menyebutkan bahwa polarisasi (yang bermula dari pilihan politik) di antara kaum muda menghambat terbentuknya solidaritas kaum muda.

**Terakhir, hambatan eksternal lain yang disebutkan oleh peserta adalah kesenjangan akses informasi.** Kesenjangan akses ini diamati pada kaum muda Jawa dan luar Jawa, kaum muda di wilayah Indonesia barat dan Indonesia timur, serta kaum muda urban dan kaum muda di daerah. Kesenjangan ini juga berkaitan dengan infrastruktur seperti koneksi internet, akses pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi.

### 5.3 Perubahan Praktik dan Kesempatan yang Berkaitan dengan Keterlibatan Kaum Muda

## Temuan Literatur

Telaah literatur menyoroti bahwa keterlibatan kaum muda di Indonesia bermula dari gerakan politik dan terus mengalami peningkatan (Ramli, 2012; Saud et al. 2020; Saud & Margono, 2021), terutama setelah jatuhnya rezim Orde Baru (Ida et al., 2020b; Parker & Nilan, 2013; Tanu, 2014). Tidak hanya keterlibatan politik secara umum, kepedulian dan keterlibatan kaum muda, khususnya para mahasiswa, terhadap isu ILH juga makin meningkat (Nilan, 2017). Peningkatan ini juga dikonfirmasi oleh survei kaum muda pada tahun 2020, yang menemukan bahwa 89% kaum muda merasa khawatir akan dampak perubahan iklim (CERAH & Change.org, 2020). Namun, beberapa peneliti beranggapan bahwa gerakan kaum muda saat ini relatif lebih kecil ruang lingkungannya dan aksi turun ke jalan lebih jarang dilakukan dibandingkan pada masa Orde Baru (Aspinall, 2012; Nilan, 2018). Saat ini, gerakan kaum muda mulai meninggalkan bentuk-bentuk aktivisme yang mengikutsertakan perusakan atau menempatkan orang lain dalam bahaya (Alam, 2016).

Bentuk-bentuk aktivisme yang makin diminati kaum muda dilakukan melalui media kreatif, pengabdian masyarakat (*community service*), dan advokasi kebijakan. Alam (2016) membahas bentuk-bentuk kampanye kreatif yang dilakukan aktivis-aktivis muda dalam upaya melindungi hutan kota Babakan Siliwangi melalui pertunjukkan teatrikal, tari-tarian, maupun pantomim. Kaum muda Indonesia juga terlibat mengelola kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat (Saud et al., 2020). Aktivisme kaum muda juga saat ini merambah ke bentuk-bentuk advokasi kebijakan (Nilan, 2015), salah satunya partisipasi dalam forum-forum pembangunan (Argo et al., 2016).



## Temuan Utama

**Peserta muda mengamati adanya perubahan tren keterlibatan kaum muda selama lima tahun terakhir, yang mencakup perubahan tren keaktifan, kepedulian dan pemahaman terhadap isu, dan strategi aksi gerakan.**

Dari segi keaktifan, studi ini menemukan bahwa sudah makin banyak kaum muda yang peduli dan aktif dalam menyuarakan permasalahan ILH. Kelompok yang aktif pun makin beragam, bahkan mencakup kelompok/komunitas yang tidak berkaitan langsung dengan isu iklim seperti *fandom* K-pop dan *influencer* muda. Dahulu, kaum muda lebih banyak terlibat menjadi relawan di organisasi besar. Kini, sudah banyak yang terjun langsung dalam kegiatan aktivisme ILH, bahkan menginisiasi gerakan/kegiatan ILH.

Pemahaman kaum muda terhadap permasalahan ILH juga sudah mulai meningkat dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Dahulu, perubahan iklim hanya dipahami sebagai pemanasan global/peningkatan suhu bumi dan mencairnya es di kutub utara. Saat ini kaum muda sudah mampu melihat keterkaitan antara perubahan iklim dengan permasalahan lainnya seperti bencana alam, ketahanan pangan, kerusakan ekosistem, konflik di masyarakat, hingga perebutan kepentingan dan kekuasaan. Beberapa peserta sepakat bahwa perubahan iklim sudah makin dekat dan nyata dirasakan oleh kaum muda dan masyarakat secara umum, terutama semenjak makin banyaknya bencana alam yang terjadi seperti banjir bandang di DKI Jakarta awal tahun 2020 atau kebakaran besar hutan Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2019. Peningkatan pemahaman ini juga dipengaruhi oleh faktor struktural eksternal pendukung keterlibatan kaum muda, seperti akses informasi yang makin luas akibat perkembangan teknologi, media, dan berbagai aktivisme di tingkat global dan nasional.

Dilihat dari strategi aksi, beberapa peserta muda menyampaikan adanya perubahan media aktivisme dan bertambahnya bentuk aktivisme yang lebih kreatif. Aksi kampanye makin banyak yang bergeser ke metode daring.

Sementara itu, aksi turun ke jalan yang dahulu biasanya berupa demonstrasi sekarang dilakukan dalam bentuk yang lebih kreatif, seperti pawai atau *long march* dengan menggunakan atribut protes dan kostum kekinian. Peserta lain juga menambahkan bahwa dahulu kegiatan yang dilakukan terbatas pada upaya kuratif seperti penanaman pohon di lahan tandus, tetapi sekarang kegiatannya lebih bersifat preventif dan menjadi bagian dari gaya hidup, misalnya gerakan *zero waste* dan gaya hidup minimalis.

Dalam pandemi Covid-19, peserta muda memiliki pengalaman dan pengamatan yang berbeda-beda dalam merespons perubahan pola aktivisme yang terjadi. Beberapa peserta menyampaikan bahwa pandemi memiliki dampak positif, seperti makin banyak kaum muda bergabung dalam kegiatan, yang diasumsikan karena mereka memiliki lebih banyak waktu luang. Gerakan Pulang Kampung yang diinisiasi oleh kaum muda adat juga merupakan salah satu respons dari banyaknya kaum muda adat yang kembali ke kampung saat pandemi. Peserta lainnya menyampaikan bahwa pandemi tidak terlalu berpengaruh terhadap kegiatan aktivisme kaum muda. Sementara itu, beberapa peserta lain mengamati adanya penurunan aktivitas semenjak pandemi dikarenakan perpindahan dari kegiatan tatap muka menjadi kegiatan daring, padahal kecenderungan aksi sipil kaum muda selama ini lebih banyak melalui aktivitas tatap muka. Perubahan situasi kegiatan ini membuat kaum muda memerlukan waktu lebih untuk beradaptasi.

### Boks 5. Media Aktivisme ILH Kaum Muda

Perkembangan teknologi digital yang pesat membuat kaum muda lebih banyak terlibat dalam gerakan secara daring terutama melalui media sosial (Rahmawan, 2018; Saud et al., 2020; Warren et al., 2016). Alam (2020) mendiskusikan tingginya popularitas media sosial sebagai media kaum muda dalam mengampanyekan dan mengelola kegiatan-kegiatan aktivisme mereka. Lebih lanjut, keberadaan media sosial terbukti membantu kaum muda dalam memperluas pengaruh gerakan sosial pro-ILH. Dalam konteks isu perubahan iklim dan teknologi, *Twitter* merupakan media sosial yang populer digunakan di Indonesia (Molaei, 2015).

Tingginya penggunaan media sosial di kalangan kaum muda juga mendukung fenomena *fan-based activism* yang saat ini cukup populer. *Fan-based activism* merupakan upaya para penggemar publik figur tertentu dalam mengatasi masalah sipil atau politik melalui keterlibatan dan penyebaran konten budaya populer secara strategis (Jenkins, 2011). Di Indonesia, salah satu contohnya adalah aktivisme dari komunitas penggemar K-pop (Andini & Akhni, 2021).

Selain aktivisme melalui media sosial, aktivisme turun ke jalan masih dianggap relevan karena merupakan bentuk perwujudan aspirasi politik kolektif kaum muda untuk terlibat secara sadar (Alam, 2016). Aksi turun ke jalan yang dilakukan oleh kaum muda pro-ILH mengangkat nilai-nilai yang berbeda dari aksi yang dilakukan kelompok dewasa atau disebut sebagai *stylized revolutions*. Lee dalam Alam (2020) menjelaskan bahwa *stylized revolutions* merupakan aksi yang dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol yang identik dengan kaum muda dan merefleksikan identitas budaya mereka.

Aksi protes yang dilakukan oleh kaum muda melalui media sosial tidak selalu terpisah dari aksi turun ke jalan. Sejak 2013, aksi protes melalui media sosial mulai dikenal secara luas dan mampu memengaruhi narasi pro-ILH di Indonesia. Meski begitu, beberapa kelompok kaum muda berpendapat bahwa aksi melalui media sosial belum cukup menciptakan transformasi politik (Alam, 2016). Di sisi lain, beberapa studi menyebutkan bahwa media sosial memiliki peranan besar dalam mendukung keterlibatan masyarakat dalam aksi protes secara langsung (Alam, 2020; Hersinta & Sofia, 2020; Saud & Margono, 2021).

## 5.4 Dukungan yang Dibutuhkan dan Diharapkan Kaum Muda

### Temuan Literatur

Meskipun kepedulian kaum muda terhadap krisis ILH terus meningkat, literatur menyinggung masih perlunya dukungan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas mereka. Dukungan dapat berupa pendidikan dan pelatihan untuk memperdalam pemahaman dan keterampilan terkait isu agar dapat mengelola kegiatan yang lebih efektif dan mendorong kebijakan berbasis bukti (Kurniawan et al., 2021). Keterlibatan orang tua juga diperlukan agar mereka sendiri lebih paham dan dapat mendukung anak-anak mereka untuk aktif. Donor-donor yang membantu pendanaan kegiatan kaum muda juga diharapkan untuk tidak terlalu birokratis dan kaku (Ridwan & Wu, 2018).

Literatur membahas perlunya ruang bagi kaum muda untuk terlibat, berkolaborasi, dan berjejaring secara aman. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat membuat ruang aman bagi kaum muda untuk melakukan aktivisme. Kolaborasi antara orang dewasa dan kaum muda juga perlu terus didukung (Ridwan & Wu, 2018). Selain itu, keterlibatan aktif kaum muda untuk memengaruhi kebijakan atau membuat perubahan sosial juga perlu terus didorong (Karliani et al., 2019) karena masih rendahnya keterlibatan kaum muda dalam penyusunan kebijakan (Amri et al., 2021a, 2021d, 2021b, 2021c).

## Temuan Utama

### **Kaum muda dalam studi menyampaikan berbagai kebutuhan peningkatan kapasitas, antara lain kemampuan berpikir kritis dan pemahaman terhadap isu iklim dan isu-isu sosial lainnya yang saling terhubung untuk mendukung keberhasilan gerakan.**

Beberapa peserta mengemukakan masih dibutuhkannya berbagai bentuk peningkatan kapasitas kaum muda agar lebih memahami isu ILH yang ada di sekitar. Penyebarluasan isu ini dinilai perlu dimulai dari bangku sekolah sehingga para guru juga perlu dibekali pengetahuan yang cukup. Seorang peserta muda menganggap perlu adanya peningkatan kapasitas kaum muda di daerah perdesaaan agar lebih peduli terhadap isu ILH.

Kapasitas lain yang penting untuk ditingkatkan adalah kemampuan berpikir kritis. Menurut para peserta muda, kemampuan ini diperlukan untuk dapat melihat isu iklim dalam perspektif lintas sektor dan tata kelola sistem sehingga kaum muda dapat menghasilkan ide-ide inovatif untuk mengatasinya. Kemampuan berpikir kritis ini demikian penting sehingga peserta muda menganggapnya perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah formal.

Dukungan peningkatan kapasitas juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik komunitas kaum muda. Misalnya, peserta muda menyampaikan perlunya pelatihan terkait advokasi, kampanye, dan *lobbying* yang efektif untuk mendorong keberhasilan aktivisme. Contoh lain, dalam gerakan yang mendukung hak masyarakat adat, kemampuan mengelola tanah adat juga diperlukan.

**Kebutuhan untuk selalu berkolaborasi dan berjejaring bagi kesuksesan dan keberlanjutan gerakan kaum muda perlu didukung oleh berbagai pihak.** Kaum muda dalam studi ini juga menekankan pentingnya ruang untuk berkolaborasi dan berjejaring antar komunitas kaum muda. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, universitas, dan organisasi donor dalam bentuk penyediaan ruang dan kesempatan bagi kaum muda untuk saling terhubung dan berjejaring sangat dibutuhkan. Melalui kolaborasi dan jejaring, kaum muda dapat membangun solidaritas, mendapatkan akses pendanaan, dan memenuhi kebutuhan spesifik gerakannya, misalnya bantuan ahli hukum untuk mendapatkan perlindungan. Salah satu peserta muda juga mengharapkan makin bermunculannya *start-up* atau *social enterprise* yang bergerak dalam isu ILH dan mendorong kolaborasi dengan kaum muda.

**Kaum muda juga mengemukakan bahwa kebijakan yang mendukung keterlibatan kaum muda dan pendanaan kegiatan dibutuhkan untuk mendukung aktivisme.** Peserta muda menyadari bahwa sudah ada beberapa peraturan yang mengakui peran kaum muda, tetapi pemerintah dan masyarakat dirasa masih sangat konservatif dalam menginterpretasikan peraturan tersebut. Sebagai contoh, partisipasi masih dianggap sekadar formalitas sehingga partisipasi yang bermakna perlu digiatkan. Berangkat dari persoalan tersebut, seorang peserta menyinggung perlunya lebih banyak kebijakan terkait isu ILH yang mendukung aktivisme kaum muda. Contoh kebijakan yang memfasilitasi dan mendukung tercapainya tujuan gerakan kaum muda yakni regulasi kantong plastik berbayar di Jakarta. Peserta menganggap bahwa sudah banyak masyarakat yang tahu tentang program-program yang ada, tetapi kurang mendapatkan insentif dari pemerintah. Selain itu, program-program tersebut belum dikelola dari sisi regulasi.

Peserta muda juga mengemukakan bahwa dukungan finansial dan pendanaan juga diperlukan untuk mendukung keterlibatan kaum muda. Di sisi lain, seorang peserta mengaku dirinya menghindari dukungan dana dari pemerintah karena tidak ingin dipaksa melakukan kegiatan yang bukan agenda gerakan kaum muda. Peserta lain juga menganggap bahwa masalah pendanaan bukan segalanya sehingga peran sponsor atau donor tidak terlalu penting.

## 5.5 Masa Depan yang Dicita-citakan

Studi ini juga menggali situasi masa depan yang diharapkan oleh kaum muda terkait dengan aktivisme ILH. Berikut adalah sintesis dari berbagai harapan kaum muda yang disampaikan dalam studi.

### Komunitas kaum muda dapat berkolaborasi secara lebih luas

Kaum muda menyinggung harapan untuk dapat membangun kerja sama antara kaum muda kota dan desa termasuk pemuda adat. Sinergi antarkomunitas kaum muda diharapkan dapat memengaruhi kebijakan, mendorong mobilisasi dan edukasi publik, dan menghubungkan aktivisme isu ILH dengan isu sosial lainnya. Kolaborasi-kolaborasi yang dibangun juga diharapkan dapat membentuk jejaring dan platform berbagi informasi termasuk mengenai bentuk alternatif kampanye, potensi pendanaan, dan lapangan kerja hijau. Kolaborasi ini diperlukan tidak hanya sesama kaum muda, tetapi juga dengan masyarakat dan pemangku kepentingan di sekitarnya.

### Lebih banyak kaum muda yang terlibat

Kaum muda menyampaikan harapannya agar makin banyak kaum muda lain yang terlibat aktif dan berkontribusi dalam gerakan ILH. Selain itu, kaum muda diharapkan makin terbuka untuk selalu belajar untuk lebih kreatif, menerima kritik dan saran, serta menikmati proses keterlibatannya dalam aktivisme. Salah satu peserta juga berharap agar tokoh-tokoh muda dapat memelopori gaya hidup yang lebih berkelanjutan supaya meluas ke kaum muda lainnya.

### Kaum muda dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan secara lebih bermakna

Kaum muda berharap agar mereka lebih dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, tidak hanya sekadar formalitas untuk memenuhi syarat keterwakilan kaum muda atau praktik tokenistik.

Kaum muda juga berharap adanya keterwakilan yang adil bagi kelompok-kelompok yang terdampak perubahan iklim dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, ada pula harapan akan ruang aman untuk menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi usia.

### Pemerintah lebih berperan mendukung aktivisme kaum muda

Kaum muda berharap pemerintah mau lebih mendengar suara kaum muda supaya dapat menghasilkan kebijakan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kaum muda juga berharap pemerintah membuka kembali ruang demokrasi dengan memberikan kesempatan dan ruang yang aman bagi kaum muda untuk menyampaikan aspirasinya. Salah satunya, dengan tidak menekan atau menangkap aktivis-aktivis yang melakukan aksi demonstrasi. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memberi kesempatan lebih besar untuk berkolaborasi dengan kaum muda dalam penyusunan kebijakan.

### Masyarakat luas lebih mendukung aktivisme kaum muda

Kaum muda juga mengharapkan adanya dukungan masyarakat yang lebih luas, karena perubahan tidak dapat diwujudkan hanya oleh kaum muda. Masyarakat diharapkan untuk turut berpartisipasi dalam gerakan-gerakan, lebih menghargai bentuk-bentuk aktivisme kaum muda, dan tidak merendahkan aksi yang dilakukan. Masyarakat juga diharap lebih peduli terhadap isu-isu ILH dan berani menyuarakan pendapat, khususnya kelompok masyarakat yang terdampak perubahan iklim secara langsung.

06

## Studi Kasus

Bagian ini merangkum temuan studi kasus yang dilakukan terhadap empat gerakan terpilih dengan menganalisis lanskap keterlibatan kaum muda dan faktor-faktor yang memengaruhi gerakan.

Tidak tersedia atau kurang relevannya beberapa informasi gerakan, khususnya untuk gerakan tipe 2, disebabkan oleh perbedaan karakteristik dan tingkat kedalaman informasi yang diperoleh antara gerakan tipe 1 dan tipe 2.<sup>11</sup> Penjabaran temuan yang lebih terperinci untuk setiap gerakan dapat dilihat pada Lampiran 3.

<sup>11</sup> Gerakan tipe 1 merupakan organisasi/komunitas yang terpilih sebagai studi kasus utama sedangkan gerakan tipe 2 merupakan organisasi/komunitas yang terpilih sebagai studi kasus pelengkap.

## 6.1 Lanskap Keterlibatan Kaum Muda per Kasus

	GDIKP	Jaga Rimba	SCC - Green Camp	IYCTC
<b>Tujuan/ agenda perubahan</b>	Misi utama GIDKP adalah mengubah perilaku masyarakat secara masif dalam penggunaan plastik sekali pakai. Misi tersebut dicapai dengan fokus dari sisi hulu yang mengintervensi plastik sebelum menjadi sampah, bukan dari segi hilir yang mengintervensi plastik ketika sudah menjadi sampah.	Jaga Rimba dibentuk sebagai gerakan kaum muda yang berfokus dalam pelestarian hutan dan turut aktif mengadvokasikan perlindungan hak masyarakat adat atau komunitas lokal yang terdampak. Pembentukan Jaga Rimba juga didorong oleh tujuan besar untuk membangun wadah bagi kaum muda untuk belajar, berdialog, serta menyoroti hak-haknya.	SCC - Green Camp merupakan program yang diinisiasi oleh Change.org Indonesia untuk mempertemukan dan meningkatkan kapasitas perempuan penggerak perubahan dalam mendorong kampanye terkait isu iklim dan lingkungan hidup.	IYCTC merupakan koalisi kaum muda yang bertujuan untuk mendekatkan isu pengendalian tembakau kepada lebih banyak orang, khususnya kaum muda. Selain itu, IYCTC juga berupaya untuk mendorong praktik keterlibatan kaum muda secara bermakna dalam isu pengendalian tembakau.
<b>Bentuk Keterlibatan Sipil</b>	Advokasi kebijakan, edukasi, kerja sama program dengan lembaga lain.	Peningkatan kesadaran, menyediakan wadah berjejaring, dan aksi protes, baik dilakukan secara digital maupun tatap muka.	Pelatihan dan pendampingan untuk membangun komunitas dan jejaring bagi perempuan penggerak perubahan di Indonesia	Menyediakan wadah belajar dan berjejaring bagi kaum muda dalam isu pengendalian tembakau, advokasi kebijakan, serta menyusun berbagai pedoman pelibatan kaum muda.
<b>Jalan Keterlibatan Sipil</b>	Latar belakang pekerjaan dan pendidikan terkait ILH, keterlibatan dalam jejaring yang berlatar belakang isu ILH.	Pengalaman bergabung di organisasi terkait ILH, hobi dan keinginan yang sama untuk belajar isu ILH, terinspirasi dari penggerak Jaga Rimba.	Informasi tidak tersedia.	Informasi tidak tersedia.
<b>Dimensi Keterlibatan Sipil</b>	Komitmen untuk berkontribusi dalam isu ILH, kemampuan mengatur tata kelola organisasi untuk memperkuat gerakan.	Keresahan bersama terkait isu ILH, kohesi sosial (solidaritas) dalam gerakan, optimisme dalam memperluas gerakan kaum muda dalam isu ILH khususnya di wilayah non-perkotaan.	Kolaborasi antarpeserta pelatihan serta kedekatan peserta dengan fasilitator setelah pelatihan selesai. Komitmen sipil terbangun dengan keyakinan bahwa perubahan dapat dimulai dari hal kecil.	Kolaborasi antaranggota terbangun untuk mendukung agenda perubahan koalisi. Komitmen bersama dalam memperjuangkan isu partisipasi kaum muda yang bermakna.
<b>Strategi Pelibatan Kaum Muda</b>	Tidak ada target khusus untuk merekrut kaum muda dalam kepengurusan, tetapi citra sebagai organisasi kaum muda terbangun melalui pendiri yang didominasi kaum muda.	Tidak ada sistem rekrutmen resmi dan keanggotaan tidak dikhususkan bagi kaum muda saja.  Sistem keanggotaan dan pembagian peran dilakukan secara sukarela dan tidak ada struktur organisasi resmi.	Tidak menyasar kaum muda secara khusus, tetapi banyak diikuti perempuan muda dengan beragam latar belakang.  Kanal daring membuat pelamar didominasi usia muda.	Menargetkan kaum muda, baik secara individu maupun organisasi dengan latar belakang yang beragam untuk aktif menyoroti isu pengendalian tembakau.

	<b>GDIKP</b>	<b>Jaga Rimba</b>	<b>SCC - Green Camp</b>	<b>IYCTC</b>
	Program Envirochallenge mengedukasi kaum muda usia SMA terkait ILH. Kaum muda juga dilibatkan dalam kampanye sosial.	Kampanye melalui media sosial menjangkau dan memperluas jejaring kaum muda.		<p>Anggota didominasi kaum muda berusia 15–24 tahun; memprioritaskan rekrutmen bagi anggota yang ingin belajar, bergerak, dan berasal dari kelompok penyandang disabilitas dan gender yang beragam.</p> <p>Rekrutmen anggota melalui pemetaan organisasi, persuasi, mengisi pakta integritas (tidak berafiliasi dengan industri rokok dan komitmen pencegahan kekerasan)</p> <p>Pernyataan bersama yang tidak mengikat organisasi anggota, sehingga organisasi anggota memiliki kebebasan lebih.</p>

## 6.2 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Perubahan

	<b>GDIKP</b>	<b>Jaga Rimba</b>	<b>SCC - Green Camp</b>	<b>IYCTC</b>
<b>Faktor Pendukung</b>	<p><b>Faktor Interaksi Sosial</b></p> <p>Keterlibatan dan interaksi dengan organisasi masyarakat sipil dalam jaringan dan aliansi global dan nasional.</p> <p>Interaksi dengan mitra pemerintah, donor, dan pemangku kepentingan lain untuk advokasi.</p> <p><b>Faktor Komunitas</b></p> <p>Rapat kerja setiap lima tahun sekali (<i>bootcamp</i>) untuk membahas agenda dan strategi gerakan.</p> <p>Kepakaran SDM pengurus, seperti keahlian di bidang hukum dan komunikasi.</p>	<p><b>Faktor Individu</b></p> <p>Peran penggerak Jaga Rimba dalam menggerakkan kegiatan dan menginspirasi kaum muda untuk bergabung.</p> <p><b>Faktor Interaksi Sosial</b></p> <p>Relasi dengan sesama anggota Jaga Rimba (pertemanan yang erat), mitra organisasi, serta komunitas kaum muda dalam mendukung kegiatan dan keberlangsungan gerakan.</p> <p>Dukungan dari orang dewasa atau pemangku kepentingan, seperti respons positif dari masyarakat adat, dukungan orang tua, akses literatur dan film untuk diskusi.</p>	<p><b>Faktor Interaksi Sosial</b></p> <p>Bantuan narasumber pelatihan dari lembaga lain, serta mitra pendukung dalam mengangkat cerita peserta.</p> <p>Dukungan mitra dan jaringan OMS dalam menyebarkan informasi mengenai program.</p> <p><b>Faktor Komunitas</b></p> <p>Ketersediaan mekanisme pengukuran hasil dan pendokumentasian capaian program yang ditetapkan sejak awal.</p> <p>Persyaratan kehadiran penuh saat pelatihan mendorong komitmen peserta.</p>	<p><b>Faktor Interaksi Sosial</b></p> <p>Kolaborasi dan upaya saling belajar antaranggota koalisi.</p> <p>Keberagaman anggota koalisi (nasional dan daerah) menaikkan posisi tawar dalam advokasi.</p> <p>Keterlibatan beragam kelompok kaum muda di luar isu tembakau ke lebih banyak kaum muda.</p> <p>Peran generasi senior sebagai sekutu yang mendampingi pendirian koalisi serta memfasilitasi relasi dengan organisasi donor.</p> <p>Upaya bersama antara generasi senior (sekutu) dan kaum muda untuk saling belajar, serta bekerja dengan setara dan bermakna.</p>

	<b>GDIKP</b>	<b>Jaga Rimba</b>	<b>SCC - Green Camp</b>	<b>IYCTC</b>
	<p>Pembenahan tata kelola organisasi untuk memperkuat akses pendanaan.</p> <p>Adanya sistem <i>monitoring</i> dalam program (Envirochallenge) untuk perbaikan program.</p> <p><b>Faktor Eksternal</b></p> <p>Pandemi Covid-19 memperluas jangkauan audiens karena perubahan metode kegiatan menjadi daring.</p> <p>Penerapan kurikulum pendidikan tahun 2013 dan program sekolah Adiwiyata mendorong penerimaan program Envirochallenge.</p>	<p><b>Faktor Komunitas</b></p> <p>Struktur organisasi dan keanggotaan yang cair dan dinamis memungkinkan pembagian tugas yang fleksibel dan memudahkan kaum muda.</p> <p>Karakteristik anggota yang beragam memengaruhi dinamika pertukaran informasi dan pengetahuan. Anggota dari wilayah <i>urban</i> memiliki akses informasi yang lebih luas, sedangkan anggota dari wilayah <i>suburban</i> memiliki pengalaman spesifik terpapar dampak perubahan iklim.</p> <p><b>Faktor Eksternal</b></p> <p>Peran media sosial dan berita di TV membuat kaum muda tertarik mendalami isu ILH, mencari komunitas, dan bergabung di Jaga Rimba.</p>	<p>Pendampingan dari pelaku kampanye yang telah berhasil pada saat pelatihan.</p> <p>Penjangkauan dan dukungan bagi peserta setelah pelatihan selesai, seperti dalam meninjau ulang strategi kampanye, pelaksanaannya, serta advokasi lanjutan.</p> <p>Materi pelatihan yang beragam dan sesuai kebutuhan peserta.</p>	<p>Fleksibilitas donor dalam memunculkan ide-ide pengembangan gerakan.</p> <p><b>Faktor Komunitas</b></p> <p>Model gerakan koalisi yang bersifat terbuka, fleksibel, dan adaptif membuat gerakan berkembang cepat.</p> <p>Inisiatif penyusunan panduan mendatangkan mitra donor baru bagi koalisi.</p> <p>Fleksibilitas sekretariat nasional dalam mengalokasikan anggaran tambahan mampu mendukung kegiatan advokasi anggota di daerah serta komunikasi dengan pembuat kebijakan.</p>
<b>Faktor Penghambat</b>	<p><b>Faktor Internal</b></p> <p>Citra sebagai organisasi kaum muda menyulitkan advokasi.</p> <p>Terbatasnya waktu, pendanaan, dan pergeseran prioritas GIDKP membuat program (Envirochallenge) terhenti.</p> <p><b>Faktor Eksternal</b></p> <p>Pandemi Covid-19 membatasi advokasi yang biasa dan lebih efektif dilakukan secara tatap muka.</p> <p>Dinamika pemangku kepentingan dan politik daerah, termasuk pergantian kepemimpinan instansi kunci, perubahan prioritas instansi, serta pengaruh kebijakan.</p>	<p><b>Faktor Interaksi Sosial</b></p> <p>Komentar negatif dari sesama kaum muda, ketidakpercayaan publik terhadap isu yang diusung, serta cemoohan dari kaum muda lainnya.</p> <p>Minimnya dukungan sekolah dan orang tua, komentar negatif dari masyarakat terkait kompetensi dan usia anggota yang masih muda, serta praktik tokenistik oleh pemangku kebijakan.</p> <p><b>Faktor Komunitas</b></p> <p>Keterbatasan pendanaan organisasi dan kesibukan anggota.</p> <p>Sifat keanggotaan yang sukarela membuat anggota sulit berkomitmen penuh dalam pengelolaan komunitas.</p>	<p><b>Faktor Interaksi Sosial</b></p> <p>Pandemi Covid-19 mengubah mode pelaksanaan pelatihan menjadi daring sehingga perlu modifikasi sesi pelatihan. Beberapa materi dipangkas dan hal ini memengaruhi interaksi antarpeserta.</p> <p>Beragamnya tingkat pengetahuan peserta terkait isu ILH memunculkan kebutuhan akan strategi pelatihan yang beragam pula.</p> <p>Kesulitan peserta dalam merumuskan strategi kampanye yang jelas dan terukur setelah pelatihan selesai.</p> <p>Tantangan birokrasi dalam pelaksanaan kampanye khususnya bagi peserta yang berafiliasi dengan organisasi.</p>	<p><b>Faktor Komunitas</b></p> <p>Keberagaman anggota koalisi memunculkan tantangan keterlibatan anggota secara efektif di seluruh kegiatan dengan keterbatasan pendanaan.</p> <p><b>Faktor Interaksi Sosial</b></p> <p>Organisasi anggota yang bergerak dalam berbagai isu sering kali kurang serius dalam melihat isu rokok.</p> <p>Ada perbedaan cara pandang dan cara kerja dalam interaksi kaum muda dengan generasi senior. Pemberian arahan yang detail dari generasi senior kadang membuat kaum muda merasa bergantung.</p>



	<b>GDIKP</b>	<b>Jaga Rimba</b>	<b>SCC - Green Camp</b>	<b>IYCTC</b>
	<p>Intervensi dari industri plastik dalam mengganggu upaya pengurangan plastik sekali pakai, misal dengan mendekati pemerintah.</p> <p>Kurangnya pemahaman masyarakat dan media seputar isu plastik.</p>	<p>Persoalan jarak dan keuangan pribadi membuat anggota sulit berpartisipasi.</p> <p>Minimnya kemampuan dalam pengelolaan komunitas.</p> <p><b>Faktor Eksternal</b></p> <p>Pandemi Covid-19 mengubah mode penyelenggaraan kegiatan dan membuat tidak semua anggota tertarik berpartisipasi dalam kegiatan daring.</p> <p>Peretasan media sosial yang dialami anggota Jaga Rimba dalam aksi demonstrasi.</p>	<p>Beragamnya tingkat pengetahuan peserta terkait isu ILH memunculkan kebutuhan akan strategi pelatihan yang beragam pula.</p> <p>Kesulitan peserta dalam merumuskan strategi kampanye yang jelas dan terukur setelah pelatihan selesai.</p> <p>Tantangan birokrasi dalam pelaksanaan kampanye khususnya bagi peserta yang berafiliasi dengan organisasi.</p>	<p>Arahan yang detail dari donor kadang menimbulkan dinamika interaksi yang membuat kaum muda merasa tidak dipercaya dan memengaruhi fleksibilitas dalam bergerak.</p> <p><b>Faktor Eksternal</b></p> <p>Pengaruh industri rokok sebagai hambatan struktural yang menciptakan bias dan mispersepsi publik serta membajak gerakan progresif di Indonesia. Hal ini menyulitkan pembentukan gerakan dan aliansi antarsu.</p> <p>Isu tembakau tidak banyak diminati, memiliki sumber daya sedikit, dan berisiko tinggi dalam advokasi.</p>



07

Hasil Tinjauan terhadap  
Ekosistem Kebijakan Terkait  
Keterlibatan Kaum Muda

## 7.1 Kebijakan yang Secara Umum Berkontribusi pada Keterlibatan Sipil

**Sebagai prasyarat terfasilitasinya keterlibatan sipil, tinjauan kebijakan dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan yang dapat memengaruhi kebebasan berpendapat atau partisipasi masyarakat dalam isu-isu strategis.**

Setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi secara sosial dan politik serta dilindungi secara konstitusi, khususnya dalam berbagai agenda pembangunan nasional. UU No. 9/1998 dan UU No. 39/1999 menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum, mendapatkan perlindungan secara hukum, berpartisipasi, serta melakukan pelaporan sebagai upaya perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Kemudian, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020–2024 juga secara jelas menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi salah satu prinsip pembangunan nasional.

Pemerintah pusat dan daerah juga memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai agenda pembangunan daerah. UU No. 23/2014 menegaskan

bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan bagi pemuda atau organisasi masyarakat serta memfasilitasi implementasi dari kerja sama internasional di tingkat nasional.

Selain itu, ada dorongan dari pemerintah untuk melibatkan masyarakat agar turut serta memantau dugaan kasus korupsi. Dalam PP No. 43/2018, dijelaskan bahwa masyarakat yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan terbukti benar sehingga laporan diteruskan ke tahap penyidikan, berpotensi mendapat insentif berupa dana dari hasil pengembalian ke kas negara.

**Walaupun tidak secara langsung, beberapa peraturan berpotensi mempersempit ruang aman bagi masyarakat, termasuk kaum muda, untuk berpendapat dan berpartisipasi.**

Salah satunya adalah Undang-Undang ITE atau UU No.19/2016 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pembatasan akses tanpa syarat dan tanpa mekanisme kontrol yang jelas. Regulasi ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memutus akses dalam rangka mencegah penyebaran dan penggunaan informasi elektronik yang mengandung muatan terlarang. Namun, rumusan mengenai muatan terlarang tersebut tidak dituliskan dengan jelas, sehingga dapat dimaknai secara subjektif. Syarat untuk melakukan pembatasan pun tidak dirumuskan dengan spesifik. Selain itu, tidak ada mekanisme kontrol dari lembaga lain untuk memastikan definisi muatan terlarang yang dimaksud tidak disalahgunakan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih memuat rumusan mengenai defamasi (pencemaran nama baik) yang dapat menghambat iklim kebebasan sipil bagi setiap warga negara, tidak terkecuali kaum muda. Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, pasal mengenai tindak pidana terhadap ketertiban umum, dan pasal mengenai pidana terhadap penguasa umum berpotensi menghambat partisipasi kaum muda. Tindakan pencemaran nama baik atau penghinaan

yang dimaksud dalam pasal-pasal ini tidak memiliki batasan dan ruang lingkup dampak yang ditimbulkan secara jelas untuk dapat disebut sebagai tindak pidana, sehingga memungkinkan kritik yang disampaikan dianggap sebagai penghinaan.

Meski PP No. 43/2018 memberikan insentif terhadap pelapor kasus korupsi, tidak ada jaminan perlindungan bagi mereka yang laporannya tidak terbukti. Regulasi ini tidak memuat rumusan perlindungan pelapor dari tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Beberapa pasal terkait lingkungan hidup dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja berpotensi melemahkan partisipasi masyarakat secara bermakna. Melalui UU Cipta Kerja, analisis dampak lingkungan hidup tidak lagi dilakukan oleh Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang mengikutsertakan masyarakat sebagai anggotanya, melainkan dilakukan oleh tim uji kelayakan dari pusat. UU ini juga menghapus ayat pada peraturan sebelumnya terkait pertimbangan kearifan lokal dalam pelarangan pembakaran hutan.

Pemilik usaha atau kegiatan hanya perlu mengurus persetujuan lingkungan yang meluluskan usaha tanpa peninjauan dampak lingkungan.<sup>12</sup> UU ini juga mengatur bahwa akses informasi terkait persetujuan lingkungan hanya bisa didapatkan melalui sistem elektronik atau cara lain yang ditetapkan pemerintah pusat sehingga dapat menghambat warga yang memiliki keterbatasan

akses digital dan internet untuk mendapatkan informasi, sedangkan sebelumnya pemerintah wajib mengumumkan informasi dengan cara yang mudah diketahui masyarakat. Tidak hanya itu, penghapusan Pasal 38 mengenai pembatalan izin lingkungan hidup oleh Pengadilan Tata Usaha Negara turut menghambat masyarakat untuk menyampaikan hak gugat.<sup>13</sup>

## 7.2 Kebijakan Terkait Keterlibatan Kaum Muda Secara Umum

**Tinjauan kebijakan ini menemukan berbagai regulasi yang mengatur keterlibatan kaum muda secara umum, termasuk partisipasi dalam berbagai ruang untuk menyampaikan pendapat. Pada peraturan yang ditinjau dalam analisis kebijakan ini, ditemukan lebih banyak istilah mengenai 'partisipasi' daripada 'keterlibatan' masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi dalam analisis ini dilihat sebagai bagian dari keterlibatan sipil.**

Di dalam RPJMN 2020–2024, peningkatan kualitas pemuda menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pada tahun 2019, pemerintah meluncurkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang merupakan tolok ukur pencapaian nasional untuk peningkatan kualitas pemuda. Partisipasi kaum muda merupakan salah satu domain dari IPP dengan angka capaian sebesar 46,67 (dalam skala 100) pada periode 2015–2018.

Regulasi mendorong partisipasi kaum muda melalui program-program kepemudaan. UU No. 40/2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa partisipasi pemuda merupakan salah satu aspek dalam perumusan kebijakan program kepemudaan. Regulasi ini mengenali peran partisipasi pemuda dalam perumusan kebijakan dan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.<sup>14</sup> Pemerintah juga mengembangkan indikator kabupaten/kota layak pemuda melalui Permenpora No. 11/2017 untuk mendorong partisipasi dan peningkatan kapasitas kaum muda.

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan ditunjukkan melalui kebijakan kabupaten/kota layak anak (KLA). Pemerintah menerbitkan Perpres No. 25/2021 yang memuat strategi nasional penyelenggaraan KLA melalui 24 indikator, salah satunya mengenai pelembagaan partisipasi anak melalui forum

anak sehingga dapat terlibat dalam kegiatan perencanaan pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun anak dalam peraturan ini merujuk pada anak usia di bawah 18 tahun, tetapi juga terdapat irisan dengan definisi kaum muda yang merujuk pada UU Kepemudaan yaitu usia 16–30 tahun.

Peraturan memfasilitasi kaum muda dalam melakukan inisiatif dan kepeloporan, tetapi masih terbatas pada kegiatan kewirausahaan. PP No. 41/2021 menyebutkan adanya unsur keterlibatan pemuda melalui masukan tertulis dalam tahap perencanaan pengembangan kegiatan kewirausahaan, kepeloporan, dan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. Selain itu, peraturan ini juga memfasilitasi keterlibatan organisasi kepemudaan dalam pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan.

Upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan pemuda khususnya dalam aspek kepemimpinan juga diatur melalui program pendidikan. UU No. 20/2003 dan PP 17/2010 menjelaskan adanya pendidikan kepemudaan yang disediakan melalui beragam program pendidikan jalur non-formal untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti melalui lembaga kursus, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim. Selain itu, pendidikan kepemudaan dapat terintegrasi dengan program pelatihan kerja dan pendidikan kesetaraan.

<sup>12</sup> Indonesian Center for Environmental Law. (2020). Berbagai Problematika Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam. <https://icel.or.id/seri-analisis/berbagai-problematika-dalam-uu-cipta-kerja-sektor-lingkungan-dan-sumber-daya-alam/>

<sup>13</sup> Indonesian Center for Environmental Law, ibid

<sup>14</sup> Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda (Pasal 1(2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009).

## 7.3 Kebijakan Terkait Partisipasi Masyarakat dalam Isu Iklim dan Lingkungan Hidup

Tidak banyak kebijakan khusus terkait isu ILH yang secara eksplisit menyebutkan partisipasi kaum muda, tetapi lebih banyak merujuk pada partisipasi masyarakat umum. Dengan melihat kaum muda sebagai bagian dari masyarakat, tinjauan kebijakan ini juga menganalisis pembahasan partisipasi masyarakat dalam berbagai peraturan terkait ILH. Tinjauan ini mengelompokkan isu ILH ke dalam tiga kategori, yaitu 1) Mitigasi Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan, 2) Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup, dan 3) Pengelolaan Lahan untuk Kegiatan Pertambangan.

### *Mitigasi Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan*

Komitmen untuk melibatkan masyarakat dalam upaya penanganan perubahan iklim telah tercakup dalam berbagai agenda global. Persetujuan Paris pada COP-21 tahun 2015 memuat upaya fasilitasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi *Nationally Determined Contribution* (NDC). NDC sendiri merupakan bentuk komitmen setiap negara yang menyepakati Persetujuan Paris dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengendalikan perubahan iklim. Selain itu, pada Bonn Climate Change Conference tahun 2017, terdapat usulan mengenai perwakilan pemuda sebagai salah satu delegasi nasional dan kemunculan gagasan delegasi kaum muda (*youth delegate*) untuk pertama kalinya dalam isu perubahan iklim.

Di Indonesia, komitmen global tersebut diadopsi dan diatur dalam berbagai kebijakan. UU No. 16/2016 menyinggung bahwa unsur partisipasi dan akses informasi politik perlu diperhatikan oleh para pihak yang bekerja sama dalam implementasi nasional di bidang perubahan iklim dan konservasi. Lebih lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan dokumen Strategi Implementasi NDC pada tahun 2017 yang memuat sembilan program implementasi NDC, di mana terdapat unsur partisipasi masyarakat dalam bentuk fasilitasi pengembangan kapasitas dan penyadaran masyarakat serta keikutsertaan dalam perencanaan dan implementasi NDC. Pemerintah juga menerbitkan dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Tahun 2020–2024 beserta terbitnya Perpres No. 98/2021 yang membuka ruang partisipasi melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau kinerja pemerintahan.

Sudah ada beberapa peraturan yang memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam aksi adaptasi perubahan iklim dan menyampaikan pengaduan atas kerusakan lingkungan. Permen LHK No. 33/2016 menjelaskan bahwa salah satu unsur kelompok kerja berupa lembaga independen non-profit bentukan masyarakat atau masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap isu-isu terkait penanggulangan dampak perubahan iklim sebagai perwakilan komunitas lokal harus ikut serta dalam penyusunan aksi adaptasi perubahan iklim. UU No. 18/2013, PP No. 4/2001, dan Permen LHK No. 32/2016 menyebutkan pembentukan wadah keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui kelompok Masyarakat Peduli Api dan Tim Pendamping Desa. Peraturan juga menyebutkan adanya upaya pengembangan kapasitas bagi kelompok-kelompok ini melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan pemahaman peraturan terkait, dan pemberian insentif untuk membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan. Sementara itu, Permen LHK No. 22/2017 menjelaskan bahwa pengaduan atas kerusakan lingkungan dan hutan dapat dilakukan melalui jalur perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau instansi pemerintah baik secara langsung, dengan mendatangi sekretariat pengaduan/pos pengaduan, ataupun tidak langsung, melalui media pengaduan yang disediakan.

Pemerintah mendorong keterlibatan masyarakat dalam penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim (ProKlim). Permen LHK No. 84/2016 dan Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI.6/3/2021 menyinggung bahwa masyarakat lokal berhak mendapatkan dukungan dan fasilitas secara hukum dari pemerintah untuk dapat menjalankan ProKlim. Melalui ProKlim, masyarakat dan perwakilannya dapat secara langsung merancang, melaksanakan, dan melakukan pemantauan program terkait iklim dan lingkungan hidup di sekitarnya.

## Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup

Komitmen global dalam menjaga lingkungan hidup dengan mempertimbangkan partisipasi masyarakat tercakup dalam agenda global. Dalam dokumen Persetujuan Paris, tercatat urgensi untuk memastikan integrasi antarekosistem, termasuk lautan, dan perlindungan terhadap biodiversitas dalam upaya penanggulangan perubahan iklim. Adopsi persetujuan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan konteks negara, asas responsif gender, asas partisipatif, dan transparansi.

Dalam konteks nasional, berbagai regulasi mengakui pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup. UU No.32/2009 dan PP No. 22/2021 memuat asas partisipatif dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UU No. 5/1990 dan UU No. 37/2014 menyebutkan perlu dilakukannya upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam melalui pendidikan dan penyuluhan. Masyarakat juga dapat terlibat dan mendapatkan pengembangan kapasitas agar berdaya dalam melakukan perencanaan, pendanaan, pengawasan, dan pengajuan gugatan mengenai konservasi tanah dan air.

Peraturan juga mendorong peningkatan kapasitas masyarakat terkait lingkungan hidup di tingkat subnasional. UU No. 23/2014 menyebutkan adanya kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan pada tingkatnya masing-masing. Misalnya, terkait isu pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), PP No. 37/2012 mengatur upaya pengembangan kapasitas bagi masyarakat dalam pengelolaan DAS. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi mengenai pendampingan, dan bantuan modal dalam pengelolaan DAS. Bentuk peran serta pun tidak dibatasi pada kelompok atau forum tertentu saja; masyarakat secara perseorangan pun dapat ikut berpartisipasi.

Setiap individu mendapatkan perlindungan hukum dan transparansi informasi dalam upaya menjaga lingkungan hidup. PP No. 22/2021 menyebutkan hak perlindungan hukum bagi setiap orang dalam melaksanakan perlindungan terhadap lingkungan hidup, khususnya masyarakat terdampak yang meliputi kelompok rentan, masyarakat adat, dan perempuan. Selain itu, UU No. 32/2009 menegaskan perlunya transparansi informasi bagi pelaku usaha atau kegiatan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Lebih lanjut dalam PP No. 46/2016, ditegaskan bahwa partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi menjadi salah satu muatan dalam laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Keterlibatan kaum muda dalam upaya pelestarian lingkungan hidup didorong melalui Gerakan Pramuka, Adiwiyata, dan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS). Sebagai organisasi kepemudaan yang diatur pemerintah melalui UU No. 12/2010, Gerakan Pramuka secara eksplisit menyebutkan pelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu tujuannya. Sementara itu, Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup (Permen LHK No. 53/2019). Selain itu, Permen LHK No. 52/2019 tentang PBLHS menyebutkan bahwa pemuda dapat dilibatkan secara lebih luas sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Agenda pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup mendorong kemunculan berbagai bentuk pelembagaan partisipasi masyarakat. Melalui Permen LHK No. 60/2015, pemerintah mengatur peran masyarakat dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup, salah satunya melalui kegiatan kepanduan dan kepeloporan generasi muda seperti Saka Kalpataru, Saka Wanabakti, kader konservasi, dan kelompok pecinta alam. Permen LHK No. 9/2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial<sup>15</sup> mengatur peran masyarakat sipil atau relawan lingkungan melalui kelompok kerja pengelolaan perhutanan sosial (Pokja PPS) dan penerima hak pengelolaan perhutanan sosial. Ruang lingkup peran masyarakat yang diatur antara lain membantu pengembangan kapasitas dan pendampingan dalam melakukan perencanaan, pengembangan usaha, dan pembinaan pengelolaan perhutanan sosial.

## Pengelolaan Lahan untuk Kegiatan Pertambangan

Upaya mendorong keterlibatan masyarakat dalam mitigasi dampak buruk kegiatan pertambangan ditemukan dalam peraturan yang dianalisis. UU No. 4/2009 dan PP No. 96/2021 menuliskan bahwa pelibatan masyarakat perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk penanganan konflik masyarakat karena usaha tambang, pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat, dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat tentang kerugian akibat usaha tambang. Selain itu, terdapat pasal mengenai perlindungan masyarakat terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari usaha tambang. Lebih lanjut, PP No. 5/2021 menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan dalam analisis risiko, yaitu masyarakat dapat memberikan masukan, data, informasi, dan peningkatan pemahaman kepada pelaku usaha.

<sup>15</sup> Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan (Pasal 1 ayat 1 Permen LHK No. 9/2021).



08

## Diskusi

Pada bagian ini dan selanjutnya pada bagian kesimpulan dan rekomendasi, peneliti menyoroti hasil-hasil studi dan menempatkannya dalam gambaran yang lebih besar serta membahas implikasi dari apa yang sudah kita ketahui lewat data. Dalam menginterpretasi makna dari hasil studi ini, kami akan menggunakan konsep-konsep yang sejak awal sudah memandu studi ini seperti kaum muda dan dimensi keterlibatan sipil. Di luar itu, kami juga akan mendiskusikan hasil dengan melihat sejumlah studi terkait yang tidak tercuplik dalam tinjauan literatur karena baru terbit, tetapi sangat relevan dan dengan konsep-konsep yang muncul saat kami berinteraksi dengan data. Secara keseluruhan, kami juga akan membahas hasil studi dengan secara terus-menerus membandingkan dugaan awal kami terkait pertanyaan utama studi ini dengan apa yang kami temukan dalam data.

## 8.1 Lanskap Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu ILH

Diagram 2. Panduan Diskusi Lanskap Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu ILH

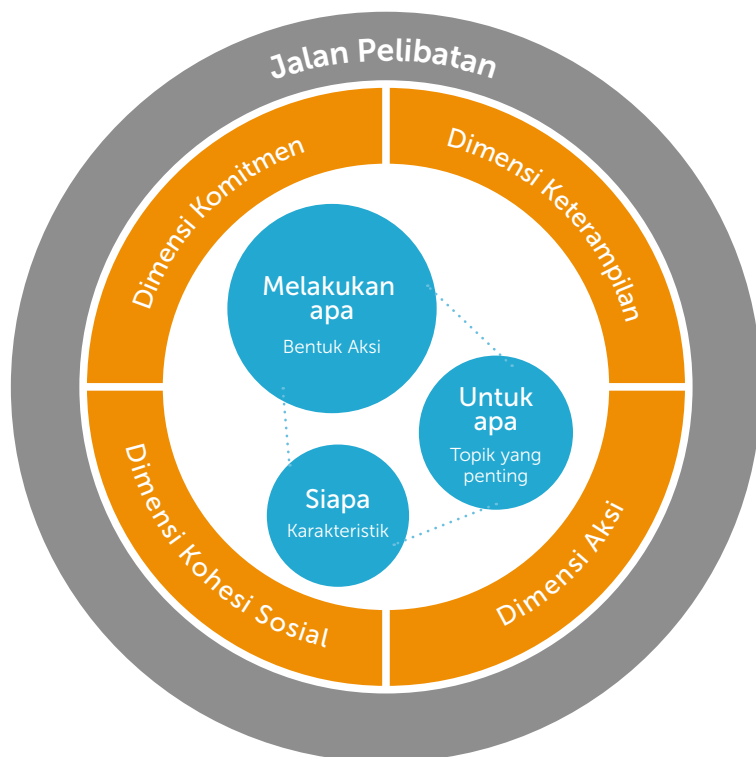


Diagram hasil olahan peneliti.

Tanda hubung tidak menandakan hubungan sebab-akibat melainkan untuk memvisualisasikan pola keterhubungan.

### Kaum muda tertentu sudah terlibat dengan beragam dimensi keterlibatan sipil.

Meskipun studi ini menggunakan usia 16–30 tahun untuk mendefinisikan kaum muda dan merekrut peserta studi, peserta muda lebih sering memaknai kaum muda sebagai fase kehidupan, seperti kelompok pelajar/mahasiswa/pekerja muda, atau tindakan, seperti kelompok yang melakukan aktivisme. Temuan ini sejalan dengan lensa generasi Huijsmans (2016). Bagian dari konsep Huijsmans melihat generasi kaum muda sebagai fase kehidupan di luar usia kronologis, dan sebagai identitas sosial kolektif yang memaknai karakteristik suatu kelompok kaum muda.

**Menggunakan lensa generasi, kaum muda identik dengan komitmen sipilnya.** Dalam studi ini, komitmen sipil kaum muda dalam isu ILH banyak dikaitkan dengan pengaruh aktivisme

global dari para tokoh muda seperti Greta Thunberg dengan aksi mogok sekolah untuk iklim (School Strike for Climate),<sup>16</sup> dan keterlibatan pelajar di forum-forum ILH internasional. Ada juga yang mengaitkannya dengan pengaruh bidang studi dan jaringan, terutama untuk kalangan mahasiswa.

**Kaum muda dengan akses pendidikan, pekerjaan, sumber daya, jaringan, keterikatan dengan wilayah, dan pengalaman berdampak tertentu memiliki keterampilan sipil tersendiri yang membentuk keterlibatan mereka dalam gerakan ILH.** Keterampilan sipil cenderung lebih menonjol ditemukan pada kaum muda pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang punya akses lebih besar untuk memperoleh pengetahuan sipil dan kesempatan berpartisipasi.

<sup>16</sup> Aksi mogok sekolah untuk iklim (School Strike for Climate), juga dikenal sebagai Fridays for Future (FFF), Youth for Climate, Climate Strike, atau Youth Strike for Climate, adalah gerakan internasional siswa sekolah yang absen dari kelas pada hari Jumat untuk berpartisipasi dalam demonstrasi menuntut tindakan dari para pemimpin politik untuk mencegah perubahan iklim dan agar industri bahan bakar fosil beralih ke energi terbarukan. Gerakan ini diawali oleh aksi Greta Thunberg, aktivis pelajar Swedia yang melakukan protes terkait iklim di depan parlemen Swedia pada Agustus 2018.



**Komitmen dan keterampilan sipil juga ditemukan lebih menonjol pada kaum muda dari kelas ekonomi menengah dan mereka yang berada wilayah perkotaan.** Dominasi wilayah perkotaan bisa jadi terkait dengan dominasi mahasiswa yang kebanyakan berkampus di kota, yang juga berhubungan dengan kelas ekonomi yang biasanya cenderung lebih baik. Temuan tentang bentuk aksi sipil menggambarkan sejumlah kegiatan yang membutuhkan biaya, sehingga memang selektif untuk mereka yang mampu menanggung ongkosnya. Di samping itu, keterampilan sipil terlihat banyak difasilitasi oleh latar belakang pendidikan dan akses informasi dan teknologi digital.

**Meski datang dari berbagai latar belakang dengan kepedulian terhadap isu yang berbeda-beda, ada modal sosial yang sama di setiap komunitas kaum muda yang menyatukan mereka.** Putnam dalam National Research Council (2014) membedakan modal sosial menjadi dua, yaitu modal sosial yang menjembatani (*bridging*) dan modal sosial yang mengikat (*bonding*). Modal sosial yang menjembatani muncul dari kepentingan bersama yang melampaui perbedaan etnis, agama, dan status sosial ekonomi. Pengalaman terdampak ILH, kepedulian, dan keresahan yang sama memunculkan solidaritas kelompok dalam gerakan kaum muda. Sementara itu, modal sosial yang mengikat terlihat di antara kelompok-kelompok yang lebih homogen, misalnya komunitas mahasiswa, kaum muda Muslim, atau BTS Army. Kedua modal sosial ini mendukung kohesi sosial dalam aksi sipil kaum muda.

**Kohesi sosial juga terbangun dari kerja sama, komunikasi, dan kolaborasi dalam komunitas atau organisasi.** Konsep kohesi sosial tersebut juga mendorong peningkatan keterampilan sipil

kaum muda. Studi ini menemukan bahwa kebebasan berpendapat dan solidaritas merupakan ciri khas interaksi kaum muda yang terus dijaga dalam komunitas. Dengan adanya kesempatan untuk menyampaikan pendapat secara bebas, kaum muda dapat terus melatih keterampilan dan memperkuat komitmen mereka dengan berpartisipasi dalam FGD dan kegiatan komunitas. Aksi peningkatan kapasitas melalui kegiatan berjejaring dan aliansi juga muncul sebagai upaya peningkatan keterampilan sipil yang turut membangun kohesi sosial.

**Studi ini mengonfirmasi dugaan bahwa meski telah ada, baru kaum muda tertentu yang terpapar keterlibatan sipil dalam ILH di Indonesia.** Kaum muda dengan latar belakang pendidikan nonformal, dari wilayah nonperkotaan, dan dengan status sosial ekonomi yang lebih beragam masih perlu mewarnai gerakan kaum muda pro-ILH. Begitu juga dengan kaum muda dengan abilitas berbeda, identitas sosial minoritas, yang mewakili kelompok rentan atau marginal, dan mereka yang terpapar langsung gejala ILH di perkotaan dan perdesaan.

**Di kelompok generasi anak dan remaja, Studi Analisis Situasional Partisipasi dan Keterlibatan Sipil Anak dan Remaja di Indonesia (Octarra et al., 2022) menemukan tingginya minat partisipasi anak laki-laki dan perempuan, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.** Sebagian besar dari mereka merasa penting untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di wilayahnya dan sudah menyadari pentingnya keterlibatan sipil mereka. Meski begitu, studi yang sama menemukan terbatasnya keterlibatan sipil remaja dengan disabilitas.

## **Kaum muda yang terlibat punya kepedulian besar pada dampak krisis ILH dan kepedulian mereka terwujud dalam aksi-aksi tertentu meski masih terbatas.**

Kaum muda tampak peduli pada topik ILH tertentu, tapi mereka juga sadar bahwa topik-topik tersebut bukan isu tunggal melainkan multidimensional dan saling beririsan. Irisan kepedulian banyak muncul dalam isu perlindungan LH dan perlindungan warga yang terdampak krisis ILH, terutama kelompok rentan. Beberapa menyebutnya sebagai *intersectional environmentalism*. Kaum muda yang sudah terlibat rata-rata peduli akan keadilan ILH dan melihatnya sebagai tujuan, karena masalah ILH telah menyebabkan ketimpangan yang ditanggung secara tidak proporsional oleh kelompok rentan. Kelompok rentan ini termasuk masyarakat prasejahtera, masyarakat adat, perempuan, anak, orang dengan disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya.

Meski kepedulian kaum muda sudah meluas ke berbagai macam topik ILH, belum semuanya terwujud secara merata dalam kelima bentuk aksi sipil yang teridentifikasi dalam studi ini. Tabel 1 menyajikan peta sederhana tentang topik-topik yang menjadi kepedulian kaum muda dalam kaitannya dengan bentuk-bentuk aksi sipil mereka. Tabel 1 memetakan secara sederhana di mana komitmen dan aksi sipil kaum muda masih cenderung dominan.

Tabel 1. Peta keterkaitan topik-topik ILH dengan keterlibatan sipil yang muncul dalam studi

Topik ILH	Aksi Sipil				
	Peningkatan Kapasitas	Advokasi Kebijakan	Kampanye	Riset	Pendampingan dan Inovasi Sosial
Gejala ILH	Muncul dalam studi	Belum muncul dalam studi	Muncul dalam studi	Muncul dalam studi	Belum muncul dalam studi
Tindakan perusakan	Dominan muncul dalam studi	Muncul dalam studi	Dominan muncul dalam studi	Belum muncul dalam studi	Muncul dalam studi
Faktor pendorong perusakan	Muncul dalam studi	Muncul dalam studi	Dominan muncul dalam studi	Belum muncul dalam studi	Muncul dalam studi
Dampak pada ILH dan mitigasinya	Dominan muncul dalam studi	Muncul dalam studi	Dominan muncul dalam studi	Muncul dalam studi	Dominan muncul dalam studi
Dampak pada warga dan mitigasinya	Muncul dalam studi	Muncul dalam studi	Muncul dalam studi	Muncul dalam studi	Dominan muncul dalam studi

**Kesenjangan komitmen sipil tampak dari terbatasnya aksi sipil kaum muda terkait topik gejala ILH dan faktor pendorong perusakan ILH.** Topik gejala ILH cenderung lebih menjadi tujuan besar gerakan daripada fokus aksi sipil kaum muda. Kaum muda sudah terlibat dalam aksi peningkatan kapasitas dan kampanye, tetapi belum secara spesifik melakukan advokasi kebijakan atau inovasi sosial terkait gejala ILH seperti perubahan iklim, kenaikan air laut, dan abrasi pantai yang sudah mereka identifikasi sebagai topik penting dalam isu ILH. Studi ini sudah menemukan upaya advokasi kebijakan di tingkat daerah dan aksi protes terhadap kebijakan pemerintah dan perusahaan. Akan tetapi, persoalan struktural LH dari sisi penyedia layanan belum banyak direspons oleh aksi sipil yang belum menjangkau tataran sistem.

**Dari bentuk keterlibatan, aksi peningkatan kapasitas dan kampanye-protes dominan muncul di semua kategori topik ILH.** Berbagai aksi sipil dalam bentuk peningkatan kapasitas yang muncul mencakup kegiatan edukasi dan pelatihan yang ditujukan baik untuk kaum muda maupun masyarakat umum. Aksi sipil ini banyak muncul, utamanya dalam merespons isu-isu hijau (*green issues*) yang muncul dalam topik "tindakan penyebab gejala ILH" dan dampak isu ILH pada LH. Beririsan dengan peningkatan kapasitas, aksi kampanye juga dominan muncul dalam kedua topik tersebut, baik kampanye secara daring dan kampanye secara fisik.

**Aksi pendampingan dan inovasi sosial juga muncul di hampir semua kategori topik, dengan dominasi aksi dalam topik dampak ILH bagi LH dan masyarakat.** Pendampingan dan inovasi sosial yang ditemukan mencakup pendampingan masyarakat terdampak perampasan lahan, mobilisasi masyarakat untuk terlibat dalam aksi sipil, mendampingi pemetaan wilayah LH, inisiasi pengelolaan sampah, inisiasi alat peringatan banjir, bank sampah, inkubasi *green start-up*, hingga sekolah adat.

Berdasarkan temuan studi dan pengamatan peneliti terhadap masyarakat sipil secara umum, studi ini menawarkan sebuah kerangka berpikir di bawah ini untuk memetakan keterlibatan kaum muda berdasarkan isu-isu yang ingin mereka tangani, tujuan yang ingin mereka capai, serta bentuk kegiatan mereka. Studi ini, misalnya, mengidentifikasi berbagai peserta muda yang terlibat dalam pengembangan kapasitas, pendampingan masyarakat, kampanye, serta tingkat advokasi dan riset yang terbatas.

Tabel 2. Bentuk keterlibatan kaum muda berdasarkan situasi, tujuan, dan manifestasi

	Riset	Peningkatan kapasitas	Advokasi	Pendampingan komunitas/ inovasi sosial	Kampanye	Pendampingan kasus
<b>Situasi</b>	Perlu memahami sesuatu	Perlu membantu orang untuk memahami sesuatu dan memberikan mereka keterampilan	Perlu meyakinkan orang untuk mengatasi permasalahan atau mengubah keadaan	Perlu membantu komunitas agar mereka mendapatkan manfaat	Perlu membentuk persepsi atau opini publik	Perlu mendampingi penyelesaian konflik/sengketa (melalui atau di luar jalur hukum)
<b>Tujuan</b>	Untuk memahami	Untuk berbagi	Untuk memengaruhi	Untuk membantu	Untuk menyebarkan, memberi tekanan, menyampaikan/ membentuk opini, membentuk perilaku	Untuk mewakili
<b>Manifestasi</b>	Pengumpulan data dan analisis, manajemen pengetahuan	Pelatihan, pendidikan sebaya, <i>mentoring</i> , webinar/ seminar, lokakarya	Asistensi teknis, lobi	Pendampingan masyarakat, inovasi sosial, kewirausahaan sosial, inisiasi praktik baik	Komunikasi publik, protes, intervensi perubahan perilaku	Bantuan hukum, mediasi, manajemen kasus, gugatan, perwakilan kelompok

## Meski aksi dan komitmen sipil muncul, masih terdapat kesenjangan dalam keterampilan sipil yang bisa jadi memengaruhi peta bentuk aksi sipil kaum muda di atas.

**Kesenjangan paling tampak dari terbatasnya aksi advokasi kebijakan dan riset.** Advokasi baru dilakukan saat ada kasus atau kebijakan tertentu di suatu daerah dan sifatnya lebih *ad hoc*. Padahal, faktor pendorong perusakan yang diidentifikasi dalam studi ini lebih memerlukan advokasi di tataran sistem karena menyangkut persoalan dampak ekonomi dari pembangunan, industrialisasi, dan konsumerisme yang merusak lingkungan. Selanjutnya, beberapa komunitas sudah melakukan penelitian di

beberapa topik ILH. Akan tetapi, agenda riset sendiri belum menjadi rencana aksi sipil kaum muda dan sangat terbatas pada topik-topik tertentu yang memperoleh dukungan pihak lain (ENGO/pemerintah). Selain itu, peningkatan kapasitas masih terbatas pada edukasi individu soal isu ILH serta peningkatan kapasitas organisasi dan komunikasi, tetapi belum banyak yang berfokus pada upaya pengambilan keputusan kolektif dan berpikir kritis.

**Jalan keterlibatan kaum muda adalah proses yang melibatkan berbagai minat dan kepentingan yang lalu terwujud menjadi komitmen sipil dan keterampilan sipil, yang juga berperan sebagai faktor-faktor pendorong serta penarik keterlibatan mereka.**

Diagram 3. Panduan Diskusi Jalan Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu ILH

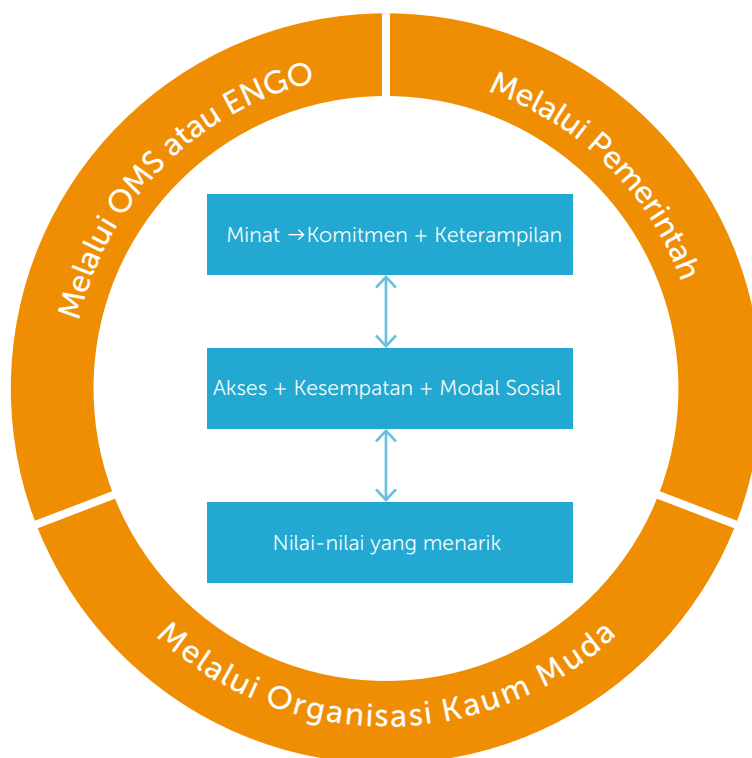


Diagram hasil olahan peneliti.

Tanda hubung tidak menandakan hubungan sebab-akibat melainkan untuk memvisualisasikan pola keterhubungan.

**Dari pola yang muncul, jalan pelibatan dan keterlibatan kaum muda ditemukan berhubungan dengan karakteristik keterampilan sipil dan pendekatan bentuk aksi sipil kaum muda.** Di antara ketiga jalan pelibatan dan keterlibatan yang telah dipetakan, kaum muda lebih nyaman melakukan berbagai bentuk aksi sipil dalam jalur pelibatan komunitas yang juga diinisiasi sesama kaum muda. Salah satu penyebabnya adalah adanya ruang untuk lebih bebas berpendapat dan berpartisipasi dengan aman dan bermakna untuk mereka.

**Partisipasi kaum muda yang diinisiasi dari kaum muda sendiri mengalami peningkatan, meski ada perubahan pola keterlibatannya.** Kaum muda sudah memosisikan diri sebagai

salah satu pemangku kepentingan dalam isu ILH dan lebih tertarik untuk melakukan aksi sipil sesuai dengan fokus gerakan komunitas yang mereka inisiasi. Interaksi kaum muda dalam komunitas yang juga diinisiasi kaum muda lebih cair dan diperkuat dengan adanya solidaritas kelompok dan kebebasan berpendapat yang memperkaya keterampilan sipil mereka. Beralihnya aktivisme kaum muda ke gerakan komunitas yang diinisiasi kaum muda sendiri salah satunya juga karena keinginan mereka untuk lepas dari ketergantungan terhadap ENGO, terutama terkait pendanaan dan kontrol kegiatan, dan keinginan untuk beralih ke tipe aktivisme berbasis komunitas yang lebih kecil, fleksibel, dan bebas.

**Meski jalan keterlibatan melalui komunitas kaum muda lebih digemari, kaum muda yang berpartisipasi melalui OMS dan ENGO lebih mungkin memperoleh tambahan akses dan kesempatan peningkatan keterampilan sipil dan paparan bentuk aksi sipil yang lebih luas.** Peran OMS dan ENGO dominan sebagai inisiator dan fasilitator gerakan sipil kaum muda dalam isu ILH. Beberapa ENGO merekrut kaum muda untuk bergabung dalam gerakan yang diadopsi dari gerakan ILH global dan nasional, sedangkan beberapa komunitas kaum muda juga ada yang dibentuk sebagai komunitas turunan dari gerakan ENGO tertentu. Kaum muda yang terlibat dalam gerakan ILH melalui jalur ini cenderung diperlengkapi dengan kapasitas organisasi yang lebih sistematis dan keterampilan sipil yang menyeluruh, serta didukung untuk terlibat dalam aksi-aksi peningkatan kapasitas dalam berbagai isu ILH. Namun demikian, peluang tersebut belum mengarah pada mentoring/bimbingan yang lebih terstruktur dalam hal gambaran besar kerja-kerja ILH dan mobilisasi sumber daya yang tersedia.

Kaum muda yang berafiliasi dengan ENGO punya akses lebih untuk memperoleh pelatihan, misalnya tentang pendekatan aksi tanpa kekerasan (*Non-Violent Direct Action/NVDA*) sebelum melakukan kampanye. Kaum muda yang terlibat melalui Greenpeace, WALHI, atau Extinction Rebellion, misalnya, punya pilihan lebih untuk melakukan pendekatan *hard diplomacy* karena mereka sudah memiliki sistem dukungan, bantuan hukum, dan jaringan nasional dan internasional yang baik dalam menghadapi potensi risiko keamanan dan keselamatan kaum

muda. Kaum muda yang memiliki sistem pendukung yang baik dan akses terhadap bantuan hukum cenderung menggunakan pendekatan *hard diplomacy*. Sementara itu, komunitas kaum muda dengan dukungan terbatas cenderung lebih banyak melakukan pendekatan *soft diplomacy* dalam aksi sipilnya. Kedua pendekatan diplomasi tersebut saling melengkapi dan belum tentu pendekatan yang satu lebih efektif dari yang lainnya.

**Sementara itu, pelibatan dan keterlibatan kaum muda dalam gerakan ILH melalui pemerintah belum ditemukan sebesar melalui kedua jalur lainnya.** Relasi kuasa yang tidak setara banyak muncul dalam diskusi pelibatan kaum muda oleh pemerintah. Posisi kaum muda kerap hanya sebagai peserta kegiatan dan praktik tokenistik sering terjadi dalam interaksi mereka. Ruang partisipasi kaum muda dalam keterlibatan dengan pemerintah lebih terbatas dan sangat tergantung pada kebutuhan pemerintah. Apalagi, ruang partisipasi ini lebih dekat dengan risiko ancaman yang membuat kaum muda membatasi partisipasinya. Meski ruang partisipasi bersama pemerintah masih terbatas dan belum banyak diakses kaum muda, Octarra et al., (2022) menemukan bahwa sebagian besar anak dan remaja dalam studinya tertarik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di komunitas mereka dan remaja menganggap mereka tetap perlu berpartisipasi dalam Musrenbang di wilayahnya.

## 8.2 Pendukung dan Penghambat Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu ILH

Seperti terlihat dalam Diagram 4, diskusi pada bagian ini mengurai bagaimana faktor pendukung dan penghambat saling berkaitan dalam memengaruhi dimensi keterlibatan sipil kaum muda, yaitu komitmen sipil untuk terlibat, keterampilan sipil, kohesi sosial, dan kemungkinan aksi sipil yang efektif.

Diagram 4. Panduan Diskusi Pendukung dan Penghambat Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu ILH

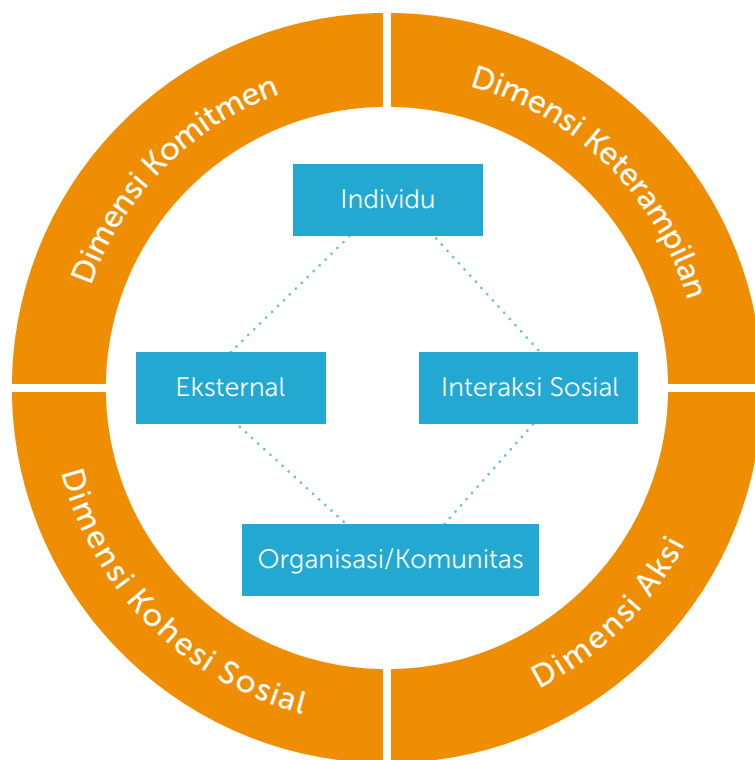


Diagram hasil olahan peneliti.

Tanda hubung tidak menandakan hubungan sebab-akibat melainkan untuk memvisualisasikan pola keterhubungan.

**Komitmen sipil kaum muda untuk terlibat dalam aktivisme isu ILH paling banyak dipengaruhi oleh faktor individu, yang juga terbentuk dari pengaruh interaksi sosial, komunitas/organisasi, dan faktor eksternal.**

**Komitmen sipil kaum muda paling dominan didukung oleh faktor individu** seperti keresahan soal dampak ILH baik di masa sekarang maupun masa depan, pengalaman terdampak, minat dan ketertarikan terhadap isu, identitas kaum muda, waktu luang, pengalaman terlibat aksi sipil, dan ajaran agama/kepercayaan

untuk melestarikan LH. Di sisi lain, faktor individu seperti dukungan keluarga dan kelas sosial ekonomi menjadi tantangan kaum muda dalam meningkatkan komitmen sipil mereka.

Faktor individu, terutama minat dan ketertarikan terhadap isu dan pengalaman terlibat aksi sipil, terbentuk dari berbagai faktor seperti interaksi sosial, komunitas/organisasi, dan faktor eksternal. Kaum muda menggunakan modal sosial mereka untuk mendapatkan teman sepemikiran dan solidaritas yang mendorong mereka bertahan dalam komunitas atau gerakan. Interaksi dengan orang dewasa seperti mentor atau *role model* juga memberikan insentif yang besar bagi kaum muda untuk tetap berkomitmen melanjutkan perjuangan dalam aktivisme mereka. *Bandwagon effect* atau kecenderungan untuk mengikuti hal yang sedang populer di kalangan kaum muda (Eastin et al., 2007) seperti pengaruh kondisi global atau interaksi tokoh-tokoh publik atau *influencer* berhasil menarik minat kaum muda untuk terlibat dalam gerakan isu ILH. Komunitas/organisasi yang inklusif dan menyediakan ruang untuk berkembang dan mengekspresikan diri juga menjadi salah satu faktor yang membuat kaum muda mempertahankan komitmen sipil mereka.

Hubungan antar faktor pendukung tersebut diterjemahkan secara berbeda dalam Studi Remotivi (2022), meski masih terhubung. Studi tersebut menemukan adanya dua faktor yang memotivasi kaum muda untuk berpartisipasi, yaitu motivasi individu (*environmental attitudes*) dan motivasi sosial (*environmental network*). Faktor motivasi sosial dalam studi tersebut dominan sebagai pendukung komitmen sipil kaum muda untuk berpartisipasi dalam aktivisme lingkungan, terutama motivasi sosial yang timbul dari konsumsi media sosial dan keterhubungan dengan LSM/NGO, yang kemudian memengaruhi minat individu kaum muda untuk berpartisipasi secara signifikan.

**Keterampilan sipil merupakan dimensi keterlibatan sipil yang dominan lebih berkembang setelah kaum muda lebih banyak terlibat dalam aksi sipil. Faktor individu dan interaksi sosial cenderung makin meningkatkan keterampilan sipil kaum muda, namun beberapa faktor eksternal dapat menghambat keterlibatan kaum muda dalam aktivisme.**

Keterampilan sipil kaum muda cenderung lebih banyak didukung oleh faktor individu, interaksi sosial, dan faktor komunitas/organisasi. Latar belakang pendidikan individu banyak berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki kaum muda dalam mendukung aktivisme. Di samping itu, interaksi sosial dengan pemangku kepentingan dari sesama komunitas kaum muda, NGO, pemerintah, dan lembaga lain yang memberikan berbagai peningkatan kapasitas dinilai banyak mendukung keterampilan sipil kaum muda.

Perkembangan teknologi informasi dan kemudahan akses media daring, terutama media sosial, merupakan faktor eksternal yang banyak dimanfaatkan kaum muda dalam meningkatkan keterampilan sipil. Remotivi (2022) menemukan bahwa media sosial sangat berperan dalam meningkatkan keterampilan sipil kaum muda dengan memperkenalkan informasi perubahan iklim, membentuk sikap politis, dan mengasah kohesi sosial kaum muda dalam partisipasi mereka dalam isu ILH. Studi tersebut juga menemukan bahwa peserta muda yang mengikuti akun media sosial NGO cenderung lebih terlibat dalam kegiatan aktivisme dan lebih condong memilih pekerjaan dengan pertimbangan lingkungan.

Masih terkait keterampilan sipil, faktor eksternal merupakan faktor penghambat yang dominan, yaitu terbatasnya akses informasi, lemahnya kapasitas pengelolaan organisasi dan lingkungan yang mendukung kemampuan berpikir kritis, serta lemahnya perhatian pada kesehatan mental kaum muda pegiat isu ILH, yang sangat berperan dalam keterampilan sipil mereka.

Selain faktor eksternal tersebut, secara khusus, Octarra et al., (2022) juga menyoroti faktor interaksi sosial dengan orang dewasa, terutama orang tua dan guru, sebagai faktor penghambat dan juga pendukung partisipasi anak dan remaja. Anak dan remaja di perdesaan menyebut adanya dukungan orang dewasa terhadap partisipasi mereka. Di sisi lain, tidak adanya dukungan orang dewasa di lingkungan sosial yang mendukung menyebabkan anak dan remaja enggan mengungkapkan pendapatnya.

**Dalam kohesi sosial, interaksi sosial yang juga dipengaruhi komunitas/organisasi dan faktor eksternal terhubung dengan nilai-nilai yang kaum muda identifikasi sebagai hal-hal positif dari keterlibatan sipil mereka dalam gerakan tertentu. Dalam banyak kesempatan, nilai-nilai tersebut menjadi faktor penarik keterlibatan kaum muda yang dekat dengan atau bahkan berkontribusi pada dimensi kohesi sosial.**

Interaksi sosial kaum muda, baik dengan sesama kaum muda maupun dengan pemangku kepentingan dewasa, berkontribusi dalam memperkuat modal sosial yang menjembatani dan mengikat kaum muda dalam memobilisasi gerakan ILH. Interaksi sosial kaum muda melalui berbagai jalan keterlibatan menunjukkan nilai-nilai yang menurut mereka positif dan dapat

berkontribusi pada dimensi kohesi sosial. Sementara itu, terdapat juga interaksi dalam komunitas/organisasi yang menghambat kohesi sosial, seperti kaum muda yang masih terpecah-pecah, persaingan kaum muda dalam aktivisme ILH, ketimpangan akses, dan dinamika gender.

Diagram 5. Nilai-Nilai yang Menarik Kaum Muda untuk Terlibat dan Tantangan di Sekitarnya





## Faktor komunitas/organisasi, faktor eksternal, dan interaksi sosial dalam menyediakan ekosistem pendukung memengaruhi efektivitas aksi sipil.

Aksi sipil yang efektif dapat terwujud dengan adanya ekosistem pendukung, yang menyediakan antara lain akses, kesempatan, kebijakan, dan peraturan yang mendukung keterlibatan sipil. Terbentuknya lingkungan yang kondusif masih terhambat oleh faktor eksternal yang dominan muncul, antara lain kebijakan yang belum menjamin ruang partisipasi yang aman, kebijakan pemerintah yang tidak mendukung kebebasan berpendapat, dan praktik tokenistik yang kerap menghambat aksi sipil kaum muda.

Di sisi lain, akses informasi melalui perkembangan teknologi dan media, strategi pengorganisasian aksi sipil yang dikelola kaum muda, dan interaksi sosial dengan kaum muda dan

pemangku kepentingan telah berkontribusi pada beragamnya bentuk dan kesempatan aksi sipil. Akses dan kesempatan bagi kaum muda untuk terpapar isu dan berperan dalam aksi sipil seperti kompetisi dan aksi-aksi sukarela dapat memicu minat kaum muda untuk lebih aktif dalam gerakan, bahkan memberikan peluang karier di masa depan. Lebih lanjut, dukungan pendanaan dan *mentorship* juga mendorong keberlangsungan dan keberhasilan aksi sipil kaum muda. Makin beragam bentuk dan kesempatan aksi sipil, makin besar kesempatan untuk kolaborasi lintas bentuk. Pada akhirnya, hal ini akan menyumbang pada efektivitas aksi sipil dan memperkuat ekosistem pendukung yang kondusif.

## 8.3 Kebijakan yang Berpotensi Menghambat Partisipasi Kaum Muda dalam Upaya Mengatasi Isu ILH

### Kebijakan yang secara khusus mengatur keterlibatan kaum muda ditemukan memiliki berbagai keterbatasan.

Beberapa regulasi berpotensi membatasi keterlibatan kaum muda pada program tertentu saja, atau mensyaratkan kaum muda untuk berpartisipasi melalui organisasi kepemudaan. Salah satunya adalah UU No. 40/2009 tentang Kepemudaan, yang merumuskan peran kaum muda sedemikian rupa sehingga justru dapat membatasi peran pada program strategis kepemudaan saja. Padahal, keterlibatan kaum muda diperlukan tidak hanya dalam konteks program khusus kepemudaan, melainkan dalam pengambilan kebijakan secara umum. Regulasi lain umumnya mengakui partisipasi kaum muda hanya jika disalurkan melalui organisasi kepemudaan, misalnya seperti yang dicantumkan pada PP No. 41/2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan Permenpora No. 11/2017.

Pelibatan kaum muda dalam sejumlah regulasi pun masih berpotensi menjadi tokenisme semata. Sebagai contoh, Permenpora No. 11/2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda mengindikasikan bahwa partisipasi kaum

muda hanya dapat terjadi pada tahap pendampingan (perencanaan) dan penghargaan, dan belum mencakup proses fasilitasi yang merupakan kegiatan utama dalam implementasi kebijakan kepemudaan yang direncanakan pada tahap pendampingan. Contoh lainnya, kirab pemuda yang diatur melalui Permenpora No. 3/2018 belum secara spesifik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kaum muda dalam pengambilan kebijakan. Kirab ini hanya mengikutsertakan kaum muda dalam kegiatan-kegiatan program kepemudaan.

Regulasi di sektor pendidikan Indonesia turut memfasilitasi pendidikan kepemudaan, tetapi terbatas pada jalur pendidikan nonformal. Pendidikan kepemudaan secara spesifik hanya tersedia melalui jalur pendidikan nonformal, dengan contoh muatan antara lain pendidikan pecinta alam (UU No. 20/2003 & PP No. 17/2010). Sejalan dengan itu, Permendikbud No. 7/2022 juga menyebutkan bahwa muatan materi pemberdayaan peserta didik hanya bersifat opsional di jalur pendidikan nonformal.

## Peran masyarakat, termasuk kaum muda, ditemukan sangat terbatas dalam kebijakan-kebijakan khusus terkait isu ILH.

Regulasi terkait mitigasi perubahan iklim melibatkan masyarakat hanya pada mekanisme dan tahapan tertentu. Permen LHK No. 22/2017 menyebutkan bahwa pemerintah dapat mengembangkan pembinaan atau kerja sama pemantauan ketaatan usaha atau kegiatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan bersama masyarakat. Namun, kolaborasi dengan masyarakat bersifat opsional dan hanya dapat dilakukan melalui sistem informasi yang ditentukan sehingga berpotensi mengecualikan masyarakat yang tidak memiliki akses. Contoh lain, Program Kampung Iklim yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat belum melibatkan masyarakat pada tahap pemantauan dan evaluasi (Renstra Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim 2020–2024).

Peran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan diatur dengan persyaratan yang ketat. UU No. 32/2009 berpotensi menghambat partisipasi masyarakat karena persyaratan bagi organisasi lingkungan hidup untuk dapat memberikan gugatan sangat kompleks sehingga sulit dipenuhi. Dalam ketentuannya, organisasi baru bisa mengajukan gugatan jika berbentuk badan hukum, menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat dua tahun. Persyaratan serupa juga terlihat dalam UU No. 37/2014 yang mengatur ketentuan bagi organisasi terkait konservasi tanah dan air.

Beberapa regulasi ditemukan menempatkan masyarakat secara pasif sebagai penerima program. Peraturan yang ditinjau menempatkan masyarakat secara pasif sebagai penerima sosialisasi dan usaha komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) seperti yang disebutkan dalam Permen LHK No. 75/2019. Dalam Permen ESDM No. 26/2018, bentuk partisipasi masyarakat juga terbatas sebagai penerima program pengembangan dan pemberdayaan saja, serta belum masuk ke berbagai tahapan lain seperti perencanaan dan evaluasi.

Regulasi terkait ILH yang ditemukan umumnya hanya menyinggung partisipasi masyarakat secara ambigu dan minim penjelasan teknis. Keterlibatan masyarakat dalam penetapan wilayah pertambangan dalam UU No. 3/2020, misalnya, hanya terbatas pada masyarakat terdampak tanpa penjelasan mekanisme konsultasi pendapat yang sepatutnya dilakukan untuk benar-benar menghimpun pendapat dari kelompok masyarakat tersebut. Selain itu, peran masyarakat dalam konservasi sumber daya alam sebagaimana diatur oleh pemerintah dalam UU No. 5/1990 terbatas pada kegiatan berdaya guna dan berhasil guna, tetapi secara eksplisit tidak dijelaskan lebih lanjut. PP No. 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan pun tidak memuat pedoman teknis bagaimana peran serta masyarakat dijalankan. Keterlibatan pun terbatas karena hanya difasilitasi pada tahap perencanaan.

## 8.4 Pembelajaran dari Praktik-Praktik Baik Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu ILH

Sesuai dengan temuan tahap 1, studi kasus juga menemukan bahwa kaum muda yang aktif terlibat dalam pembentukan atau pengurusan gerakan memiliki sejumlah modal sosial seperti akses informasi, kesempatan untuk ikut terlibat dalam aksi kaum muda, serta keterampilan untuk berkontribusi dalam gerakan. Sebelum mendirikan GIDKP, para pendiri sudah memiliki pengalaman terlibat dalam berbagai jaringan kaum muda maupun organisasi masyarakat sipil terkait isu ILH. Latar belakang pendidikan salah satu pendiri GIDKP juga berkontribusi pada pemilihan fokus strategi yang diadopsi oleh GIDKP. Serupa, penggerak Jaga Rimba banyak mempelajari pengelolaan organisasi dan proyek melalui pengalaman organisasi yang

dilakukan sebelumnya. Pada saat itu, para penggerak Jaga Rimba mengamati bahwa diskusi tentang ILH kerap didominasi oleh mereka yang berpendidikan tinggi atau tinggal di perkotaan sehingga diperlukan gerakan kaum muda yang lebih inklusif. Pola serupa juga ditemukan pada IYCTC yang terbentuk melalui hasil diskusi perwakilan-perwakilan organisasi kaum muda yang aktif dalam isu pengendalian tembakau.

Studi kasus ini menemukan jalan keterlibatan kaum muda dalam gerakan, khususnya para pendiri atau penggerak, melalui komunitas kaum muda atau melalui OMS/ENGO, seperti yang diamati pada temuan tahap 1. Namun, dalam salah satu gerakan juga ditemukan titik masuk lain, yaitu melalui jaringan pertemanan dan media sosial. Sebagian pengurus GIDKP sudah terlibat dalam organisasi yang bergerak dalam isu ILH sebelum bergabung dengan GIDKP. Seorang pengurus harian GIDKP juga sudah terlibat aktif dalam jaringan ILH sejak masih mahasiswa. Begitu juga dengan penggerak Jaga Rimba yang sebelumnya sudah berpengalaman mengikuti organisasi dan kegiatan terkait isu ILH hingga akhirnya berkomitmen membangun Jaga Rimba. Namun, beberapa anggota Jaga Rimba lain mengungkapkan jalan keterlibatan yang sedikit berbeda, yaitu melalui jaringan pertemanan dengan penggerak lainnya. Salah satu anggota Jaga Rimba lain mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui Jaga Rimba melalui media sosial dan terinspirasi oleh para penggerak lainnya dalam sebuah film dokumenter.

Meski awalnya didirikan oleh kaum muda sehingga identik sebagai gerakan kaum muda, gerakan-gerakan dalam studi kasus ini umumnya tidak menetapkan batas usia anggota 30 tahun ke bawah. Walau GIDKP kerap dianggap sebagai organisasi kaum muda karena didirikan dan didominasi oleh kaum muda, rekrutmen pengurus GIDKP dilakukan berdasarkan kompetensi dan tidak menargetkan kaum muda secara khusus. Beberapa posisi dalam GIDKP, terutama yang berhubungan dengan advokasi kebijakan dan berinteraksi langsung dengan pemerintah, diisi oleh orang yang cukup senior dan berpengalaman. Citra GIDKP sebagai organisasi kaum muda juga dianggap sebagai tantangan untuk bergerak lebih jauh dalam advokasi kebijakan. Sementara itu, meski dibangun untuk menjadi wadah kolaborasi kaum muda, Jaga Rimba tidak memiliki sistem rekrutmen resmi. Walau demikian, sebelumnya Jaga Rimba memiliki beberapa syarat keanggotaan termasuk usia yang sudah tidak diberlakukan lagi. Berbeda dengan yang lain, IYCTC memiliki bentuk keanggotaan unik karena sifatnya sebagai koalisi berbagai organisasi kaum muda, meski keanggotaan perseorangan juga diperbolehkan dengan menasihatkan kaum muda secara khusus.

### **Lensa analisis faktor pendukung dan penghambat dalam studi kasus ini melihat pengaruh faktor-faktor tersebut pada tingkat organisasi. Hal ini berbeda dengan analisis dalam studi tahap 1 yang melihat pengaruh faktor pendukung dan penghambat pada tingkat keterlibatan individu.**

Dalam studi kasus ini, interaksi sosial ditemukan sangat memengaruhi keberhasilan gerakan mencapai agenda perubahannya, baik secara positif maupun negatif. Seluruh Gerakan menyampaikan bahwa dukungan dari berbagai pemangku kepentingan dan mitra sangat mendukung aktivisme mereka. Bagi GIDKP, jejaring dengan organisasi lain sangat membantu pencapaian tujuan terutama hubungan baik dengan mitra pemerintah, donor, dan pemangku kepentingan lainnya, mulai dari sisi teknis hingga informasi perkembangan isu di tingkat global. Di SCC - Green Camp, interaksi positif antara pengelola dan peserta melalui bimbingan hingga fasilitasi hubungan dengan pemangku kepentingan terkait tampak mendukung capaian program. Di Jaga Rimba, pertemanan erat antaranggota dipandang sebagai faktor pendukung gerakan yang menonjol karena memperkuat keaktifan para anggotanya. Meski Jaga Rimba mengakui besarnya dukungan dari kaum muda di luar komunitasnya terhadap aksi-aksi mereka, ada juga bentuk cemoohan dan komentar negatif dari sesama kaum muda yang menjadi tantangan. Dalam beberapa situasi, ketiadaan dukungan pemangku kepentingan sekitar, seperti orang tua dan/atau pihak sekolah, hingga adanya praktik tokenistik oleh orang dewasa menjadi faktor penghambat bagi Jaga Rimba.

Berbagai faktor internal komunitas/organisasi itu sendiri, seperti bentuk, struktur, pengelolaan organisasi, dan pendanaan, juga ditemukan memengaruhi upaya pencapaian tujuan gerakan secara berbeda-beda. Gerakan yang diinisiasi oleh kelompok yang lebih muda (Jaga Rimba dan IYCTC) cenderung memiliki struktur organisasi yang cair, sedangkan gerakan yang diprakarsai oleh kelompok kaum muda yang lebih senior atau kelompok nonkaum muda (GIDKP dan SCC - Green Camp) cenderung lebih terstruktur. Baik GIDKP maupun SCC - Green Camp memiliki mekanisme perencanaan, pendokumentasian, dan pengukuran capaian yang ditentukan sejak awal dan dilakukan secara berkala. Sementara itu, Jaga Rimba dan IYCTC lebih memilih fleksibilitas dalam pembagian tugas dan penentuan kegiatan karena dianggap mempermudah dan mendukung perkembangan dan keberlangsungan gerakan. Meski demikian, belajar dari salah satu gerakan, keberadaan dokumen-dokumen internal seperti anggaran dasar, standar kerja, atau pedoman lain juga meningkatkan kredibilitas gerakan. Keterbatasan pendanaan menjadi isu yang dibahas oleh seluruh gerakan dan beberapa mengangkat adanya dinamika dengan pemberi dana, seperti tuntutan untuk menjadi lebih terstruktur dan mengurangi kesan tidak teratur yang timbul akibat tingginya fleksibilitas dalam bekerja.

**Seluruh partisipan studi kasus menyampaikan adanya faktor eksternal, seperti pandemi Covid-19 dan pemahaman kaum muda dan masyarakat terkait isu, sebagai penghambat agenda perubahan.** Hampir seluruh gerakan menganggap Covid-19 menghambat aktivisme khususnya dalam kegiatan yang membutuhkan pertemuan tatap muka. Selain itu, beragamnya tingkat pemahaman anggota gerakan dan masyarakat umum tentang isu yang menjadi fokus juga menghambat gerakan dalam mengusung agenda perubahannya.

**Di salah satu gerakan, faktor individu yang kuat atau menonjolnya sosok penggerak dianggap menjadi pendukung yang penting.** Salah satu penggerak Jaga Rimba berperan besar menarik kaum muda untuk bergabung dalam komunitas dan menggerakkan kegiatan-kegiatan Jaga Rimba. Besarnya pengaruh dari penggerak ini diakui para anggota lain yang terinspirasi dari inisiatif-inisiatifnya. Namun, adanya ketokohan yang kuat ini juga dapat berdampak negatif karena berjalannya aktivisme akan bergantung pada sosok ini.

**Gerakan-gerakan dalam studi kasus ini memandang kesuksesan secara beragam dan dinamis mengikuti perkembangan strategi dalam mencapai tujuannya.** Kesuksesan besar GIDKP diraih melalui advokasi kebijakan yang menghasilkan peraturan pembatasan plastik sekali pakai di beberapa daerah, meski ada juga capaian-capaian lain untuk

strategi edukasi dan kerja sama. Secara kuantitatif, SCC - Green Camp melihat jumlah kampanye yang berhasil diluncurkan pesertanya sebagai capaian, meski pengelola melihat juga bahwa secara kualitatif tujuan program untuk menjadi wadah jejaring dan kolaborasi turut tercapai. Sementara itu, capaian terbesar bagi Jaga Rimba adalah makin banyaknya pembicaraan terkait isu masyarakat adat di media sosial. Selain itu, bagi IYCTC, dokumen Panduan Pelibatan Partisipasi Kaum Muda dalam Isu Pengendalian Tembakau (P3KT) merupakan capaian terbesar karena selain menjadi rujukan bagi berbagai organisasi, dokumen ini juga menaikkan posisi tawar koalisi di mata pemangku kepentingan.

**Studi kasus juga mengamati adanya pola keterkaitan antara struktur organisasi dan cara gerakan tersebut mengukur capaian yang dihasilkan.** GIDKP dan SCC - Green Camp, yang tata kelola organisasinya lebih terstruktur, memiliki perencanaan dan indikator keberhasilan tersendiri yang disusun secara berkala untuk memantau perkembangan dan capaian atas berbagai pendekatan yang dilakukan. Sementara itu, gerakan dengan bentuk keanggotaan yang cair, seperti Jaga Rimba, tidak memiliki tolok ukur keberhasilan yang diatur secara khusus dalam dokumen organisasi. Jaga Rimba mengukur kesuksesan berdasarkan persepsi anggota mengenai apa yang sudah dicapai oleh gerakannya. Sementara itu, IYCTC yang bergerak secara organik belum melihat adanya kebutuhan tersebut.



09



Kesimpulan dan  
Rekomendasi

**1 Studi ini menemukan bahwa setiap bentuk aksi sipil kaum muda dalam gerakan ILH cenderung tersekat-sekat dalam isu yang berbeda. Aksi-aksi sipil yang muncul masih dominan di skala komunitas dan belum menghasilkan perubahan sistemis. Merespons persoalan ini, pemangku kepentingan<sup>17</sup> dapat menyediakan dukungan proporsional dalam aksi sipil yang komprehensif.**

- Pemangku kepentingan dapat bekerja bersama kaum muda dalam mendorong berbagai bentuk aksi sipil kaum muda yang komprehensif sesuai dengan spesialisasi komunitas, cakupan isu, dan kapasitas kaum muda.
- Sambal tetap mendukung bentuk aksi sipil yang dominan seperti upaya peningkatan kapasitas, kampanye, aksi protes, serta pendampingan masyarakat dan inovasi sosial, pemangku kepentingan dapat melengkapi bentuk aksi sipil kaum muda dengan memfasilitasi riset dan advokasi kebijakan tentang isu yang bersangkutan.
- Dukungan proporsional dalam berbagai bentuk aksi sipil yang saling melengkapi dapat membantu aksi sipil kaum muda menjangkau tataran sistem dan mewujudkan upaya aktivisme ILH yang lebih berkelanjutan.

**2 Studi ini menemukan bahwa upaya pelibatan kaum muda masih terbatas dan kurang menjangkau kaum muda rentan. Tantangan lainnya, masih ada kesenjangan antara keterampilan sipil yang disediakan oleh pihak yang melibatkan dengan kebutuhan dan kondisi kaum muda yang berbeda-beda. Pemangku kepentingan diharap dapat menyediakan ruang partisipasi dan dukungan keterampilan sipil yang adaptif dan inklusif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kaum muda di gerakan ILH. Beberapa faktor struktural seperti perkembangan teknologi dan media kreatif dapat dimanfaatkan untuk mengisi kesenjangan tersebut.**

- Pemangku kepentingan bisa lebih adaptif dan inklusif dalam melibatkan kaum muda di gerakan ILH dengan penyesuaian terhadap kondisi dan karakteristik kaum muda, perkembangan teknologi, dan metode aksi yang terus berkembang.
- Ruang keterlibatan kaum muda dapat diupayakan lebih inklusif dengan meminimalisasi hambatan partisipasi kaum muda, terutama kelompok rentan, seperti kelompok pra-sejahtera, kelompok disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya.
- Pemangku kepentingan dapat memperluas berbagai saluran atau kanal untuk kaum muda dari kelompok rentan agar mereka dapat terlibat dan memberikan masukan serta umpan balik dalam berbagai aktivisme kaum muda.
- Pemangku kepentingan juga perlu mempertimbangkan kemudahan akses agar kelompok rentan dapat terlibat dalam aktivisme ILH sesuai kapasitasnya sembari memitigasi risiko stigma dan diskriminasi yang sering kali mereka alami saat terlibat dalam aksi sipil.
- Seiring perkembangan teknologi, pemangku kepentingan juga dapat berinvestasi pada literasi digital dan pelibatan tokoh berpengaruh dalam mendukung aktivisme kaum muda melalui media sosial agar lebih mudah menjangkau kaum muda secara umum.
- Di sisi lain, investasi juga diperlukan untuk menyediakan ruang partisipasi khusus bagi kelompok yang kesulitan mengakses jaringan digital.

<sup>17</sup> Pemangku kepentingan termasuk lembaga pemerintah, ENGO, LSM, organisasi pemuda, dan kelompok masyarakat sipil lainnya yang terlibat dalam isu-isu di luar aktivisme iklim dan lingkungan.

- Media massa, baik tradisional maupun daring, juga dapat membantu menyebarkan informasi pilihan ruang keterlibatan yang dapat diakses kaum muda.
- Pemangku kepentingan dapat melibatkan kaum muda secara aktif untuk secara adaptif menilai kebutuhan keterampilan sipil yang penting untuk ditingkatkan. Sebagai contoh, peserta muda mengusulkan peningkatan kemampuan berpikir kritis bagi pelajar sekolah melalui penyesuaian kurikulum pendidikan.
- Sementara itu, pelatihan advokasi, kampanye, dan *lobbying* yang efektif untuk mendorong keberhasilan aktivisme, diusulkan untuk diarahkan pada kelompok usia mahasiswa.
- Terkait keadilan ILH, ditemukan adanya kebutuhan peningkatan keterampilan kaum muda adat dalam mengelola tanah adat. Kebutuhan yang berbeda-beda ini dapat diakomodasi dengan melibatkan kaum muda sejak tahap awal, yakni identifikasi kapasitas yang dibutuhkan.
- Ruang dialog antargenerasi juga dapat terus dibangun untuk memahami berbagai sudut pandang dan menjembatani kesenjangan aksi sipil dari berbagai kelompok generasi muda.
- Pemangku kepentingan hendaknya berusaha memahami berbagai metode kreatif yang ditawarkan kaum muda dalam merespons persoalan ILH.
- Seiring perkembangan pengetahuan, bentuk aksi sipil generasi muda saat ini bisa berbeda dengan bentuk aksi sipil generasi muda di masa lampau. Aksi sipil yang makin kreatif inilah yang dapat menarik minat kaum muda dalam aktivisme ILH.

### 3 Studi ini menemukan modal sosial sebagai faktor pendukung keterlibatan sipil yang dapat memperkuat komitmen sipil kaum muda dan menjangkau kelompok kaum muda lainnya. Pemangku kepentingan dapat memanfaatkan berbagai modal sosial yang telah dimiliki kaum muda untuk memperluas akses dan peluang keterlibatan kaum muda dalam isu ILH.

- Modal sosial yang menjembatani (seperti pengalaman terdampak, kepedulian, dan keresahan yang sama akan persoalan ILH) serta modal sosial yang mengikat (terkait identitas sosial seperti status mahasiswa, kaum muda adat, penganut agama/kepercayaan tertentu, dan fanbase) dapat memunculkan solidaritas kelompok yang menyatukan kaum muda untuk melakukan aksi sipil dalam isu ILH.
- Sementara itu, modal sosial yang mengikat dapat digunakan untuk menjangkau berbagai kelompok muda dengan basis identitas yang selama ini belum banyak dijangkau.
- Pemangku kepentingan dapat mendorong modal sosial yang menjembatani demi memperluas partisipasi kaum muda.

**4** Studi ini menemukan terbatasnya insentif bagi kaum muda dalam berkolaborasi, baik secara internal maupun di luar komunitas atau organisasi mereka. Padahal, ruang kolaborasi antarkomunitas kaum muda dan dengan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat membentuk jejaring, tukar pengetahuan, prospek pendanaan, dan menciptakan lapangan kerja hijau. Pemangku kepentingan perlu mengupayakan terwujudnya insentif yang mampu memotivasi kaum muda untuk berkolaborasi dan memperluas keterlibatan mereka.

- Pemangku kepentingan perlu mendorong kolaborasi dan kerja sama komunitas kaum muda dengan tetap mendukung spesialisasi masing-masing komunitas.
- Pemangku kepentingan dapat mulai mengidentifikasi beragam inisiatif dan fokus gerakan komunitas kaum muda dan berinvestasi pada penguatan spesialisasi mereka dengan peningkatan keterampilan organisasi atau keterampilan lain yang mereka perlukan.
- Lebih lanjut, pemangku kepentingan dapat memberikan dukungan insentif dalam penyediaan ruang atau forum komunikasi untuk menghubungkan aktivis muda di berbagai isu ILH dan isu sosial lainnya.
- Adanya ruang atau forum berjejaring di tingkat nasional dan daerah akan membantu kaum muda membangun dan memperluas solidaritas kelompok dan memperluas potensi pendanaan serta potensi kerja sama kegiatan agar aksi sipil tidak saling tumpang tindih dan dapat mencapai tujuan bersama yaitu mencegah dampak perubahan iklim sekaligus melestarikan LH.

**5** Studi ini mencatat adanya kebutuhan penguatan kapasitas tata kelola organisasi dalam merespons tantangan struktural di internal komunitas kaum muda. Pemangku kepentingan dapat mendukung ruang belajar dan berinvestasi pada pengembangan organisasi komunitas kaum muda melalui transfer pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik pengorganisasian komunitas, dan ruang pembelajaran untuk praktik pengorganisasian dan pengambilan kebijakan.

- Tanpa melakukan intervensi dalam pengambilan keputusan kaum muda, pemangku kepentingan dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman pengorganisasian yang akan memperkuat keterampilan sipil dalam komunitas, termasuk dalam hal proses pendanaan serta pemantauan dan evaluasi yang belum banyak disebutkan dalam diskusi dengan kaum muda.
- Pemangku kepentingan juga dapat memberikan kesempatan dan ruang belajar secara riil dengan *mentorship*, baik di dalam atau di luar komunitas, ataupun ruang belajar melalui program magang atau sebagai pekerja muda di organisasi/ENGO dan instansi pemerintah yang relevan.
- Pemangku kepentingan dapat berperan sebagai pembuka jalan bagi gerakan kaum muda untuk memperluas jejaring, baik dengan tujuan untuk memperkuat advokasi gerakan ataupun untuk memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan gerakan untuk menjalankan aktivismenya. Peran fasilitasi dan pembuka jalan perlu dilakukan secara proporsional dan hati-hati untuk menghindari kooptasi gerakan, dan memberikan ruang untuk kaum muda dalam menentukan sendiri kebutuhannya, khususnya dalam berjejaring dan berkolaborasi dengan pihak lain.



- Pengalaman dan interaksi melalui ruang-ruang tersebut dapat memberikan insentif bagi kaum muda untuk melanjutkan perjuangan dalam aktivisme yang dilakukan.
- Pemangku kepentingan dapat mendukung dan meningkatkan pelibatan generasi yang lebih muda/remaja dalam aktivisme ILH. Aktivistis muda yang sudah lebih berpengalaman juga dapat melibatkan kelompok remaja secara lebih bermakna, tidak hanya sebagai penerima manfaat/peserta kegiatan di sekolah.
- Pemangku kepentingan perlu memahami berbagai struktur dan cara kerja yang diadopsi oleh gerakan kaum muda dalam melakukan aktivismenya. Misalnya, struktur dan pembagian kerja yang cair, dinamis, dan sukarela. Kolaborasi dengan gerakan kaum muda dapat lebih efektif jika pemangku kepentingan mempertimbangkan tata kelola gerakan kaum muda tersebut.
- Dukungan pendanaan dari lembaga donor untuk gerakan kaum muda, baik secara langsung maupun diperantarai oleh OMS, perlu memerhatikan aspirasi, agenda perubahan, serta kapasitas kaum muda dalam berkolaborasi. Setiap pendanaan harus disertai pendampingan dan penguatan kelembagaan gerakan agar dana dapat digunakan secara akuntabel dan dimobilisasi untuk jangka panjang.

## 6 Persoalan ruang partisipasi yang masih cenderung tokenistik, terutama dalam perumusan kebijakan, merupakan tantangan keterlibatan kaum muda yang banyak ditemukan dalam studi ini. Pemangku kepentingan perlu mendorong kepemimpinan yang terbuka pada lembaga pemerintah dan nonpemerintah agar dapat mengkomodasi keterlibatan sipil kaum muda.

- Pimpinan lembaga perlu memastikan bahwa kebijakan yang mendukung keterlibatan sipil tersedia di lembaganya dan dapat diterapkan demi menjamin keamanan kaum muda dalam melakukan aktivismenya. Kebijakan yang perlu dipastikan dan dikawal antara lain tentang jaminan kebebasan sipil untuk berpendapat dan berorganisasi dan tentang perlindungan keamanan individu, data, identitas, dan privasi, baik untuk aktivisme tatap muka maupun daring.
  - Lembaga pemerintah dan nonpemerintah dapat mengkomodasi keterlibatan sipil kaum muda dengan memastikan ketersediaan dukungan sumber daya serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelibatan kaum muda.
  - Pimpinan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dapat lebih terbuka dalam mempertimbangkan masukan kaum muda dan memosisikan kaum muda sebagai mitra dalam perumusan kebijakan dan program pemerintah terkait ILH.
- Pemerintah, secara khusus dapat memberikan peta jalan (*roadmap*) untuk memandu kaum muda dalam mengidentifikasi peluang kontribusi mereka, mengevaluasi kontribusi yang telah diberikan, serta mengevaluasi langkah-langkah keterlibatan mereka.
- Selain kebijakan, proses alokasi sumber daya, infrastruktur, tata kelola, serta sistem dan prosedur yang partisipatif juga perlu diupayakan pemimpin lembaga dalam mewujudkan ekosistem yang mendukung keterlibatan sipil yang lebih bermakna. Pemimpin lembaga diharapkan dapat mengisi kesenjangan relasi kuasa dengan memosisikan kapasitas kaum muda secara proporsional untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, tanpa menuntut mereka sebagai pihak yang harus menyelesaikan semua permasalahan yang muncul.

**7** Studi ini menemukan bahwa kebebasan berpendapat dan lingkungan partisipasi yang aman masih belum dapat dipastikan oleh pemangku kepentingan secara menyeluruh. Aksi sipil kaum muda dalam isu ILH cenderung dominan pada isu-isu yang tidak berisiko karena hak sipil untuk terlibat lebih mudah dipastikan. Sementara itu, aksi sipil kaum muda dalam isu gejala ILH yang secara struktural lebih politis umumnya terbatas karena adanya kekhawatiran akan ancaman terhadap hak sipil mereka. Pemangku kepentingan pemerintah dan nonpemerintah perlu mendukung pemenuhan hak sipil kaum muda, termasuk kebebasan berpendapat dan lingkungan partisipasi yang aman.

- Pemangku kepentingan perlu bekerja sama memastikan terpenuhinya hak sipil kaum muda dalam keterlibatan mereka dalam aktivisme isu ILH. Hak sipil ini antara lain akses dan kesempatan yang adil dan aman dalam memperoleh informasi; kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi; serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
- Secara khusus pemerintah perlu segera memastikan adanya kebijakan yang melindungi aksi sipil kaum muda di tingkat nasional dan daerah, termasuk kebijakan pencegahan upaya kriminalisasi kaum muda dalam menyuarakan pendapat, perlindungan data dan privasi, perlindungan keamanan individu, dan prosedur penanganan masalah yang transparan.
- Untuk memastikan hak sipil dapat terpenuhi, pengambil keputusan lembaga pemerintah dan nonpemerintah juga perlu berinvestasi pada perluasan akses informasi beragam isu ILH, sumber daya untuk mendukung ruang aksi sipil dan interaksi yang aman, dan dukungan bantuan hukum agar kaum muda dapat menggunakan hak sipilnya dalam isu-isu ILH secara menyeluruh. Dengan adanya kesempatan untuk menyampaikan pendapat secara bebas, kaum muda dapat terus melatih keterampilan dan memperkuat komitmen sipil mereka dalam isu-isu sistemis yang berpengaruh besar pada upaya pencegahan dan penanganan krisis ILH.



## Referensi

- Alam, M. (2016). Politicised Space and Contentious Youth in Urban Environmentalism in Indonesia. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 8(1), 1–12.
- Alam, M. (2020). Reconstructing anti-capitalism as heterodoxa in Indonesia's youth-led urban environmentalism Twitter account. *Geoforum*, 114, 151–158.
- Alam, M., & Nilan, P. (2015). Urban growth, youth and environmentalism driving local initiatives in Bandung, Indonesia. 243.
- Alam, M., Nilan, P., & Leahy, T. (2019). Learning from greenpeace: Activist habitus in a local struggle. *Electronic Green Journal*, 1(42).
- Amri, B. S., Nugraha, A. C., & Sari, M. P. N. (2021a). Laporan Partisipasi Politik Anak Muda Terhadap Isu Lingkungan di Provinsi Gorontalo. Yayasan Partisipasi Muda (Generasi Melek Politik).
- Amri, B. S., Nugraha, A. C., & Sari, M. P. N. (2021b). Laporan Partisipasi Politik Anak Muda Terhadap Isu Lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat. Yayasan Partisipasi Muda (Generasi Melek Politik).
- Amri, B. S., Nugraha, A. C., & Sari, M. P. N. (2021c). Laporan Partisipasi Politik Anak Muda Terhadap Isu Lingkungan di Provinsi Riau. Yayasan Partisipasi Muda (Generasi Melek Politik).
- Amri, B. S., Nugraha, A. C., & Sari, M. P. N. (2021d). Laporan Partisipasi Politik Anak Muda Terhadap Isu Lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah. Yayasan Partisipasi Muda (Generasi Melek Politik).
- Andini, A. N., & Akhni, G. N. (2021). Exploring Youth Political Participation: K-Pop Fan Activism in Indonesia and Thailand.
- Argo, T. A., Prabonno, S., & Singgi, P. (2016). Youth participation in urban environmental planning through augmented reality learning: The case of Bandung City, Indonesia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 227, 808–814.
- Aspinall, E. (2012). Indonesia: Moral force politics and the struggle against Authoritarianism. In *Student activism in Asia: Between protest and powerlessness* (Vol. 153180). U of Minnesota Press.
- Azis, H., Pawito, P., & Setyawan, A. (2020). The Impact of New Media Use on Youth Political Engagement. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(1), 223–233.
- Baharuddin, T., Salahudin, S., Sairin, S., Qodir, Z., & Jubba, H. (2021). Kampanye Antikorupsi Kaum Muda melalui Media Sosial Twitter. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(1), 58–77.
- Bappenas. (2020). Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2019. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bassar, E., Impron, & Yanindraputri, P. (2018). Mapping Issues, Stakeholders and Actions on Youth Climate Change Communication in Indonesia for the Period 2008–2015. In W. Leal Filho, E. Manolas, A. M. Azul, U. M. Azeiteiro, & H. McGhie (Eds.), *Handbook of Climate Change Communication: Vol. 2* (pp. 69–85). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-70066-3\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-319-70066-3_6)
- Campbell, D. E. (2009). Civic Engagement and Education: An Empirical Test of the Sorting Model. *American Journal of Political Science*, 53(4), 771–786. JSTOR.

- CERAH, & Change.org. (2020). Laporan Survei Krisis Iklim di Mata Anak Muda. Yayasan Cerah Indonesia & Change.org. <https://www.change.org/l/id/press-release-krisis-iklim-di-mata-anak-muda>
- Crosby, A. (2013). Remixing environmentalism in Blora, Central Java 2005–10. *International Journal of Cultural Studies*, 16(3), 257–269. <https://doi.org/10.1177/1367877912474535>
- Eastin, M. S., Hilligoss, B., & Rieh, S. Y. (2007). *Digital Media, Youth, and Credibility* (M. J. Metzger & A. J. Flanagin, Eds.). MIT Press.
- EPA. (2020). Learn About Environmental Justice. United States Environmental Protection Agency. <https://www.epa.gov/environmentaljustice/learn-about-environmental-justice>
- Gaby, S. (2017). The Civic Engagement Gap(s): Youth Participation and Inequality From 1976 to 2009. *Youth & Society*, 49(7), 923–946. <https://doi.org/10.1177/0044118X16678155>
- Hersinta, H., & Sofia, A. (2020). Social media, youth and environmental low-risk activism: A case study of Savesharks Indonesia campaign on Twitter. *ASPIRATION Journal*, 1(2), 113–134.
- Huijsmans, R. (Ed.). (2016). *Generational Development: A Relational Approach to Children, Youth and Development*. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-55623-3>
- Ida, R., Saud, M., & Mashud, M. (2020a). Persistence of social media on political activism and engagement among Indonesian and Pakistani youths. *International Journal of Web Based Communities*, 16(4), 378–395.
- Ida, R., Saud, M., & Mashud, M. (2020b). An empirical analysis of social media usage, political learning and participation among youth: A comparative study of Indonesia and Pakistan. *Quality & Quantity*, 54(4), 1285–1297. <https://doi.org/10.1007/s11135-020-00985-9>
- Jenkins, H. (2011). "Cultural acupuncture": Fan activism and the Harry Potter Alliance. *Transformative Works and Cultures*, 10. <https://doi.org/10.3983/twc.2012.0305>
- Karlioni, E., Kartadinata, S., Winatapura, U. S., & Komalasari, K. (2019). Indonesian civic engagement among college students. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 29(5), 582–592.
- Kim, A., McLnerney, P., Smith, T. R., & Yamakawa, N. (2020, June 29). What makes Asia–Pacific's Generation Z different? McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/business-functions/growth-marketing-and-sales/our-insights/what-makes-asia-pacifics-generation-z-different>
- Kurniawan, E., Suharini, E., & Dafip, M. (2021). How Far Disaster Management Implemented Toward Flood Preparedness: A Lesson Learn from Youth Participation Assessment in Indonesia. *Journal Homepage*: <https://lieta.Org/Journals/ljsse>, 11(2), 175–183.
- Kusumaningrum, S., Siagian, C., Sari, W. L., Adhi, A. A., Wandasari, W., Febrianto, R., & Tiekien, S. (2021). The Situation of Children and Young People in Indonesian Cities. PUSKAPA, UNICEF, BAPPENAS.
- Kusumasari, B. (2013). Civic Engagement: Connecting Adolescents' Voice through Social Media and the Implications for Government Policy-Making. *Asian Review of Public Administration*, 21.
- Lovejoy, K., Waters, R. D., & Saxton, G. D. (2012). Engaging stakeholders through Twitter: How nonprofit organizations are getting more out of 140 characters or less. *Public Relations Review*, 38(2), 313–318.
- Meyers, S. (2017). Youth with Disabilities in Law and Civil Society: Exclusion and inclusion in public policy and NGO networks in Cambodia and Indonesia.
- Mietzner, M. (2020). Sources of resistance to democratic decline: Indonesian civil society and its trials. *Democratization*, 28:1(Democratic Regressions in Asia), 161–178. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1796649>

- Mok, M. M. C., Kennedy, K. J., & Zhu, J. (2013). Adolescents' civic engagement: A cross culture study of five Asian societies. In *Advancing cross-cultural perspectives on educational psychology: A Festschrift for Dennis McInerney* (pp. 169–19). Information Age Publishing Inc.
- Molaei, H. (2015). Discursive opportunity structure and the contribution of social media to the success of social movements in Indonesia. *Information, Communication & Society*, 18(1), 94–108. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2014.934388>
- National Research Council. (2014). *Civic Engagement and Social Cohesion: Measuring Dimensions of Social Capital to Inform Policy* (p. 18831). National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/18831>
- Nilan, P. (2015). Discourses of non-formal pedagogy in two youth-oriented Indonesian environmental NGOs. *Asian Social Science*, 11(21), 162–173.
- Nilan, P. (2017). The ecological habitus of Indonesian student environmentalism. *Environmental Sociology*, 3(4), 370–380.
- Nilan, P. (2018). Smoke gets in your eyes: Student environmentalism in the Palembang haze in Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 46(136), 325–342.
- Nilan, P. (2020). Muslim youth environmentalists in Indonesia. *Journal of Youth Studies*, 1–16.
- Nilan, P., & Wibawanto, G. R. (2015). "Becoming" an environmentalist in Indonesia. *Geoforum*, 62, 61–69.
- Octarra, H. S. (2022). Analisis Situasi Partisipasi Anak dan Remaja dan Keterlibatan di Masyarakat di Indonesia. UNICEF.
- Parker, L., & Nilan, P. (2013). *Adolescents in contemporary Indonesia*. Routledge.
- Parker, L., Prabawa-Sear, K., & Kustiningsih, W. (2018). How young people in Indonesia see themselves as environmentalists: Identity, behaviour, perceptions and responsibility. *Indonesia and the Malay World*, 46(136), 263–282.
- Peace, A., Connor, L. H., & Trigger, D. (2012). Environmentalism, Culture, Ethnography. *Oceania*, 82(3), 217–227. JSTOR.
- Pickerill, J. (2001). Environmental Internet Activism in Britain. *Peace Review*, 13(3), 365–370. <https://doi.org/10.1080/13668800120079063>
- Rahmawan, D. (2018). Opportunities and challenges of digital media utilization for youth activism in Indonesia.
- Ramadhan, A. S. (2013). *Kebijakan Anak Muda di Indonesia: Mengaktifkan Peran Anak Muda*.
- Ramli, R. (2012). Youth political participation in Asia: Outlooks in Malaysia and Indonesia. In *Dlm. Youth Future Agents of Change or Guardians of Establishment* (pp. 11–18).
- Remotivi. (2022). *Anak Muda dan Aksi Iklim: Peran Media Sosial dan Komunitas dalam Mendorong Aktivisme Lingkungan*. Remotivi.
- Ridwan, R., & Wu, J. (2018). 'Being young and LGBT, what could be worse?' Analysis of youth LGBT activism in Indonesia: Challenges and ways forward. *Gender & Development*, 26(1), 121–138.
- Sari, N. R., Agustina, R., Girsang, A. P. L., Annisa, L., Dewi, F. W. R., Sulistyowati, N. P., & Wilson, H. (2020). *Statistik Pemuda Indonesia 2020 (04220.2004)*. Badan Pusat Statistik.
- Saud, M., Ida, R., & Mashud, M. (2020). Democratic practices and youth in political participation: A doctoral study. *International Journal of Adolescence and Youth*, 25(1), 800–808.

- Saud, M., & Margono, H. (2021). Indonesia's rise in digital democracy and youth's political participation. *Journal of Information Technology & Politics*, ahead-of-print(ahead-of-print), 1–12. <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019>
- Sugihartati, R., Suyanto, B., & Sirry, M. (2020). The shift from consumers to prosumers: Susceptibility of young adults to radicalization. *Social Sciences*, 9(4), 40.
- Tanu, D. (2014). *Engaging Indonesia's Youth*, by Dr Danau Tanu (p. 45).
- Tanu, D., & Parker, L. (2018). Fun, 'Family', and Friends: Developing pro-environmental behaviour among high school students in Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 46(136), 303–324.
- United Nations. (2019, May 31). Climate Justice. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/climate-justice/>
- Van Reeuwijk, M. (2018). Meaningful Youth Participation as a way to achieving success. *Canadian Journal of Children's Rights/Revue Canadienne Des Droits Des Enfants*, 5(1), 200–222.
- Warren, A. M., Jaafar, N. I., & Sulaiman, A. (2016). Youth Civic Engagement Behavior on Facebook: A Comparison of Findings from Malaysia and Indonesia. *Journal of Global Information Technology Management*, 19(2), 128–142. ProQuest Central. <https://doi.org/10.1080/1097198X.2016.1187527>
- Weiss, M. L. (2014). New media, new activism: Trends and trajectories in Malaysia, Singapore and Indonesia. *International Development Planning Review*, 36(1).
- Yue, A., Nekmat, E., & Beta, A. R. (2019). Digital Literacy through Digital Citizenship: Online Civic Participation and Public Opinion Evaluation of Youth Minorities in Southeast Asia. *Media and Communication*, 7(2), 100–114. <https://doi.org/10.17645/mac.v7i2.1899>
- Zhu, J., Kuang, X., Kennedy, K. J., & Mok, M. M. C. (2018). Previous civic experience and Asian adolescents' expected participation in legal protest: Mediating role of self-efficacy and interest. *Asia Pacific Journal of Education*, 38(3), 414–431.



Lampiran



## Lampiran 1. Peserta Pengumpulan Data Primer

Tabel 1. Daftar Peserta Konsultasi/FGD dan KII

Metode Pengumpulan Data Primer	Total Peserta	Jumlah Peserta Perempuan	Jumlah Peserta Laki-laki	Latar Belakang Peserta
Konsultasi Pakar Kaum Muda	7	3	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kaum muda berusia 27–29 tahun</li> <li>b. Memiliki rekam jejak bekerja atau terlibat aktif dalam isu sosial dan lingkungan dalam 4–10 tahun terakhir, baik secara individu maupun dalam komunitas.</li> <li>c. Keterwakilan setara antara pakar muda yang bekerja di media, lembaga <i>think tank</i>, komunitas, lembaga donor, dan organisasi masyarakat sipil terkait isu sosial, iklim, dan LH.</li> </ul>
Konsultasi Pakar Nonkaum Muda/Dewasa	9	5	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki rekam jejak bekerja atau terlibat aktif dalam isu keterlibatan kaum muda dalam isu sosial dan lingkungan dalam 5–10 tahun terakhir.</li> <li>b. Keterwakilan setara antara organisasi masyarakat sipil, media dan lembaga <i>think tank</i>.</li> </ul>
FGD	28	16	12	<p>FGD 1: Mewakili Inisiatif Nasional</p> <p>FGD 2: Mewakili Inisiatif Nasional dan Internasional</p> <p>FGD 3: Mewakili Inisiatif Nasional dan Daerah</p> <p>FGD 4: Mewakili Inisiatif Nasional dan Daerah</p> <p>FGD 5: Mewakili Remaja Dewasa/19–22 tahun</p> <p>FGD 6: Mewakili Remaja Muda/16–18 tahun</p>
KII	14	8	6	Perwakilan dari <i>fanbase</i> K-pop, komunitas kaum muda, pemerintah nasional dan daerah, organisasi masyarakat sipil, dan <i>think tank</i> .

Tabel 2. Peserta Studi Kasus Berdasarkan Tipe

Organisasi/ komunitas	Peserta berdasarkan tipe		
	Tipe A	Tipe B	Tipe C
GIDKP	3	2	2
Jaga Rimba	5	3	-
SCC	1		1
IYCTC	1		1

Tabel 3. Peserta Studi Kasus Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia

Peserta berdasarkan jenis kelamin	
Laki-laki	5
Perempuan	13
Peserta berdasarkan usia	
17–21 tahun	9
22–30 tahun	3
>30 tahun	6

## Lampiran 2. Pemilihan dan Pengumpulan Data Studi Kasus

### Gerakan Tipe 1

#### Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP)

Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) merupakan lembaga nirlaba berbadan hukum perkumpulan yang memiliki visi untuk menjadikan Indonesia bebas kantong plastik dengan mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan kantong plastik dan plastik sekali pakai lainnya. GIDKP mendorong uji coba penerapan kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis pada tahun 2016 di 23 daerah dan berhasil mengurangi konsumsi kantong plastik hingga 55%. Uji coba tersebut merupakan tindak lanjut dari petisi mereka #Pay4Plastic yang didukung oleh lebih dari 70.000 orang di situs Change.org.

#### Alasan pemilihan

Gerakan Diet Kantong Plastik (GIDKP) memiliki reputasi yang baik di kalangan aktivis proiklim dan lingkungan maupun di luar kalangan tersebut. Dalam studi tahap 1, baik perwakilan pemerintah maupun nonpemerintah kerap menyebutkan GIDKP sebagai salah satu gerakan yang dianggap berhasil mendorong perubahan sosial. GIDKP memiliki sejarah yang cukup panjang dalam membangun gerakan di tingkat nasional dan daerah, termasuk keberhasilannya mendorong perubahan kebijakan dan perilaku masyarakat terkait penggunaan plastik sekali pakai.

#### Jaga Rimba

Aksi Mogok Sekolah untuk Hutan adalah gerakan yang diinisiasi oleh kaum muda dari Jaga Rimba untuk menuntut hak masyarakat adat yang terdampak bisnis energi terbarukan geotermal. Selain Aksi Mogok Sekolah, Jaga Rimba juga melakukan aksi kampanye dan protes melalui petisi dan penggalangan dana di media sosial menggunakan hashtag #savekinipan dan berhasil mengumpulkan 60.000 tanda tangan. Jaga Rimba sebagai perwakilan kaum muda Indonesia telah berhasil mempromosikan isu perlindungan hak masyarakat adat ke gerakan internasional melalui aksi Fridays for Future Indonesia. Jaga Rimba memiliki aktivitas diskusi dan aksi mogok sekolah rutin yang dilakukan secara langsung dan daring (saat pandemi) bersama kaum muda. Saat ini, Jaga Rimba ikut tergabung dalam aliansi kaum muda yang bergerak dalam isu iklim dan lingkungan hidup, seperti Extinction Rebellion.

#### Alasan pemilihan

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari studi tahap 1, peserta dari Jaga Rimba mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam beberapa upaya advokasi isu-isu terkait keadilan iklim yang menarik untuk digali lebih lanjut. Jaga Rimba dikelola oleh pendiri bersama sekelompok aktivis remaja dengan prinsip pengelolaan tanpa hierarki, serta dibiayai langsung oleh kaum muda (*self-funded*). Gerakan yang dilakukan Jaga Rimba juga banyak mendapatkan perhatian nasional maupun global. Jaga Rimba juga memiliki afiliasi dengan gerakan global Fridays for Future.

### Gerakan Tipe 2

#### Program She Creates Change (SCC)

She Creates Change - Green Camp merupakan sebuah program pelatihan yang bertujuan untuk mempertemukan para perempuan penggerak perubahan (*change-makers*) dari berbagai daerah di Indonesia untuk bekerja sama, menginspirasi, dan mendukung satu sama lain, khususnya dalam kampanye-kampanye lingkungan hidup. Program ini diinisiasi oleh Change.org, sebuah organisasi nirlaba yang bekerja mendorong inisiatif publik dalam bentuk petisi demi terwujudnya perubahan sosial, khususnya dari segi kebijakan. Change.org meluncurkan program SCC pada 24–28 Oktober 2019 sebagai bentuk dukungan bagi perempuan penggerak perubahan di bidang lingkungan hidup.

#### Alasan pemilihan

Berbeda dari peserta studi kasus yang lain, SCC merupakan program yang diinisiasi oleh organisasi nonkaum muda (Change.org), yang khusus menasar perempuan muda dalam programnya. Individu yang menjadi penggagas maupun yang terlibat dalam program ini menarik untuk dijadikan narasumber guna menggali informasi seputar strategi keterlibatan kaum muda, jalan keterlibatan, serta agenda perubahan yang dipromosikan.

## Gerakan Tipe 2

### Indonesia Youth Council on Tobacco Control (IYCTC)

Indonesian Youth Council for Tobacco Control (IYCTC) atau Dewan Muda Indonesia untuk Pengendalian Tembakau terbentuk pada tanggal 20 Februari 2021. Koalisi ini berdiri untuk memwadahi partisipasi kaum muda yang beragam dalam isu pengendalian tembakau di Indonesia. IYCTC muncul dari kesadaran bersama bahwa isu pengendalian tembakau atau rokok bukan isu kesehatan saja. Ada dimensi ekonomi, sosial, bahkan budaya di dalamnya. Maka dari itu, kolaborasi kaum muda lintas latar belakang diperlukan guna menghadapi isu ini. Pendirian IYCTC disepakati melalui musyawarah virtual yang dihadiri 50 perwakilan kaum muda dari 43 organisasi/komunitas di 20 kota se-Indonesia.

### Alasan pemilihan

Meski relatif baru terbentuk, berbagai organisasi anggota IYCTC sukses dalam mendorong perubahan kebijakan dan mobilisasi publik, seperti pada gerakan FCTC untuk Indonesia yang bertujuan untuk menggalang dukungan masyarakat agar pemerintah Indonesia menandatangani Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Beberapa organisasi anggota lainnya juga berasal dari daerah dan bergerak dalam isu-isu di luar pengendalian tembakau, termasuk isu iklim dan lingkungan hidup. Meski IYCTC tidak termasuk dalam organisasi yang terlibat dalam studi tahap 1, tetapi salah satu pendirinya terlibat dalam salah satu konsultasi pakar, mewakili organisasi lain.

Pengumpulan data dilakukan melalui *desk research* dan wawancara mendalam. Pada tahap awal, *desk research* dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal profil organisasi, latar belakang pendirian, capaian dan cerita kesuksesan, serta dokumentasi perkembangan dan pengelolaan organisasi/komunitas. Hasil *desk research* kemudian digunakan untuk memperdalam instrumen wawancara supaya dapat menangkap karakteristik dan situasi khusus masing-masing organisasi/komunitas.

*Desk research* dilakukan dengan pencarian secara daring terhadap berbagai publikasi tentang masing-masing organisasi, laporan dan artikel yang diterbitkan organisasi/komunitas, video kegiatan, hingga siniar yang diisi oleh anggota organisasi/komunitas. Saat melakukan wawancara, tim peneliti juga menanyakan langsung dokumen-dokumen yang relevan kepada peserta, kemudian informasi yang diperoleh ditambahkan ke pangkalan data yang sudah tersedia.

Selanjutnya, wawancara mendalam dilakukan secara individu atau berkelompok melalui aplikasi Zoom/Google Meet dan dapat juga dilakukan melalui panggilan WhatsApp/WA atau telepon seluler. Wawancara mendalam untuk gerakan tipe 1 dilakukan dengan maksimal 15 orang peserta per organisasi/komunitas. Sementara itu, wawancara mendalam untuk gerakan tipe 2 dilakukan dengan maksimal dua orang peserta per organisasi/komunitas.

Peserta wawancara dibagi ke dalam tiga tipe, yaitu:

- Peserta tipe A (internal-struktural): merupakan individu yang memiliki informasi terkait sejarah pembentukan organisasi, visi dan misi organisasi, gambaran umum program, strategi kerja, dan arah pengembangan organisasi/komunitas. Peserta ini mencakup ketua/koordinator organisasi, manajer proyek, dan penasihat.
- Peserta tipe B (internal-teknis): merupakan individu yang memiliki informasi terperinci dan teknis mengenai program, kegiatan, strategi kerja, termasuk tantangan dan rekomendasi penguatan tata kelola organisasi ke depan. Peserta ini mencakup pengurus, anggota dari organisasi/komunitas/aliansi, dan staf program/proyek.
- Peserta tipe C (eksternal): merupakan individu di luar organisasi yang memiliki informasi yang relevan dengan pertanyaan studi. Peserta ini mencakup penerima manfaat, mitra kerja, dan alumni.

Wawancara dilakukan oleh dua orang peneliti; satu orang bertugas memandu jalannya wawancara dan satu orang lagi bertugas merekam serta mencatat proses dan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. Setiap sesi wawancara rata-rata berlangsung sekitar 60–90 menit dan wawancara lanjutan juga dapat diadakan. Setiap selesai wawancara, tim peneliti bersama dengan manajer proyek dan wakil ketua studi kasus melakukan debrief untuk merefleksikan proses dan hasil wawancara serta menentukan arah wawancara selanjutnya (peserta, topik, dan pertanyaan wawancara).

## Lampiran 3. Temuan Studi Kasus

Temuan studi kasus untuk masing-masing organisasi/komunitas diuraikan dalam beberapa kategori, yaitu (i) deskripsi singkat organisasi/komunitas, (ii) bentuk keterlibatan sipil, (iii) jalan keterlibatan sipil, (iv) strategi pelibatan kaum muda, (v) ekosistem yang mendukung dan menghambat, dan (vi) capaian dan pembelajaran utama. Perbedaan level informasi yang diperoleh dari gerakan tipe 1 (studi kasus utama) dan gerakan tipe 2 (studi kasus pelengkap) memengaruhi penulisan masing-masing kategori.

# Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP)

## Deskripsi Singkat: Tujuan, Rintangan, dan Pendekatan untuk Mengatasi

**GIDKP bermula dari inisiatif lembaga dan individu untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai.**

Pada tahun 2010, sebuah organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada produksi dan konsumsi berkelanjutan memulai uji coba program kantong plastik berbayar di sebuah minimarket di Kota Bandung. Pada tahun 2013, individu pendiri GIDKP mengajukan petisi kepada ritel modern untuk tidak memberikan kantong plastik secara gratis kepada konsumen. Petisi ini mendapat dukungan dari berbagai pihak dan para pendiri kemudian memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak tersebut. Dari pertemuan itu terbentuklah beberapa kolaborasi program hingga akhirnya muncul gagasan untuk membawa isu pengurangan sampah plastik ini menjadi lebih sistematis. Dalam merumuskan gagasan tersebut, para pendiri juga berdiskusi dengan *retailer*, konsumen, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengenai permasalahan sampah plastik dari sudut pandang masing-masing.

**Untuk mengatasi permasalahan sampah plastik secara sistematis, berbagai pihak yang mendukung petisi sepakat untuk membentuk organisasi Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik.**

Pada tahun 2014, GIDKP resmi menjadi organisasi berbadan hukum dengan misi utama mengubah perilaku masyarakat secara masif dalam penggunaan plastik sekali pakai. Seorang peserta yang merupakan salah satu pendiri sekaligus direktur GIDKP (sejak tahun 2016) menjelaskan bahwa masalah iklim dan lingkungan hidup itu banyak sekali, akan tetapi masalah plastik cukup unik karena karakteristiknya yang dirancang untuk sekali pakai.

la menyampaikan bahwa dari sekian banyak plastik yang diproduksi di seluruh dunia saat ini, mungkin 50% baru diproduksi dalam kurun 15 tahun terakhir.

Akibatnya, polusi plastik menjadi hal yang serius. Dari fakta itu, ia memilih untuk berfokus pada isu plastik dari sisi hulu dengan mengintervensi plastik sebelum menjadi sampah, bukan dari sisi hilir dengan mengintervensi plastik ketika sudah menjadi sampah. Intervensi ini dilakukan melalui kampanye sosial atau advokasi kebijakan untuk menolak plastik sekali pakai.

Sebelum peserta ini menjabat sebagai direktur, kesekretariatan GIDKP dipegang oleh lembaga pendiri yang disebutkan di atas. Pada masa itu, pendekatan utama yang digunakan GIDKP untuk mencapai misi di atas adalah dengan edukasi kepada masyarakat. Dari pengalaman tersebut, peserta lainnya menilai bahwa pendekatan edukasi sulit diukur perubahannya. Berangkat dari pembelajaran tersebut, GIDKP menyesuaikan pendekatan utama yang digunakan, yaitu berfokus pada advokasi kebijakan.

Selain advokasi kebijakan, GIDKP juga memiliki pendekatan edukasi dan kerja sama dalam mencapai misi organisasi. Dalam pendekatan advokasi kebijakan, GIDKP banyak bekerja dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menerapkan kebijakan atau peraturan mengenai pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Terkait dengan edukasi, kegiatan utamanya adalah kampanye sosial dan penguatan kapasitas yang menasar kaum muda. Sementara itu, untuk pendekatan kerja sama, GIDKP bekerja sama dengan ritel modern dan pasar tradisional untuk pengurangan plastik sekali pakai.

Peserta yang berasal dari tataran teknis (peserta tipe B) menyampaikan bahwa terdapat kaitan antara pendekatan edukasi dan advokasi. Sebelum atau paralel dengan pendekatan advokasi, perlu dilakukan juga pendekatan ke masyarakat melalui kampanye dan edukasi untuk menyiapkan masyarakat ketika kebijakan/peraturan yang diadvokasikan sudah terbit atau berlaku.

## Bentuk Keterlibatan Sipil

**Bentuk keterlibatan sipil GIDKP dilakukan melalui kerangka tiga pendekatan: advokasi kebijakan, edukasi, dan kerja sama.**

Advokasi kebijakan kepada pemerintah daerah dilakukan dengan pendekatan yang berbeda-beda sesuai konteks daerah. Pada advokasi kebijakan di DKI Jakarta, misalnya, GIDKP mendampingi pemerintah DKI dalam penyusunan dan penerapan Peraturan Gubernur No.142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat. Sementara itu, pada advokasi kepada pemerintah Kota Bandung, GIDKP mendampingi pemerintah daerah dalam menjalankan program pengurangan plastik sekali pakai secara bertahap (selama lima tahun).

Pada pendekatan edukasi, program utama GIDKP adalah Envirochallenge, yaitu program pendampingan kepada sekolah-sekolah setingkat SMA yang siswanya berminat menyelesaikan permasalahan plastik di sekitar mereka. Program ini bertujuan untuk membangun kapasitas siswa dalam menyusun proposal program ILH secara sistematis. Proposal yang terpilih kemudian akan mendapatkan pendanaan dan pendampingan dari GIDKP.

Pada pendekatan kerja sama, program utama GIDKP adalah pasar bebas plastik. Dalam program ini, GIDKP bekerja sama dengan ritel modern dan pasar tradisional untuk membangun ekosistem yang membuat masyarakat terbiasa menggunakan kantong belanja ramah lingkungan.

## Jalan Keterlibatan Sipil

**Dari lima orang pengurus harian GIDKP yang menjadi peserta, sebagian memiliki latar belakang di isu ILH dan sebagian lagi belum pernah berurusan dengan isu ILH.**

Misalnya, seorang peserta yang merupakan salah satu pendiri bekerja di firma hukum sebagai pengacara selama 6 tahun.

Meskipun demikian, ia sudah memiliki ketertarikan pada isu ILH sejak kecil dan berniat untuk mencurahkan energinya pada isu ini. Komitmen ini ia manifestasikan dalam upaya menggalang petisi yang ditujukan kepada retailer untuk tidak memberikan kantong plastik secara gratis, yang kemudian mendapat dukungan dari berbagai pihak. Latar belakangnya sebagai sarjana hukum membuatnya menyoroti sisi kebijakan terkait permasalahan ILH, khususnya isu sampah plastik. Fokusnya pada sisi kebijakan juga tercermin dalam pendekatan utama yang diterapkan GIDKP saat ia menjabat sebagai direktur. Satu orang peserta tipe B juga tidak memiliki latar belakang isu ILH. Sebelum bergabung di GIDKP, ia aktif dalam isu pembangunan berkelanjutan dan tergabung dalam jaringan kaum muda untuk pembangunan berkelanjutan. Titik masuknya ke GIDKP adalah saat ia mengenal salah seorang pengurus GIDKP yang juga bergabung dalam jaringan yang sama.

Tiga orang pengurus harian lainnya sudah aktif dalam isu ILH sebelum bergabung dengan GIDKP. Dua orang peserta merupakan anggota dari organisasi pendiri GIDKP. Ketika GIDKP terbentuk, keduanya bergabung dengan GIDKP dan berperan sebagai koordinator nasional dan sebagai relawan. Sementara itu, seorang peserta sudah terlibat dalam kerja-kerja GIDKP saat ia masih berstatus mahasiswa. Saat itu, ia terlibat dalam jaringan mahasiswa ilmu pertanian, yaitu International Association of Students in Agricultural and Related Sciences (IAAS) yang fokus pada isu lingkungan. Melalui kegiatannya di jaringan tersebut, ia kemudian diajak GIDKP untuk bekerja sama dalam membuat kegiatan Zero Waste Youth Festival. Setelah itu, ia bergabung dengan GIDKP sebagai relawan dan kemudian diangkat menjadi staf edukasi.

## Dimensi Keterlibatan Sipil

**Dimensi keterlibatan sipil secara tidak langsung tergambar dari diskusi mengenai jalan keterlibatan sipil dan pendekatan untuk mencapai agenda perubahan organisasi.**

Dimensi komitmen sipil misalnya terlihat dari adanya keinginan peserta yang berperan sebagai pendiri untuk berkontribusi dalam isu ILH meskipun saat itu karier profesionalnya adalah sebagai pengacara. Dimensi keterampilan sipil juga tergambar dari kemampuannya untuk mengatur ulang tata kelola organisasi ketika ia baru menjabat sebagai direktur GIDKP. Kemampuan pengambilan keputusan kolektif juga tercermin dari informasi mengenai pelibatan semua pengurus harian dalam mengambil keputusan-keputusan penting di organisasi.

## Strategi Pelibatan Kaum Muda

### Kepengurusan awal yang didominasi kaum muda membentuk citra GIDKP sebagai organisasi kaum muda.

Dari lima orang pengurus harian GIDKP yang menjadi peserta, semuanya bergabung dengan GIDKP pada usia kaum muda (16–30 tahun). Ada yang bergabung saat memasuki usia 27 dan 28 tahun, ada yang bergabung pada usia 24 tahun, dan ada pula yang bergabung sejak usia 20 tahun. Dua dari lima pengurus harian ini bergabung di GIDKP sebagai relawan dan kemudian diangkat menjadi pengurus harian.

Seorang peserta tipe A menyampaikan bahwa GIDKP memiliki citra sebagai organisasi kaum muda karena pada saat awal terbentuk pengurusnya didominasi oleh kaum muda. Namun, GIDKP ingin bergeser dari citra tersebut karena biasanya organisasi kaum muda identik dengan kegiatan kampanye atau edukasi sehingga cukup menantang bagi mereka untuk bergerak di bidang yang lebih strategis seperti advokasi kebijakan.

Peserta tersebut juga menyebutkan bahwa tidak ada target khusus untuk merekrut kaum muda sebagai pengurus GIDKP, sebab rekrutmen biasanya dilakukan berdasarkan kompetensi. Kebanyakan anggota direkrut lewat rekomendasi internal atau setelah sebelumnya bekerja dengan GIDKP sebagai relawan atau project officer. Dalam kebanyakan kasus, posisi strategis seperti bidang hukum, komunikasi, dan lingkungan, diisi oleh mereka yang berusia di atas 30 tahun karena membutuhkan pengalaman. Sementara itu, perekrutan staf yang lain, misalnya di bidang edukasi dan kampanye publik, memang lebih menasar kaum muda karena dianggap lebih paham mengenai media digital dan dapat lebih terhubung dengan para pengguna media sosial.

Seorang peserta tipe B juga menambahkan bahwa dari hasil survei yang mereka lakukan, kaum muda memiliki keunggulan dalam mendorong berbagai gerakan. Oleh karena itu, lebih tepat untuk menempatkan mereka sebagai agen perubahan di masyarakat. Untuk kegiatan advokasi sendiri, kaum muda tidak terlalu dilibatkan karena mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang terbatas, khususnya dalam berinteraksi dengan pejabat pemerintah yang rata-rata berusia senior. Namun, kehadiran kaum muda sebagai pendorong gerakan di lapangan juga menjadi amunisi bagi tim advokasi untuk memberi jaminan kepada pembuat kebijakan bahwa ada pihak yang bisa mendorong kebijakan tersebut di lapangan.

**Terkait dengan strategi pelibatan kaum muda, sejak 2016 GIDKP memiliki program Envirochallenge, yaitu program di bidang edukasi yang khusus menasar kaum muda (siswa SMA).**

Program ini sudah berjalan di sekolah-sekolah di wilayah Jabodetabek, Bandung, dan Bali. Kriteria sekolah yang dilibatkan adalah yang sudah memiliki kesadaran tentang iklim dan lingkungan hidup. Sekolah dipilih berdasarkan rekomendasi dari beberapa pihak dan diutamakan bagi sekolah yang mengikuti program Adiwiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Program ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu penguatan kapasitas dan pendampingan. Penguatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan yang bertujuan agar siswa mampu menyusun proposal program ILH di sekolah secara sistematis. Proposal yang lulus seleksi akan didanai oleh GIDKP dan diberi pendampingan selama program berlangsung.

Satu peserta yang merupakan peserta Envirochallenge menyampaikan bahwa pelatihan/lokakarya yang diadakan oleh GIDKP sangat membantunya untuk melihat masalah dengan lebih sistematis dan membuatnya sadar akan pentingnya proses riset sebelum menyusun program. Hal tersebut menurutnya tidak hanya bermanfaat dalam keterlibatannya di program Envirochallenge, tapi juga bagi keterlibatannya di organisasi lainnya dan juga dalam kehidupan sehari-hari.

Selain program Envirochallenge, kaum muda juga dilibatkan dalam kegiatan kampanye sosial. Misalnya, dalam pawai bebas plastik yang diinisiasi GIDKP dan beberapa lembaga ILH lainnya, beberapa komunitas kaum muda dilibatkan sebagai kolaborator untuk meramaikan kegiatan pawai. Di samping itu, kaum muda juga dilibatkan dalam kegiatan penggalangan petisi dan surat terbuka yang digagas GIDKP, misalnya petisi untuk menolak galon sekali pakai dan surat terbuka kepada pelaku bisnis *e-commerce* untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

## Ekosistem yang Mendukung dan Menghambat

**Dalam diskusi mengenai ekosistem yang mendukung, faktor komunitas/organisasi merupakan faktor yang kerap disebut mendukung berjalannya pendekatan dan tercapainya agenda GIDKP. Sementara itu, terkait dengan ekosistem yang menghambat, faktor eksternal merupakan faktor yang paling banyak dibahas oleh peserta. Selain itu, peserta juga membahas faktor interaksi sosial, khususnya dengan pemangku kepentingan, yang lebih dominan berperan membentuk ekosistem pendukung dalam menjalankan agenda perubahan GIDKP.**

### Faktor Interaksi Sosial

GIDKP tergabung dalam berbagai jaringan dan aliansi baik di tingkat global, seperti Break Free From Plastic (BFFP) dan Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) Asia Pacific, maupun tingkat nasional seperti Alliance Zero Waste Indonesia (AZWI). Interaksi dengan berbagai organisasi yang tergabung dalam jaringan dan aliansi tersebut membantu GIDKP dalam menjalankan agenda-agenda perubahannya. Organisasi yang ada di AZWI misalnya, sangat membantu dalam bidang teknis, khususnya untuk mencapai target pada tiga fokus pendekatan GIDKP, yaitu advokasi, edukasi, dan kerja sama. Sementara itu, organisasi di tingkat global membantu GIDKP memperoleh informasi perkembangan global sehingga dapat merancang strategi advokasi dan kampanye tingkat nasional yang sesuai.

Interaksi dengan mitra pemerintah, mitra donor, dan pemangku kepentingan lainnya juga merupakan faktor yang mendukung kerja-kerja GIDKP. Dalam advokasi dengan pemerintah daerah, GIDKP mengambil posisi sebagai mitra yang memberikan dukungan/asistensi. Selain dukungan dalam hal teknis, seperti perumusan peraturan/kebijakan, GIDKP juga siap memberi dukungan finansial, seperti mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang tidak dianggarkan daerah. Hal ini menurut peserta berkontribusi terhadap munculnya kepercayaan pemerintah daerah kepada GIDKP. Peserta lainnya menambahkan bahwa mitra pemerintah, mitra donor, dan pemangku kepentingan lainnya juga dilibatkan dalam penyusunan program-program tertentu.

### Faktor Komunitas atau Organisasi

Adanya rapat kerja setiap lima tahun sekali (sering disebut dengan bootcamp) merupakan faktor yang paling sering dibahas oleh peserta. Di dalam bootcamp, tim GIDKP membahas teori perubahan dan strategi yang akan diterapkan dalam lima tahun ke depan. Bootcamp juga menjadi wadah bagi tim GIDKP untuk merefleksikan capaian dan pembelajaran selama lima tahun ke belakang. Selain bootcamp, terdapat pula rapat tahunan yang menjadi sarana bagi tim untuk merefleksikan capaian dan target-target tahunan organisasi. Peserta tipe B juga menyampaikan bahwa di dalam bootcamp, tim juga melakukan pemetaan terhadap arah pembangunan pemerintah daerah yang nantinya akan menjadi modal dalam kegiatan-kegiatan advokasi kebijakan.

Faktor sumber daya manusia (SDM) juga kerap disebut sebagai salah satu faktor internal yang mendukung tercapainya target-target GIDKP.

Seorang peserta tipe A menyampaikan bahwa GIDKP memiliki SDM yang tidak banyak dimiliki oleh gerakan dan organisasi lain, seperti personel yang ahli di bidang hukum sehingga memperkuat upaya advokasi kebijakan. Peserta tipe A lainnya menambahkan bahwa selain ahli hukum, GIDKP juga memiliki ahli komunikasi yang mendukung semua agenda komunikasi publik dan ahli statistik yang mendukung pengukuran perubahan yang ditargetkan.

Faktor internal lain yang disebutkan ialah pembenahan tata kelola organisasi. Saat menjadi direktur GIDKP, seorang peserta tipe A melakukan pembenahan internal yang meliputi pembenahan administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia (seperti struktur organisasi dan kewenangan serta kontrak kerja karyawan). Peserta ini menjelaskan bahwa tata kelola yang baik dapat mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan pendanaan yang lebih besar dari lembaga donor. Sumber daya finansial sendiri juga disebutkan seorang peserta tipe B sebagai salah satu faktor pendukung dalam menjalankan kegiatan-kegiatan GIDKP. Pada kegiatan advokasi misalnya, komponen-komponen yang tidak dianggarkan oleh daerah, seperti diseminasi dan konsultasi publik, biasanya akan dianggarkan dari internal GIDKP.

Khusus pada program Envirochallenge, seorang peserta tipe C yang merupakan peserta program menyebutkan bahwa adanya sistem monitoring ke sekolah-sekolah merupakan salah satu faktor yang mendukung berjalannya program ini dengan baik. Peserta tipe C lainnya yang berperan sebagai konsultan menyampaikan bahwa adanya proses diskusi dan refleksi internal mengenai pembelajaran dari program yang sudah dijalankan membuat program ini berjalan lebih baik dari tahun ke tahun.

Sementara itu, terkait dengan faktor internal yang menghambat agenda perubahan GIDKP, peserta tipe A menyampaikan bahwa citra GIDKP sebagai organisasi kaum muda merupakan faktor yang menyulitkan pendekatan advokasi (lihat bagian Strategi Pelibatan Kaum Muda). Khusus untuk program Envirochallenge, peserta tipe C menyampaikan bahwa terbatasnya waktu dan pendanaan serta pergeseran prioritas GIDKP membuat penyusunan modul dan pelaksanaan program Envirochallenge terhenti sejak tahun 2020.



### Faktor Eksternal

Terkait dengan faktor struktural eksternal, pandemi Covid-19 merupakan topik yang sering disebut memengaruhi berbagai kegiatan GIDKP. Di satu sisi, pandemi dianggap sebagai faktor pendukung, khususnya pada pendekatan edukasi karena metode penyelenggaraan daring membuat jangkauan audiens bertambah luas (mencakup daerah di luar Jabodetabek). Namun di sisi lain, pandemi juga menyulitkan beberapa kegiatan, khususnya dalam pendekatan advokasi. Dialog dengan mitra pemerintah misalnya, pemangku kepentingan pemerintah biasanya lebih nyaman dengan pertemuan tatap muka dibandingkan pertemuan daring. Upaya melakukan kegiatan secara daring pun, misalnya saat konsultasi publik, memiliki keterbatasan jumlah peserta yang minim.

Faktor lainnya yang disebut cukup menghambat kegiatan GIDKP ialah yang berkaitan dengan dinamika pemangku kepentingan dan dinamika politik pada tingkat daerah. Pada kerja advokasi misalnya, pergantian pimpinan di instansi kunci membuat tim harus memulai lagi koordinasi dari awal dengan pejabat yang baru. Selain itu, perubahan prioritas instansi berdasarkan arahan dari pimpinan juga tidak jarang terjadi dan memengaruhi proses advokasi yang sedang berjalan. Peserta juga menambahkan bahwa arah kebijakan di tingkat daerah juga kerap dipengaruhi oleh kepentingan politik dari kubu yang berlawanan dengan pemerintah.

Dinamika pemangku kepentingan ini tidak hanya memengaruhi kegiatan advokasi, tetapi juga kegiatan-kegiatan kerja sama dan edukasi. Pada program pasar bebas plastik misalnya, pergantian kepala pasar membuat tim harus memulai komunikasi dari awal dengan kepala pasar yang baru. Di sisi lain, perubahan arah kebijakan pemerintah daerah di suatu provinsi justru meningkatkan animo sekolah dalam berpartisipasi pada program Envirochallenge.

Terakhir, faktor eksternal lainnya yang disebut menghambat kerja-kerja GIDKP adalah adanya intervensi dari industri plastik. Industri plastik kerap mengganggu upaya pengurangan plastik sekali pakai, misalnya dengan melakukan pendekatan kepada pemerintah. GIDKP menyikapi ini dengan tidak berhadapan langsung dengan mereka, melainkan melalui pendekatan tidak langsung seperti kepada masyarakat serta bekerja sama dengan media dan juga tokoh publik. Peserta menyebutkan penggalangan petisi yang ditujukan kepada retailer sebagai salah satu contoh berhasilnya upaya pendekatan melalui masyarakat. Di samping itu, berkat kemitraan dengan pemerintah, GIDKP selalu memperoleh informasi terkini tentang agenda-agenda yang sedang dijalankan oleh industri plastik.

Faktor eksternal lainnya yang dirasa menghambat kerja-kerja GIDKP khususnya di bidang edukasi adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan media mengenai urgensi isu plastik. Banyak pihak belum menyadari bahwa permasalahan plastik bukan hanya berkaitan dengan sampah, tetapi juga berkaitan dengan perubahan iklim dan akan berdampak ke berbagai sektor lainnya jika tidak ditangani dengan tepat.

Sementara itu, faktor eksternal yang dirasa mendukung kerja-kerja GIDKP khususnya di bidang edukasi adalah penerapan kurikulum pendidikan tahun 2013 dan adanya program sekolah Adiwiyata oleh KLHK. Kurikulum tahun 2013 memuat materi tentang lingkungan dan sekolah Adiwiyata membantu GIDKP dalam mempersiapkan sekolah untuk menerima program Envirochallenge.

### Capaian dan Pembelajaran Utama

**Capaian terbesar GIDKP banyak berasal dari sisi advokasi kebijakan, melalui penerbitan berbagai peraturan pembatasan plastik sekali pakai di beberapa daerah.**

Seorang peserta tipe B menyampaikan bahwa salah satu capaian terbesar GIDKP dalam upaya advokasi adalah pendampingan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerbitkan peraturan pembatasan plastik sekali pakai. Menurutnya, ini termasuk capaian terbesar karena Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah ibukota sehingga secara tidak langsung akan memengaruhi daerah-daerah lainnya. Pendampingan tersebut dimulai dengan mengkaji data kondisi awal penggunaan kantong plastik di Jakarta serta opini masyarakat tentang sampah plastik. Dalam merumuskan peraturan ini, tim GIDKP juga melakukan konsultasi publik dengan pihak-pihak yang terdampak. Setelah peraturan ini terbit dan berlaku, tim GIDKP juga melakukan studi monitoring untuk melihat perbedaan/perubahan dari kondisi awal. Hasil studi awal dan studi monitoring ini juga digunakan untuk menentukan intervensi selanjutnya yang dapat dilakukan oleh GIDKP.

GIDKP juga melakukan advokasi serupa di daerah-daerah lainnya. Pada tahun 2016, GIDKP melakukan uji coba kantong plastik berbayar di beberapa kabupaten/kota di Indonesia yang bekerja sama dengan KLHK. Hingga saat ini, GIDKP sudah berhasil mendorong lebih dari 70 kabupaten/kota untuk mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Seorang peserta tipe A menambahkan bahwa diterbitkannya peraturan mengenai pengurangan plastik sekali pakai belum sepenuhnya bisa dikatakan sebagai capaian, karena penerapan peraturan tersebut juga sama pentingnya untuk mencapai visi dan misi GIDKP.

Ia menyampaikan bahwa setelah peraturan diterbitkan, sistem monitoring menjadi komponen yang penting dan hal ini sedang diupayakan GIDKP bersama dengan pemerintah daerah.

Dari advokasi yang telah dijalankan, peserta belajar bahwa perubahan kebijakan tidak akan tercapai hanya melalui kerja sama dengan pemerintah/pembuat kebijakan. Upaya advokasi kebijakan juga perlu melibatkan pemangku kepentingan lainnya. Misalnya, dalam mendorong peraturan tentang pengurangan plastik, masyarakat juga harus dilibatkan agar memiliki kesadaran mengenai permasalahan sampah plastik dan mau menjalankan peraturan tersebut ketika sudah diterbitkan.

Di bidang edukasi, peserta tipe B menyebutkan bahwa salah satu capaian terbesar adalah dilaksanakannya pawai bebas plastik tahun 2019 yang melibatkan ribuan orang dan diliput oleh berbagai media terpercaya. Peserta juga menyebutkan bahwa pada program Envirochallenge, GIDKP berinovasi untuk menjawab tantangan pandemi COVID-19, yaitu membuat dokumen Panduan Sekolah Bebas Plastik. Panduan ini dirancang untuk menjadi bahan pembelajaran bagi sekolah-sekolah yang ingin mereplikasi program-program yang ada di Envirochallenge tanpa harus menjadi peserta. Program Envirochallenge sendiri sudah berhasil melibatkan 50 sekolah dan sekitar 1000 siswa dan warga sekolah di wilayah Jabodetabek, Bandung Raya, dan Bali.

Sementara itu, di bidang kerja sama, inisiatif pasar bebas plastik yang dilakukan di sebuah pasar tradisional di Jakarta Selatan dibahas sebagai salah satu capaian. Inisiatif ini kemudian menarik banyak daerah lainnya dan sudah diadopsi di Kota Bandung, Provinsi Bali, Kota Surabaya, dan Kota Banjarmasin. Dari penerapan program ini, tim GIDKP belajar bahwa pendekatan perlu disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing, karena tipe pasar di setiap daerah berbeda-beda. Misalnya, tipe pasar di Bali adalah pasar adat sehingga tim harus melibatkan tokoh-tokoh adat dalam program intervensi. Di Surabaya, pasar dimiliki oleh swasta sehingga pendekatannya dilakukan langsung kepada pemilik pasar. Selain disesuaikan dengan karakteristik daerah, tim juga belajar bahwa pendekatan harus disesuaikan dengan target penerima manfaat, misalnya pedagang pasar, penggerak PKK, pegawai pemerintahan, dan lain sebagainya. Setiap anggota tim dituntut untuk mampu menyesuaikan pendekatan dengan dinamika yang ada di masing-masing kategori penerima manfaat.

# Jaga Rimba

## Deskripsi Singkat: Tujuan, Rintangan, dan Pendekatan untuk Mengatasi

**Jaga Rimba dibentuk sebagai gerakan kaum muda yang berfokus pada pelestarian hutan dan aktif mengampanyekan perlindungan hak masyarakat adat atau komunitas lokal yang terdampak.**

Jaga Rimba diinisiasi oleh tokoh kaum muda yang memulai gerakan bersama teman-teman sekolahnya pada tahun 2019, khususnya setelah ia dan teman-temannya terpapar dengan situasi hutan masyarakat adat di Desa Kinipan, Kalimantan Tengah. Sejak itu, Aksi Mogok Sekolah untuk Hutan diinisiasi oleh penggerak dan teman-temannya sebagai bentuk solidaritas untuk menuntut hak masyarakat adat yang terdampak ekspansi perkebunan sawit di Kinipan. Selain itu, Jaga Rimba juga mendorong partisipasi publik melalui petisi dan penggalangan dana di media sosial menggunakan tagar #SaveKinipan dan berhasil mengumpulkan 60.000 tanda tangan. Jaga Rimba sebagai perwakilan kaum muda Indonesia telah berhasil menggaungkan isu perlindungan hak masyarakat adat ke gerakan global Fridays for Future International.

Pembentukan Jaga Rimba didorong oleh tujuan besar untuk membangun wadah bagi kaum muda untuk belajar, berdialog, serta menyuarakan hak-hak mereka. Terlebih, penggerak Jaga Rimba juga sadar bahwa gerakan yang disebut Lingkar Belajar kaum muda ini perlu melibatkan tidak hanya kaum muda yang tinggal di perkotaan saja, melainkan juga yang berada di wilayah nonperkotaan. Secara khusus, keinginan mendirikan Jaga Rimba juga berangkat dari kekecewaan penggerak terhadap kebijakan pemerintah dalam isu iklim dan lingkungan hidup yang penerapannya tidak sesuai harapan.

Beberapa anggota Jaga Rimba juga menambahkan bahwa meski isu masyarakat adat adalah isu utama yang mereka bahas, isu ini juga bersinggungan dengan isu-isu ILH lain. Jaga Rimba menyadari perlunya memperluas fokus agar mencakup isu-isu yang bersinggungan ini setelah berinteraksi dengan gerakan lain dalam berbagai kesempatan. Misalnya, pada tahun 2020, ketika terlibat dalam kegiatan demonstrasi/aksi, Jaga Rimba berkenalan dengan gerakan lain yang membahas isu laut dan polusi. Dalam sebuah wawancara, anggota Jaga Rimba memberi catatan bahwa walaupun ada fokus isu yang mereka pilih, bukan berarti isu-isu lain tidak penting. Sebaliknya, ini berarti bahwa gerakan ILH harus senantiasa menyadari keterhubungan antarisu, dan mampu secara adaptif melihat situasi dan kondisi politik dan sosial di Indonesia.

Dalam mengedukasi publik mengenai isu-isu yang menjadi fokus perhatian, media sosial kerap digunakan untuk menyebarkan konten dengan tujuan mengedukasi dan menggerakkan kaum muda agar mendukung agenda-agenda utama Jaga Rimba. Selain itu, media sosial juga digunakan untuk membuka ruang dialog yang luas dengan sesama kaum muda dan menyebarkan informasi dan edukasi mengenai isu-isu lain seputar keadilan iklim, seperti menyuarakan dekolonisasi dalam gerakan ILH. Sementara itu, metode kampanye digital sering kali digunakan dalam menyuarakan isu tentang hutan dan masyarakat adat.

Jaga Rimba menyadari kekuatan dan potensinya yang lebih besar dalam mengedukasi publik khususnya kaum muda melalui media sosial, dibandingkan dalam melakukan advokasi formal. Pendekatan ini juga dipilih mengingat pengalaman Jaga Rimba yang dianggap kurang diperhitungkan dalam proses advokasi formal karena usia anggotanya yang muda.

Selain menggunakan media sosial, Jaga Rimba juga memiliki pendekatan lain dalam melibatkan kaum muda, seperti mengadakan kegiatan diskusi buku/film/isu terkait ILH (biasa disebut Lingkar Belajar), hingga menjangkau kaum muda untuk bergabung di Jaga Rimba untuk mendukung aksi lebih lanjut. Dalam proses rekrutmen anggota ini, kaum muda senantiasa diingatkan mengenai peran strategisnya dalam memerangi permasalahan ILH serta pentingnya solidaritas sesama kaum muda untuk mendorong perubahan.

Kekhawatiran terhadap isu ILH menjadi pendorong besar anggota untuk bergabung dalam gerakan. Kegiatan Lingkar Belajar membuat anggota, khususnya kaum muda usia SMP dan SMA, makin paham akan kompleksitas isu ILH dan tertarik untuk terlibat dalam aktivisme. Seorang anggota mengungkapkan bahwa keterpaparannya dengan isu masyarakat adat membuatnya sadar bahwa masih banyak peraturan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat adat. Ia juga berefleksi bahwa selama tinggal di kota, gejala perubahan iklim yang dialaminya menjadi peringatan bahwa lingkungan hidup sedang tidak baik-baik saja, sehingga ia terdorong untuk tetap aktif di Jaga Rimba.

Pendekatan yang bersifat aksi langsung pun dilakukan di luar kegiatan diskusi. Selain aksi mogok sekolah, terdapat kegiatan kunjungan langsung ke wilayah konflik. Misalnya, anggota mendatangi langsung dan berinteraksi dengan komunitas terdampak di wilayah Kinipan. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan serupa yang dilakukan oleh anggota di wilayah lainnya secara informal, misalnya di Sumatera Utara.

Meski demikian, pendekatan yang dilakukan oleh Jaga Rimba tidak bersifat tetap; anggota bisa dengan mudah mengusulkan ide kegiatan dan kemitraan dengan komunitas lain. Hal ini mungkin sebab pengelolaan Jaga Rimba bersifat organik dan tidak ada struktur resmi sehingga siapa pun bisa mengusulkan ide kegiatan atau pendekatan.

### Bentuk Keterlibatan Sipil

Pendekatan digital dan tatap muka, seperti yang diuraikan di bagian sebelumnya, diwujudkan Jaga Rimba melalui tiga bentuk keterlibatan sipil, yaitu upaya peningkatan kesadaran, penyediaan wadah berjejaring, dan aksi protes.

Pertama, upaya peningkatan kesadaran dilakukan melalui kampanye, diskusi publik secara daring, pembuatan karya seni, serta penjangkauan dan edukasi ke sekolah melalui kegiatan Jaga Rimba Goes to School. Kedua, Jaga Rimba menyediakan wadah belajar atau berjejaring, misalnya kolaborasi dengan Ruang Baca Puan untuk berdiskusi mengenai isu ekofeminisme, kegiatan Lingkar Belajar tempat peserta dapat saling berbagi bahan bacaan serta mendiskusikannya. Ketiga, yakni aksi protes, seperti aksi mogok sekolah di depan gedung KLHK dan aksi secara digital (*digital strike*) yang dilakukan dalam situasi pandemi Covid-19.

Ketiga bentuk keterlibatan ini tidak selalu dilakukan secara terpisah. Misalnya, dalam pelaksanaan digital strike, bahan yang digunakan dalam aksi berasal dari hasil kegiatan Lingkar Belajar. Digital strike dilakukan dengan pembuatan poster oleh anggota Jaga Rimba di berbagai wilayah terkait isu tertentu, yang kemudian diunggah ke Instagram masing-masing.

Lanjut, beberapa anggota juga berefleksi bahwa aksi protes mereka tidak serta merta dilakukan dengan tujuan advokasi untuk perubahan kebijakan, melainkan juga sebagai medium bagi anggota Jaga Rimba untuk meluapkan keresahan yang mereka miliki sebagai individu dan kelompok.

### Jalan Keterlibatan Sipil

Penggerak dan seorang anggota Jaga Rimba mengungkapkan bahwa sebelum menggerakkan dan aktif di Jaga Rimba, mereka juga sempat bergabung di organisasi yang turut menyuarakan isu ILH, seperti Bye Bye Plastic Bag, House of Fauna, serta Extinction Rebellion.

Belajar dari pengalaman terlibat di organisasi lain, penggerak Jaga Rimba mengungkapkan bahwa masih banyak organisasi kaum muda atau yang melibatkan kaum muda yang cenderung melibatkan kaum muda di wilayah perkotaan. Dari hal tersebut, ia menyadari perlunya gerakan yang lebih banyak melibatkan kaum muda dari wilayah nonperkotaan. Selain itu, keterlibatan di organisasi lain membuat penggerak belajar mengenai pengelolaan proyek dan organisasi dan terinspirasi mengembangkan Jaga Rimba.

Penggerak Jaga Rimba bercerita secara lebih mendetail mengenai satu pengalaman khusus yang kian mendorongnya untuk menggerakkan Jaga Rimba. Dalam sebuah kegiatan diskusi isu ILH, ia melihat bahwa pembicara isu ILH didominasi oleh orang dewasa dengan pengalaman kerja yang luas dan latar belakang pendidikan dari sekolah luar negeri. Ia kemudian berambisi agar dapat memiliki kemampuan untuk memahami isu dan berbicara seperti orang dewasa di dalam kegiatan diskusi tersebut, sehingga membuka ruang dan kesempatan bagi kaum muda untuk bisa berpendapat dengan baik mengenai keresahan yang mereka alami.

Hobi yang sama dan keinginan untuk belajar lebih lanjut mendorong kaum muda bergabung dan bertahan di Jaga Rimba. Seorang peserta mengungkapkan bahwa alasan dirinya ikut tergerak mendirikan Jaga Rimba adalah karena pertemanan sejak SMP serta kesamaan hobi dengan penggerak utama, yakni mendaki gunung dan berkegiatan di alam bebas. Tak hanya itu, ia mengungkapkan bahwa kekhawatiran yang sama terkait masa depan hutan di Indonesia juga mendorong para penggerak untuk membentuk Jaga Rimba.

Salah seorang anggota juga mengungkapkan bahwa kegiatan yang sama dengan penggerak, yakni kursus Bahasa Perancis, membuka kesempatannya berinteraksi dengan penggerak dan bergabung dengan Jaga Rimba.

Beberapa peserta mengungkapkan bahwa mereka tertarik untuk bergabung dengan Jaga Rimba karena terinspirasi aktivisme yang dilakukan penggerak. Tiga orang anggota mengungkapkan bahwa mereka mengetahui Jaga Rimba dari film dokumenter *Diam dan Dengarkan* dan kagum pada para penggerak Jaga Rimba, khususnya karena usia yang sangat muda dan kesadaran yang tinggi terhadap isu ILH. Beberapa anggota bahkan sebelumnya tidak bergelut di isu ILH.

Misalnya, seorang anggota bergabung dengan Jaga Rimba pada tahun 2020 karena pencariannya terhadap komunitas ILH di media sosial dan melihat Jaga Rimba sebagai komunitas yang menarik buatnya. Selain itu, keberadaan media sosial Jaga Rimba juga membuat salah seorang peserta lebih mudah menghubungi Jaga Rimba dan mendorongnya untuk bergabung. Saat ini, peserta tersebut menjadi anggota aktif Jaga Rimba.

Tak hanya sebagai inspirasi, ketika sudah bergabung dengan Jaga Rimba, sang penggerak juga kerap kali menjadi mentor bagi anggota lainnya dengan memberikan saran dan terbuka untuk berkonsultasi terkait advokasi dan pengelolaan komunitas.

### Dimensi Keterlibatan Sipil

**Selain digerakkan oleh keresahan kaum muda terkait permasalahan ILH, aspek komitmen sipil serta kohesi sosial antar anggota menjadi dimensi keterlibatan sipil yang cukup dominan ditemui dan memengaruhi pengelolaan gerakan Jaga Rimba.**

Terkait dengan komitmen sipil, misalnya, berbagai anggota mengutarakan bahwa mereka bertahan di Jaga Rimba karena kesadaran untuk menjaga kepedulian kaum muda khususnya dalam isu-isu yang diperjuangkan Jaga Rimba. Meski sebagian anggota merasa kecewa terhadap kebijakan pemerintah di isu ILH, hal tersebut juga diiringi dengan optimisme mereka akan perubahan kebijakan di Indonesia. Optimisme ini tampak dalam dialog yang melibatkan kaum muda. Selain itu, penggerak Jaga Rimba juga melihat bahwa idealisme kaum muda terkait aspirasi mereka di isu ILH menjadi modal dan kekuatan utama dalam gerakan, khususnya dalam upaya memperluas gerakan di kalangan kaum muda.

Dimensi kelekatan atau kohesi sosial juga tampak dalam pengalaman pengelolaan gerakan. Pertemanan yang erat di komunitas membuat anggota bertahan dan bahkan menginspirasi anggota baru untuk bergabung dan menjadi teman bagi anggota untuk berbagi keresahan. Seorang anggota Jaga Rimba bahkan menyebutkan bahwa pertemanan di Jaga Rimba tidak ia temukan di tempat lain karena ia merasa seperti di rumah (*feels like home*) dan mendapat tempat aman untuk bercerita tanpa dihakimi oleh teman-temannya, serta menjadi sistem pendukung untuk pengembangan diri.

Selain antarsesama anggota, kelekatan dengan kelompok kaum muda lainnya juga tercermin dari diskusi dengan peserta. Hal ini terlihat melalui dukungan yang diberikan komunitas-komunitas lain kepada Jaga Rimba, misalnya dengan memberikan saran dan masukan bagi pengembangan dan keberlangsungan gerakan.

Tak hanya itu, relasi dengan komunitas lain juga membantu Jaga Rimba dalam menggalang dukungan sumber daya, seperti pencarian sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan.

### Strategi Pelibatan Kaum Muda

Menurut anggota Jaga Rimba, kaum muda penting dalam mendorong agenda perubahan yang diusung Jaga Rimba, karena perannya sebagai generasi penerus.

Kaum muda juga memiliki kesadaran yang lebih baik terhadap lingkungan dan memiliki privilese dalam memanfaatkan teknologi untuk memaksimalkan dampak positif aktivisme. Tak hanya itu, kaum muda dipandang memiliki pemikiran yang ideal dan tidak terfokus pada kebutuhan atau kepentingan ekonomi pribadi semata.

Secara organisasi, Jaga Rimba tidak memiliki sistem rekrutmen resmi, meski awalnya memiliki beberapa syarat keanggotaan (seperti jumlah maksimal dan usia) yang sudah tidak diberlakukan lagi. Dengan demikian, siapa pun baik kaum muda maupun non-kaum muda bebas bergabung selama tertarik dengan isu dan agenda perubahan yang diperjuangkan.

Sistem keanggotaan dan pembagian peran dilakukan dengan prinsip sukarela dan tidak ada struktur organisasi resmi. Hal ini dipelajari Jaga Rimba dari komunitas lain yang bercita-cita membangun komunitas yang berkelanjutan dan dapat dimiliki bersama. Strategi ini juga terinspirasi dari cara berpikir gerakan anarkis yang menjunjung spontanitas dan antusiasme kaum muda dalam membesarkan gerakan. Sistem ini juga diberlakukan agar tidak ada kesenjangan hirarki di antara anggota. Dengan sistem yang fleksibel ini, diharapkan banyak kaum muda yang tertarik bergabung dan rasa kepemilikan atas komunitas juga dapat terbangun.

Meski tidak memiliki sistem pengorganisasian yang formal, pembagian peran dan penjelasan tugas tetap dilakukan dan disusun untuk bidang-bidang kerja tertentu, seperti koordinator untuk pengelolaan media sosial dan penulisan artikel. Selanjutnya, pengelolaan dan keanggotaan bidang-bidang tertentu bersifat sukarela. Dalam pengelolaan Lingkaran Belajar, misalnya, terdapat Tim Pustaka yang bertugas mendokumentasikan usulan literatur, film, atau video. Keanggotaan tim ini bersifat terbuka, tergantung minat dan kemungkinan anggota mengerjakan tugas tersebut.

Untuk menjangkau kaum muda, Jaga Rimba memaksimalkan penggunaan media sosial dalam berkampanye, khususnya kepada teman-teman sebaya. Aksi demonstrasi serta digital strike juga digunakan sebagai sarana memperluas jejaring kaum muda.

Meski tidak mensyaratkan usia dalam keanggotaan, semua anggota Jaga Rimba saat ini berusia muda, terutama dari kalangan rekan-rekan sebaya penggerak dan anggota terdahulu. Keanggotaan saat ini beragam, dari pelajar dan mahasiswa hingga anggota yang telah bekerja. Secara geografis, anggota masih didominasi oleh individu yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya. Untuk berkomunikasi dengan anggota di wilayah yang beragam, terdapat grup koordinasi kecil yang dibentuk berdasarkan domisili anggota.

## Ekosistem yang Mendukung dan Menghambat

**Berbagai hal yang mendukung dan menghambat gerakan Jaga Rimba berhasil teridentifikasi, baik yang termasuk dalam faktor individu penggerak, relasi antar sesama kaum muda, dukungan dari orang dewasa atau organisasi lain, tata kelola dan sumber daya internal organisasi, maupun faktor eksternal.**

### Faktor Individu

Selain berperan besar dalam menarik kaum muda lainnya untuk bergabung dan bertahan di Jaga Rimba, tokoh penggerak juga berperan penting dalam menggerakkan berbagai kegiatan di Jaga Rimba. Beberapa kegiatan dimulai dari inisiatif yang ia lakukan, seperti aksi mogok sekolah dan kunjungan ke wilayah konflik, yang kemudian diikuti oleh anggota lainnya. Film dokumenter yang mengulas aktivisme gerakan Jaga Rimba juga ditonton dan menginspirasi kaum muda hingga tertarik dengan isu ILH dan bergabung dengan Jaga Rimba. Saat peserta mengambil jeda dari perannya di Jaga Rimba, beberapa kegiatan juga terhenti dan seorang peserta menyampaikan bahwa Jaga Rimba sebagai sebuah gerakan juga mengalami masa vakum. Hal ini juga disadari oleh peserta penggerak, yang menyampaikan bahwa semua anggota seharusnya bisa terlibat dalam gerakan Jaga Rimba dan tidak bisa lagi bergantung kepada satu orang saja untuk memastikan keberlangsungan gerakan.

### Faktor Interaksi Sosial

Relasi dengan sesama anggota Jaga Rimba serta mitra organisasi atau komunitas kaum muda lainnya dipandang sebagai faktor pendukung gerakan. Pertemanan erat dengan sesama anggota Jaga Rimba, khususnya dalam menerima dan menghargai pandangan yang berbeda di dalam komunitas juga dirasa menjadi hal yang memperkuat anggota untuk aktif berkegiatan di Jaga Rimba. Solidaritas di dalam komunitas juga terlihat ketika salah seorang anggota aktif bermaksud untuk rehat dari aktivitas di Jaga Rimba, dan anggota lainnya berinisiatif untuk membantu menjalankan sebagian perannya dalam mengelola Jaga Rimba.

Pertemanan yang erat di dalam komunitas membuat banyak anggota tetap bertahan aktif di Jaga Rimba. Makin sering anggota bertemu dengan kaum muda sebayanya, dampak aktivismenya makin terasa karena banyak yang ikut bergerak dan memiliki keresahan yang sama. Bahkan, salah satu anggota mengatakan bahwa alasan bergabung dengan Jaga Rimba juga karena ia melihat sosok salah satu penggerak Jaga Rimba yang menurutnya keren karena aktif dalam isu ILH.

Tak hanya dari kalangan internal Jaga Rimba saja, dukungan dari sesama kaum muda juga dirasakan sebagai faktor pendukung. Misalnya, saran dari sesama kaum muda dalam pendirian Jaga Rimba dan penyusunan konten kampanye. Dukungan dari sesama kaum muda juga dirasakan ketika Jaga Rimba menyusun materi audiensi untuk kegiatan advokasi bersama komunitas lain, mencari sumber dana untuk keberlangsungan komunitas, dan belajar hal baru tentang isu ILH maupun tentang pengelolaan organisasi. Sesama kaum muda juga memberi inspirasi kepada anggota Jaga Rimba untuk terus aktif menyuarakan isu ILH.

Meski demikian, tidak semua interaksi dengan sesama kaum muda bersifat mendukung gerakan Jaga Rimba. Komentar negatif dari sesama kaum muda, ketidakpercayaan dengan isu yang diusung, serta cemoohan dari kaum muda lain disebutkan peserta menjadi penghambat gerakan. Misalnya, seorang peserta menceritakan pengalamannya dicemooh karena perilaku menggunakan sedotan plastik yang dipandang tidak sejalan dengan aktivisme yang dilakukan, atau komentar negatif ketika melakukan digital strike di media sosial. Hal-hal seperti ini diakui membuat semangat anggota turun dalam berpartisipasi di kegiatan Jaga Rimba.

Selain interaksi dengan sesama kaum muda, dukungan dari orang dewasa atau pemangku kepentingan nonkaum muda juga didapatkan, mulai dari apresiasi terhadap konten dan aktivitas Jaga Rimba, respons positif dari masyarakat adat, dukungan orang tua dalam bentuk izin untuk berpartisipasi di kegiatan, hingga dukungan bahan bacaan, film, serta diskusi untuk mengenal isu ILH secara lebih mendalam yang dilakukan bersama jejaring masyarakat sipil.

Interaksi sosial dengan orang dewasa juga sekaligus menjadi penghambat aktivisme bagi kaum muda. Minimnya dukungan dari sekolah dan orang tua menjadi perhatian khusus peserta. Di tingkat sekolah, misalnya, ketiadaan dukungan sekolah membuat mereka sulit melakukan aktivisme. Tidak hanya dukungan yang minim, sekolah terkadang secara aktif menentang aktivisme yang dilakukan kaum muda, misalnya melalui permintaan klarifikasi dan peringatan dari sekolah karena keterlibatan siswa dalam aksi demonstrasi.



Di rumah, beberapa peserta mengungkapkan sulitnya mendapatkan persetujuan orang tua karena anggapan bahwa aktivisme itu menakutkan dan berbahaya, sehingga menghambat partisipasi aktif anggota.

Komentar negatif dari masyarakat umum juga diterima oleh anggota Jaga Rimba, dikarenakan usia mereka yang masih muda dan tidak memiliki kapasitas atau kompetensi untuk menyuarakan isu yang dibahas. Secara lebih lanjut, beberapa peserta menyampaikan pengalaman dan observasi terhadap praktik pelibatan kaum muda yang bersifat tokenistik, seperti pengabaian suara anggota Jaga Rimba atau kaum muda secara umum ketika melakukan audiensi bersama pemerintah.

Peserta juga memberikan komentar tentang interaksi dengan orang dewasa pemangku kepentingan yang berperan mendukung sekaligus menghambat aktivisme kaum muda. Dalam penyusunan strategi perubahan, Jaga Rimba banyak terinspirasi dari literatur anarko, degrowth, ekofeminisme, serta dekolonisasi untuk memahami lebih lanjut seputar keadilan iklim dari perspektif negara berkembang. Akses bacaan banyak diterima organisasi dari mitra masyarakat sipil dan hasil keterlibatan atau diskusi dengan komunitas lain. Organisasi-organisasi ILH nonkaum muda lain juga memberikan dukungan dengan membagikan ulang infografis yang disusun, membeli produk dari kegiatan penggalangan dana Jaga Rimba, membantu memperluas jejaring dengan organisasi/gerakan ILH lain, serta memberikan arahan perlindungan hukum ketika anggota Jaga Rimba mengalami peretasan akun media sosial setelah mengikuti aksi demonstrasi. Menurut anggota Jaga Rimba, dukungan-dukungan eksternal ini menumbuhkan motivasi, inspirasi, dan semangat untuk terus memperjuangkan isu-isu ILH.

Di sisi lain, Jaga Rimba juga memiliki pandangan khusus terhadap relasi dengan lembaga donor. Berdasarkan observasi seorang peserta, beberapa OMS yang memiliki idealisme kuat justru tergerus karena mengikuti kepentingan atau agenda donor. Hal ini membuat Jaga Rimba merasa perlu hati-hati terhadap kepentingan donor dan merasa kaum muda perlu membentuk arena sendiri yang terbebas dari kepentingan lembaga lain.

### Faktor Komunitas atau Organisasi

Jaga Rimba dibentuk dengan struktur organisasi dan keanggotaan yang bersifat cair dan dinamis sehingga memungkinkan pembagian tugas yang lebih fleksibel dan pengelolaannya tidak bergantung pada anggota-anggota tertentu. Menurut penggerak dan anggota, hal ini mampu mendorong keberlangsungan komunitas secara jangka panjang karena banyak kaum muda yang memiliki kesibukan lain di luar komunitas.

Karakteristik anggota juga dipandang mewarnai pengelolaan komunitas. Misalnya, keragaman status sosial ekonomi anggota yang memengaruhi tingkat pendidikan, pengetahuan, serta pengalaman dalam isu iklim dan lingkungan. Anggota yang berasal dari wilayah urban memiliki akses informasi yang lebih luas, sedangkan dari suburban memiliki pengalaman langsung terdampak perubahan iklim, yang dirasa menarik dalam gerakan Jaga Rimba. Hal ini memungkinkan pertukaran informasi dan pengetahuan dari sesama anggota. Semangat dan solidaritas anggota dalam berpartisipasi, serta anggota yang bersifat rendah hati, juga dipandang sebagai hal yang mendorong keberlangsungan komunitas.

Keterbatasan pendanaan serta kesibukan anggota menjadi faktor penghambat yang banyak disebutkan. Selama ini, pendanaan berasal dari internal komunitas melalui dana anggota dan belum ada dukungan eksternal. Salah satu alasannya adalah Jaga Rimba berhati-hati dalam menerima donasi eksternal yang tidak memiliki nilai dan semangat juang yang sama dengan Jaga Rimba, karena ketakutan akan berubahnya kepentingan komunitas. Sifat keanggotaan yang sukarela di satu sisi memungkinkan anggota untuk bersekolah atau berkegiatan di tempat lain, tetapi di sisi lain menyulitkan komitmen penuh terhadap pengelolaan komunitas. Hambatan jarak dan dana dalam berpartisipasi di kegiatan Jaga Rimba juga dihadapi oleh beberapa anggota.

Beberapa anggota juga menyampaikan masih minimnya kemampuan dalam pengelolaan komunitas, khususnya dalam hal penulisan catatan kegiatan, dokumentasi, penulisan artikel yang baik untuk publikasi, serta pengelolaan media sosial.

### Faktor Eksternal

Publikasi di media sosial dan berita di televisi membuat banyak kaum muda tertarik mendalami isu lingkungan serta mencari komunitas dan bergabung di dalamnya, termasuk di Jaga Rimba. Tak hanya itu, dukungan publik terhadap pesan advokasi Jaga Rimba di media sosial juga dipandang sebagai faktor pendukung banyaknya kaum muda yang tertarik untuk bergabung. Kesadaran akan dukungan publik yang besar membuat Jaga Rimba senantiasa belajar mengenai pengelolaan media sosial untuk menjangkau berbagai segmen pembaca.

Pandemi COVID-19 memengaruhi mode penyelenggaraan kegiatan dan partisipasi anggota serta kaum muda yang terlibat dalam kegiatan Jaga Rimba. Sebelumnya, kegiatan Jaga Rimba banyak yang bersifat tatap muka, seperti penjangkauan ke sekolah, aksi, hingga penggalangan dana publik. Menurut anggota Jaga Rimba, pergeseran kegiatan dari tatap muka ke daring berpengaruh terhadap rasa kepemilikan anggota, sebab tidak semua anggota tertarik berpartisipasi dalam kegiatan daring.

Pesan advokasi yang diusung Jaga Rimba tidak selalu disetujui semua orang, terlebih lagi ketika disuarakan oleh kaum muda. Dalam beberapa aksi demonstrasi, anggota Jaga Rimba menjadi korban peretasan media sosial. Kondisi ini menuntut adanya dukungan dari lembaga bantuan hukum serta disusun dan diimplementasikannya strategi mitigasi keselamatan anggota.

## Capaian dan Pembelajaran Utama

**Anggota Jaga Rimba menilai bahwa capaian terbesar mereka adalah mulai banyaknya pembicaraan mengenai isu-isu masyarakat adat di media sosial, khususnya yang disertai penyebaran konten Jaga Rimba.**

Reaksi positif dari publik juga terwujud melalui dukungan untuk petisi #SaveKinipan, yang juga bertujuan agar isu hutan dan hak masyarakat adat dapat dipahami dan dibicarakan oleh kaum muda. Ajakan kolaborasi juga bermunculan sejak Jaga Rimba menyelenggarakan kegiatan bersama Ruang Baca Puan sebagai ruang belajar bersama.

Pencapaian lainnya termasuk hasil penggalangan dana yang digunakan untuk membangun Balai Rumah Jaga di area yang berbatasan dengan wilayah konsesi sawit di Kinipan, permintaan data dan informasi dari pelajar SMA terkait wilayah cagar alam ke Jaga Rimba, serta persepsi anggota bahwa Jaga Rimba merupakan rumah pertama untuk berdiskusi tentang ILH.

Dari aktivisme yang dilakukan, pembelajaran berharga didapatkan baik secara individu maupun organisasi. Secara individu, bergabung di Jaga Rimba membuat anggota belajar tentang pengelolaan proyek dan gerakan, informasi baru dari literatur yang dibaca, membentuk karakter diri menjadi lebih kritis, mendapatkan pengalaman baru, serta mendapat tempat yang aman untuk bercerita. Tak hanya itu, anggota juga belajar untuk lebih terbuka dalam menerima pandangan baru, tidak mudah menyerah, dan belajar tentang komunikasi publik.

Keterpaparan langsung anggota terhadap aktivisme isu ILH juga membuat mereka sadar bahwa proses perumusan kebijakan di Indonesia itu rumit, gerakan ILH di daerah bersifat beragam, solidaritas dalam gerakan berperan penting, serta bahwa perubahan yang lebih besar dimulai dari perubahan di tataran diri dan teman terdekat. Dalam membangun gerakan ILH, Jaga Rimba juga sadar bahwa tiap gerakan tetap memerlukan konsep yang jelas untuk mencapai tujuan, terlepas dari pengelolaan secara organisasi. Dengan demikian, untuk membangun gerakan, Jaga Rimba perlu banyak berjejaring dan menjangkau orang-orang di luar jaringan yang selama ini dibentuk.

Kemampuan dan kemauan untuk belajar dalam gerakan juga penting untuk menentukan arah dan strategi aksi. Terlepas dari itu semua, setiap anggota harus menjaga semangat dalam melakukan aktivismenya.

Pembentukan Jaga Rimba sebagai komunitas yang cair secara struktur organisasi dan keanggotaan bukanlah hal yang mudah dan butuh banyak penyesuaian dari anggota yang tidak terbiasa bekerja tanpa struktur. Adaptasi model komunitas cair ini berangkat dari cara kerja teman-teman gerakan bawah tanah (*underground*) dengan mempertimbangkan keberlangsungan organisasi, di mana anggota dapat lebih berinisiatif dalam menentukan keberlangsungan.

Menurut anggota, banyak kegiatan Jaga Rimba diselenggarakan tanpa target hasil dan sistem evaluasi yang bersifat resmi. Evaluasi tatap muka dilakukan secara informal dengan spontan bertanya kepada peserta kegiatan, serta secara daring melalui komunikasi di kanal *chat group*. Evaluasi juga tidak selalu bersifat tertulis, sering kali dibicarakan secara lisan setelah kegiatan saja. Beberapa pencatatan kegiatan dalam bentuk notulen dilakukan, tetapi tidak seluruhnya digunakan untuk publikasi, khususnya di media sosial.

Beberapa anggota memiliki pandangan khusus seputar pencapaian dan cara mengukur dampak. Menurut seorang peserta, keberhasilan menurutnya adalah ketika isu yang didorong didengar oleh masyarakat, meski selama ini tidak benar-benar diukur secara khusus. Peserta lain justru menyangsikan urgensi dokumentasi formal dari kegiatan yang dilakukan. Dalam aktivisme, kesuksesan perlu dilihat secara beragam, bukan hanya untuk mengubah kebijakan, tetapi juga menjangkau dan mengubah persepsi masyarakat. Menurut seorang anggota, pencapaian dari aktivisme Jaga Rimba sulit diukur karena dampaknya tidak dapat dilihat secara langsung. Meski demikian, peserta menyampaikan bahwa dokumentasi dan evaluasi dapat membantu Jaga Rimba menentukan fokus aktivisme dan strategi ke depannya.

Ke depannya, anggota Jaga Rimba berharap agar dapat memperkuat fondasi Jaga Rimba dengan terus membangun pengetahuan dan solidaritas antaranggota, menjaring kaum muda lain di luar keanggotaan Jaga Rimba, serta memiliki kapasitas yang lebih baik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait RUU Masyarakat Adat.



Secara organisasi, beberapa kebutuhan dan rencana ke depan disampaikan oleh anggota, seperti melanjutkan penggalangan dana dengan menjual barang-barang yang diproduksi secara kolektif, mengumpulkan anggota yang terpisah karena situasi pandemi Covid-19, meningkatkan keaktifan anggota, mengaktifkan kembali kegiatan yang sempat terhenti, hingga mulai memikirkan keberlanjutan komunitas dengan merefleksikan ulang basis keanggotaan dan fokus isu dalam gerakan.

Untuk mencapai hal-hal tersebut, kebutuhan pendanaan menjadi tidak terelakkan, meskipun hal ini menjadi sesuatu yang masih didiskusikan secara internal dan belum distrategikan secara khusus. Tak hanya itu, fasilitas ruang sekretariat sebagai tempat berkumpul juga dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan kegiatan tatap muka.

## She Creates Changes (SCC) - Green Camp

### Deskripsi Singkat: Tujuan, Rintangan, dan Pendekatan untuk Mengatasi

**She Creates Change (SCC) - Green Camp merupakan program yang diinisiasi oleh Change.org Indonesia untuk mempertemukan dan meningkatkan kapasitas perempuan penggerak perubahan dalam mendorong kampanye terkait isu iklim dan lingkungan hidup.**

Program SCC awalnya diinisiasi oleh organisasi yang mengelola situs petisi Change.org di India, tetapi isu yang diangkat adalah kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*). Berdasarkan pengalaman mengikuti kegiatan SCC di India, pengelola Change.org Indonesia terinspirasi untuk menyelenggarakan program serupa, tetapi memilih untuk mengangkat isu ILH. Hal ini dilakukan atas pertimbangan bahwa pada tahun 2018, isu ILH merupakan isu yang paling banyak dikampanyekan melalui kanal Change.org Indonesia. Sejak tahun 2015, isu lingkungan juga selalu muncul sebagai salah satu dari lima isu terpopuler di Change.org Indonesia. Pada awal peluncurannya di tahun 2019, peserta yang mendaftar SCC Green Camp mencapai hampir 1.200 perempuan, tetapi saat itu program hanya menerima 21 peserta. Peserta terpilih ini kemudian diberi pelatihan selama lima hari residensi untuk mengasah keterampilan mereka dalam melakukan kampanye efektif guna mendorong perubahan.

Tujuan program adalah peningkatan kapasitas dan pengembangan jejaring. Awalnya, ada tiga agenda perubahan yang ingin disasar SCC - Green Camp. Pertama, SCC - Green Camp berupaya meningkatkan kapasitas para perempuan penggerak perubahan dalam berkampanye agar dampak yang dihasilkan lebih besar. Kedua, program ini juga diharapkan dapat membantu para peserta menemukan dan menggali jati diri, minat, dan motivasi pribadi untuk membuat perubahan. Ketiga, program ini juga bertujuan untuk membentuk komunitas serta

menyediakan ruang aman dan sarana berjejaring bagi perempuan-perempuan penggerak perubahan. Namun, pada SCC - Green Camp 2.0 yang diadakan secara daring di masa pandemi, pengelola merasa sulit untuk memastikan bahwa komponen penggalan jati diri tercapai melalui pelatihan daring.

Agenda perubahan ini dihasilkan dari keyakinan pengelola bahwa sudah ada penggerak-penggerak perubahan yang memiliki motivasi besar dan melakukan perubahan di wilayahnya masing-masing. Meski demikian, para penggerak tersebut masih memerlukan peningkatan kapasitas dalam melakukan kampanye secara digital untuk memperbesar dampak perubahan yang dihasilkan. Selain itu, berdasarkan pembelajaran Change.org sebagai situs yang memfasilitasi kampanye digital, pengelola program menilai bahwa gerakan yang diinisiasi individu membutuhkan dukungan dan aliansi agar dapat berkelanjutan dan berdampak dalam skala yang lebih besar. Oleh karena itu, SCC - Green Camp juga memfasilitasi peserta untuk berjejaring agar bisa bergerak bersama.

Strategi pelatihan dan pendampingan pascapelatihan menjadi bagian penting dalam program. Sebelum pelatihan, peserta SCC - Green Camp diberi materi presentasi, video, dan modul pelatihan agar dapat dipelajari terlebih dahulu. Dalam pertemuan, materi dijelaskan kembali satu per satu. Materi diberikan dalam berbagai format untuk membantu peserta menyusun strategi kampanyenya. Pertemuan lanjutan pascapelatihan umumnya terjadi secara organik antara penyelenggara dan peserta program. Tidak ada komitmen tertulis mengenai lamanya pendampingan bagi peserta dalam mengembangkan strategi kampanyenya.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari salah satu peserta, pendampingan diberikan mulai dari penyusunan dan penerbitan petisi, hingga dukungan pascapenerbitan, seperti melakukan audiensi ke pemangku kepentingan terkait.

### **Bentuk Keterlibatan Sipil**

**SCC - Green Camp merupakan program yang memberikan pelatihan dan pendampingan dan membangun komunitas dan jejaring bagi perempuan penggerak perubahan di Indonesia.**

Kampanye atau upaya peningkatan kesadaran adalah keterampilan yang didorong SCC - Green Camp bagi para pesertanya. Salah satunya adalah menyusun strategi kampanye publik melalui pembuatan film dokumenter yang dilakukan oleh salah satu peserta SCC - Green Camp.

### **Dimensi Keterlibatan Sipil**

**Dari pengamatan, SCC Green Camp tampak mendorong kohesi sosial melalui kolaborasi antarpeserta dan membentuk komitmen sipil peserta melalui pelatihan yang dilakukan.**

Kohesi sosial terefleksi melalui kolaborasi peserta program SCC - Green Camp yang saling berbagi ide dan merayakan keberhasilan masing-masing. Selain itu, peserta tidak hanya menjalin relasi selama pelatihan; kedekatan antarpeserta bahkan dengan fasilitator juga dirasakan setelah pelatihan selesai. Interaksi lebih lanjut untuk berbagi inisiatif kegiatan dan kolaborasi juga muncul setelah pelatihan.

Bentuk komitmen sipil terlihat pada salah satu peserta SCC - Green Camp yang meyakini bahwa perubahan dapat dilakukan mulai dari hal kecil, seperti menanamkan pola berpikir kritis, sehingga dirinya terpacu untuk membagikan pengetahuan dan pengalamannya kepada kaum muda lain, khususnya siswa SMP dan SMA.

### **Strategi Pelibatan Kaum Muda**

Meski tidak menasar kaum muda secara khusus, SCC - Green Camp banyak diikuti perempuan muda.

SCC - Green Camp menasar perempuan-perempuan penggerak isu ILH dengan beragam latar belakang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Program ini tidak secara khusus menasar kaum muda berusia di bawah 30 tahun, tetapi mengingat rekrutmen peserta dilakukan melalui kanal-kanal daring yang sebagian besar didominasi oleh pengguna muda, maka 82% peserta merupakan perempuan muda dengan rentang usia peserta berkisar antara 20 hingga 35 tahun.

Salah satu peserta yang diwawancarai menganggap bahwa strategi SCC - Green Camp untuk menasar perempuan muda sangat baik karena mereka cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. Sebelum mengikuti pelatihan, peserta tersebut mengaku memiliki pemahaman sempit mengenai kepemimpinan, yaitu sebatas pemimpin organisasi. Selain itu, ia menyampaikan bahwa materi yang disampaikan mudah dipahami serta kegiatan yang dilakukan menyenangkan.

### **Ekosistem yang Mendukung dan Menghambat**

**Dalam diskusi mengenai ekosistem, faktor komunitas/ organisasi banyak disebut sebagai pendukung, sedangkan faktor eksternal kerap menjadi penghambat. Selain itu, peserta juga menyampaikan contoh adanya pengaruh interaksi sosial dengan pemangku kepentingan yang menjadi pendukung sekaligus penghambat.**

#### **Faktor Interaksi Sosial**

Dalam pelaksanaannya, SCC - Green Camp banyak dibantu oleh berbagai pihak, seperti para narasumber yang berafiliasi dengan berbagai lembaga serta mitra media yang mendukung dengan mengangkat cerita perempuan penggerak perubahan. Selain itu, dalam proses rekrutmen peserta, pengelola program juga dibantu oleh OMS beserta jaringan OMS untuk menyebarkan informasi mengenai SCC - Green Camp.

Namun, salah satu peserta menyampaikan tantangan yang berdampak pada aktivismenya, yakni ketika tidak mendapatkan dukungan dari salah satu pemangku kepentingan utama. Saat itu, kampanye yang dilakukannya tidak ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terkait, yaitu OMS yang didorong untuk bertindak.

### Faktor Komunitas atau Organisasi

Strategi-strategi dalam proses rekrutmen juga diakui membantu pengelola program dalam menyusun kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan para peserta. Program ini juga memiliki mekanisme pengukuran dan pendokumentasian capaian-capaian program dengan beberapa indikator kuantitatif dan kualitatif yang telah ditetapkan sejak awal.

Sebelum pelatihan, peserta diminta untuk mengisi kuesioner agar pengelola dapat mengetahui latar belakang, motivasi, dan tingkat pemahaman mengenai kampanye yang dimiliki peserta. Saat pelatihan dilakukan secara daring, komitmen waktu peserta menjadi makin penting. Oleh karena itu, untuk memastikan komitmen peserta, pengelola menetapkan berbagai syarat kelulusan program, salah satunya tingkat kehadiran.

Selain itu, ada sesi khusus di mana pelaku-pelaku kampanye yang sudah berhasil berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi ketika melakukan kampanye. Ketika pelatihan, pelaku kampanye ini juga mendampingi peserta yang dibagi dalam beberapa kelompok. Seluruh peserta juga didorong untuk berpartisipasi aktif, khususnya mereka yang cenderung lebih pasif selama diskusi. Peserta juga dibekali materi dan didorong untuk percaya diri dalam menulis dan menerbitkan siaran pers (*press release*), walaupun tidak sampai dipublikasikan atau diliput oleh media.

Setelah pelatihan berakhir, SCC - Green Camp terus berupaya untuk menjangkau dan memberi dukungan bagi pesertanya. Misalnya, pengelola program akan membantu peserta meninjau ulang strategi kampanye dan turut memfasilitasi peserta dalam pelaksanaannya. Pengelola program juga membantu menghubungkan kampanye peserta dengan pengambil kebijakan yang relevan. Selain itu, SCC - Green Camp juga menyediakan wadah bagi para peserta untuk berbagi keberhasilan, termasuk dari penggerak-penggerak perubahan dari program SCC di negara lain, yang dapat saling menginspirasi.

Salah satu peserta program juga mengungkapkan bahwa dukungan materi yang diberikan serta sambutan yang hangat dari para pengelola program sangat membantu kaum muda yang masih sedikit pengalaman dalam melakukan kampanye. Pemberian materi pelatihan yang tidak hanya teknis terkait isu ILH seperti materi kesadaran penuh (*mindfulness*) juga dianggapnya membantu mempersiapkan mental untuk menghadapi tantangan kampanye yang mungkin ditemui.

### Faktor Eksternal

Pandemi Covid-19 cukup menghambat pelaksanaan SCC - Green Camp karena harus mengubah mode pelaksanaan pelatihan dari tatap muka menjadi daring. Pengelola harus memodifikasi sesi pelatihan untuk membuat peserta lebih nyaman dan termotivasi agar tetap mengikuti pelatihan daring sampai selesai. Beberapa materi juga terpaksa dipangkas karena pengelola khawatir sesi daring yang terlalu lama akan membuat peserta terlalu lelah. Peserta juga menyampaikan bahwa kegiatan daring mengurangi kualitas interaksi mereka.

Beragamnya tingkat pengetahuan peserta tentang isu ILH menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola program. Alhasil, perlu diterapkan strategi khusus, seperti mengatur agar latar belakang peserta bervariasi dalam satu kelompok serta mengemas materi dengan bahasa yang sederhana.

Pengelola program juga mengamati adanya tantangan tersendiri dalam pendampingan setelah pelatihan. Meski materi sudah diberikan saat pelatihan, banyak peserta yang masih kesulitan merumuskan strateginya secara jelas dan terukur serta kesulitan menyusun narasi dan mengunggahnya ketika berkampanye. Selain itu, pengelola juga mengamati bahwa peserta yang berafiliasi dengan suatu organisasi kerap kali mengalami tantangan birokrasi dalam organisasinya yang tidak selalu memprioritaskan kampanye. Implementasi strategi kampanye akan lebih mudah jika peserta bergerak secara individu, meski berjalannya kampanye juga tergantung dari motivasi masing-masing peserta.

### Capaian dan Pembelajaran Utama

Perkembangan SCC - Green Camp terlihat dari 24 kampanye yang berhasil diluncurkan oleh para peserta pada tahun pertama dan 28 kampanye pada tahun kedua.

Pengelola juga menilai tujuan mereka untuk menjadi wadah berjejaring tercapai jika dilihat dari interaksi antarpeserta yang berinisiatif untuk saling mendukung dan berkolaborasi, meski tidak selalu dalam aktivisme isu ILH. Bagi pengelola, peserta yang seluruhnya perempuan dianggap sebagai peluang karena peserta kemudian merasa lebih aman untuk terbuka dan berpendapat. Pengelola program percaya bahwa keterbukaan dan rasa percaya antarsesama peserta dan fasilitator penting untuk dibangun di awal pelatihan sehingga sesi dapat berjalan dengan lancar.

Sejak awal, pengelola program sudah menentukan berbagai indikator keberhasilan, antara lain kemampuan membuat narasi (*storytelling*), kemampuan mendistribusikan materi kampanye, ditindaklanjuti kampanye oleh pengambil kebijakan, dan adanya media yang meliput. Ada juga berbagai indikator kualitatif lain, seperti terbangunnya kedekatan antar peserta untuk saling berbagi, mendukung, dan berkolaborasi, yang merefleksikan capaian atas terbentuknya komunitas dan jejaring antarpeserta. Pengelola program juga membagi tugas secara internal untuk mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan dan capaian-capaiannya dalam laporan tahunan. Laporan ini digunakan untuk pembelajaran ke depan dan dapat diakses oleh publik.

Perubahan mode pelatihan dari tatap muka menjadi daring akibat pandemi Covid-19 memberikan pelajaran besar bagi pengelola dalam penyelenggaraan program. Pertama, agenda perubahan perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas teknis dan pembentukan jejaring. Kedua, berbagai penyesuaian strategi pelatihan terkait waktu, materi, serta metode penyampaian juga perlu dilakukan untuk memastikan hasil pelatihan optimal. Selain itu, pandemi menghambat peserta dalam meluncurkan kampanye karena hilangnya momentum yang tepat. Walaupun demikian, pengelola tidak menganggap hambatan tersebut sebagai masalah besar karena yang terpenting peserta sudah memiliki keterampilan yang cukup, memahami penggunaan perangkat yang dibutuhkan, dan mengetahui pihak yang bisa dihubungi ketika ada isu baru yang ingin diangkat.

## Indonesian Youth Council for Tobacco Control (IYCTC)

### Deskripsi Singkat: Tujuan, Rintangan, dan Pendekatan untuk Mengatasi

**Indonesian Youth Council for Tobacco Control (IYCTC) merupakan koalisi kaum muda yang terbentuk pada tahun 2021 dari hasil diskusi antara organisasi-organisasi kaum muda yang bergerak dalam isu pengendalian tembakau di Indonesia.**

Pembentukan IYCTC digerakkan oleh sejumlah kaum muda yang tergabung dalam OMS serta difasilitasi oleh sebuah yayasan yang telah lama berfokus pada pemberdayaan remaja dan kaum muda dalam isu rokok. Yayasan tersebut saat ini mengelola dukungan pendanaan untuk IYCTC yang berasal dari lembaga donor yang bergerak dalam isu pengendalian tembakau.

Saat awal terbentuk, IYCTC bertujuan mendekatkan isu pengendalian tembakau ke lebih banyak orang, khususnya kaum muda, sehingga lebih banyak kaum muda yang terlibat di dalamnya. Peserta menyampaikan bahwa isu rokok tergolong isu yang tidak populer dan sensitif, karena berkaitan dengan pihak yang memiliki sumber daya sangat besar dan berpengaruh kuat. Kaum muda perlu bergerak dalam isu ini, karena mereka merupakan target utama dari industri rokok, sebagai pelanggan di masa mendatang.

Target pelibatan kaum muda bukan hanya mereka yang sudah aktif dalam isu pengendalian tembakau, tetapi juga yang bergerak dalam isu-isu lainnya seperti isu keagamaan dan isu gender.

Organisasi kaum muda yang bergerak di luar isu tembakau, tetapi berpotensi terlibat sudah dipetakan sejak awal terbentuk dan juga diundang dalam serangkaian diskusi di awal pembentukan koalisi. Agenda IYCTC adalah mendorong pembahasan isu pengendalian tembakau secara interseksional, karena menurut mereka hal ini tidak banyak dilakukan oleh pegiat senior isu tembakau.

Menurut peserta, pegiat senior isu tembakau cenderung hanya membahas isu tembakau dari perspektif kesehatan. Meskipun ada yang membahas isu pengendalian tembakau dari sisi gender, sering kali bersifat heteronormatif; pengeluaran tertinggi di rumah tangga adalah untuk membeli rokok (oleh ayah), sehingga ibu kesulitan mengatur belanja rumah tangga. Peserta juga menambahkan bahwa selain tidak sensitif gender, pendekatan pegiat senior juga sering kali tidak sensitif terhadap permasalahan kelas (ekonomi). Misalnya dengan menyalahkan masyarakat miskin yang menggunakan bantuan sosial untuk konsumsi rokok. Padahal, mereka seharusnya dilihat sebagai korban, sedangkan yang patut disalahkan sekaligus menjadi sasaran advokasi adalah industri rokok. Berbagai permasalahan tersebut di atas mendasari dua nilai dasar IYCTC yaitu pelibatan kaum muda yang bermakna dalam isu pengendalian tembakau, sekaligus pembahasan isu tembakau yang lebih inklusif dari berbagai perspektif.

Selang beberapa waktu, terdapat pergeseran agenda perubahan, dari yang semula bertujuan melibatkan kaum muda sebanyak-banyaknya (secara kuantitatif), menjadi upaya untuk juga mendorong praktik keterlibatan kaum muda secara bermakna dalam isu pengendalian tembakau. Momentum pergeseran agenda perubahan tersebut diawali dengan kebebasan yang diberikan oleh yayasan pelopor jaringan ini kepada salah satu pendiri yang menjadi peserta dalam studi ini, untuk menyusun ide pengembangan gerakan ke depannya. Peserta tersebut kemudian mengajak anggota IYCTC lainnya untuk berdiskusi dan dari situ muncul urgensi untuk menyusun panduan tentang keterlibatan kaum muda secara bermakna dalam mengatasi permasalahan rokok. Di samping berdiskusi secara internal, peserta bersama dengan rekan-rekannya juga menyurvei alasan kaum muda enggan bersuara tentang isu rokok.

Panduan tersebut dituangkan dalam dokumen Panduan Pelibatan Partisipasi Kaum Muda dalam Isu Pengendalian Tembakau (disingkat P3KT). Target utama dokumen P3KT ini adalah remaja dan kaum muda usia 15–24 tahun sesuai dengan komposisi anggota IYCTC yang paling dominan. Di samping itu, dokumen ini juga diperuntukkan bagi pemangku kepentingan yang ingin melibatkan kaum muda dalam program-program mereka. Dokumen ini juga mendokumentasikan berbagai upaya pengendalian tembakau yang dilakukan kaum muda sejak tahun 2009, dengan tujuan menjadi daya tawar bagi kaum muda, bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah hal yang baru.

Peserta juga menjelaskan bahwa gerakan IYCTC bersifat organik dan terbuka (*open-ended*). Program dan kegiatan tidak dirancang dari awal, dan dibiarkan berkembang sesuai kebutuhan. Pada program penguatan kapasitas anggota misalnya, sesi/kelas diadakan sesuai kebutuhan anggota tanpa dibentuk kerangka waktu yang definitif di awal. Contoh lainnya ialah pembentukan struktur kepengurusan, yang pada awalnya tidak dianggap perlu, tetapi belakangan anggota menyadari bahwa mereka butuh struktur organisasi agar kegiatan di koalisi dapat dikelola dengan baik. Anggota koalisi menyadari bahwa pada tahap tertentu akhirnya dibutuhkan pembagian peran dan mekanisme pengambilan keputusan.

Diskusi dengan peserta juga menggambarkan pengambilan keputusan secara kolektif yang diterapkan di koalisi. Pada program penguatan kapasitas misalnya, topik-topik ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan bersama para anggota. Pendekatan kolektif ini bahkan diterapkan pada hal-hal yang sifatnya fundamental, seperti penyusunan struktur kepengurusan, yang dilakukan melalui beberapa kali pertemuan daring dengan para anggota koalisi.

Seorang peserta menyampaikan bahwa pendekatan kolektif ini bertujuan untuk menciptakan agensi kaum muda sekaligus memunculkan *sense of belonging*, bahwa mereka ikut menentukan arah gerakan koalisi.

## Bentuk Keterlibatan Sipil

**Selain menyusun berbagai pedoman, IYCTC juga melakukan serangkaian kegiatan dengan tujuan untuk menyediakan wadah belajar atau berjejaring bagi kaum muda serta melakukan advokasi kebijakan.**

Dalam menyediakan wadah belajar atau berjejaring, bentuk keterlibatan IYCTC adalah penyelenggaraan NgeKOS atau Kelas Online Santai sebagai upaya peningkatan kapasitas anggota koalisi. Berbagai materi dapat dipelajari di sini sesuai kebutuhan anggota, dan topik atau materi yang akan didiskusikan diputuskan secara kolektif.

Selain itu, IYCTC juga kerap melakukan diskusi antarsesama anggota untuk berbagi cerita mengenai praktik baik yang dapat didorong atau dipelajari untuk diterapkan di wilayah lain. Keahlian anggota IYCTC yang kaya memunculkan kolaborasi lebih lanjut dengan organisasi lain, seperti upaya membantu sebuah yayasan nonkaum muda dalam membentuk komunitas kaum muda.

Untuk advokasi kebijakan, kegiatan yang dilakukan adalah memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan di tingkat daerah terkait upaya pengendalian tembakau. Tak hanya itu, advokasi lain juga diperluas, misalnya menyuarakan isu rokok ke KLHK pada Hari Tembakau Sedunia serta melalui kegiatan Indonesian Youth Summit on Tobacco Control. Lebih lanjut, IYCTC mengadakan kegiatan jambore yang melibatkan kaum muda dengan dukungan dari pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan. Advokasi kawasan tanpa rokok (KTR) dilakukan melalui jambore ini, di mana para peserta juga mendiskusikan praktik baik gerakan pengendalian tembakau, berdiskusi langsung dengan pejabat pemerintahan, serta meluncurkan kertas kebijakan terkait isu KTR berdasarkan hasil survei digital. Kegiatan advokasi ini banyak dilakukan IYCTC mengingat banyak dari anggotanya yang sudah melakukan advokasi sebelum bergabung dengan koalisi.

Melalui dukungan mitra pembangunan, koalisi kaum muda ini juga terlibat dalam berbagai advokasi isu pengendalian tembakau, seperti advokasi kawasan tanpa rokok, termasuk pelarangan iklan, promosi, dan sponsor rokok khususnya yang menasar anak dan kaum muda. Dalam melaksanakan advokasi tersebut, jaringan dan mitra IYCTC bekerja sama melakukan survei daring untuk menggali persepsi masyarakat mengenai kawasan tanpa rokok dengan melibatkan lebih dari 7.000 responden. Hasil survei ini sedang diolah menjadi catatan kebijakan sebagai salah satu alat advokasi.

### *Dimensi Keterlibatan Sipil*

Dimensi kohesi sosial tergambar dari relasi antaranggota, sedangkan dimensi komitmen sipil terlihat dari tujuan bersama.

Meski berbentuk koalisi dengan banyak organisasi anggota yang bergabung di dalamnya, peserta menjelaskan bahwa sekretariat nasional senantiasa berupaya mengetahui agenda perubahan dan aktivitas masing-masing anggota. Di beberapa kesempatan, kolaborasi antaranggota terbangun sebagai bentuk dukungan terhadap agenda dan aktivitas bersama. Dengan demikian, membangun keeratan dengan sesama anggota merupakan hal yang kerap diupayakan di koalisi.

Selain itu, dimensi komitmen sipil juga tercermin melalui komitmen bersama dalam memperjuangkan partisipasi kaum muda yang bermakna dalam isu pengendalian tembakau. Seorang peserta dari organisasi anggota yang berfokus dalam isu plastik menegaskan bahwa kaum muda memiliki peran yang sama penting dalam membuat perubahan, baik dalam isu pengendalian tembakau maupun plastik.

Untuk isu tembakau sendiri, peserta tersebut melihat kaum muda bisa menjadi kelompok yang paling berisiko jika tidak terlibat sebagai subjek utama dalam membuat perubahan. Dalam hal ini, IYCTC memiliki komitmen yang kuat untuk mengusahakan keterlibatan kaum muda secara bermakna, bukan hanya sebagai pajangan atau pelibatan yang tokenistik. Ia juga menyebutkan bahwa saat ini kaum muda sudah terlihat melakukan aksi dalam isu tembakau karena terdorong oleh semangat untuk menyelamatkan generasi mendatang, atau setidaknya generasi kaum muda itu sendiri.

### *Strategi Pelibatan Kaum Muda*

Strategi membangun dan memperluas koalisi dilakukan dengan menargetkan kaum muda (baik secara individu maupun organisasi) dari berbagai latar belakang, khususnya selain mereka yang aktif menyuarakan isu pengendalian tembakau.

Saat ini, anggota koalisi didominasi oleh remaja dan kaum muda berusia 15–24 tahun dengan latar belakang pelajar, mahasiswa, maupun profesional muda dan berasal dari beragam wilayah, baik dari pulau Jawa maupun Indonesia Timur dan wilayah luar Jawa lainnya. Meski demikian, IYCTC menyadari perlunya keterwakilan yang lebih luas, termasuk dari kelompok penyandang disabilitas dan gender yang beragam.

Dalam perekrutan anggota, IYCTC memprioritaskan mereka yang ingin belajar dan bergerak di isu pengendalian tembakau. Koalisi ini memiliki strategi rekrutmen khusus. Pertama, dengan memetakan organisasi yang relevan dan mengundang mereka untuk berdiskusi dan bergabung dalam koalisi. Kedua, jika sepakat bergabung, calon anggota perlu mengisi pakta integritas yang menyatakan bahwa individu dan organisasi tersebut tidak berafiliasi dengan industri rokok, termasuk tidak pernah menerima uang dari industri rokok untuk kegiatan organisasi. Tak hanya itu, pakta integritas ini juga mencakup komitmen terhadap pencegahan kekerasan dan eksploitasi seksual, dengan tujuan untuk membuat ruang yang aman di dalam koalisi.

Peserta menyadari bahwa IYCTC sering kali mengeluarkan pernyataan bersama untuk merespons isu tertentu. Namun demikian, pernyataan tersebut bersifat tidak mutlak mengikat dan tidak harus disetujui seluruh anggotanya. Setiap pernyataan yang dikeluarkan bersifat khusus mempertimbangkan hal yang disuarakan. Adanya sistem seperti ini diharapkan membuat anggota koalisi bebas menyatakan dukungan atau tidak menyesuaikan dengan kesepakatan organisasi anggota secara internal.

Dari segi pembentukan koalisi, tata kelola internal menjadi sesuatu yang tengah dan kian berkembang. Awalnya, koalisi dibentuk tanpa struktur supaya kepemilikan lebih fleksibel. Meski demikian, belajar dari pengalaman menjalankan kegiatan khususnya jika sudah berkaitan dengan organisasi mitra, struktur kerja diperlukan. Dalam menyusun hal ini, digunakan metode musyawarah melalui serangkaian pertemuan dengan anggota koalisi. Saat berkumpul, organisasi membahas berbagai pilihan struktur organisasi yang akan diterapkan. Tak hanya terkait struktur koalisi, perumusan strategi advokasi pun dilakukan dengan melibatkan anggota koalisi. Organisasi anggota koalisi juga pernah dilibatkan dalam memberikan saran atau masukan terhadap rencana dan desain kegiatan koalisi.



## Ekosistem yang Mendukung dan Menghambat

Diskusi mengenai ekosistem yang mendukung dan menghambat jalannya agenda dan pendekatan IYCTC didominasi oleh dua faktor utama, yaitu interaksi sosial baik dengan orang dewasa pemangku kepentingan maupun dengan sesama kaum muda dan faktor eksternal. Faktor eksternal banyak dibahas sebagai penghambat gerakan, sementara faktor interaksi sosial dibahas sebagai faktor pendukung sekaligus penghambat gerakan.

### Faktor interaksi sosial

Terkait faktor interaksi dengan sesama kaum muda, keberagaman anggota dipandang sebagai faktor pendukung berjalannya koalisi. Anggota yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia diberikan kesempatan untuk berkolaborasi dan saling belajar satu sama lain. Dalam proses advokasi, keberagaman anggota ini juga bisa menaikkan posisi tawar, baik bagi sekretariat nasional maupun bagi anggota di daerah. Misalnya, komunikasi anggota koalisi dengan salah satu aktor kunci di pemerintahan daerah menjadi lebih lancar setelah adanya kunjungan dari sekretariat nasional dan mitra pembangunan. Di samping itu, keterlibatan beragam kelompok kaum muda di luar isu rokok juga mendukung agenda IYCTC untuk lebih mendekati isu rokok kepada kaum muda. Namun, peserta juga memberi catatan bahwa anggota yang beragam sekaligus menjadi tantangan bagi koalisi, khususnya dalam upaya pelibatan seluruh anggota di berbagai kegiatan, apalagi dengan anggaran yang terbatas.

Perbedaan pendekatan dan cara pandang di antara kaum muda anggota koalisi juga memunculkan tantangan. Misalnya, beberapa anggota ada yang melihat jumlah peserta yang hadir dan singkatnya waktu pelaksanaan sebagai indikator dalam mengukur hasil dari suatu kegiatan. Sementara ada sebagian anggota lain yang mempertimbangkan indikator-indikator yang lebih baik seperti kompensasi bagi peserta, rencana tindak lanjut setelah kegiatan berakhir, insentif untuk narasumber, dan sebagainya.

Adanya interaksi antarkaum muda yang bergerak dalam isu pengendalian tembakau dan kaum muda yang bergerak dalam isu lain, termasuk ILH, juga dikemukakan sebagai hal yang penting bagi peserta. Meskipun menghadapi tantangan yang sama, yaitu kepentingan korporasi, aktivis lingkungan sering kali kurang serius dalam melihat isu pengendalian tembakau. Jikapun isu rokok dibahas, persepsi bahwa pemberhentian industri rokok akan berdampak pada rakyat kecil seperti petani dan buruh kerap memengaruhi diskusi sehingga sulit membangun aliansi antar-isu.

Interaksi salah satu pendiri dengan berbagai pemangku kepentingan dalam isu anak dan kaum muda sebelum membangun koalisi juga dianggap menjadi faktor pendukung berkembangnya koalisi. Pengalamannya terlibat di berbagai organisasi lain yang berfokus pada isu perbudakan modern, kesejahteraan pekerja muda, serta perlindungan anak memengaruhi arah gerakan koalisi yang dibangun. Sebagai contoh, dokumen panduan kesehatan mental yang dikembangkan di organisasi tempatnya dulu bekerja menginspirasi untuk menyusun dokumen serupa bagi aktivis kaum muda pada konteks Indonesia.

Diskusi mengenai interaksi dengan orang dewasa pemangku kepentingan didominasi oleh dua topik besar, yaitu relasi dengan generasi senior dan relasi dengan donor. Meski demikian, relasi antara koalisi dengan donor tidak terlepas dari dinamika interaksi dengan generasi senior karena pengelolaannya masih difasilitasi oleh OMS. Dari pengamatan salah satu peserta, interaksi antara gerakan kaum muda, OMS, dan donor berpotensi memengaruhi persepsi terhadap suatu keputusan maupun mengubah cara kerja kaum muda itu sendiri dalam membangun gerakan. Peserta juga berefleksi bahwa permasalahan pendanaan yang terbatas mendorong berbagai gerakan untuk saling berkompetisi dalam menarik donor untuk membantu pembiayaan kegiatan. Oleh karena itu, bersama dengan OMS, koalisi sering kali berupaya untuk menunjukkan posisi tawarnya dalam bernegosiasi dengan donor.

Generasi senior berperan mendukung koalisi dengan menjadi sekutu bagi kaum muda serta mendampingi kaum muda dalam membangun gerakannya sendiri, seperti OMS yang turut memfasilitasi pendirian koalisi. Peserta menambahkan bahwa gerakan kaum muda sering kali membutuhkan sekutu selain sesama kaum muda, yang paham betul mengenai kebutuhan dan potensi kaum muda. Namun, di sisi lain, interaksi dengan generasi senior juga memberikan tantangan sendiri bagi sebagian kaum muda karena adanya perbedaan cara kerja dan pandangan. Misalnya, terkait jam kerja, generasi senior rupanya tidak terlalu mempermasalahkan kegiatan di luar jam kerja, sedangkan kaum muda lebih mengutamakan *work-life balance*.

Selain itu, ada kesan bahwa generasi senior enggan untuk membiarkan kaum muda bergerak secara independen dengan cara memberi arahan terlalu detil kepada kaum muda. Interaksi seperti ini kadang membuat kaum muda merasa tergantung pada generasi senior. Meski demikian, hal ini membuat kaum muda maupun generasi senior saling belajar untuk dapat bekerja sama secara lebih setara dan bermakna.

Selain itu, ada kesan bahwa generasi senior enggan untuk membiarkan kaum muda bergerak secara independen dengan cara memberi arahan terlalu detil kepada kaum muda. Interaksi seperti ini kadang membuat kaum muda merasa tergantung pada generasi senior. Meski demikian, hal ini membuat kaum muda maupun generasi senior saling belajar untuk dapat bekerja sama secara lebih setara dan bermakna.

### Faktor Komunitas atau Organisasi

Peserta menyampaikan bahwa model gerakan koalisi yang bersifat terbuka, fleksibel, dan adaptif merupakan salah satu faktor yang membuat gerakan berkembang dengan cepat. Inisiatif menyusun dokumen panduan pelibatan kaum muda misalnya, mendatangkan mitra donor baru bagi koalisi. Fleksibilitas sekretariat nasional dalam mengalokasikan anggaran tambahan untuk mendukung kegiatan advokasi anggota di daerah juga mendorong lebih lancarnya komunikasi anggota dengan aktor kunci di daerah tersebut. Di samping itu, keberagaman anggota, seperti yang disinggung di bagian interaksi sosial, juga memperlancar proses advokasi anggota di daerah dan memperkuat posisi tawar IYCTC di tingkat nasional.

### Faktor Eksternal

Hambatan struktural utama yang diidentifikasi adalah pengaruh industri rokok. Industri rokok menciptakan bias dan kebohongan publik yang sangat besar, bahkan membajak gerakan progresif di Indonesia sehingga sulit untuk membangun aliansi antarsu, termasuk antara isu ILH dengan isu tembakau. Bias dan kebohongan tersebut misalnya terlihat dari gagasan bahwa pemberhentian industri rokok akan berdampak pada petani, buruh, dan semacamnya. Ia juga menambahkan bahwa isu tembakau memiliki karakteristik yang unik, karena tidak banyak diminati, memiliki sumber daya yang sedikit, dan berisiko tinggi. Salah satu risiko tersebut dirasakan sendiri olehnya saat mendapatkan ancaman pembunuhan karena bersuara melawan salah satu perusahaan rokok pada tahun 2019.

### Capaian dan Pembelajaran Utama

Penyusunan berbagai dokumen panduan dan catatan kebijakan menjadi keberhasilan terbesar koalisi.

Dokumen P3KT merupakan salah satu capaian kunci IYCTC. Tak hanya menjadi rujukan banyak organisasi dalam penguatan partisipasi kaum muda, dokumen ini juga menginspirasi penyusunan dokumen turunan lainnya, seperti dokumen Panduan Perlindungan dan Kesehatan Mental Aktivis Pengendalian Tembakau (PPKM).

Dokumen ini memberikan arahan bagi koalisi dalam upaya menjaga kesehatan mental bagi anggota, perlindungan dari kekerasan seksual dan perundungan terhadap kelompok disabilitas, serta mitigasi risiko ancaman digital dan represi akibat aktivisme yang dilakukan. Menurut peserta, dokumen seperti ini tidak banyak dimiliki aktivis senior di gerakan tembakau maupun ILH. Penyusunan dokumen ini juga dipandang dapat menaikkan daya tawar koalisi di mata pemangku kepentingan. Koalisi juga telah melakukan sosialisasi dokumen P3KT dan dokumen turunan lainnya ke 5 kabupaten/kota dan mengadvokasikannya ke beberapa kementerian atas dukungan dari mitra donor.

Apresiasi dari berbagai organisasi terhadap dokumen P3KT juga mendatangkan kepercayaan dari mitra donor untuk mendukung kegiatan-kegiatan koalisi. Hasilnya, IYCTC memiliki sumber daya yang cukup dalam menyusun berbagai dokumen internal, seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) melalui proses musyawarah dengan anggota.

Terkait dengan advokasi, berbagai keberhasilan dicapai oleh anggota daerah sejak bergabung dengan koalisi. Selain kelancaran proses advokasi di sebuah daerah di Provinsi DIY seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat pula cerita advokasi yang cukup berhasil di daerah lainnya. Advokasi peraturan daerah tentang pelarangan iklan rokok di sebuah kota di Sumatera berhasil karena beberapa organisasi anggota ikut terlibat di dalamnya, termasuk yang berdomisili di luar kota/wilayah tersebut.

Terkait dengan penyusunan rencana kerja, hingga saat ini, tidak ada anggota koalisi yang menjalankan peran khusus untuk menyusun dokumen perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Meski demikian, terdapat satu orang yang bertugas menyusun laporan untuk lembaga donor yang mendukung kegiatan koalisi. Ketiadaan peran khusus dan fokus untuk merencanakan dan mendokumentasikan kegiatan secara formal bukan hanya didorong oleh ketiadaan SDM, kapasitas, dan waktu semata, melainkan pemikiran bahwa penyusunan *logical framework* dan rencana kerja (termasuk indikator pencapaian) terkesan kaku dan membatasi koalisi dalam bergerak dan berkembang. Menurut peserta, selama ini koalisi berkembang atas kebutuhan dan kesepakatan kolektif, bukan karena kewajiban organisasi berdasarkan perencanaan formal yang dilakukan di awal. Menurutnya, indikator pencapaian dan *logical framework* memang penting untuk disusun, tetapi penyusunannya perlu dilakukan secara organik dan disepakati secara kolektif.



Dari pencapaian dan proses dokumentasi yang dilakukan, peserta merefleksikan beberapa pembelajaran yang bermanfaat bagi pengembangan organisasi ke depannya. Pertama, dalam hal koordinasi, komunikasi dengan seluruh anggota yang beragam menjadi tantangan. IYCTC terus berupaya menjadi wadah yang inklusif sehingga semua anggota merasa dilibatkan. Kedua, penting untuk mempertahankan koalisi dengan bentuk yang fleksibel dan adaptif terhadap situasi dan kebutuhan anggota, sehingga dapat membuat koalisi senantiasa dibutuhkan dan terus berkembang. Untuk makin berkembang ke depannya, juga perlu adanya dukungan dari generasi senior dalam membukakan jalan dan akses sumber daya bagi kaum muda.

Ke depannya, IYCTC berencana untuk menjaga kinerja kepengurusan yang baru terbentuk serta memperkuat peran pengurus dan anggota agar lebih aktif lagi. IYCTC akan terus melanjutkan agenda tahunannya, termasuk menyebarluaskan dokumen P3KT ke pemangku kepentingan yang lebih luas dan memperluas cakupan anggota dan jejaring.

Secara isu, IYCTC melihat peluang untuk mengkaji dan berfokus pada isu-isu baru yang berhubungan, seperti rokok elektronik dan dampaknya terhadap lingkungan serta terus mengarusutamakan isu rokok ke isu-isu lain. Hal ini dirasa penting mengingat dalam aktivisme rokok, pembingkaihan isu sangat berpengaruh karena isu rokok adalah isu yang khusus, kompleks, dan saling terhubung dengan isu yang lain, tetapi jarang diminati.



**PUSKAPA**  
CENTER ON CHILD PROTECTION & WELLBEING

# Fair Chance For All Children

Pusat Kajian & Advokasi Perlindungan  
& Kualitas Hidup Anak  
(Center on Child Protection and Wellbeing)

Universitas Indonesia  
Gedung Nusantara II FISIP, Lantai 1  
Kampus UI, Depok, 16424

T (021) 78849181  
F (021) 78849182

[www.puskapa.org](http://www.puskapa.org)



@puskapa



@puskapa